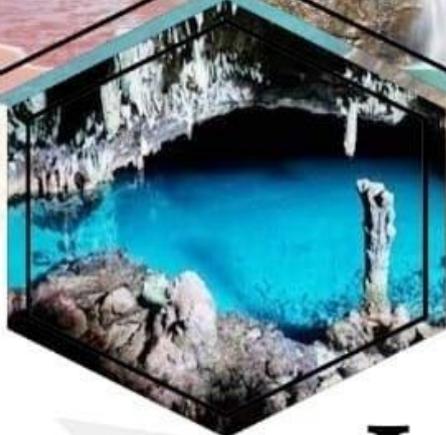


LAMPIRAN VI Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022

Nomor : 4 Tahun 2023

Tanggal : 19 Juni 2023



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

AUDITED

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT



BUPATI MANGGARAI BARAT

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang terdiri dari a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Laporan Operasional; d. Laporan Perubahan Ekuitas, e Neraca; f. Laporan Arus Kas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Labuan Bajo, 29 Maret 2023



BUPATI MANGGARAI BARAT L.

EDISTASIUS ENDI, SE

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenaan kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan baik. Laporan Keuangan ini selanjutnya akan menjadi rujukan dalam pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan juga sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Hal ini sesuai dengan amanat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara "***Bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir***".

Substansi laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mencakup beberapa materi laporan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang mengatur Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Cakupan laporan tersebut antara lain *a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan.*

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 merupakan laporan keuangan yang disusun sesuai kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual. Atas hal ini maka Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memohon dukungan dan koreksi konstruktif terutama dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia agar Laporan Keuangan ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku serta dapat menjadi bahan evaluasi berharga bagi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Manggarai Barat. **Ⓛ**


BUPATI MANGGARAI BARAT **Ⓛ**

EDISTASIUS ENDI, SE

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Umum	1
B. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan	2
C. Dasar Hukum.....	3
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	6
A. Ekonomi Makro.....	6
B. Kebijakan Keuangan.....	11
C. Pencapaian Target Kinerja APBD	16
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	23
A. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	18
B. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	25
C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	25
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	45
A. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	45
B. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan SAL.....	74
C. Penjelasan Pos-pos Neraca.....	76
D. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional.....	158
E. Penjelasan Pos-pos Arus Kas	187
F. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	195
BAB V PENGUNGKAPAN LAINNYA	199
BAB VI PENUTUP	216



BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Salah satu misi pemerintahan Indonesia yang juga sejalan dengan tujuan MDGs saat ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan upaya konkrit adalah mendorong dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas bagi setiap pengelola keuangan daerah dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan misi tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga telah mengatur proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Hal ini dimaksudkan agar tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan.

Dalam Kerangka Manajemen Pemerintahan, proses penyelenggaraan Pemerintahan daerah akan berujung pada tahapan evaluasi dan pelaporan yang dalam konteks Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan pada saat Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBD kepada DPRD. Hal ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ***bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Laporan tersebut SETIDAK-TIDAKNYA meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah yang penyajiannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.***

Beberapa aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 telah memberikan penjelasan secara teknis normatif atas Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada intinya menyatakan bahwa “PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).” Hal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.



Lebih lanjut pada tahun 2010 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang mengatur Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal. Secara teknis normatif Standar Akuntansi Berbasis Akruwal telah di-*breakdown* melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 yang menjelaskan bahwa Penyajian laporan keuangan terdiri atas: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan. Akuntansi dengan basis akruwal ini dianggap lebih baik daripada basis kas, karena akuntansi berbasis akruwal diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Merujuk pada uraian di atas maka Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Daerah sebagai wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyusunan laporan keuangan ini didasarkan pada berbagai ketentuan aturan yang berlaku terutama Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat) selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka akuntabilitas, manajemen, transparan dan kesinambungan antar generasi (*intergenerational equity*).

Pelaporan keuangan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Informasi yang disediakan dalam laporan keuangan terdiri dari:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer baik dari Pusat maupun dari Provinsi maupun Pembiayaan apakah mengalami kenaikan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.



C. Dasar Hukum

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan perubahannya;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2021;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Nggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022;
34. Peraturan Daerah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022;
35. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022;
36. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 107 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022;
37. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.



D. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

- A. Umum
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Sistematika Penulisan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- A. Ekonomi Makro
- B. Kebijakan Keuangan
- C. Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Kebijakan Akuntansi

- A. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Bab IV Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- A. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- B. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan SAL
- C. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
- D. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- E. Penjelasan Pos-pos Neraca
- F. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Bab V Penutup

Lampiran



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 16,18%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,51%.
3. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 64,42
4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,76%

Gini Ratio dan Inflasi tidak dapat diuraikan sebagai bagian dari kinerja Ekonomi Makro Kabupaten Manggarai Barat dengan pertimbangan :

- a. Kota-kota di dalam Wilayah Nusa Tenggara Timur yang menjadi lokasi atau obyek survey Inflasi adalah Kota Kupang, Kota Maumere dan Kota Waengapu.
- b. Indikator Gini Ratio tidak tersedia dalam data BPS Kabupaten Manggarai Barat, sedangkan data BPS Provinsi NTT dan BPS Nasional hanya menyediakan data terbatas untuk Indikator Gini Ratio Provinsi NTT dan Gini Ratio Nasional.

1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Manggarai Barat periode tertentu.

Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Manggarai Barat

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Kabupaten Manggarai Barat (%)	17,92	17,15	-0,77
2	Kabupaten Manggarai Barat (Ribuan Orang)	51,15	49,95	-1,20
3	Provinsi NTT (%)	20,99	20,05	-0,94
4	Nasional (%)	10,14	9,54	-0,61
5	Peringkat Provinsi	8	8	Tetap
6	Peringkat Nasional	Data belum tersedia	Data belum tersedia	Data belum tersedia

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Manggarai Barat

Persentase penduduk miskin Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun 2021 mencapai 17,92% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 15.150 jiwa. Angka ini pada Tahun 2022 menurun 0,77% menjadi 17,15% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 49.950 jiwa atau turun sebanyak 1.200 jiwa. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yakni 16,18%, maka capaian Tahun 2022 ini berada di atas target RPJMD. Persentase penduduk miskin Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 ini sedikit lebih baik dari keadaan Provinsi NTT namun masih di atas angka nasional, sehingga dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun-tahun mendatang harus tetap menjadi prioritas dan memastikan agar program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran dan tepat kegiatan agar angka kemiskinan ini dapat terus ditekan hingga mencapai angka yang minimal.

Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Manggarai Barat

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Manggarai Barat	3,55	4,44	0,89
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi NTT	3,96	3,63	-0,33
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,75	1,59	-0,16
4	Peringkat Provinsi	14	10	4
5	Peringkat Nasional	Data belum tersedia	Data belum tersedia	Data belum tersedia

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Manggarai Barat

Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Manggarai Barat

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab. Manggarai Barat	0,99	1,36	0,37
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi NTT	1,05	0,93	-0,12
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,42	0,39	-0,03



No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
4	Peringkat Provinsi	11	14	-3
5	Peringkat Nasional	Data belum tersedia	Data belum tersedia	Data belum tersedia

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Manggarai Barat

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran Terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten manggarai Barat Tahun 2022 mencapai 4,91%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Manggarai Barat

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Manggarai Barat	4,94	4,91	-0,03
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	3,77	3,54	-0,51
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	5,86	-0,58
4	Peringkat Provinsi	19	20	-1
5	Peringkat Nasional	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Manggarai Barat

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Manggarai Barat Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,94 %, sedangkan TPT pada Tahun 2022 sebesar 4,91% atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2021 dengan penurunan sebesar 0,03%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 lebih tinggi dari TPT Provinsi NTT, walaupun masih lebih rendah dibanding TPT Nasional. Secara peringkat, TPT Kabupaten Manggarai Barat turun menjadi peringkat 20 di Provinsi NTT dibanding satu tahun sebelumnya pada peringkat 19.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan



(*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu :

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 mencapai 63,89 poin dengan kategori sedang sementara di tahun 2021 naik mencapai 63,89 sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota	64,17	64,92	0,75
2	Provinsi	65,28	65,90	0,62
3	Indonesia/Nasional	72,29	72,91	0,86
4	Peringkat Provinsi	12	11	1
5	Peringkat Nasional	494	494	Tetap

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Manggarai Barat

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Manggarai Barat mengalami peningkatan sebesar 0,75 poin dari keadaan tahun 2021. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), harapan lama sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2021 mencapai 67,73 tahun lebih lama 0,27 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, Rata-rata Lama Sekolah mencapai 7,80 tahun dengan harapan lama sekolah 12,31 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita Tahun 2022 sebesar Rp. 7.636.000 naik dari Rp. Rp.7.410.000,- juta dari tahun sebelumnya.

IPM Kabupaten Manggarai Barat pada saat ini berada pada urutan 11 dari 22 Kab/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berada pada urutan 494 di tingkat nasional dari 548 Kab/Kota yang ada di Indonesia pada tahun 2022.

4. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat,



sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai Barat

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2021
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	2.267,50	2.296,77	Data tersedia sekitar Maret 2022	Data belum tersedia	Data belum tersedia
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	0,89	1,29	Data tersedia sekitar Maret 2022	2,51	3,69
3	Peringkat Provinsi	4	16	Data belum tersedia	Data belum tersedia	Data belum tersedia
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	Data belum tersedia	Data belum tersedia	Data belum tersedia	Data belum tersedia	Data belum tersedia

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Manggarai Barat

Selama kurun waktu 2020-2021, perekonomian Kabupaten Manggarai Barat mengalami fluktuasi naik turun. Pada periode Tahun 2020-2021 pertumbuhan perekonomian Manggarai Barat mengalami penurunan sangat signifikan mencapai 4,65% di tahun di tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19, namun mengalami sedikit kenaikan menjadi 1,29% pada tahun 2021. Pada kurun waktu yang sama, Pertumbuhan Ekonomi Nasional bahkan menjadi minus sebesar -2,07% dan meningkat menjadi 3,69% di tahun 2021. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT yang pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,83% bertumbuh menjadi 2,51% pada tahun 2021. Sementara, Data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 belum dirilis oleh BPS.

5. Struktur Perekonomian Kabupaten Manggarai Barat

Struktur perekonomian Kabupaten Manggarai Barat dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	A-Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 447 389.0	1.479.614.4	Data belum tersedia
2	B-Pertambangan dan Penggalian	64.195.1	66.729.49	Data belum tersedia
3	C-Industri Pengolahan	15.846.2	15.104.9	Data belum tersedia
4	D-Pengadaan Listrik dan Gas	1.669.7	1.961.2	Data belum tersedia
5	E-Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30.6	35.63	Data belum tersedia



No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
6	F-Konstruksi	484.124.5	529.039.65	Data belum tersedia
7	G-Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	337.082.2	336.197.21	Data belum tersedia
8	H-Transportasi dan Pergudangan	119.055.9	126.552.86	Data belum tersedia
9	I-Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18.106.6	19.892.89	Data belum tersedia
10	J-Informasi dan Komunikasi	254.713.7	264.385.02	Data belum tersedia
11	K-Jasa Keuangan dan Asuransi	20.871.8	21.035.00	Data belum tersedia
12	L-Real Estate	102.294.4	104.845.11	Data belum tersedia
13	M,N-Jasa Perusahaan	9.325.7	8.028.79	Data belum tersedia
14	O-Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	487.842.4	446.059.86	Data belum tersedia
15	P-Jasa Pendidikan	112.076.2	111.676.79	Data belum tersedia
16	Q-Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	40.894.2	46.311.02	Data belum tersedia
17	R,S,T,U-Jasa lainnya	3.821.7	3.729.36	Data belum tersedia
18	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3.519.340.0	3.611.199.39	Data belum tersedia
19	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	3.519.340.0	3.611.199.39	Data belum tersedia
20	PDRB PROVINSI	27.517.846.22	29.024.684.56	Data belum tersedia
21	PDRB NASIONAL	15.434.200.000	Data belum tersedia	Data belum tersedia
22	PERINGKAT PROVINSI	Data belum tersedia	Data belum tersedia	Data belum tersedia
23	PERINGKAT NASIONAL	Data belum tersedia	Data belum tersedia	Data belum tersedia

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Manggarai Barat

B. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada beberapa prinsip antara lain partisipatif atau melibatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan pembangunan, transparansi, dapat dipertanggungjawabkan, disiplin anggaran dan keadilan anggaran, serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas anggaran. Di samping itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah juga memperhatikan



berbagai temuan aparat pemeriksa baik internal maupun eksternal sebagai referensi untuk memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Secara umum kebijakan keuangan daerah adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan Daerah

Penetapan Pendapatan Daerah dilakukan melalui perkiraan pendapatan yang dapat dicapai, terukur dan rasional dengan mempertimbangkan potensi Kabupaten Manggarai Barat dan realisasi penerimaan tahun 2021.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 dan realisasi penerimaan PAD tahun 2022, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Manggarai Barat.
- 3) Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- 4) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD telah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 5) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada Bank telah memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud.
- 6) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, telah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
- 7) Penerimaan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.



b. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022. Peraturan Presiden tersebut mengatur tentang penganggaran dana Perimbangan sebagai berikut:

- 1) Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022
- 2) Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022
- 3) Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022
- 4) Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022
- 5) Rincian Alokasi Dana Alokasi Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022
- 6) Rincian Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2022

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019. Uraian penganggaran atas Lain-Lain pendapatan Daerah Yang sah adalah sebagai berikut:

- 1) Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penganggaran penerimaan hibah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 bersumber dari Hibah IPDM-IP, Hibah PHJD dan Hibah Air Minum Pedesaan yang bersumber dari APBN yang telah didasari pada Perjanjian.
- 3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang selanjutnya terdistribusi pada beberapa SKPD. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

a. Belanja Operasi

Penganggaran belanja Operasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai



- a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempatbelas.
 - b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - c) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
 - d) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
 - e) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - f) Penganggaran tunjangan profesi guru PNSD, dana tambahan penghasilan guru PNSD dan tunjangan khusus guru dianggarkan setelah dipastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mendapatkan alokasi dana Tunjangan profesi dan Tambahan Penghasilan Guru dan tunjangan khusus guru dari APBN.
- 2) Belanja Barang dan Jasa
- Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- 3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
- Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



b. Belanja Modal

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Alokasi Belanja Modal dalam APBD Kabupaten Manggarai Barat digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang telah terdistribusi pada seluruh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan prioritas Pembangunan Daerah. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Penganggaran Belanja Transfer berpedoman pada Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis :

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menganggarkan belanja bantuan keuangan kepada desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa serta beberapa Peraturan Pemerintah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Merujuk pada beberapa ketentuan tersebut diatas, pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah mengalokasikan anggaran untuk dana Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari dana Transfer setelah dikurangi dana DAK, serta mengalokasikan dana transfer Desa dari APBN sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SiLPA) Tahun 2021 sebesar Rp 9.027.531.679,55.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Penganggaran Pengeluaran Pembiayaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dimana Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk: 1) pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, 2) penyertaan modal daerah, 3) pembentukan Dana Cadangan, 4) Pemberian Pinjaman Daerah, 5) pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pencapaian Target Kinerja APBD

- **Realisasi Pendapatan**

Melalui tabel berikut dapat dilihat ikhtisar pencapaian kinerja keuangan untuk pendapatan daerah.

**Ikhtisar Realisasi Pendapatan Kabupaten Manggarai Barat
Tahun Anggaran 2022**

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN	1.330.686.744.398,00	1.255.652.663.532,58	94,36
PENDAPATAN ASLI DAERAH	248.356.435.716,00	190.816.711.963,02	76,83
Pendapatan Pajak Daerah	182.374.604.134,00	141.461.757.403,65	77,57
Pendapatan Retribusi Daerah	52.650.585.944,00	41.417.841.264,00	78,67
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.720.173.212,00	5.216.940.083,37	100,00
Lain-lain PAD yang sah	10.611.072.426,00	5.216.938.603,18	49,17
PENDAPATAN TRANSFER	1.021.462.504.330,00	1.004.830.794.004,00	98,37
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	846.864.158.094,00	834.424.885.187,00	98,53
Dana Bagi Hasil Pajak	8.470.198.697,00	9.051.047.982,00	
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.028.124.826,00	2.126.859.069,00	104,87
Dana Alokasi Umum	496.029.645.000,00	495.899.733.992,00	99,97
Dana Alokasi Khusus	340.336.189.571,00	327.347.244.144,00	96,18
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	145.840.976.000,00	145.840.976.000,00	100,00
Dana Penyesuaian	145.840.976.000,00	145.840.976.000,00	100,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	28.757.370.236,00	24.564.932.817,00	85,42
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	28.757.370.236,00	24.564.932.817,00	85,42
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	60.867.804.352,00	60.005.157.565,56	98,58
Pendapatan Hibah	13.975.449.352,00	14.536.876.920,00	104,02
Pendapatan Lainnya	46.892.355.000,00	45.468.280.645,56	96,96



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun 2022 direncanakan sebesar **Rp1.330.686.744.398,00** yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp248.356.435.716,00**, Pendapatan Transfer sebesar **Rp1.021.462.504.330,00** dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar **Rp60.867.804.352,00**. Realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun 2021 adalah sebesar **Rp1.255.652.663.532,58** yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp190.816.711.963,02** Pendapatan Transfer sebesar **Rp1.004.830.794.004,00** dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar **Rp60.005.157.565,56**.

- **Realisasi Belanja**

Melalui tabel berikut dapat dilihat ikhtisar pencapaian kinerja keuangan untuk belanja daerah.

**Ikhtisar Realisasi Belanja dan Transfer Kabupaten Manggarai Barat
Tahun Anggaran 2022**

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA DAN TRANSFER	1.581.873.367.077,00	1.494.257.748.969,32	94,46
BELANJA	1.371.584.666.677,00	1.285.831.152.969,32	93,75
BELANJA OPERASI	832.858.131.339,00	789.416.323.826,32	94,78
Belanja Pegawai	377.556.575.509,00	371.287.510.538,00	98,34
Belanja Barang dan Jasa	428.254.387.848,00	392.905.825.453,32	91,75
Belanja Bunga	8.471.765.932,00	7.038.707.835,00	83,08
Belanja Hibah	18.575.402.050,00	18.184.280.000,00	97,89
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
BELANJA MODAL	532.747.431.197,00	493.263.439.543,00	92,59
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.245.404,00	38.845.232.335,00	97,11
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	161.980.290.249,00	159.623.544.220,00	98,55
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	328.417.976.752,00	292.362.220.356,00	89,02
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.348.918.792,00	2.432.442.632,00	103,56
BELANJA TAK TERDUGA	5.979.104.141,00	3.173.879.600,00	53,08
Belanja Tak Terduga	5.979.104.141,00	3.173.879.600,00	53,08
TRANSFER	210.288.700.400,00	208.426.596.000,00	99,11
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	13.929.599.000,00	12.067.494.600,00	86,63
Bagi Hasil Pajak	10.649.599.000,00	9.137.494.600,00	85,80
Bagi Hasil Retribusi	3.280.000.000,00	2.930.000.000,00	89,33
Belanja Bantuan Keuangan	196.359.101.400,00	196.359.101.400,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	196.359.101.400,00	196.359.101.400,00	100,00

Anggaran Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun 2022 direncanakan sebesar **Rp1.581.873.367.077,00** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp832.858.131.339,00**, Belanja Modal sebesar **Rp532.747.431.197,00**, Belanja Tak Terduga sebesar **Rp5.979.104.141,00** dan Belanja Transfer sebesar **Rp210.288.700.400,00**. Secara keseluruhan Realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun 2022 sebesar **Rp1.494.280.238.969,32** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp789.416.323.826,32**, Belanja Modal sebesar **Rp493.263.439.543,00**, Belanja Tak



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Terduga sebesar **Rp3.173.879.600,00** dan Belanja Transfer sebesar **Rp208.426.596.000,00**.

Data kinerja *mandatory spending* dalam postur APBD seperti diantaranya presentase belanja wajib untuk pendidikan, kesehatan, pengawasan, perlindungan Sosial dampak pandemi, kenaikan inflasi dan kenaikan BBM serta penjelasan atas capaiannya.

**Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan
Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun 2022
Kabupaten Manggarai Barat**

Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
a. Belanja pada Dinas Kesehatan		
1) BELANJA OPERASI		
a) Belanja Pegawai	48,778,598,795	46,059,436,918
b) Belanja Barang dan Jasa	79,012,857,715	73,361,179,475
c) Belanja Hibah	650,000,000	680,000,050
2) BELANJA MODAL		
a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,992,313,550	4,027,038,740
b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,350,000,000	2,350,000,000
c) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,278,953,610	1,234,473,510
b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang pelaksanaan fungsi kesehatan, antara lain :		
1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	13,500,000	13,500,000
2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	2,515,400	2,515,400
3) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	15,665,479,316	14,767,234,743
4) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	2,661,000,000	2,587,080,000
5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	1,818,900	1,818,900
6) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	13,157,800	27,677,800
7) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	26,309,500	36,306,900
8) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	107,156,000	443,821,700
9) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	78,950,000	97,950,000
10) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	6,000,000	12,000,000
11) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	118,449,900	320,922,500
12) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	719,953,600	719,953,600
13) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	4,990,000	9,987,500



Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
14) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	91,290,000	241,230,000
15) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	4,970,500	4,970,500
16) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	44,514,000	64,514,000
17) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	52,107,614	129,107,614
18) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	24,000,000	24,000,000
19) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	500,000,000	605,371,007
20) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	342,000,000	410,300,000
21) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	33,000,000	110,540,000
22) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	106,834,986,706	106,896,636,706
23) Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	336,000,000	5,837,042,333
24) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	2,985,605,000	4,235,306,405
25) Sub Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	280,027,000	280,027,000
26) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	8,997,036,600	4,981,736,600
27) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	634,395,000	1,350,000,000
28) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	1,196,136,860	2,043,982,680
29) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	703,615,320	1,477,297,503
30) Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	4,730,000	46,700,000
31) Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	5,793,100,000	8,613,703,726
32) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	286,250,000	239,500,000
33) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas pada Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Labuan Bajo	2,103,354,000	2,103,354,000
34) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas pada Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Benteng	481,250,000	481,250,000
35) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas pada Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Rekas	342,925,000	342,925,000
36) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas pada Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Werang	717,530,000	717,530,000
37) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas pada Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Warsawe	331,375,000	331,375,000
38) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas pada Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Wae Nakeng	1,323,498,000	1,323,498,000



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
39) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas pada Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Datak	480,645,000	480,645,000
40) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas pada Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Nangalili	466,235,000	466,235,000
41) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas pada Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Lengkong Cepang	577,830,000	577,830,000
42) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas pada Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Wae Kanta	479,820,000	479,820,000
43) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas pada Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Orong	601,370,000	601,370,000
44) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas pada Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Golo Welu	671,385,000	671,385,000
45) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas pada Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Ranggu	502,040,000	502,040,000
46) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas pada Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Tentang	597,685,000	597,685,000
47) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas pada Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Pacar	811,998,000	811,998,000
48) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas pada Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Bari	400,180,000	400,180,000
49) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas pada Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Rego	410,575,000	410,575,000
50) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas pada Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Terang	830,060,000	830,060,000
51) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas pada Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Waning	330,000,000	330,000,000
52) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas pada Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Nanga Terang	330,000,000	330,000,000
53) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas pada Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Wae Pitak	330,000,000	330,000,000
Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan	297,745,523,686	297,464,618,810
Total Belanja Daerah	1,628,491,535,318	1,581,873,367,077
Gaji ASN	271,990,824,192	250,366,380,209
Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN	1,356,500,711,126	1,331,506,986,868
Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan Terhadap Belanja Daerah	21.95%	22.34%

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun 2022 Kabupaten Manggarai Barat

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
	a. Belanja pada Dinas Pendidikan		
	1) BELANJA OPERASI		
	a) Belanja Pegawai	199,539,004,624	188,363,235,905
	b) Belanja Barang dan Jasa	49,428,012,165	58,077,341,776
	c) Belanja Hibah	4,127,475,000	4,677,475,000
	2) BELANJA MODAL		
	a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,435,456,251	14,498,390,058
	b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46,781,914,000	20,410,737,389
	c) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18,618,668,626	18,618,668,626
	b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi pendidikan, antara lain :		
	1) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada Perangkat Daerah Unit SPNF SKB Manggarai Barat	47,280,000	47,280,000
	2) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Perangkat Daerah Unit SPNF SKB Manggarai Barat	24,998,400	24,998,400
	3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Perangkat Daerah Unit SPNF SKB Manggarai Barat	10,401,200	8,498,600
	4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Perangkat Daerah Unit SPNF SKB Manggarai Barat	3,000,000	2,500,000
	5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada Perangkat Daerah Unit SPNF SKB Manggarai Barat	2,503,500	1,717,200



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
	6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material pada Perangkat Daerah Unit SPNF SKB Manggarai Barat	2,990,400	2,393,800
	7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Perangkat Daerah Unit SPNF SKB Manggarai Barat	39,760,000	22,330,000
	8) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Perangkat Daerah Unit SPNF SKB Manggarai Barat	2,100,000	1,740,000
	9) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Perangkat Daerah Unit SPNF SKB Manggarai Barat	7,200,000	7,200,000
	10) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Perangkat Daerah Unit SPNF SKB Manggarai Barat	2,000,000	2,000,000
	11) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Perangkat Daerah Unit SPNF SKB Manggarai Barat	4,500,000	1,500,000
	12) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD pada Perangkat Daerah Unit SPNF SKB Manggarai Barat	10,000,000	10,000,000
	13) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan pada Perangkat Daerah Unit SPNF SKB Manggarai Barat	225,000,000	225,000,000
	14) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan pada Perangkat Daerah Unit SPNF SKB Manggarai Barat	25,000,000	25,000,000
	15) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan pada Perangkat Daerah Unit SPNF SKB Manggarai Barat	82,705,000	76,541,400
	16) Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan pada Perangkat Daerah Unit SPNF SKB Manggarai Barat	30,486,700	21,448,300
	17) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan pada Perangkat Daerah Unit SPNF SKB Manggarai Barat	41,823,000	40,633,000
	18) Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium pada Perangkat Daerah Unit SPNF SKB Manggarai Barat	759,135,000	759,134,600
	19) Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota pada Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10,748,580,600	10,737,740,600
	20) Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial pada Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	256,202,100	244,605,200
	21) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka pada Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	39,050,000	35,470,000
	22) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik pada Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	94,721,500	75,611,500
	23) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan pada Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	1,267,104,779	1,349,054,779
	24) Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan pada Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	203,241,500	203,241,500
	25) Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional pada Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	72,598,100	72,598,100
	26) Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya pada Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	55,036,442	55,036,442
	27) Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya pada Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	155,100,000	122,100,000
	28) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1,826,718,000	2,158,604,407
	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	337,969,766,887	320,979,826,582
	Total Belanja Daerah	1,628,491,535,318	1,581,873,367,077
	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	20.75%	20.29%



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel Format Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2022

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
1	Total Belanja Daerah	1,628,491,535,318	1,581,873,367,077
2	Belanja Bagi Hasil Dan/Atau Transfer kepada daerah dan/atau desa		
	a. Belanja Bagi Hasil	13,929,599,000	13,929,599,000
	b. Bantuan Keuangan	196,359,101,400	196,359,101,400
	Jumlah (a+b)	210,288,700,400	210,288,700,400
3	Selisih (1-2)	1,418,202,834,918	1,371,584,666,677
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	567,281,133,967	548,633,866,671
5	a) Belanja Modal:	561,779,669,658	532,747,431,197
	1) Tanah;	-	-
	2) Peralatan Dan Mesin;	22,156,819,896	40,000,245,404
	3) Bangunan Dan Gedung;	190,789,424,706	161,980,290,249
	4) Jalan, Jaringan, Dan Irigasi;	330,152,484,430	328,417,976,752
	5) Aset Tetap Lainnya;	18,680,940,626	2,348,918,792
	6) Aset Lainnya.	-	-
	b) Belanja Pemeliharaan	14,198,975,745.00	13,295,430,951
6	1) Belanja Hibah	15,646,205,000	20,050,048,084
	2) Belanja Bantuan Sosial		
	3) Belanja Bantuan Keuangan		
7	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	591,624,850,403	566,092,910,232
	Presentase Belanja Infrastruktur Daerah	41.72%	41.27%

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode, maupun antar entitas akuntansi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

A. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

- a. Entitas Akuntansi adalah seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Manggarai Barat yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing – masing SKPD sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan keuangan SKPD terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah. Terdapat sebanyak 56 SKPD yang terdiri dari 18 Dinas, 6 Badan, 10 Bagian, 1 RSUD, 1 Sekretariat, 12 Kecamatan, 5 Kelurahan, 1 Inspektorat, 1 Satuan Polisi Pamong Praja dan 1 Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar, dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	SPNF SKB Manggarai Barat
3	Dinas Kesehatan
4	Rumah Sakit Umum Daerah Komodo
5	Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang
6	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan
7	Satuan Polisi Pamong Praja
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Dinas Sosial
10	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM

NO	SKPD
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	Dinas ketahanan Pangan dan Perikanan
13	Dinas Lingkungan Hidup ,Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
23	Bagian Pemerintahan
24	Bagian Kesejahteraan Rakyat
25	Bagian Hukum
26	Bagian Perekonomian dan SDA
27	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
28	Bagian Umum
29	Bagian Organisasi
30	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
31	Bagian Administrasi Pembangunan
32	Bagian Perencanaan dan Keuangan
33	Inspektorat
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
35	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
36	Badan Pendapatan Daerah
37	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
38	Sekretariat DPRD
39	Kecamatan Komodo
40	Kecamatan Boleng
41	Kecamatan Kuwus
42	Kecamatan Lembor
43	Kecamatan Lembor Selatan
44	Kecamatan Macang Pacar
45	Kecamatan Mbeliling
46	Kecamatan Ndosso
47	Kecamatan Sano Nggoang
48	Kecamatan Welak
49	Kecamatan Pacar
50	Kecamatan Kuwus Barat
51	Kelurahan Labuan Bajo
52	Kelurahan Wae Kelambu
53	Kelurahan Tangge
54	Kelurahan Nantal
55	Kelurahan Golo Ruu
56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

b. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Laporan keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

B. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 adalah basis akrual penuh. Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2020 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, sebagai berikut:

1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Sedangkan Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- 6) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah, diakui pada saat terbitnya SP2B.

Pengukuran Pendapatan LRA

- a. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
- e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi yaitu:

- a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak

pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

- b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
- c. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
- d. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.
- e. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah, diakui pada saat terbitnya SP2B

Pengukuran:

- 1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat:

- 1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- 2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.

3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), diakui pada saat terbitnya SP2B.

Pengukuran:

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Beban diakui pada:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau

jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya. Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
- b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

Khusus pengeluaran Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pengakuan beban dilakukan pada saat terbitnya SP2B.

3 Kebijakan Akuntansi Transfer.

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi

hasil. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengakuan Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer:

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengakuan Transfer Keluar dan Beban Transfer:

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Pengukuran Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer:

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Pengukuran Transfer Keluar dan Beban Transfer

1. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan.

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari :

- 1) Penerimaan pembiayaan, dan
- 2) Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

5 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas.

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas terdiri dari:

- a) Kas di Kas Daerah;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan;
- c) Kas di Bendahara Pengeluaran;
- d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),
- e) Kas Lainnya

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

6 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan Investasi Jangka Pendek.

1) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali

b) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

2) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

3) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

c. Pengukuran Investasi Jangka Pendek.

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut :

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

(1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

(2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai

wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

7 Kebijakan Akuntansi Piutang.

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Pengakuan Piutang.

Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

- a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
- b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b) jumlah piutang dapat diukur;

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer. Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran Piutang

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- a) Pemberian pinjaman.
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- b) Penjualan.
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- c) Kemitraan.
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- d) Pemberian fasilitas/jasa.
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
- c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan dan penghapusbukuan. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a) Kualitas Piutang Lancar;
- b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c) Kualitas Piutang Diragukan;
- d) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- a) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- b) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas lancar, dengan kriteria:

- (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- (1) Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
- (1) Umur piutang lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- (1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah/ Pejabat yang ditunjuk (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang diatas 3 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*)

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;

- b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
- c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
- d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan tidak dilakukan pelunasan;
- c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 2-4 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan tidak dilakukan pelunasan; dan
- d) Kualitas macet, jika piutang yang dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan tidak dilakukan pelunasan, atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a) 0 % (nol perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b) 25 % (dua puluh lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

8 Kebijakan Akuntansi Persediaan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:

- a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Pengakuan Persediaan

1) Persediaan diakui:

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,

- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.
- 2) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran Persediaan

- 1) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
- 2) Persediaan disajikan sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
- 3) Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

9 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen. Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu

sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

10 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Berwujud;
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengukuran Aset Tetap.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - (1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - (2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - (3) bertambah volume, dan/atau
 - (4) bertambah kapasitas produksi

- b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

- a. alat angkutan dan alat berat sebesar Rp 1.000.000,
- b. peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat sebesar Rp500.000,
- c. aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan sebesar Rp500.000,
- d. aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan sebesar Rp100.000;
- e. pengeluaran dengan nilai yang sama dengan atau lebih besar dari Rp15.000.000,00 untuk bangunan dan gedung.

Jika barang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) maka dilakukan pencatatan pada daftar barang non aset tetap/pakai habis (*extra comtable*). Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

11 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

- a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d) Aset Tidak Berwujud;
- e) Aset Lain-lain.

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini

dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K)

Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:

- a) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- b) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
- c) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.

12 Kebijakan Akuntansi Kewajiban.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Pengakuan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

Pengakuan Utang Bunga.

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran Utang Bunga.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

Pengakuan Utang Kepada Pihak Ketiga pada saat :

- barang yang dibeli sudah diterima.
- jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian.
- sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima.

tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengukuran Utang Kepada Pihak Ketiga.

Utang kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban pemerintah terhadap barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian.

Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

- 1) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
- 2) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka.

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

Utang Beban diakui pada saat :

- 1) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 2) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengukuran Utang Beban.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.

Pengakuan Utang Dalam Negeri

- 1) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
- 2) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

Pengukuran Utang Dalam Negeri

- 1) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
- 2) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- 3) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

13 Kebijakan Akuntansi Ekuitas.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih Revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.



PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan

Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Pendapatan Daerah		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih(Kurang)	Realisasi 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp
1)	Pendapatan Asli Daerah	248.356.435.716,00	190.932.174.516,58	-57.424.261.199,42	154.767.294.151,76
2)	Pendapatan Transfer	1.021.462.504.330,00	1.004.830.794.004,00	-16.631.710.326,00	868.022.860.854,00
3)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	60.867.804.352,00	59.889.695.012,00	-978.109.340,00	66.714.193.679,01
Jumlah		1.330.686.744.398,00	1.255.652.663.532,58	-75.034.080.865,42	1.089.504.348.684,77

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.255.652.663.532,58 atau 94,36% dari anggaran sebesar Rp1.330.686.744.398,00.

Realisasi masing-masing pos pendapatan daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/Kurang	Realisasi 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp
a.	Pajak Daerah	182.374.604.134,00	141.461.757.403,65	-40.912.846.730,35	82.144.344.494,16
b.	Retribusi Daerah	52.650.585.944,00	41.417.841.264,00	-11.232.744.680,00	51.310.800.176,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.720.173.212,00	2.720.173.212,00	0,00	4.012.182.992,00
d.	Lain-lain PAD yang Sah	10.611.072.426,00	5.332.402.636,93	-5.278.669.789,07	17.299.966.489,60
Jumlah PAD		248.356.435.716,00	190.932.174.516,58	-57.424.261.199,42	154.767.294.151,76

Realisasi PAD TA 2022 sebesar Rp190.932.174.516,58 atau 76,88% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD yaitu sebesar Rp248.356.435.716,00. Penjelasan atas masing – masing pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dirincikan sebagai berikut :

**1) Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Barat selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah :		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/Kurang	Realisasi 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp
1)	Pajak Hotel	35.078.923.660,00	34.275.785.576,00	-803.138.084,00	13.119.668.167,76
2)	Pajak Restoran	25.061.961.994,00	24.492.063.467,07	-569.898.526,93	11.266.134.532,40
3)	Pajak Hiburan	1.257.804.016,00	814.374.420,00	-443.429.596,00	299.515.859,00
4)	Pajak Reklame	643.138.844,00	956.920.006,01	313.781.162,01	370.040.818,00
5)	Pajak Penerangan Jalan	9.775.000.000,00	9.548.974.318,00	-226.025.682,00	7.632.909.189,00
6)	Pajak Parkir	276.042.400,00	301.174.775,00	25.132.375,00	173.547.758,00
7)	Pajak Air Tanah	31.733.220,00	34.125.630,00	2.392.410,00	25.587.750,00
8)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	50.000.000.000,00	25.604.810.458,57	-24.395.189.541,43	22.365.189.764,00
9)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	17.000.000.000,00	9.211.154.453,00	-7.788.845.547,00	5.182.519.150,00
10)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	43.250.000.000,00	36.222.374.300,00	-7.027.625.700,00	21.709.231.506,00
Jumlah		182.374.604.134,00	141.461.757.403,65	-40.912.846.730,35	82.144.344.494,16

Realisasi pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp141.461.757.403,65 atau 77,57% dari anggaran sebesar Rp182.374.604.134,00. Realisasi pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp59.317.412.909,49 jika dibandingkan dengan realisasi pajak daerah Tahun Anggaran 2021.

Atas penerimaan obyek pajak daerah tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pajak Hotel di tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp34.275.785.576,00 dari target anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Penerimaan Pajak Hotel tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp21.156.117.408,24 jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021. Penerimaan Pajak Hotel dapat dirincikan sebagai berikut :

- Pajak Hotel	Rp	33.843.923.278,00
- Pajak Losmen	Rp	203.217.298,00
- Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	Rp	228.645.000,00
Jumlah	Rp	34.275.785.576,00

- Penerimaan Pajak Restoran di tahun 2022 sebesar Rp24.492.063.467,07 mengalami peningkatan sebesar Rp13.225.928.934,67 jika



dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran tahun 2021.

Penerimaan Pajak Restoran bersumber dari:

- Pajak Restoran dan Sejenisnya	Rp	21.356.695.239,07
- Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	Rp	2.006.720.671,00
- Pajak Kantin dan Sejenisnya	Rp	1.128.647.557,00
Jumlah	Rp	24.492.063.467,07

- Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp9.548.974.318,00 atau 97,69% dari target anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Realisasi Pajak Penerangan Jalan pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersumber dari pelanggan listrik Perusahaan Listrik Negara di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, yang dipungut pajaknya pada saat pembayaran Langganan listrik untuk yang masih menggunakan meteran pasca bayar atau pada saat pembelian pulsa listrik untuk pelanggan yang telah bermigrasi ke meteran Prabayar, di mana pemotongan/pemungutannya dan penyetorannya dilakukan dengan transfer langsung ke Rekening Kas Daerah oleh Perusahaan Listrik Negara.

- Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp25.604.810.458,57. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

- Pajak Parkir pada tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp301.174.775,00 atau 109,10% dari anggaran yang ditargetkan dalam APBD. Realisasi tersebut merupakan penerimaan pajak parkir kendaraan di Bandar Udara Komodo yang dikelola oleh pihak ketiga.

- Pajak Reklame di tahun 2022 melampaui target anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yaitu sebesar Rp956.920.006,01 atau 148,79% dari anggaran sebesar Rp643.138.844,00. Penerimaan Pajak Reklame dapat kami rincikan sebagai berikut :

- Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	Rp	538.153.367,00
- Pajak Reklame Kain	Rp	33.758.593,00
- Pajak Reklame Melekat/Stiker	Rp	385.008.046,01
Jumlah	Rp	956.920.006,01

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing OPD dengan realisasi selama TA 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021**

Retribusi Daerah :		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp
1)	Retribusi Pelayanan Kesehatan	21.611.919.086,00	20.770.685.198,00	-838.074.888,00	38.276.428.656,00
2)	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.650.000.000,00	1.479.572.000,00	-170.428.000,00	804.590.000,00
3)	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	164.691.429,00	196.430.000,00	31.738.571,00	194.203.000,00
4)	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	52.615.000,00
5)	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	250.000.000,00	85.161.000,00	-164.839.000,00	185.528.000,00
6)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.079.835.429,00	2.175.537.132,00	95.701.703,00	1.302.159.288,00
7)	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	600.000.000,00	699.127.100,00	99.127.100,00	367.977.700,00
8)	Retribusi Tempat Pelelangan	910.000.000,00	635.115.000,00	-274.885.000,00	459.652.000,00
9)	Retribusi Terminal	22.140.000,00	36.627.000,00	14.487.000,00	38.184.000,00
10)	Retribusi Tempat Khusus Parkir	40.000.000,00	31.248.000,00	-8.752.000,00	43.662.000,00
11)	Retribusi Rumah Potong Hewan	100.000.000,00	101.555.000,00	1.555.000,00	460.411.700,00
12)	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	680.000.000,00	627.200.000,00	-52.800.000,00	514.481.000,00
13)	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	13.500.000.000,00	9.436.060.000,00	-4.063.940.000,00	2.496.720.000,00
14)	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	75.000.000,00	75.005.000,00	5.000,00	35.691.620,00
15)	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.500.000.000,00	4.769.038.834,00	-5.730.961.166,00	5.495.366.800,00
16)	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman	450.000.000,00	299.480.000,00	-150.520.000,00	162.500.000,00
17)	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	2.925.000,00
18)	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00	417.704.412,00
Jumlah		52.650.585.944,00	41.417.841.264,00	-11.232.744.680,00	51.310.800.176,00

Realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2022 sebesar Rp41.417.841.264,00 atau 78,67% dari anggaran sebesar Rp52.650.585.944,00.

Realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9.892.958.912,00 jika dibandingkan dengan realisasi retribusi daerah Tahun Anggaran 2021. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa Pos Retribusi Daerah yang belum dioptimalkan seperti Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dikarenakan tidak adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai untuk mengoperasikan peralatan pengujian kendaraan.



Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh masing-masing OPD sebagaimana dapat dilihat pada daftar berikut:

Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Masing – Masing OPD

OPD	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022
		Rp	Rp
Dina Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.500.000.000,00	3.065.120.500,00
Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	Retribusi Pelayanan Kesehatan	16.500.000.000,00	17.082.376.298,00
Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.500.000.000,00	4.769.038.834,00
Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	164.691.429,00	196.430.000,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	0,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	429.835.429,00	707.543.080,00
	Retribusi Terminal	22.140.000,00	36.627.000,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	680.000.000,00	627.200.000,00
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.000.000,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Retribusi Tempat Pelelangan	910.000.000,00	635.115.000,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	40.000.000,00	31.248.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	75.000.000,00	75.005.000,00
Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.650.000.000,00	1.479.572.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	250.000.000,00	85.161.000,00
Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	13.500.000.000,00	9.436.060.000,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Retribusi Pelayanan Kesehatan	611.919.086,00	623.188.400,00
	Retribusi Rumah Potong Hewan	100.000.000,00	101.555.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	600.000.000,00	699.127.100,00
	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman	450.000.000,00	299.480.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.650.000.000,00	1.467.994.052,00
Jumlah		52.650.585.944,00	41.417.841.264,00

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan PAD dari pembagian atas laba perusahaan milik



daerah/Dividen dari PT. Bank NTT Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	Lebih/Kurang Rp	Realisasi 2021 Rp
1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.720.173.212,00	2.720.173.212,00	0,00	4.012.182.992,00
Jumlah	2.720.173.212,00	2.720.173.212,00	0,00	4.012.182.992,00

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.720.173.212,00 atau terealisasi 100% dari anggaran sebesar Rp2.720.173.212,00.

4) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap maupun rutin, dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 6 Anggaran dan Realisasi Lain – Lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah		Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	Lebih/Kurang Rp	Realisasi 2021 Rp
1)	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	558.214.000,00	558.214.000,00	33.200.000,00
2)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	540.000,00	540.000,00	664.514.740,00
3)	Jasa Giro	2.159.906.237,00	1.108.793.804,21	-1.051.112.432,79	655.998.251,11
4)	Pendapatan Bunga	694.851.690,00	538.549.852,19	-156.301.837,81	569.653.074,99
5)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	5.654.686.400,00	224.019.543,00	-5.430.666.857,00	276.619.124,64
6)	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	367.245.173,00	1.223.548.594,66	856.303.421,66	784.210.796,69
7)	Pendapatan Denda Pajak Daerah	29.064.166,00	52.824.110,00	23.759.944,00	635.069.658,72
8)	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	4.310.244,00
9)	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	148.598.928,91
10)	Lain-Lain	125.983.959,00	247.656.487,56	-121.672.528,56	526.561.863,00
11)	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	451.470.007,31	451.470.007,31	173.074.269,80
12)	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.579.334.801,00	926.786.238,00	-652.548.563,00	0,00
	Jumlah	10.611.072.426,00	5.332.402.636,93	-5.222.014.846,19	4.471.810.951,86



Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.332.402.636,93 atau terealisasi 50,25% dari anggaran sebesar Rp10.611.072.426,00.

Atas realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yaitu Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp 558.214.000,00 merupakan penerimaan dari Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin yang dilelang oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang dengan hasil lelang dirincikan sebagai berikut :

a.	15 Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (Yang Dilengkapi Dokumen BPKB)	Rp	378.900.500,00
b.	9 Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (Yang Tidak Dilengkapi Dokumen BPKB)	Rp	179.313.500,00
Jumlah		Rp	558.214.000,00

Realisasi penerimaan dari Jasa Giro Tahun 2022 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah sebesar Rp1.108.793.804,21 atau direalisasikan sebesar 51,34% dari target anggaran yang ditetapkan. Realisasi tersebut merupakan pendapatan jasa giro dari rekening bank milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat dirincikan sebagai berikut :

	Uraian		Nilai
a.	Jasa Giro pada Kas Daerah :		
-	Jasa Giro Bank BNI	Rp	99.424.721,00
-	Jasa Giro Bank NTT Rekening 2-2 & 3-4	Rp	926.918.433,83
-	Jasa Giro Bank BRI	Rp	4.397.673,00
	Jumlah Jasa Giro pada Kas Daerah	Rp	1.030.740.827,83
b.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara SKPD	Rp	67.936.633,40
c.	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	Rp	6.584.307,11
d.	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	Rp	3.532.035,87
	Total a+b+c+d	Rp	1.108.793.804,21

Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memperoleh realisasi pendapatan bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp 538.549.852,19 atau 77,51% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp694.851.690,00. Realisasi pendapatan tersebut merupakan pendapatan atas bunga deposito yang dapat dirincikan sebagai berikut :

Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

-	Bunga Deposito Bank NTT	Rp	253.693.681,00
-	Bunga Deposito Bank BNI	Rp	146.609.590,00
-	Bunga Deposito Bank BRI	Rp	25.068.499,00
-	Bunga Deposito Bank Mandiri	Rp	113.178.082,19
	Jumlah	Rp	538.549.852,19

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp224.019.543,00. Realisasi tersebut merupakan penerimaan atas setoran temuan hasil pemeriksaan sebesar Rp165.814.443,00, Penyetoran kembali kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp36.650.500,00 dan Setoran kelebihan



pembayaran tunjangan umum dan fungsional kepada PNS tugas belajar sebesar Rp21.554.600,00.

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan adalah sebesar Rp1.223.548.594,66 atau 333,17% dari target yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Manggarai Barat. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan merupakan pendapatan yang bersumber dari sanksi kepada rekanan/pihak ketiga yang berkaitan dengan keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2022 merealisasikan penerimaan Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp52.824.110,00 atau 181,75% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp29.064.166,00. Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Pajak Daerah dapat kami dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7 Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah

Uraian		Nilai	
a.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	Rp	16.292.507,00
b.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	Rp	28.583.911,00
c.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	Rp	4.430.498,00
d.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	Rp	2.959.098,00
e.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	Rp	558.096,00
Jumlah		Rp	52.824.110,00

Atas realisasi penerimaan Pendapatan dari Pengembalian tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp247.656.487,56 atau 104,21% dari target anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp247.656.487,56. Realisasi tersebut merupakan penerimaan atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp64.122.164,00 dan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp68.071.770,00 serta Penerimaan lain Dana BOS sebesar Rp115.462.553,56 berdasarkan SP2H Nomor 900.940/BPKD/44.1/I/2023 tanggal 6 Januari 2023.

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat direalisasikan sebesar Rp451.470.007,31. Realisasi tersebut merupakan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang digunakan untuk menampung transaksi-transaksi pendapatan antara lain kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga dan setoran atas temuan pemeriksaan karena kurang volume pekerjaan oleh penyedia jasa konstruksi.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2022 merealisasikan Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp926.786.238,00 atau 58,68% dari target anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Penerimaan tersebut merupakan cicilan atas pembayaran Sanksi Administrasi Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai kepada pemilik bangunan Hotel yang melanggar ketentuan pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Pede dan Pantai Wae Cicu di Kecamatan Komodo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 277/KEP/HK/2021 Tahun 2021.

**b. Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT, meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah dengan realisasi untuk TA 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer:		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp
a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	992.705.134.094,00	980.265.861.187,00	-12.439.272.907,00	848.880.452.749,00
b.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.757.370.236,00	24.564.932.817,00	-4.192.437.419,00	19.142.408.105,00
Jumlah		1.021.462.504.330,00	1.004.830.794.004,00	-16.631.710.326,00	868.022.860.854,00

1) Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK fisik dan DAK non fisik), dan Dana Desa dengan realisasi untuk Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 9 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat :		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp
1)	Dana Bagi Hasil (DBH)	10.498.323.523,00	11.177.907.051,00	679.583.528,00	13.263.365.170,00
2)	Dana Alokasi Umum (DAU)	496.029.645.000,00	495.899.733.992,00	(129.911.008,00)	495.133.465.000,00
3)	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	262.318.942.571,00	257.974.030.469,00	(4.344.912.102,00)	86.315.187.368,00
4)	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	78.017.247.000,00	69.373.213.675,00	(8.644.033.325,00)	82.992.058.211,00
5)	DID	0,00	0,00	0,00	21.674.262.000,00
6)	Dana Desa	145.840.976.000,00	145.840.976.000,00	0,00	149.502.115.000,00
Jumlah		992.705.134.094,00	980.265.861.187,00	-12.439.272.907,00	848.880.452.749,00

Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp980.265.861.187,00 atau 98,75% dari anggaran sebesar Rp992.705.134.094,00.

Realisasi Bagi Hasil Pajak sebesar Rp11.177.907.051,00 dapat dirinci sebagai berikut.

a.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	Rp	5.967.255.176,00
b.	DBH PPh Pasal 21	Rp	2.675.019.943,00
c.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON	Rp	238.793.155,00
d.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Rp	169.979.708,00
e.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	Rp	117.514.000,00
f.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	Rp	0,00
g.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	Rp	50.105.069,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

h.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Rp	929.000,00
i.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	Rp	1.958.311.000,00
	Jumlah	Rp	11.177.907.051,00

Realisasi Bagi Hasil Pajak-Bagi Hasil dari PBB sebesar Rp5.967.255.176,00 dapat dirinci sebagai berikut :

a.	DBH PBB Bagian Daerah Untuk Kabupaten/Kota	Rp	1.012.659.557,00
b.	DBH PBB Biaya Pemungutan Untuk Kabupaten/Kota	Rp	29.436.550,00
c.	DBH PBB Bagi Rata	Rp	4.925.159.069,00
	Jumlah	Rp	5.967.255.176,00

Realisasi Bagi Hasil Pajak-Bagi Hasil dari PPh Pasal 21, 25 dan Pasal 29 WP OP sebesar Rp 2.913.813.098,00 dapat dirinci sebagai berikut.

a.	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP OP	Rp	238.793.155,00
b.	Bagi Hasil dari PPh Pasal 21	Rp	2.675.019.943,00
	Jumlah	Rp	2.913.813.098,00

Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp2.126.859.069,00 dapat dirinci sebagai berikut.

a.	DBH SDA Perikanan	Rp	1.958.311.000,00
b.	DBH SDA Panas Bumi - Iuran Produksi	Rp	42.890.000,00
c.	DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap	Rp	74.624.000,00
d.	DBH SDA Mineral dan Batu Bara - Royalti	Rp	49.305.572,00
e.	DBH SDA Kehutanan – PSDH	Rp	929.000,00
f.	DBH SDA Mineral dan Batu Bara - Iuran Tetap	Rp	799.497,00
	Jumlah	Rp	2.126.859.069,00

Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam tahun ini melampaui mencapai target yang telah ditetapkan.

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 sebesar Rp495.899.733.992,00 atau 99,97% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp496.029.645.000,00.

Realisasi DAK-fisik sebesar Rp257.974.030.469,00 dapat dirinci sebagai berikut :

a.	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	Rp	54.572.269.735,00
b.	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	Rp	113.984.619.788,00
c.	Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan	Rp	36.617.996.500,00
d.	Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian dan Irigasi	Rp	14.223.173.765,00
e.	Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum, dan Sanitasi	Rp	9.158.385.000,00
f.	Dana Alokasi Khusus Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah	Rp	16.626.822.681,00
g.	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp	1.028.643.000,00
h.	Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan	Rp	11.762.120.000,00
	Jumlah	Rp	257.974.030.469,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Realisasi DAK-non fisik sebesar Rp69.373.213.675,00 dapat dirinci sebagai berikut :

a.	TPG PNSD	Rp	44.418.346.000,00
b.	Tamsil Guru PNSD	Rp	974.400.000,00
c.	TKG PNSD	Rp	3.565.803.000,00
d.	BOP PAUD	Rp	2.401.800.000,00
e.	BOP Pendidikan Kesetaraan	Rp	235.500.000,00
f.	BOKKB-BOK	Rp	11.273.045.700,00
g.	PK2UKM	Rp	1.842.956.000,00
h.	Dana Pelayanan Kepariwisata	Rp	1.022.716.590,00
i.	Fasilitasi Penanaman Modal	Rp	377.827.265,00
j.	BOKB-KB	Rp	2.635.619.250,00
k.	Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Rp	625.199.870,00
	Jumlah	Rp	69.373.213.675,00

Realisasi Penerimaan Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp145.840.976.000,00 atau 100% dari anggarannya untuk 164 Desa yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Realisasi penerimaan Dana Desa dapat kami rincikan sebagai Berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah Desa		Realisasi
1	Kecamatan Boleng	11	Rp	10.094.621.000,00
2	Kecamatan Komodo	17	Rp	15.103.419.000,00
3	Kecamatan Kuwus	10	Rp	8.879.225.000,00
4	Kecamatan Kuwus Barat	10	Rp	8.789.941.000,00
5	Kecamatan Lembor	14	Rp	12.028.928.000,00
6	Kecamatan Lembor Selatan	15	Rp	13.466.128.000,00
7	Kecamatan Macang Pacar	13	Rp	11.504.473.000,00
8	Kecamatan Mbeliling	15	Rp	12.717.163.000,00
9	Kecamatan Ndos	15	Rp	14.106.140.000,00
10	Kecamatan Pacar	13	Rp	12.306.530.000,00
11	Kecamatan Sano Nggoang	15	Rp	12.028.299.000,00
12	Kecamatan Welak	16	Rp	14.816.109.000,00
	Total Realisasi	164	Rp	145.840.976.000,00

2) Transfer Antar Daerah

Realisasi Penerimaan Transfer Antar Daerah merupakan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp24.564.932.817,00 atau 85,42% dari anggaran sebesar Rp28.757.370.236,00.

Realisasi sebesar Rp24.564.932.817,00 dapat dirinci sebagai berikut:

a.	Dari Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	5.078.169.046,00
b.	Dari BBNKB	Rp	1.190.098.141,00
c.	Dari PBBKB	Rp	3.969.519.452,00
d.	Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	Rp	8.708.000,00
e.	Dari Pajak Rokok Daerah	Rp	14.318.438.178,00
	Jumlah	Rp	24.564.932.817,00

**c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA**

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Anggaran dan Realisasi Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 dan Tahun 2021

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp
a.	Pendapatan Hibah	13.975.449.352,00	14.536.876.920,00	561.427.568,00	27.742.144.046,00
b.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	46.892.355.000,00	45.352.818.092,00	-1.539.536.908,00	38.972.049.633,01
Jumlah		60.867.804.352,00	59.889.695.012,00	-978.109.340,00	66.714.193.679,01

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp59.889.695.012,00 atau 98,39% dari anggaran sebesar Rp60.867.804.352,00. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah dengan realisasi sebesar Rp14.536.876.920,00 dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan realisasi sebesar Rp45.352.818.092,00.

Realisasi Pendapatan Hibah sebesar Rp14.536.876.920,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	13.975.449.352,00	13.366.211.920,00	-609.237.432,00	27.517.144.046,00
2.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	0,00	1.170.665.000,00	1.170.665.000,00	0,00
3.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenia	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00
Jumlah		13.975.449.352,00	14.536.876.920,00	561.427.568,00	27.742.144.046,00

Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp13.366.211.920,00 merupakan Hibah program IPDMIP (*Integrated Participatory Development and Management Irrigation Project*). Sedangkan realisasi penerimaan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri sebesar Rp1.170.665.000,00 merupakan Dana Hibah Vaksin dari Organisasi Perempuan Pertiwi Indonesia Tebet.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan realisasi sebesar Rp45.352.818.092,00 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Lain – Lain Pendapatan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp
1.	Pendapatan Hibah Dana BOS	33.772.600.000,00	33.292.915.034,00	-479.684.966,00	35.874.745.149,01
2.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	0,00	0,00	3.097.304.484,00
3.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.119.755.000,00	12.059.903.058,00	-1.059.851.942,00	0,00
Jumlah		46.892.355.000,00	45.352.818.092,00	-1.539.536.908,00	38.972.049.633,01

Pendapatan Hibah Dana BOS tahun 2022 dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebesar Rp33.772.600.000,00 dan direalisasikan 98,58% dari anggaran yang ditetapkan atau sebesar Rp33.292.915.034,00. Jumlah sekolah negeri di Kabupaten Manggarai Barat yang menerima Dana Bantuan Operasional pada Tahun 2021 sebanyak 255 sekolah yang terdiri dari SD Negeri sebanyak 179 dan SMP Negeri sebanyak 79. Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Satuan Pendidikan Negeri yang berada di Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pendapatan Hibah BOS yang kurang dari target yang telah ditetapkan disebabkan penyesuaian jumlah siswa dalam data pokok pendidikan.

Realisasi penerimaan Dana Kapitasi JKN Tahun 2022 adalah sebesar Rp12.059.903.058,00 atau 91,92% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp13.119.755.000,00. Pendapatan Dana Kapitasi JKN merupakan pendapatan yang dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Pendapatan Dana Kapitasi JKN tersebut terdapat di 21 (dua puluh satu) Puskesmas yaitu:

Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Dana Kapitasi JKN Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp
1.	Puskesmas Labuan Bajo	2.103.354.000,00	2.468.186.400,00	364.832.400,00	2.137.035.195,27
2.	Puskesmas Benteng	481.250.000,00	416.746.850,00	-64.503.150,00	477.168.450,00
3.	Puskesmas Rekas	342.925.000,00	339.355.592,00	-3.569.408,00	356.552.939,75
4.	Puskesmas Werang	717.530.000,00	567.696.879,00	-149.833.121,00	750.241.700,00
5.	Puskesmas Warsawe	331.375.000,00	336.302.850,00	4.927.850,00	326.847.525,00
6.	Puskesmas Waenakeng	1.323.498.000,00	1.318.918.243,00	-4.579.757,00	1.285.221.752,72
7.	Puskesmas Datak	480.645.000,00	406.014.463,00	-74.630.537,00	456.165.975,00



Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021
	Rp	Rp	Rp	Rp
8. Puskesmas Nangalili	466.235.000,00	413.185.625,00	-53.049.375,00	495.998.950,00
9. Puskesmas Lengkong Cepang	577.830.000,00	624.938.984,00	47.108.984,00	622.903.700,00
10. Puskesmas Wae Kanta	479.820.000,00	357.845.242,00	-121.974.758,00	432.232.200,00
11. Puskesmas Orong	601.370.000,00	493.099.905,00	-108.270.095,00	552.164.475,00
12. Puskesmas Golowelu	671.385.000,00	630.293.550,00	-41.091.450,00	636.654.000,00
13. Puskesmas Rangu	502.040.000,00	304.611.923,00	-197.428.077,00	415.045.825,00
14. Puskesmas Tentang	597.685.000,00	550.067.349,00	-47.617.651,00	565.731.200,00
15. Puskesmas Pacar	811.998.000,00	630.997.562,00	-181.000.438,00	907.046.450,00
16. Puskesmas Bari	400.180.000,00	427.411.731,00	27.231.731,00	555.715.200,00
17. Puskesmas Rego	410.575.000,00	366.226.466,00	-44.348.534,00	281.170.200,00
18. Puskesmas Terang	830.060.000,00	725.134.957,00	-104.925.043,00	874.876.700,00
19. Puskesmas Waning	330.000.000,00	293.752.700,00	-36.247.300,00	247.315.200,00
20. Puskesmas Nanga Terang	330.000.000,00	185.936.496,00	-144.063.504,00	231.841.200,00
21. Puskesmas Wae Pitak	330.000.000,00	203.179.291,00	-126.820.709,00	220.226.700,00
Jumlah	13.119.755.000,00	12.059.903.058,00	-1.059.851.942,00	12.828.155.537,74

Realisasi penerimaan Dana Kapitasi JKN Tahun 2022 kurang dari target anggaran yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya perhitungan penyaluran Dana Kapitasi JKN oleh BPJS Kesehatan dengan menjadikan saldo sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN tahun sebelumnya sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Kapitasi JKN Tahun 2022 berdasarkan Permendagri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

2. Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022, terdapat sebanyak 56 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan pengguna anggaran. Berdasarkan jenis kelompoknya, Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Transfer / Bagi Hasil ke Desa, dan Transfer Bantuan Keuangan. Adapun Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2022 dan Tahun 2021

Belanja Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021
	Rp	Rp	Rp	Rp
Belanja Operasi	832.858.131.339,00	789.416.323.826,32	-43.441.807.512,68	720.906.686.316,24
Belanja Modal	532.747.431.197,00	493.263.439.543,00	-39.483.991.654,00	162.697.188.838,00
Belanja Tak Terduga	5.979.104.141,00	3.173.879.600,00	-2.805.224.541,00	3.890.479.982,00
Belanja Transfer	210.288.700.400,00	208.426.596.000,00	-1.862.104.400,00	211.748.477.416,00
Jumlah	1.581.873.367.077,00	1.494.280.238.969,32	-87.593.128.107,68	1.099.242.832.552,24



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Jumlah realisasi Belanja Daerah dan Transfer TA 2022 sebesar Rp1.494.280.238.969,32 atau 94,46% dari anggaran sebesar Rp1.581.873.367.077,00.

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi Kabupaten Manggarai Barat meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, dan Hibah dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021

Belanja Operasi :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021
	Rp	Rp	Rp	Rp
a. Belanja Pegawai	377.556.575.509,00	371.287.510.538,00	-6.269.064.971,00	336.092.253.190,25
b. Belanja Barang dan Jasa	428.254.387.848,00	392.905.825.453,32	-35.348.562.394,68	374.782.619.165,99
c. Bunga	8.471.765.932,00	7.038.707.835,00	-1.433.058.097,00	0,00
d. Belanja Hibah	18.575.402.050,00	18.184.280.000,00	-391.122.050,00	10.031.813.960,00
Jumlah	832.858.131.339,00	789.416.323.826,32	(43.441.807.512,68)	720.906.686.316,24

Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Manggarai Barat TA 2022 sebesar Rp789.416.323.826,32 atau 94,78% dari yang dianggarkan pada APBD sebesar Rp832.858.131.339,00. Rincian realisasi Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp371.287.510.538,00 dari anggaran sebesar Rp377.556.575.509,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 16 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021

Belanja Pegawai :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/(Kurang)
	Rp	Rp	Rp
a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	250.366.380.209,00	249.081.016.486,00	-1.285.363.723,00
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	24.898.353.227,00	22.308.946.777,00	-2.589.406.450,00
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	66.222.939.404,00	64.371.212.709,00	-1.851.726.695,00
d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	19.838.323.758,00	19.485.512.021,00	-352.811.737,00
e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	818.709.247,00	813.913.981,00	-4.795.266,00
f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.201.600.000,00	2.201.600.000,00	0,00
g. Belanja Pegawai BOS	13.210.269.664,00	13.025.308.564,00	-184.961.100,00
Jumlah	377.556.575.509,00	371.287.510.538,00	(6.283.064.971,00)

Rincian Belanja Pegawai masing-masing OPD sebagai berikut :

1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Rp	186.400.331.732,00
2	SPNF SKB Manggarai Barat	Rp	73.215.000,00
3	Dinas Kesehatan	Rp	45.067.967.881,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	Rp	13.714.307.578,00
5	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan	Rp	4.821.424.837,00
6	Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Rp	3.991.879.186,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	2.272.440.375,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	1.964.519.256,00
9	Dinas Sosial	Rp	1.686.605.022,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

10	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	Rp	1.908.205.734,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp	2.233.805.054,00
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Rp	1.952.374.386,00
13	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	3.411.357.568,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	1.988.085.192,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp	2.212.926.118,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	2.008.789.544,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	2.456.601.622,00
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rp	2.281.921.469,00
19	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	Rp	2.597.809.094,00
20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Rp	8.427.279.256,00
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp	2.927.755.440,00
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp	1.750.874.748,00
23	Bagian Pemerintahan	Rp	39.480.000,00
24	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp	64.010.000,00
25	Bagian Hukum	Rp	42.390.000,00
26	Bagian Perekonomian dan SDA	Rp	49.740.000,00
27	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	484.630.000,00
28	Bagian Umum	Rp	9.198.570.390,00
29	Bagian Organisasi	Rp	43.860.000,00
30	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp	49.080.000,00
31	Bagian Administrasi Pembangunan	Rp	40.980.000,00
32	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Rp	34.030.000,00
33	Inspektorat	Rp	2.934.210.953,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	2.083.916.235,00
35	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	14.646.691.899,00
36	Badan Pendapatan Daerah	Rp	3.760.927.267,00
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	2.363.950.387,00
38	Sekretariat DPRD	Rp	21.336.149.313,00
39	Kecamatan Komodo	Rp	2.374.310.285,00
40	Kelurahan Labuan Bajo	Rp	20.700.000,00
41	Kelurahan Wae Kelambu	Rp	20.700.000,00
42	Kecamatan Boleng	Rp	1.228.119.398,00
43	Kecamatan Mbeliling	Rp	1.222.239.186,00
44	Kecamatan Sano Nggoang	Rp	1.144.159.163,00
45	Kecamatan Lembor	Rp	2.295.780.472,00
46	Kelurahan Tangge	Rp	23.940.000,00
47	Kecamatan Welak	Rp	1.365.383.044,00
48	Kecamatan Lembor Selatan	Rp	1.084.698.012,00
49	Kecamatan Kuwus	Rp	1.380.979.781,00
50	Kelurahan Nantal	Rp	17.100.000,00
51	Kelurahan Golo Ruu	Rp	17.100.000,00
52	Kecamatan Macang Pacar	Rp	1.084.066.652,00
53	Kecamatan Ndosu	Rp	813.692.305,00
54	Kecamatan Kuwus Barat	Rp	962.563.899,00
55	Kecamatan Pacar	Rp	1.045.387.437,00
56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	1.863.498.368,00
	Jumlah	Rp	371.287.510.538,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp186.400.331.732,00 termasuk didalamnya belanja yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebanyak 255 Sekolah Negeri (SD dan SMP) sebesar Rp13.025.308.564,00.

2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp392.905.825.453,32 dari anggaran sebesar Rp428.254.387.848,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 17 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 dan Tahun 2021

Belanja Barang dan Jasa :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/(Kurang)
	Rp	Rp	Rp
a. Belanja Barang	168.439.060.855,00	154.649.892.044,00	-13.789.168.811,00
b. Belanja Jasa	160.643.234.100,00	148.376.588.344,80	-12.266.645.755,00
c. Belanja Pemeliharaan	16.392.977.117,00	15.305.510.080,00	-1.087.467.037,00
d. Belanja Perjalanan Dinas	63.467.358.820,00	55.946.370.437,00	-7.520.988.383,00
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.596.900.000,00	1.564.900.000,00	-32.000.000,00
f. Belanja Barang dan Jasa BOS	17.714.856.956,00	17.062.564.547,52	-652.292.408,48
Jumlah	428.254.387.848,00	392.905.825.453,32	-35.357.052.394,48

Rincian Belanja Barang dan Jasa masing-masing SKPD sebagai berikut :

1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Rp	57.199.321.644,52
2	SPNF SKB Manggarai Barat	Rp	288.508.500,00
3	Dinas Kesehatan	Rp	77.894.072.087,80
4	Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	Rp	29.200.430.555,00
5	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan	Rp	36.148.178.778,00
6	Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Rp	25.459.556.986,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	3.675.847.157,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	1.065.801.150,00
9	Dinas Sosial	Rp	2.299.059.222,00
10	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	Rp	2.834.326.820,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp	4.597.592.386,00
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Rp	5.804.473.860,00
13	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	13.589.433.058,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	1.903.047.205,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp	5.270.818.295,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	3.539.779.240,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	1.303.798.603,00
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rp	1.645.748.370,00
19	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	Rp	4.690.064.872,00
20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Rp	31.508.437.810,00
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp	9.730.541.416,00
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp	3.342.403.282,00
23	Bagian Pemerintahan	Rp	417.273.106,00
24	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp	1.056.498.534,00
25	Bagian Hukum	Rp	1.908.583.315,00
26	Bagian Perekonomian dan SDA	Rp	485.801.500,00
27	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	587.643.163,00
28	Bagian Umum	Rp	14.197.500.053,00
29	Bagian Organisasi	Rp	582.360.092,00
30	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp	610.170.698,00
31	Bagian Administrasi Pembangunan	Rp	1.271.394.755,00
32	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Rp	272.393.200,00
33	Inspektorat	Rp	2.183.757.448,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	4.278.748.959,00
35	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	10.074.100.975,00
36	Badan Pendapatan Daerah	Rp	3.614.159.640,00
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	3.946.172.778,00
38	Sekretariat DPRD	Rp	16.060.339.570,00
39	Kecamatan Komodo	Rp	665.994.669,00
40	Kelurahan Labuan Bajo	Rp	460.097.800,00
41	Kelurahan Wae Kelambu	Rp	212.775.000,00
42	Kecamatan Boleng	Rp	349.589.000,00
43	Kecamatan Mbeliling	Rp	461.215.000,00
44	Kecamatan Sano Nggoang	Rp	435.727.725,00
45	Kecamatan Lembor	Rp	606.308.700,00
46	Kelurahan Tangge	Rp	251.166.950,00
47	Kecamatan Welak	Rp	453.839.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

48	Kecamatan Lembor Selatan	Rp	392.528.691,00
49	Kecamatan Kuwus	Rp	348.078.342,00
50	Kelurahan Nantal	Rp	170.010.725,00
51	Kelurahan Golo Ruu	Rp	141.321.279,00
52	Kecamatan Macang Pacar	Rp	339.415.486,00
53	Kecamatan Ndoso	Rp	335.265.785,00
54	Kecamatan Kuwus Barat	Rp	350.955.200,00
55	Kecamatan Pacar	Rp	461.234.078,00
56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	1.932.162.240,00
	Jumlah	Rp	392.905.825.453,32

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp57.199.321.644,52 termasuk didalamnya belanja yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebanyak 255 Sekolah Negeri (SD dan SMP) sebesar Rp17.062.564.547,52 dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp77.894.072.087,80 termasuk didalamnya belanja yang bersumber Dana JKN sebanyak 21 FKTP Puskesmas sebesar Rp12.247.068.874,80.

3. Belanja Bunga

Realisasi Belanja Bunga sebesar Rp7.038.707.835,00 dari anggaran sebesar Rp8.471.765.932,00 merupakan pembayaran Bunga Dana Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) terdapat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 18 Anggaran dan Realisasi Belanja Bunga Tahun 2022 dan Tahun 2021

Belanja Bunga	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/Kurang	Realisasi 2021
	Rp	Rp	Rp	Rp
Belanja Bunga	8.471.765.932,00	7.038.707.835,00	-1.433.058.097,00	0,00
Jumlah	8.471.765.932,00	7.038.707.835,00	-1.433.058.097,00	0,00

4. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp18.184.280.000,00 dari anggaran sebesar Rp18.575.402.050,00 dengan sebagai berikut :

Tabel 19 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

Belanja Hibah :		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/Kurang	Realisasi 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp
a.	Belanja Hibah kepada Badan Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	17.289.252.050,00	16.898.130.000,00	-391.122.050,00	8.802.963.960,00
b.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.286.150.000,00	1.286.150.000,00	0,00	1.228.850.000,00
Jumlah		18.575.402.050,00	18.184.280.000,00	-391.122.050,00	10.031.813.960,00

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.898.130.000,00 dengan rincian Penerima sebagai berikut :

1	DEKRANASDA Kabupaten Manggarai Barat	Rp	750.000.000,00
---	--------------------------------------	----	----------------



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

2	PRAMUKA Kabupaten Manggarai Barat	Rp	500.000.000,00
3	Organisasi KONI Tingkat Kabupaten Manggarai Barat	Rp	800.000.000,00
4	P2TP2A	Rp	30.000.000,00
5	Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak DI 102 DESA se-Kabupaten Manggarai Barat	Rp	2.011.200.000,00
6	P2TP2A	Rp	35.000.000,00
7	RPL 111 PDHL RES MABAR 2JPS8KSA	Rp	1.385.427.000,00
8	Komando Distrik Militer (KODIM) 1612/ Kabupaten Manggarai	Rp	150.000.000,00
9	KEPOLISIAN RESOR (POLRES) Kabupaten Manggarai Barat	Rp	501.053.000,00
10	PRAMUKA Kabupaten Manggarai Barat	Rp	350.000.000,00
11	KONI Tingkat Kabupaten Manggarai Barat	Rp	300.000.000,00
12	DWP Kabupaten Manggarai Barat	Rp	100.000.000,00
13	Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Manggarai Barat	Rp	30.000.000,00
14	Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Manggarai Barat	Rp	150.000.000,00
15	Persatuan Penyandang Disabilitas (PPD)	Rp	50.000.000,00
16	Tilawatil Quran	Rp	200.000.000,00
17	DLP3KD	Rp	195.000.000,00
18	Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat	Rp	650.000.000,00
19	Rumah Gendang	Rp	760.000.000,00
20	Gereja	Rp	870.000.000,00
21	Pastoran	Rp	80.000.000,00
22	Masjid	Rp	240.000.000,00
23	Biara	Rp	65.000.000,00
24	Susteran	Rp	125.000.000,00
25	Kapela	Rp	365.000.000,00
26	Kelompok Usaha	Rp	391.450.000,00
27	MTQ	Rp	50.000.000,00
28	Kevikepan Labuan Bajo	Rp	750.000.000,00
29	Gua Maria Lordes Nunang	Rp	15.000.000,00
30	Tempat Penitipan Anak Madre Kompasione	Rp	85.000.000,00
31	BOP PAUD	Rp	2.501.800.000,00
32	BOP Pendidikan Kesetaraan	Rp	235.500.000,00
33	Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ	Rp	50.000.000,00
34	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Rp	50.000.000,00
35	Dewan Kesenian Manggarai barat	Rp	30.000.000,00
36	Panitia Acara Congko Lokap	Rp	290.000.000,00
37	Situs Devosional Gua Maria	Rp	105.000.000,00
38	MUI Kabupaten Manggarai Barat	Rp	40.000.000,00
39	Keuskupan Labuan Bajo	Rp	1.300.000.000,00
40	MTSS Nurul Taufik	Rp	50.000.000,00
41	Komisi Penanggulangan AIDS	Rp	261.700.000,00
	Jumlah	Rp	16.898.130.000,00

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.286.150.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1	PARTAI PAN	Rp	125.240.000,00
2	PARTAI PERINDO	Rp	57.350.000,00
3	PARTAI PBB	Rp	32.540.000,00
4	PARTAI HANURA	Rp	90.870.000,00
5	PARTAI NASDEM	Rp	201.240.000,00
6	PARTAI PKS	Rp	85.100.000,00
7	PARTAI GOLKAR	Rp	125.100.000,00
8	PARTAI PPP	Rp	65.810.000,00
9	PARTAI PKB	Rp	105.070.000,00
10	PARTAI PKP	Rp	61.430.000,00
11	PARTAI GERINDRA	Rp	85.140.000,00
12	PARTAI PDIP	Rp	128.450.000,00
13	PARTAI DEMOKRAT	Rp	122.810.000,00
	Jumlah	Rp	1.286.150.000,00

**b. Belanja Modal**

Belanja Modal Kabupaten Manggarai Barat meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya, dengan realisasi untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 20 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021

Belanja Modal	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/Kurang	Realisasi 2021
	Rp	Rp	Rp	Rp
a. Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Belanja Peralatan dan Mesin	40.000.245.404,00	38.845.232.335,00	-1.155.013.069,00	26.156.043.181,00
c. Belanja Gedung dan Bangunan	161.980.290.249,00	159.623.544.220,00	-2.356.746.029,00	43.703.403.403,00
d. Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	328.417.976.752,00	292.362.220.356,00	-36.055.756.396,00	89.642.030.454,00
e. Belanja Aset Tetap Lainnya	2.348.918.792,00	2.432.442.632,00	83.523.840,00	3.195.711.800,00
f. Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal	532.747.431.197,00	493.263.439.543,00	-39.483.991.654,00	162.697.188.838,00

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp493.263.439.543,00 atau 92,59% dari anggaran sebesar Rp532.747.431.197,00.



Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Tanah

Pada tahun anggaran 2022 atas belanja modal tanah tidak dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai Barat.

2. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp38.845.232.335,00 dengan rincian sebagai berikut:

1)	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	14.381.934.574,00
2)	SPNF SKB Manggarai Barat	459.984.900,00
3)	Dinas Kesehatan	3.595.377.286,00
4)	Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	5.223.810.523,00
5)	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan	342.190.600,00
6)	Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang	573.490.320,00
7)	Satuan Polisi Pamong Praja	1.100.000,00
8)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.000.000,00
9)	Dinas Sosial	127.916.000,00
10)	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	3.002.070.112,00
11)	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	608.460.000,00
12)	Dinas ketahanan Pangan dan Perikanan	53.840.454,00
13)	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.206.988.000,00
14)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	113.050.500,00
15)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	81.900.000,00
16)	Dinas Komunikasi dan Informatika	288.468.365,00
17)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	122.499.000,00
18)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	172.509.500,00
19)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	794.550.443,00
20)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	872.548.000,00
21)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	127.242.847,00
22)	Bagian Pemerintahan Umum	39.000.000,00
23)	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	89.900.000,00
24)	Bagian Hukum	126.133.300,00
25)	Bagian Ekonomi, Pembangunan dan SDA	42.323.500,00
26)	Bagian Umum	2.480.800.000,00
27)	Bagian Humas dan Protokol	106.155.000,00
28)	Bagian Administrasi Pembangunan	271.260.000,00
29)	Bagian Perencanaan dan Keuangan	79.300.000,00
30)	Inspektorat	350.596.727,00
31)	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	220.574.100,00
32)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	902.184.200,00
33)	Badan Pendapatan Daerah	187.728.000,00
34)	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	1.041.050.000,00
35)	Sekretariat DPRD	447.459.040,00
36)	Kecamatan Komodo	14.000.000,00
37)	Kelurahan Labuan Bajo	37.500.000,00
38)	Kecamatan Boleng	33.420.000,00
39)	Kecamatan Mbeliling	51.808.300,00
40)	Kecamatan Sano Nggoang	20.445.279,00
41)	Kecamatan Welak	16.152.965,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

42) Kecamatan Macang Pacar	51.372.500,00
43) Kecamatan Pacar	15.890.000,00
44) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	61.248.000,00
Jumlah	38.845.232.335,00

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin per obyek belanja sebagai berikut:

uraian	Jumlah
- Belanja Modal Alat Besar	68.419.189,00
- Belanja Modal Alat Angkutan	4.357.207.261,00
- Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	163.045.750,00
- Belanja Modal Alat Pertanian	32.992.751,00
- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.673.913.740,00
- Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	516.585.055,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.786.964.495,00
- Belanja Modal Alat Laboratorium	1.649.012.500,00
- Belanja Modal Komputer	14.688.095.616,00
- Belanja Modal Alat Eksplorasi	142.711.620,00
- Belanja Modal Alat Peraga	506.257.500,00
- Belanja Modal Rambu-Rambu	149.804.600,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.110.222.258,00
Total	38.845.232.335,00

3. Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp159.623.544.220,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	19.564.827.268,00
2) SPNF SKB Manggarai Barat	427.331.280,00
3) Dinas Kesehatan	2.294.023.521,00
4) Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	105.627.972.500,00
5) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	4.231.162.789,00
6) Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.116.770.500,00
7) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.979.637.011,00
8) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	69.999.250,00
9) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	371.077.238,00
10) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.754.290.642,00
11) Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.046.452.221,00
12) Sekretariat DPRD	140.000.000,00
Jumlah	159.623.544.220,00

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan perobyek belanja sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
- Belanja Modal Bangunan Gedung	157.576.642.326,00
- Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.046.901.894,00
Total	159.623.544.220,00

4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp292.362.220.356,00 dengan rincian sebagai berikut:

1)	Dinas Kesehatan	1.193.344.099,00
2)	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan	279.454.460.948,00
3)	Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang	9.997.901.923,00
4)	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.464.343.929,00
5)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	52.551.942,00
6)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	199.617.515,00
	Jumlah	292.362.220.356,00

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan perobyek belanja sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
- Belanja Modal Jalan dan Jembatan	281.010.121.155,00
- Belanja Modal Bangunan Air	9.959.137.587,00
- Belanja Modal Instalasi	1.392.961.614,00
Total	292.362.220.356,00

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menganggarkan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan dengan realisasi sebesar Rp221.970.353.154,00.

Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang bersumber dari Dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai berikut:

A	Peningkatan Jalan	217.648.753.216,00
1)	Penanganan Jalan Dalam Kota Labuan Bajo Paket I	28.904.593.400,00
2)	Penanganan Jalan Dalam Kota Labuan Bajo Paket II	29.255.910.000,00
3)	penanganan ruas jalan Bambor – Werang	16.889.854.457,00
4)	Penanganan Ruas Golo Menes - Kondas – Warsawe	9.277.658.000,00
5)	Penanganan Ruas Lando – Terang	11.699.440.000,00
6)	Penanganan Ruas Hita – Bari	7.829.859.994,00
7)	Penanganan Ruas Sp.Momol - Waning - Tehong - Wae Ncuring	8.885.178.400,00
8)	Penanganan Ruas Sp. Nara - Wontong - Pateng Leong - Wae Ncuring	10.229.014.116,00
9)	Penanganan Ruas Golo Welu - Lewur - Nggawut (Perbatasan Manggarai)	13.766.364.232,00
10)	Penanganan Ruas Sambigoro - Orong-Wae Tesem - Perbatasan Manggarai	13.667.760.617,00
11)	Penanganan Ruas Sp. Loha – Tanggar – Naha – Sp. Konang	7.898.949.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

12)	Penanganan Ruas Nao - Kolang – Monsok	8.777.971.800,00
13)	Penanganan Ruas Rangga – Perang – Beci	9.794.319.000,00
14)	Penanganan Ruas Daleng - Pela – Galang	9.387.772.800,00
15)	Penanganan Ruas Daleng - Reweng - Kaca - Wae Mege	14.238.091.650,00
16)	Penanganan Ruas Ngaet – Kaung – Wae Jare	4.056.890.000,00
17)	Penanganan Ruas Bambor – Meter – Wae Jare	3.126.814.600,00
18)	Penanganan Ruas Sp. Lambur – Kotok – Sp. Wol	9.962.310.250,00

B Pengawasan **4.321.599.938,00**

1)	Jasa Konsultan Pengawasan Teknis Jalan Dana Pinjaman Daerah Dalam Kota Labuan Bajo Paket II (Kec. Komodo)	532.032.850,00
2)	Jasa Konsultan Pengawasan Teknis Jalan Dana Pinjaman Daerah Dalam Kota Labuan Bajo Paket I (Kec. Komodo)	649.688.100,00
3)	Jasa Konsultan Pengawasan Teknis Jalan Dana Pinjaman Daerah IX (Kec. Kuwus Barat)	594.322.698,00
4)	Jasa Konsultan Pengawasan Teknis Jalan Dana Pinjaman Daerah Paket III (Kec. Mbeling dan Kec. Sano Nggoang)	442.680.975,00
5)	Jasa Konsultan Pengawasan Teknis Jalan Dana Pinjaman Daerah Paket IV (Kec. Lembor dan Lembor Selatan)	412.013.250,00
6)	Jasa Konsultan Pengawasan Teknis Jalan Dana Pinjaman Daerah Paket V (Kec. Welak)	482.248.000,00
7)	Jasa Konsultan Pengawasan Teknis Jalan Dana Pinjaman Daerah VIII (Kec. Ndosu dan Kec. Kuwus)	366.576.440,00
8)	Jasa Konsultan Pengawasan Teknis Jalan Dana Pinjaman Daerah VII (Kec. Macang Pacar)	472.923.000,00
9)	Jasa Konsultan Pengawasan Teknis Jalan Dana Pinjaman Daerah VI (Kec. Boleng dan Kec. Pacar)	369.114.625,00
JUMLAH		221.970.353.154,00

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.432.442.632,00 dengan rincian sebagai berikut:

1)	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.882.142.600,00
	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan	25.000.000,00
2)	Permukiman dan Pertanahan	
3)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	525.300.032,00
Jumlah		2.432.442.632,00

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan perobyek belanja sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
- Belanja Modal Bahan Perpustakaan	25.000.000,00
- Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	525.300.032,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.882.142.600,00
Total	2.432.442.632,00



6. Belanja Aset Lainnya

Pada tahun anggaran 2022 atas belanja modal Aset Lainnya tidak dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai Barat.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga (BTT) dialokasikan pada APBD dalam rangka penanganan akibat dari bencana alam dan pelaksanaan kewenangan daerah lainnya. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2022 adalah Rp3.173.879.600,00 atau 53,08% dari anggaran sebesar Rp5.979.104.141,00.

Adapun rincian realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari APBN atas Dukungan Terhadap Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 sebesar Rp 214.720.000,00
- Tagihan atas Belanja tidak terduga dalam rangka penanganan Korban Penganiayaan an. Agustinus Anto di desa Pangga Kec. Kuwus Kab. Mabar sebesar Rp45.000.000,00
- Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor di Ruas Jalan Dahang - Tentang - Sirimese, Dusun Sano, Desa Momol, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat sebesar Rp197.648.000,00.
- Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat sebesar Rp32.480.000,00.
- Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Dukungan Pembiayaan Pengamanan Kunjungan Kepala Negara (Wakil Presiden RI) di Labuan Bajo Tanggal 14 s/d 15 Maret 2022 sebesar Rp529.772.000,00
- Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Belanja Bantuan Sosial bagi Fakir Miskin di Kabupaten Manggarai Barat pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp210.911.000,00.
- Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penyelesaian Utang Beban Belanja Penyediaan Peti Jenasah Bagi Pasien Covid - 19 Tahun 2021 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat sebesar Rp20.000.000,00.
- Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Dukungan Pembiayaan Persiapan dan Penerimaan Kunjungan Presiden RI di Labuan Bajo dari Tanggal 21 s/d 22 Juli 2022 sebesar Rp648.863.000,00. Atas realisasi BTT sebesar Rp650.016.000,00 terdapat Contra Pos (CP) sebesar Rp1.153.000,00 sehingga nilai realisasi belanja BTT menjadi Rp648.863.000,00 (Rp650.016.000,00 - Rp1.153.000,00).



- Belanja tidak terduga dalam rangka dukungan pembiayaan persiapan dan penerimaan kunjungan kerja Presiden Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL) di Labuan Bajo dari tanggal 23 s/d 24 Juli 2022 sebesar Rp420.614.000,00. Atas realisasi BTT sebesar Rp472.636.000,00 terdapat Contra Pos (CP) sebesar Rp52.022.000,00 sehingga nilai realisasi belanja BTT menjadi Rp420.614.000,00 (Rp472.636.000,00 - Rp52.022.000,00).
- Belanja tidak terduga dalam rangka Pengamanan Kunker Ibu Presiden dan Ibu Wakil Presiden di Kab. Manggarai Barat tanggal 28 s.d 29 September 2022 sebesar Rp379.668.000,00.
- Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pemulangan Orang Terlantar di Kabupaten Manggarai Barat pada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat sebesar Rp5.720.000,00.
- Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor Di Ruas Jalan Persimpangan Landong - Kantor Camat Kuwus Barat - Pertigahan Pertamina Ndiuk Desa Golo Lewe Kecamatan Kuwus Barat Kab.Manggarai Barat sebesar Rp225.583.600,00.
- Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Kepada Pelaku Usaha Mikro,Kecil dan Menengah, dan Nelayan Yang Terdampak Inflansi di KMB.TA. 2022 Pada Dinas Sosial KMB sebesar Rp191.700.000,00.
- Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengamanan Demonstrasi/Unjuk Rasa tanggal 29 Desember Tahun 2022 dan Pengamanan Tahun Baru Tahun 2023 pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Barat sebesar Rp39.200.000,00.
- Tagihan atas Belanja Tidak terduga dalam Rangka Bantuan Biaya Pengiriman Barang Bantuan Sosial Korban Bencana Alam di Kabupaten Manggarai Barat pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 Rp12.000.000,00.

d. Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 adalah Rp208.426.596.000,00 atau 99,11% dari anggaran sebesar Rp210.288.700.400,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 21 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2022

Transfer	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
	Rp	Rp	Rp
1. Belanja Bagi Hasil Pendapatan	13.929.599.000,00	12.067.494.600,00	-1.862.104.400,00
2. Belanja Bantuan Keuangan	196.359.101.400,00	196.359.101.400,00	(0,00)
Jumlah	210.288.700.400,00	208.426.596.000,00	-1.862.104.400,00



1. Belanja Bagi Hasil

Transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp12.067.494.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

		2022	2021
a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah			
• Belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintahan Desa	Rp	9.137.494.600,00	9.333.743.800,00
b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah			
• Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintahan Desa	Rp	2.930.000.000,00	2.615.102.180,00
Jumlah	Rp	12.067.494.600,00	11.948.845.980,00

Belanja Transfer bagi hasil pajak dan retribusi ke desa, hanya terealisasi 86,63% dari anggaran karena disesuaikan dengan pencapaian pendapatan pajak dan retribusi daerah pada periode pencairan. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah ke Desa diberikan kepada 164 desa di Kabupaten Manggarai Barat masing-masing disajikan lebih rinci pada **Lampiran 1 dan 2**.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Transfer bantuan keuangan sebesar Rp196.359.101.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

		2022	2021
1) Bantuan keuangan ke desa			
• Alokasi Dana Desa	Rp	50.518.125.400,00	50.297.516.436,00
2) Bantuan keuangan ke desa	Rp	145.840.976.000,00	149.502.115.000,00
• Dana Desa			
Jumlah	Rp	196.359.101.400,00	199.799.631.436,00

Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, diberikan kepada 164 desa di Kabupaten Manggarai Barat, adapun rincian terlampir pada **Lampiran 3 dan 4**.

Atas Belanja Transfer - Belanja Bantuan Keuangan – Bantuan Keuangan ke Desa – Dana Desa dapat kami sampaikan bahwa Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening kas Umum daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Untuk tahun anggaran 2022, dari alokasi sebesar Rp145.840.976.000,00 telah ditransfer 100% ke 164 Desa di Kabupaten Manggarai Barat dan di sajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022.

i. Pembiayaan

**e. Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Manggarai Barat TA 2022 sebesar Rp256.560.815.271,55 atau 99,05% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp259.027.531.679,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Penerimaan Pembiayaan :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/Kurang	Realisasi 2021
	Rp	Rp	Rp	Rp
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9.027.531.679,55	9.027.531.679,55	0,00	37.766.015.547,02
b. Penerimaan Pinjaman Daerah	250.000.000.000,00	247.533.283.592,00	-2.466.716.408,00	0,00
c. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	259.027.531.679,00	256.560.815.271,55	-2.466.716.408,00	37.766.015.547,02

Jumlah sebesar Rp9.027.531.679,00 merupakan realisasi penerimaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.027.531.679,00 yang digunakan di Tahun Anggaran 2022. Sedangkan atas Penerimaan Pinjaman Daerah yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000.000,00 berdasarkan Naskah Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-216/SMI/1221 tanggal 29 Desember 2021 dan direalisasikan sebesar Rp247.533.283.592,00 berdasarkan akta Notaris Lestiana Wang, SH, Mkn Nomor 32 tanggal 31 Oktober 2022 tentang perubahan dan pernyataan kembali perjanjian pemberian pinjaman.

f. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Manggarai Barat TA 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 63,77% yang dianggarkan sebesar Rp7.840.909.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2022	Raelisasi 2022	Lebih/Kurang	Realisasi 2021
	Rp	Rp	Rp	Rp
a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	19.000.000.000,00
b. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	2.840.909.000,00	0,00	-2.840.909.000,00	0,00
Jumlah	7.840.909.000,00	5.000.000.000,00	-2.840.909.000,00	19.000.000.000,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 pada Tahun 2022 diperuntukan sebagai penyertaan modal pada PT Bank NTT



berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Realisasi penyertaan modal ke Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp5.000.000.000,00 direalisasikan tanggal 17 Maret 2022 berdasarkan SP2D Nomor 428/LS/III/2022. Sedangkan sisa sebesar Rp2.840.909.000,00 (dua miliar delapan ratus empat Puluh juta Sembilan ratus Sembilan ribu rupiah) adalah rencana pengembalian Pokok Pinjaman namun sesuai berdasarkan akta Notaris Lestiana Wang, SH, Mkn Nomor 32 tanggal 31 Oktober 2022 tentang perubahan dan pernyataan kembali perjanjian pemberian pinjaman, maka atas Perencanaan dan pengembalian pokok Pinjaman daerah baru dapat diperhitungkan pada tahun anggaran 2023.



B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Awal Tahun 2022 sebesar Rp9.027.531.679,55. Terdapat Penurunan Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp28.738.483.867,47 jika dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2021 sebesar Rp37.766.015.547,02.

2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Pada Tahun 2022 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp9.027.531.679,55.

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA

Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2022 sebesar Rp12.933.239.834,81. Terdapat peningkatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp3.905.708.155,26 jika dibandingkan dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp9.027.531.679,55.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus/Defisit Anggaran	-Rp 238.627.575.436,74
- Pembiayaan Netto	Rp 251.560.815.271,55 +
SILPA Tahun berjalan	Rp12.933.239.834,81

4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Adalah koreksi kesalahan Pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Pada tahun 2022 tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan pada tahun sebelumnya.

5. Saldo Anggaran Lebih Tahun 2022 sebesar Rp12.933.239.834,81.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Saldo Anggaran Lebih Tahun 2022 sebesar Rp12.933.239.834,81 sedangkan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2021 sebesar Rp9.027.531.679,55. Saldo Anggaran Lebih Tahun 2022 terdiri dari :

1	Kas di Kas Daerah	Rp14.556.240.877,49	
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp5.167.900,00	
3	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp196.801.480,19	
4	Kas yang dibatasi penggunaannya	Rp0,00	
5	Kas di Bendahara FKTP	Rp262.865.775,37	
6	Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah	Rp199.220.075,76	+
7	Jumlah (1 s/d 6)		Rp 15.220.296.108,81
8	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		Rp 2.287.056.274,00
9	Saldo Anggaran Lebih Tahun 2022 (7 – 8)		Rp12.933.239.834,81



C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

Struktur Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Tahun 2022 mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, beberapa Perangkat daerah yang mengalami Perubahan antara lain :

1. Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan : Perangkat Daerah ini merupakan pemekaran dari urusan Pekerjaan Umum yaitu urusan kebinamargaan dan juga melaksana urusan Perhubungan yang tadi merupakan satu SKPD tersendiri.
2. Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang : Perangkat daerah ini merupakan Pemekaran dari urusan Pekerjaan umum yaitu urusan Sumber Daya Air, Kecipta karyaan dan Tata Ruang
3. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan : Perangkat Daerah ini merupakan Penggabungan urusan lingkungan hidup, kebersihan, Kawasan permukiman, perumahan rakyat dan Pertanahan.
4. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM : Perangkat daerah ini merupakan penggabungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan urusan Koperasi dan UKM yang berasal dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang merupakan pemekaran dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan pemekaran dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah khusus urusan Pengelolaan Keuangan daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Badan Pendapatan Daerah merupakan pemekaran dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah khusus urusan penanganan Pendapatan Daerah khusus Pendapatan Asli Daerah sekaligus menjadi Koordinator Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Tentu perubahan struktur organisasi tersebut berpengaruh terhadap penyajian aset tetap dan aset persediaan karena terjadi mutasi masuk dan mutasi keluar.

1. Aset

a. Aset Lancar

1) Kas di Kas Daerah	31 Des 2022	31 Des 2021
	Rp14.556.240.877,49	Rp7.186.468.649,34

Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Per 31 Desember 2022 pada PT. Bank NTT Cabang Labuan Bajo, PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pembantu Labuan Bajo dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Labuan Bajo. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.556.240.877,49 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.186.468.649,34. Rincian Kas Daerah di Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 pada 4 Rekening BUD adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 1 Rincian Saldo Kas di Kas Daerah per Rekening

No		Uraian	per 31 Desember 2022	per 31 Desember 2021
A.	Saldo Menurut Rekening Koran			
1	Rekening pada Bank NTT			
1.1	025.01.04000002-2	Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat	10.614.733.102,41	3.137.828.227,41
1.2	025.01.04000003-4	Rekening Penerimaan Daerah (Rekening Penampung PAD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat)	12.336.540.541,72	3.849.233.711,93
2	Rekening pada BRI			
2.1	1112-01-000087-30-5	Rekening Penerima Khusus Penampung BPHTB Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat	390.731,00	2.924.559,00
3	Rekening pada BNI			
3.1	0822564724	Rekening Penerimaan Pajak dan Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	991.756.021,00	196.482.151,00
Total Saldo Menurut Rekening Koran			23.943.420.396,13	7.186.468.649,34
B.	Rekonsiliasi Bank			
1	Tambah			
	Setoran dalam perjalanan pada Rekening Bank NTT 025.01. 04000003-4		152.735.241,36	0,00
2	Kurang			
	SP2D dalam perjalanan pada Rekening Bank NTT 025.01. 04000002-2		9.539.914.760,00	0,00
Saldo Kas di Kas Daerah Setelah Rekonsiliasi			14.556.240.877,49	7.186.468.649,34

1. Pada PT. Bank NTT Cabang Labuan Bajo, terdapat 2 Rekening BUD, yaitu:

- a. Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan Nomor Rekening: 025.01.04.000002-2 pada Bank NTT Cabang Labuan Bajo merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi Bendahara Umum Daerah yang meliputi penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta pengeluaran atas belanja daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 900.954/PPKD/16/III/2019 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Saldo Akhir Bank pada rekening 025.01.04.000002-2 sebesar Rp10.614.733.102,41 dikurangi dengan SP2D-LS beredar senilai Rp9.539.914.760,00, sehingga Saldo Kas di Kas Daerah pada Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan Nomor Rekening: 025.01.04.000002-2 adalah senilai Rp1.074.818.342,41.

Pada Tahun 2022 terdapat SP2D dalam perjalanan sebesar Rp9.539.914.760,00 terdiri dari:

- a. Tagihan atas biaya termin III untuk pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Labuan Bajo I PT Sentral Multikon Indi SP2D Nomor 6266/LS.BJ/XII/2022 **6.710.323.134,00**
- b. Penyetoran PFK sesuai SP2D Nomor :6255/NA/XII/2022 atas

PPH Ps. 21	1.320.000,00
PPH Ps. 22	10.124.006,00
PPH Ps. 4	140.294.130,00

867.712.173,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

PPn Pusat	715.974.037,00
c. Penyetoran PFK sesuai SP2D Nomor :6275/NA/XII/2022 atas	1.961.879.453,00
PPh Ps. 22	5.571.623,00
PPh Ps. 4	348.794.534,00
PPn Pusat	1.607.513.296,00
TOTAL SP2D Dalam Perjalanan (a+b+c)	9.539.914.760,00

SP2D Beredar tersebut telah diungkapkan dalam Rekonsiliasi Bank. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah menerbitkan SP2D Beredar tersebut dan sudah dicatat sebagai pengeluaran dalam BKU tetapi belum dilakukan pembukuan oleh Bank NTT. Hal tersebut dikarenakan pencairan SP2D melebihi jam operasional Bank, sehingga baru diproses oleh Bank NTT pada hari kerja berikutnya yaitu pada tanggal 2 dan 3 Januari 2023. Rincian lebih lanjut atas saldo Kas di Kas Daerah disajikan pada **Lampiran 5**

- b. Rekening Penerimaan Daerah (Rekening Penampung PAD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat) dengan Nomor Rekening: 025.01.04.000003-4, merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk penempatan dana Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, yang meliputi transaksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat termasuk di dalamnya yaitu untuk menampung pendapatan jasa giro yang di-*autodebet*-kan dari Rekening Kas Umum Daerah dan dari seluruh Rekening Giro Bendahara Pengeluaran OPD yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 900.954/PPKD/16/III/2019 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Saldo Akhir Bank pada rekening 025.01.04.000003-4 sebesar Rp12.336.540.541,72 dan Setoran dalam perjalanan PAD berdasarkan STS bulan Desember 2022 sebesar Rp152.735.241,36.
2. Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pembantu Labuan Bajo terdapat 1 Rekening Giro, yaitu Rekening Penerimaan Khusus Penampung BPHTB Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan Nomor Rekening : 1112-01-000087-30-5 merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk menampung Pendapatan Asli Daerah berupa pendapatan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dan Jasa Giro yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 900.954/PPKD/16/III/2020 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Saldo Akhir Bank pada rekening 00001112-01-000087-30-5 sebesar Rp390.731,00.
3. Pada Tahun 2020 Pemerintah Manggarai membuka rekening Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada PT. Bank Negara



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Indonesia (BNI) Cabang Labuan Bajo dengan nomor rekening : 0822564724, pembukaan Rekening Kas Daerah ini digunakan untuk menampung Pendapatan Asli Daerah berupa pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Jasa Giro yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomot 900.954/PPKD/23/V/2020 tentang Penetapan Rekening Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Manggarai Barat. Saldo Akhir Bank pada rekening 0822564724 sebesar Rp991.756.021,00.

4. Pada Tahun 2022 terdapat SP2D dalam perjalanan sebesar Rp9.539.914.760,00 terdiri dari:

a.	Tagihan atas biaya termin III untuk pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Labuan Bajo I PT Sentral Multikon Indi SP2D Nomor 6266/LS.BJ/XII/2022	6.710.323.134,00
b.	Penyetoran PFK sesuai SP2D Nomor :6255/NA/XII/2022 atas	867.712.173,00
	PPh Ps. 21	1.320.000,00
	PPh Ps. 22	10.124.006,00
	PPh Ps. 4	140.294.130,00
	PPn Pusat	715.974.037,00
c.	Penyetoran PFK sesuai SP2D Nomor :6275/NA/XII/2022 atas	1.961.879.453,00
	PPh Ps. 22	5.571.623,00
	PPh Ps. 4	348.794.534,00
	PPn Pusat	1.607.513.296,00
TOTAL SP2D Dalam Perjalanan (a+b+c)		9.539.914.760,00

SP2D Beredar tersebut telah diungkapkan dalam Rekonsiliasi Bank. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah menerbitkan SP2D Beredar tersebut dan sudah dicatat sebagai pengeluaran dalam BKU tetapi belum dilakukan pembukuan oleh Bank NTT. Hal tersebut dikarenakan pencairan SP2D melebihi jam operasional Bank, sehingga baru diproses oleh Bank NTT pada hari kerja berikutnya yaitu pada tanggal 2 dan 3 Januari 2023. Rincian lebih lanjut atas saldo Kas di Kas Daerah disajikan pada **Lampiran 5**

Sedangkan nilai saldo akhir tercatat pada masing-masing rekening kas daerah per 31 Desember 2021 dalam pembukuan Bendahara Umum Daerah setelah dilakukan rekonsiliasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Rincian Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021

No	Nomor Rekening Bank	Nama Rekening	Bank	Saldo per 31 Desember 2021 setelah Rekonsiliasi
1	025.01.04.000002-2	Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat	Bank NTT Cab. Labuan Bajo	3.137.828.227,41
2	025.01.04.000003-4	Rekening Penerimaan Daerah (Rekening Penampung PAD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat)	Bank NTT Cab. Labuan Bajo	3.849.233.711,93
3	1112-01-000087-30-5	Rekening Penerimaan Khusus Penampung BPHTB Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat	BRI KCP Labuan Bajo	2.924.559,00
4	0822564724	Penerimaan Pajak dan Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	BNI KCP Labuan Bajo	196.482.151,00
Jumlah				7.186.468.649,34



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Nilai saldo akhir per 31 Desember 2021 setelah rekonsiliasi pada masing-masing rekening bank tersebut digunakan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai saldo awal dalam melakukan Penatausahaan Kas Tahun 2022 pada masing-masing buku bantu kas daerah.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Des 2022	31 Des 2021
	Rp5.167.900,00	Rp0,00

Pada Tahun 2022 terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp5.167.900,00 yang merupakan sisa kas di bendahara pengeluaran Kecamatan Sano Nggoang Tahun 2022 yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan atas nilai sebesar Rp5.167.900,00 telah disetor ke RKUD dengan STS Nomor 05/STS-UP/I/2023 tanggal 06 Januari 2023. Sedangkan pada Tahun 2021 tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Rincian lebih lanjut atas saldo Kas Pengeluaran disajikan pada **Lampiran 6 dan 7**

3) Kas di Bendahara Penerimaan	31 Des 2022	31 Des 2021
	Rp196.801.480,19	Rp392.513.405,32

Jumlah sebesar Rp196.801.480,19 merupakan Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2022 yang terdapat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp196.800.000,00 dan Kas Bendahara Penerimaan dari Pendapatan Bunga Jasa giro di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah sebesar Rp1.480,19. Saldo kas bendahara penerimaan tahun 2022 sebesar Rp196.801.480,19 telah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan periode bulan Januari 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp196.800.000,00 telah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 03 Januari 2023 berdasarkan STS Nomor: 001/STS/I/2023 sebesar Rp25.100.000,00 dan STS Nomor 02/STS/I/2023 sebesar Rp171.700.000,00 pada tanggal 04 Januari 2023; dan
2. Kas Bendahara Penerimaan dari Pendapatan Bunga Jasa giro di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah sebesar Rp1.480,19 telah disetor pada tanggal 19 Januari 2023 dengan STS Nomor Jasa Giro/STS/XII/2022

Sedangkan jumlah sebesar Rp392.513.405,32 merupakan Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2021 yang terdapat di Dinas Kesehatan sebesar Rp280.914.500,00, RSUD Komodo sebesar Rp11.600.036,00, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp57.010.000,00 dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp25.360.000,00 dan Kas Bendahara Penerimaan dari Pendapatan Bunga Tabungan Dana BOS sebesar Rp17.628.869,32. Atas saldo kas bendahara penerimaan Tahun 2021 seluruhnya telah disetor pada tahun 2022. Daftar rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada **Lampiran 9**



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	SALDO AWAL per 1 Jan 2022	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR per 31 Desember 2022
025.01.05.000215-5	Puskesmas Orong KJKN	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	111.570,00	493.099.905,00	493.210.517,00	958,00
025.01.05.000220-9	Puskesmas Golowelu KJKN	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	0,00	630.293.550,00	611.985.418,00	18.308.132,00
025.01.05.000218-1	Puskesmas Ranggu KJKN	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	28.861.852,00	304.611.923,00	333.440.356,00	33.419,00
025.01.05.000221-1	Puskesmas Tentang KJKN	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	27.693.851,00	550.067.349,00	529.203.688,00	48.557.512,00
025.01.05.000212-1	Puskesmas Pacar KJKN	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	165.408.188,00	630.997.562,00	796.405.143,00	607,00
025.01.05.000209-1	Puskesmas Bari KJKN	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	40.305.969,00	427.411.731,00	430.573.011,00	37.144.689,00
025.01.05.000219-2	Puskesmas Rego KJKN	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	95.734,00	366.226.466,00	366.311.332,00	10.868,00
025.01.05.000214-3	Puskesmas Terang KJKN	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	19.910.993,00	725.134.957,00	744.771.773,00	274.177,00
025.01.05.000370-6	Puskesmas Waning	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	0,00	293.752.700,00	271.556.269,00	22.196.431,00
025.01.05.000369-1	Puskesmas Nanga Terang	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	36.442.204,00	185.936.496,00	222.311.467,00	67.233,00
025.01.05.000368-8	Puskesmas Wae Pitak	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	33.685.984,00	203.179.291,00	236.865.275,00	0,00
JUMLAH			450.031.592,17	12.059.903.058,00	12.247.068.874,80	262.865.775,37

Sejak tahun 2015 rekening JKN tidak dikelompokkan lagi sebagai rekening yang berada di bawah pengelolaan Bendahara Umum Daerah dan disajikan di Neraca pada akun Kas JKN. Tidak terdapat penambahan jumlah rekening JKN pada Tahun 2022. Kas JKN merupakan Kas Dana Kapitasi JKN yang berada pada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing Puskesmas/FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang bersumber dari saldo awal ditambah pendapatan dan dikurangi belanja. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas/FKTP diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Kepada SKPD Dinas Kesehatan melalui PPKD selaku BUD. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP membuka rekening Dana Kapitasi JKN yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pembayaran dana kapitasi JKN dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada setiap



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Puskesmas/FKTP dan diakui sebagai pendapatan dan belanja setelah diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh PPKD selaku BUD.

Sedangkan Saldo Kas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2021 sebesar Rp450.031.592,17 merupakan total seluruh saldo rekening Kas Jaminan Kesehatan Nasional yang terdapat di 21 (dua puluh satu) Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Adapun rincian saldo kas JKN per 31 Desember 2021 pada masing-masing Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Rincian Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2021

NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	SALDO AWAL per 1 Jan 2021	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR per 31 Desember 2021
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
025.01.05.000222-2	Puskesmas Labuan Bajo KJKN	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	143.583.547,73	2.137.035.195,27	2.280.618.743,00	0,00
025.01.05.000213-0	Puskesmas Benteng KJKN	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	72.200.142,00	477.168.450,00	549.368.592,00	0,00
025.01.05.000214-3	Puskesmas Terang KJKN	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	118.347.477,00	874.876.700,00	973.313.184,00	19.910.993,00
025.01.05.000208-8	Puskesmas Rekas KJKN	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	37.808.332,13	356.552.939,75	393.768.964,00	592.307,88
025.01.05.000.225-8	PUSKESMAS Warsawe	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	0,00	326.847.525,00	326.847.525,00	0,00
025.01.05.000216-7	Puskesmas Werang KJKN	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	108.638.858,00	750.241.700,00	841.070.062,00	17.810.496,00
025.01.05.000217-9	Puskesmas Waenakeng KJKN	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	106.624.037,57	1.285.221.752,72	1.391.746.083,00	99.707,29
025.01.05.000.226-1	PUSKESMAS Wae Kanta	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	62.905.136,00	432.232.200,00	454.994.178,00	40.143.158,00
025.01.05.000210-6	Puskesmas Nangaili KJKN	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	8.609.807,00	495.998.950,00	504.608.757,00	0,00
025.01.05.000.223-4	PUSKESMAS Lengkong Cepang KJKN	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	149.969.897,00	622.903.700,00	734.065.881,00	38.807.716,00
025.01.05.000215-5	Puskesmas Orong KJKN	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	41.408.430,00	552.164.475,00	593.461.335,00	111.570,00
025.01.05.000211-8	Puskesmas Datak KJKN	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	50.074.712,00	456.165.975,00	506.178.825,00	61.862,00
025.01.05.000220-9	Puskesmas Golowelu KJKN	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	80.902.239,00	636.654.000,00	717.556.239,00	0,00
025.01.05.000218-1	Puskesmas Ranggu KJKN	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	93.733.559,00	415.045.825,00	479.917.532,00	28.861.852,00
025.01.05.000221-1	Puskesmas Tentang KJKN	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	71.784.026,00	565.731.200,00	609.821.375,00	27.693.851,00
025.01.05.000212-1	Puskesmas Pacar KJKN	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	164.005.058,00	907.046.450,00	905.643.320,00	165.408.188,00
025.01.05.000209-1	Puskesmas Bari KJKN	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	68.922.424,00	555.715.200,00	584.331.655,00	40.305.969,00
025.01.05.000219-2	Puskesmas Rego KJKN	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	9.084.782,00	281.170.200,00	290.159.248,00	95.734,00
025.01.05.000370-6	Puskesmas Waning	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	14.818.898,00	247.315.200,00	262.134.098,00	0,00
025.01.05.000368-8	Puskesmas Wae Pitak	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	18.183.160,00	220.226.700,00	204.723.876,00	33.685.984,00
025.01.05.000369-1	Puskesmas Nanga Terang	Bank NTT Cabang Labuan Bajo	21.412.960,00	231.841.200,00	216.811.956,00	36.442.204,00
JUMLAH			1.443.017.482,43	12.828.155.537,74	13.821.141.428,00	450.031.592,17

5) Kas Dana BOS

31 Des 2022
Rp199.220.075,76

31 Des 2021
Rp1.110.657.121,08

Jumlah sebesar Rp199.220.075,76 merupakan saldo akhir kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terdapat di Satuan Pendidikan Negeri yang terdapat di Kabupaten Manggarai Barat. Adapun jumlah Satuan Pendidikan Negeri di Kabupaten Manggarai Barat yang menerima dan mengelola Dana Bantuan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Operasional Sekolah pada Tahun 2022 sebanyak 255 sekolah, dengan rincian sebagai berikut :

1	Sekolah Dasar Negeri	176
2	Sekolah Menengah Pertama Negeri	79

Saldo Kas Dana BOS sebesar Rp199.220.075,76 terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2022 sebesar Rp191.405.650,76 dan Utang PFK BOS sebesar Rp7.814.425,00. Sisa utang PFK sebesar Rp7.814.425,00 merupakan sisa pajak yang harus disetor ke kas negara yang terdiri dari PPN sebesar Rp6.570.387,00, PPh 21 sebesar Rp395.000,00, dan PPh 23 sebesar Rp849.038,00.

Sedangkan Saldo Kas Dana BOS Tahun 2021 sebesar Rp1.110.657.121,08 terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2021 sebesar Rp863.266.032,81 dan Utang PFK BOS sebesar Rp247.391.088,27. Sisa utang PFK sebesar Rp247.391.088,27 merupakan sisa pajak yang harus disetor ke kas negara yang terdiri dari PPN sebesar Rp195.355.879,27, PPh 21 sebesar Rp19.824.338,00, PPh 22 sebesar Rp761.964,00 dan PPh 23 sebesar Rp31.448.907,00.

Atas Rincian saldo akhir Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2022 disajikan pada **Lampiran 9**

6) Kas yang dibatasi penggunaannya	31 Des 2022	31 Des 2021
	Rp 0,00	Rp135.252.000,00

Saldo Kas yang dibatasi penggunaannya pada Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp135.252.000,00. Saldo Kas yang dibatasi penggunaannya pada Tahun 2021 sebesar Rp135.252.000,00 merupakan Kas di SMPN 4 Lembor yang belum dapat dipastikan/dijelaskan sumber pendanaan atas Kas tersebut, dimana atas Kas tersebut sudah disetor Ke RKUD Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 01 Desember 2022 dengan STS Nomor 596/STS/XII/2022.

7) Piutang Pendapatan	31 Des 2022	31 Des 2021
	Rp70.607.800.808,23	Rp70.894.098.200,72

Piutang menggambarkan hak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terhadap penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lain. Saldo piutang per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

a. Piutang Pajak

Piutang Pajak terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan sampai dengan batas tertentu tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah. Saldo Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 sebesar Rp28.454.422.026,23 mengalami kenaikan mencapai Rp1.656.713.856,51 dari piutang pajak Tahun 2021 sebesar Rp26.797.708.169,72 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5 Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Uraian	per 31 Desember 2022	per 31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Pajak Hotel	135.049.757,82	263.112.488,82	-128.062.731,00
2	Pajak Restoran/Rumah Makan	719.141.545,37	986.239.088,86	-267.097.543,49
3	Pajak Hiburan	9.415.850,00	363.120.645,00	-353.704.795,00
4	Pajak Reklame	22.838.715,00	37.386.959,00	-14.548.244,00
5	PBB P2	23.968.855.536,04	21.498.941.988,04	2.469.913.548,00
6	Pajak Bahan Galian Golongan C	3.396.590.000,00	3.648.907.000,00	-252.317.000,00
7	Pajak Parkir	202.530.622,00	0,00	202.530.622,00
	Jumlah	28.454.422.026,23	26.797.708.169,72	1.656.713.856,51

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2022 terdapat pada Badan Pendapatan Daerah termasuk pencatatan Piutang Bahan Galian Golong C yang sebelumnya tercatat di Dinas Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang. Pada Tahun 2022 terdapat perubahan Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) pada lingkup Pemerintah Manggarai Barat dimana terdapat perubahan struktur organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah sehingga terdapat koreksi pengurangan saldo awal atas Pajak Daerah tahun 2022 di Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang (untuk Piutang Bahan Galian Golongan C) dimana saldo pajak Daerah di dua OPD tersebut diatas menjadi Rp0,00 dengan adanya mutasi seluruh saldo pajak daerah pada tahun 2022 ke Badan Pendapatan Daerah. Untuk Piutang Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terdapat koreksi pengurangan saldo awal atas Piutang Pajak Hotel sebesar Rp263.112.488,82, Pajak Restoran/Rumah Makan sebesar Rp986.239.088,86, Pajak Hiburan sebesar Rp363.120.645,00, Pajak Reklame sebesar Rp37.386.959,00, Piutang PBB P2 sebesar Rp21.498.941.988,04 yang dimutasi ke Badan Pendapatan Daerah.

b) Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang

Terdapat koreksi pengurangan saldo awal atas Piutang Pajak Bahan Galian Golongan C sebesar Rp3.648.907.000,00 yang dimutasi ke Badan Pendapatan Daerah.

c) Badan Keuangan Daerah

Terdapat Koreksi Tambah saldo awal Piutang Pajak Daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari Piutang Pajak Hotel sebesar Rp263.112.488,82, Pajak Restoran/Rumah Makan sebesar Rp986.239.088,86, Pajak Hiburan sebesar Rp363.120.645,00, Pajak Reklame sebesar Rp37.386.959,00, Piutang PBB P2 sebesar Rp21.498.941.988,04 dan Koreksi Tambah saldo awal Piutang Pajak Bahan Galian Golongan C sebesar Rp3.648.907.000,00 dari Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang.

- Piutang Pajak Hotel



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Saldo Piutang Pajak Hotel Pada tahun 2022 sebesar Rp135.049.757,82 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp263.112.488,82 ditambah penambahan piutang tahun berjalan sebesar Rp29.799.283,00 dikurangi cicilan pelunasan/penyetoran piutang Pajak Hotel sebesar Rp157.862.014,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat penyetoran atas Piutang Pajak Hotel Tahun 2008, 2010, 2013, 2014 dan tahun 2018 pada Tahun 2022.
- b. Pada Tahun 2022 terdapat cicilan pelunasan atas Piutang Tahun 2012 sebesar Rp400.000,00, Tahun 2019 sebesar Rp140.062.254,00, dan pelunasan Piutang Hotel Tahun 2021 sebesar Rp17.399.760,00.
- c. Terdapat pula penambahan Piutang Pajak Hotel tahun 2022 sebesar Rp29.799.283,00.

- **Piutang Pajak Rumah Makan/ Restoran**

Saldo Piutang Pajak Rumah Makan/ Restoran tahun 2022 sebesar Rp719.141.545,37 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp986.239.088,86 ditambah penambahan piutang tahun berjalan sebesar Rp109.064.864,00 dikurangi cicilan pelunasan/penyetoran piutang Pajak Rumah Makan/Restoran sebesar Rp376.162.407,49 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada Tahun 2022 terdapat cicilan pelunasan Piutang Pajak Rumah Makan/Restoran Tahun 2015 sebesar Rp500.000,00, Tahun 2019 sebesar Rp331.088.827,49 dan Pelunasan Tahun 2021 sebesar Rp44.573.580,00.
- b. Untuk Piutang Pajak Rumah Makan Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, dan 2020 tidak terdapat penyetoran pada tahun 2022.
- c. Terdapat pula penambahan Piutang Pajak Rumah Makan tahun 2022 sebesar Rp109.064.864,00.

- **Piutang Pajak Hiburan**

Yang dikategorikan sebagai pajak hiburan diantaranya adalah tempat karaoke/pub, tempat pijat, spa, tempat permainan *billiard* dan tempat hiburan lainnya. Saldo Piutang Pajak Hiburan Tahun 2022 sebesar Rp9.415.850,00 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp363.120.645,00 ditambah penambahan piutang tahun berjalan sebesar Rp3.217.500,00 dikurangi penyetoran piutang Pajak Hiburan sebesar Rp356.922.295,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat penyetoran Piutang Pajak Hiburan tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2016 pada tahun 2022.
- b. Pada tahun 2022 terdapat cicilan pelunasan Piutang Pajak Hiburan Tahun 2019 sebesar Rp351.006.402,00, dan Pelunasan Piutang Pajak Hiburan Tahun 2021 sebesar Rp5.915.893,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- c. Selain itu terdapat penambahan Piutang Pajak Hiburan tahun 2021 sebesar Rp3.217.500,00.

- **Piutang Pajak Reklame**

Saldo Piutang Pajak Reklame Tahun 2022 sebesar Rp22.838.715,00 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp37.386.959,00 dikurangi penyeteroran piutang Pajak Reklame sebesar Rp27.708.959,00 dan Penambahan piutang reklame tahun 2022 sebesar Rp13.160.715,00, dengan rincian sebagai berikut:

 - a. Untuk Piutang Pajak Reklame Tahun 2008, 2009, 2014, 2015, 2016 dan Tahun 2019 tidak terdapat penyeteroran pada tahun 2021.
 - b. Terdapat Penyeteroran/Pelunasan atas Piutang Reklame Tahun 2021 sebesar Rp27.708.959,00.
 - c. Pada tahun 2022 terdapat penambahan Piutang Pajak Reklame sebesar Rp13.160.715,00.

- **Piutang PBB P2**

Sejak tahun 2014 Piutang PBB P2 menjadi pajak daerah, hal ini menyebabkan KPP Pratama Ruteng mengalihkan penagihan PBB P2 ke Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Saldo Piutang PBB P2 tahun 2022 sebesar Rp23.968.855.536,04 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp21.498.941.988,04 ditambah penambahan Piutang tahun berjalan sebesar Rp4.733.386.897,00 dikurangi total penyeteroran Piutang tahun 2022 sebesar Rp2.263.473.349,00 dengan rincian sebagai berikut:

 - a. Tidak terdapat cicilan pelunasan/penyeteroran atas Piutang pengalihan PBB P2 tahun 2008 s/d 2013 pada tahun 2022.
 - b. Terdapat cicilan pelunasan/penyeteroran atas Piutang PBB P2 tahun 2014 sebesar Rp57.679.711,00.
 - c. Terdapat cicilan pelunasan/penyeteroran atas Piutang PBB P2 tahun 2015 sebesar Rp93.722.743,00.
 - d. Terdapat cicilan pelunasan/penyeteroran atas Piutang PBB P2 tahun 2016 sebesar Rp69.583.627,00.
 - e. Terdapat cicilan pelunasan/penyeteroran atas Piutang PBB P2 tahun 2017 sebesar Rp133.343.650,00.
 - f. Terdapat cicilan pelunasan/penyeteroran atas Piutang PBB P2 tahun 2018 sebesar Rp194.604.867,00.
 - g. Terdapat cicilan pelunasan/penyeteroran piutang PBB P2 Tahun 2019 sebesar Rp226.718.508,00.
 - h. Terdapat cicilan pelunasan/penyeteroran piutang PBB P2 Tahun 2020 sebesar Rp358.456.683,00.
 - i. Terdapat cicilan pelunasan/penyeteroran piutang PBB P2 Tahun 2021 sebesar Rp1.129.363.560,00
 - j. Pada Tahun 2022 terdapat penambahan Piutang PBB P2 sebesar Rp4.733.386.897,00.

- **Piutang Pajak Parkir**



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Selain itu terdapat koreksi saldo awal piutang Pajak Parkir sebesar Rp202.530.622,00 di Badan Pendapatan Daerah yang merupakan Piutang Pajak Parkir di Bandara Komodo.

- **Piutang Pajak Galian Golongan C**

Saldo Pajak Galian C tahun 2022 sebesar Rp3.396.590.000,00 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp3.648.907.000,00 ditambah penambahan Piutang tahun berjalan sebesar Rp1.261.742.000,00 dikurangi total penyetoran Piutang tahun 2022 sebesar Rp1.514.059.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Saldo Piutang Pajak Galian C tahun 2007 s/d tahun 2010 pada tahun 2021 sama dengan saldo Piutang Pajak Galian C Tahun 2020 dimana tidak ada penyetoran atas Piutang tersebut pada tahun 2021. Piutang Galian C termasuk kategori macet sehingga berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat maka penyisihan piutang tidak tertagih Pajak Galian C ditetapkan 100% dari piutang pajak galian C sehingga saldo setelah Penyisihan Piutang sebesar Rp0,00 dan Saldo sebelum Penyisihan Piutang sebesar Rp167.148.000,00.
- b. Pada Tahun 2021 terdapat cicilan pelunasan/penyetoran Piutang Galian Golongan C Tahun 2019 sebesar Rp18.190.000,00 yang terdiri dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan an. Desa Cunca Lolos atas Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa TA. 2019.
- c. Selain itu terdapat pelunasan atas Piutang Pajak Galian Golongan C Tahun 2021 sebesar Rp1.495.869.000,00 dimana masih terdapat saldo atas Piutang Pajak Galian Golongan C Tahun 2021 sebesar Rp1.495.869.000,00 yang terdiri dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan a/n PT. Lestari Nauli Jaya KSO PT. Gunung Sari Indah atas Peningkatan Jalan SP Noa - Golo Welu TA.2020 sebesar Rp845.825.000 dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan a/n PT. Amarta Karya atas pembangunan SPAM Wae Mese II Kapasitas 2x50l/dtk Kabupaten Manggarai Barat TA.2020 & 2021 sebesar Rp1.070.022.000.
- d. Pada Tahun 2022 terdapat penambahan Piutang Galian C di Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.261.742.000,00.

Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan piutang yang dilakukan merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Jumlah sebesar Rp(13.073.744.750,14) dan Rp(9.813.002.254,71) merupakan saldo penyisihan piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 6 Rincian Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Penyisihan Piutang Pajak			
1	Pajak Hotel	-74.505.762,41	-94,798,969.70
2	Pajak Rumah Makan	-338.513.840,69	-288,045,019.72
3	Pajak Hiburan	-6.198.350,00	-93,934,950.50
4	Pajak Reklame	-9.559.000,00	-8,563,500.00
5	PBB P2	-11.947.005.047,04	-9,107,328,314.79
6	Pajak Bahan Galian Golongan C	-697.962.750,00	-220,331,500.00
Jumlah		-13.073.744.750,14	-9.813.002.254,71

Penyisihan Piutang Pajak tahun 2022 terdiri dari:

- a. Penyisihan Piutang Pajak Hotel tahun 2008 sebesar Rp26.380.400,00, tahun 2010 sebesar Rp1.316.000,00, tahun 2012 sebesar Rp2.225.000,00, tahun 2013 sebesar Rp7.060.000,00, dan tahun 2014 sebesar Rp6.779.650,00. Penyisihan Piutang tidak tertagih pajak hotel tahun 2008, tahun 2010, tahun 2012, tahun 2013, dan tahun 2014 termasuk kategori piutang macet berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sehingga penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan 100% dari piutang pajak hotel tahun 2008, tahun 2010, tahun 2012, tahun 2013 tahun 2014.
- b. Penyisihan Piutang Pajak Hotel tahun 2018 sebesar Rp500.000,00 serta Penyisihan Piutang Pajak Hotel 2019 sebesar Rp30.244.712,41. Penambahan tersebut terjadi karena bertambahnya umur Piutang Pajak Hotel tahun 2019 pada tahun 2022 sehingga Penyisihan piutang tidak tertagih juga bertambah sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
- c. Penyisihan Piutang Pajak Rumah Makan tahun 2010 sebesar Rp1.346.000,00, tahun 2011 sebesar Rp5.213.500,00, Pajak Rumah Makan tahun 2012 sebesar Rp235.000,00, tahun 2013 sebesar Rp19.799.500,00, dan tahun 2014 sebesar Rp12.400.000,00. Penyisihan Piutang tidak tertagih Pajak Rumah Makan tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 termasuk kategori piutang macet berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sehingga penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan 100% dari Piutang Pajak Rumah Makan tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013, dan tahun 2014.
- d. Pada Tahun 2022 terdapat penambahan Penyisihan Piutang Pajak Rumah Makan atas Pajak Rumah Makan Tahun 2016 dan Tahun 2019, penambahan tersebut terjadi karena bertambahnya umur Piutang Pajak Rumah Makan tahun 2016 dan tahun 2019 pada tahun 2022 sehingga Penyisihan piutang tidak tertagih juga bertambah sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
- e. Penyisihan Piutang Pajak Hiburan terdiri dari penyisihan Piutang Pajak Hiburan tahun 2010 sebesar Rp1.562.000,00, tahun 2011 sebesar Rp150.000,00, tahun 2012 sebesar Rp2.040.000,00, tahun 2013 sebesar Rp816.350,00, dan tahun 2014 sebesar Rp1.600.000,00. Penyisihan Piutang tidak tertagih pajak Hiburan tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 termasuk kategori piutang macet berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sehingga penyisihan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- piutang tidak tertagih ditetapkan 100% dari piutang pajak Hiburan tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014. Penyisihan Piutang Pajak Hiburan tahun 2016 sebesar Rp30.000,00. Penambahan penyisihan Piutang Pajak Hiburan tahun 2016 dan terjadi karena bertambahnya umur Piutang Pajak Hiburan tahun 2016 pada tahun 2022 sehingga Penyisihan piutang tidak tertagih juga bertambah sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
- f. Penyisihan Piutang Pajak Reklame tahun 2008 sebesar Rp3.355.000,00, tahun 2009 sebesar Rp480.000,00, tahun 2014 sebesar Rp1.616.250,00 dan tahun 2015 sebesar Rp2.116.750,00. Penyisihan Piutang tidak tertagih Pajak Reklame tahun 2008, tahun 2009, tahun 2014 dan tahun 2015 termasuk kategori piutang macet berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sehingga penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan 100% dari piutang Pajak Reklame tahun 2008, tahun 2009, tahun 2014 dan tahun 2015.
- g. Penyisihan Piutang Pajak Reklame tahun 2016 sebesar Rp1.872.000,00 dan tahun 2019 sebesar Rp119.000,00. Penambahan saldo Penyisihan Piutang Pajak Hiburan terjadi karena bertambahnya umur Piutang Pajak Hiburan tahun 2016 dan tahun 2019 pada tahun 2022 sehingga Penyisihan piutang tidak tertagih juga bertambah sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
- h. Saldo Penyisihan Piutang PBB per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.947.005.047,04 terdiri dari: Penyisihan Piutang pengalihan PBB P2 tahun 2008 s/d tahun 2013 sebesar Rp53.818.651,00, penyisihan piutang pengalihan PBB P2 tahun 2014 sebesar Rp1.154.364.906,64, penyisihan Piutang PBB tahun 2015 sebesar Rp1.185.795.601,40, penyisihan Piutang PBB tahun 2016 sebesar Rp1.298.411.512,00, penyisihan Piutang PBB tahun 2017 sebesar Rp1.329.801.388,00, penyisihan Piutang PBB tahun 2018 sebesar Rp3.314.130.534,00, penyisihan Piutang PBB tahun 2019 sebesar Rp1.771.791.885,00, penyisihan piutang PBB tahun 2020 sebesar Rp944.249.084,00 dan penyisihan piutang PBB tahun 2021 sebesar Rp894.641.485,00. Penyisihan Piutang tidak tertagih Pajak PBB P2 tahun 2008 s/d tahun 2018 termasuk kategori piutang macet berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sehingga penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan 100% dari Pajak PBB P2 tahun 2008 s.d. tahun 2018.
- i. Untuk Saldo Penyisihan Piutang Bahan Galian Golongan C tahun 2022 sebesar Rp697.962.750,00 yang terdiri dari Penyisihan Piutang Bahan Galian Golongan C Tahun 2007 s/d 2010 sebesar Rp167.148.000,00, Penyisihan Piutang Bahan Galian Golongan C Tahun 2017 sebesar Rp45.419.000,00, penambahan saldo Penyisihan Piutang Bahan Galian Golongan C Tahun 2018 sebesar Rp6.434.000,00, dan penyisihan Piutang Galian golongan C Tahun 2021 sebesar Rp478.961.750,00. Penyisihan Piutang Bahan Galian Golongan C Tahun 2007 s/d 2010 dan Piutang Bahan Galian Golongan C Tahun 2017 dan 2018 tidak tertagih termasuk kategori piutang macet berdasarkan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, sehingga penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan 100% dari Piutang Bahan Galian Golongan C.

b. Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 sebesar Rp2.481.114.593,00 mengalami penurunan sebesar Rp205.477.700,00 dari saldo Piutang Retribusi Tahun 2021 sebesar Rp2.686.592.293,00. Pada Tahun 2022 terdapat perubahan Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) pada Lingkup Pemerintah Manggarai Barat dimana terdapat perubahan struktur organisasi pada Dinas Perhubungan menjadi Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan sehingga terdapat koreksi pengurangan saldo awal saldo awal atas Retibusi Daerah tahun 2022 di Dinas Perhubungan dan dimutasi ke Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan. Piutang Retribusi rincian sebagai berikut:

Tabel 7 Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Uraian	per 31 Desember 2022	per 31 Desember 2021
A	Badan Keuangan dan Aset Daerah	207.883.100,00	135.000.000,00
1	Retribusi Sewa Grosir TA 2011	70.000.000,00	70.000.000,00
2	Retribusi Sewa Grosir TA 2012	65.000.000,00	65.000.000,00
3	Retribusi sewa tanah pemda	72.883.100,00	0,00
B	Dinas Perhubungan	0,00	72.750.000,00
1	Jasa Angkutan Perintis Pedesaan TA 2012	0,00	21.000.000,00
2	Jasa Angkutan Perintis Pedesaan TA 2013	0,00	6.750.000,00
3	Jasa Angkutan Perintis Pedesaan TA 2014	0,00	45.000.000,00
C	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan	99.645.000,00	26.895.000,00
1	Piutang Pihak Ketiga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas Sewa Pakai Alat Berat (alat Vibro) untuk pekerjaan peningkatan jln depan kantor Bappeda-Gg Sipri Rambu Kec.Komodo dengan nomor kontrak : PU.760/TLT-ALT-BRT/1557/XII/2017 Tanggal 04 Desember 2017 an. CV.PIONERA	2.106.000,00	2.106.000,00
2	Piutang Pihak Ketiga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas Sewa Pakai Alat Berat (alat Vibro) untuk pekerjaan peningkatan Jalan pusut-wae wako-pampa Kec.Lembor dengan nomor kontrak : PU.760/TLT-ALT-BRT/924/IV/2017 Tanggal 27 Oktober 2017 an. CV. WENAN STAR	19.758.000,00	19.758.000,00
3	Piutang Pihak Ketiga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas Sewa Pakai Alat Berat (alat Vibro) untuk pekerjaan peningkatan Jalan Gorontalo-biara OFM Kec.Komodo dengan nomor kontrak : PU.760/TLT-ALT-BRT/1134/XI/2017 Tanggal 30 November 2017 an. CV. SONYA KARYA	2.896.000,00	2.896.000,00
4	Piutang Pihak Ketiga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas Sewa Pakai Alat Berat (Bachoe Loader) untuk pekerjaan peningkatan Jalan Gorontalo-biara OFM Kec.Komodo dengan nomor kontrak : PU.760/TLT-ALT-BRT/934/X/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 an. CV. SONYA KARYA	2.135.000,00	2.135.000,00
5	Jasa Angkutan Perintis Pedesaan TA 2012	21.000.000,00	0,00
6	Jasa Angkutan Perintis Pedesaan TA 2013	6.750.000,00	0,00
7	Jasa Angkutan Perintis Pedesaan TA 2014	45.000.000,00	0,00
D	RSUD Komodo	1.049.060.400,00	1.406.553.200,00
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Komodo atas Klaim BPJS Bulan Agustus Tahap II Tahun 2021	0,00	73.168.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	per 31 Desember 2022	per 31 Desember 2021
2	Piutang Klaim Covid 19 pada RSUD Komodo Ke BPJS Oktober II Tahun 2021	0,00	373.944.200,00
3	Piutang Klaim Covid 19 pada RSUD Komodo Ke BPJS November Tahun 2021	0,00	191.889.700,00
4	Piutang Klaim Covid 19 pada RSUD Komodo Ke BPJS Oktober II Tahun 2021 dan November II Tahun 2021	0,00	640.479.100,00
5	Piutang Klaim Covid 19 pada RSUD Komodo Ke BPJS Desember tahun 2021	0,00	127.072.200,00
6	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Komodo atas Klaim BPJS Bulan November Tahun 2022	1.049.060.400,00	0,00
E	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	788.606.093,00	793.109.093,00
1	Retribusi Pasar TA 2008	11.800.202,00	11.800.202,00
2	Retribusi Pasar TA 2009	6.368.988,00	6.368.988,00
3	Retribusi Pasar TA 2010	20.348.298,00	20.348.298,00
4	Retribusi Pasar TA 2011	3.034.650,00	3.034.650,00
5	Retribusi Pasar TA 2012	19.477.020,00	19.477.020,00
6	Retribusi Pasar TA 2013	4.662.650,00	4.662.650,00
7	Retribusi Pasar TA 2014	11.982.475,00	11.982.475,00
8	Retribusi Pasar TA 2016	52.574.400,00	52.574.400,00
9	Retribusi Pasar TA 2017	7.671.400,00	7.671.400,00
10	Retribusi Pasar TA 2018	114.816.250,00	114.816.250,00
11	Retribusi Pasar TA 2019	406.622.760,00	406.622.760,00
12	Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol	124.250.000,00	133.750.000,00
13	Retribusi Pasar TA 2022	4.997.000,00	0,00
F	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	39.700.000,00	44.700.000,00
1	Piutang Retribusi Tempat Pariwisata Pariwisata Pulau Komodo (Loh Liang) pada masa tugas pemungut tanggal 11 sampai dengan 20 Desember 2019 an. PT. Flores Trail (Emil Bei)	39.700.000,00	44.700.000,00
G	Dinas Ketaahanan Pangan dan Perikanan	296.220.000,00	207.585.000,00
1	Piutang atas Retribusi sewa kios di Tempat Pelelangan Ikan Tahun 2020	1.625.000,00	5.625.000,00
2	Piutang atas Retribusi Lapak Penjualan Ikan segar dan Ikan Kering di Tempat Pelelangan Ikan Tahun 2020	13.500.000,00	13.500.000,00
3	Piutang atas Retribusi sewa kios di Tempat Pelelangan Ikan Tahun 2021	18.900.000,00	156.600.000,00
4	Piutang atas Retribusi Lapak Penjualan Ikan segar dan Ikan Kering di Tempat Pelelangan Ikan Tahun 2021	9.000.000,00	31.860.000,00
5	Piutang atas Retribusi sewa kios di Tempat Pelelangan Ikan 2022	206.850.000,00	0,00
6	Piutang atas Retribusi Lapak Penjualan Ikan segar (Lapak B) di Tempat Pelelangan Ikan 2022	21.235.000,00	0,00
7	Piutang atas Retribusi Lapak Penjualan Ikan Kering (Lapak A) di Tempat Pelelangan Ikan 2022	25.110.000,00	0,00
	Jumlah	2.481.114.593,00	2.686.592.293,00

Saldo Piutang Retribusi tahun 2022 dan tahun 2021 yang tercatat di Neraca merupakan Saldo Piutang Retribusi sebelum Penyisihan Piutang. Untuk Piutang Retribusi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

- Piutang Retribusi Pasar

Saldo Piutang Retribusi Pasar tahun 2022 sebesar Rp664.356.093,00 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp659.359.093,00 ditambah Piutang Tahun 2022 sebesar Rp4.997.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2022 tidak terdapat penyeteroran Piutang Retribusi Pasar Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 dan Tahun 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- b. Pada Tahun 2022 terdapat penambahan Piutang Retribusi Pasar Tahun 2022 sebesar Rp4.997.000,00.
- Piutang Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol
Pada Tahun 2019 terdapat penambahan piutang di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol atas kurang bayar Pendapatan Retribusi senilai Rp141.2500.00 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Kepatuhan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 71/LHP/XIX.KUP/12/2019 tanggal 9 Desember 2019. Dari Jumlah tersebut terdapat penyetoran pada tahun 2020 sebesar Rp7.500.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terdapat penyetoran atas Piutang Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol sebesar Rp9.500.000,00 sehingga Saldo Piutang Piutang Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol Tahun 2022 sebesar Rp124.250.000,00 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp133.750.000,00 dikurangi cicilan penyetoran Piutang Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol sebesar Rp9.500.000,00.

b) Badan Keuangan dan Aset Daerah

Saldo piutang Retribusi Sewa Grosir didasarkan pada Surat Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang diwakili Plt. Sekretaris Daerah dan CV. Adikara Putra Nomor:900/PPKAD/316.c/IV/2011 dan Nomor 038/CV.AP/IV/2011 tanggal 01 April 2011 tentang Sewa Bangunan Rumah Toko (Ruko) Labuan Bajo Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp175.000.000,00 pertahun selama 2 (dua) tahun yaitu Tahun 2011 dan 2012 dimana Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 masih terdapat Piutang sebesar Rp135.000.000,00 dimana selama tahun 2022 tidak terdapat penyetoran atas piutang tersebut.

c) Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan

Piutang Retribusi Jasa Angkutan Perintis Pedesaan

Pada Tahun 2022 terdapat mutasi masuk Saldo Piutang Saldo Piutang Retribusi Jasa Angkutan Perintis Pedesaan tahun 2022 sebesar Rp72.750.000,00 karena adanya penyesuaian Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Saldo Piutang Retribusi Jasa Angkutan Perintis Pedesaan tahun 2022 disajikan sebesar Rp72.750.000,00 yang merupakan saldo Piutang Retribusi Jasa Angkutan Perintis Pedesaan tahun 2012 s/d 2014. Tidak terdapat penyetoran atas Piutang Retribusi Jasa Angkutan Perintis Pedesaan tahun 2012 s.d. tahun 2014 pada tahun 2022.

Piutang Retribusi Sewa Pakai Alat Berat



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Saldo Piutang Sewa Alat Berat Tahun 2019 sebesar Rp26.895.000,00 dimana tidak terdapat penyetoran atas Piutang Sewa Alat Berat pada tahun 2022 sehingga saldo Piutang Retribusi Sewa Pakai Alat Berat tahun 2021 sama dengan tahun 2022.

d) RSUD Komodo

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pada Tahun 2022 terdapat pelunasan atas saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Tahun 2021 sebesar Rp1.402.703.800,00 dan terdapat koreksi pengurangan pencatatan saldo awal atas Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Komodo atas Klaim BPJS Bulan Agustus Tahap II 2021 sebesar Rp3.849.400,00. Pada Tahun 2022 terdapat pelunasan atas saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari:

- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Komodo atas Klaim BPJS Bulan Agustus Tahap II 2021 sebesar Rp 69.318.600,00.
- Piutang Klaim Covid 19 pada RSUD Komodo Ke BPJS Oktober II Tahun 2021 sebesar Rp373.944.200,00.
- Piutang Klaim Covid 19 pada RSUD Komodo Ke BPJS November Tahun 2021 sebesar Rp191.889.700,00.
- Piutang Klaim Covid 19 pada RSUD Komodo Ke BPJS Oktober II Tahun 2021 dan November II Tahun 2021 sebesar Rp 640.479.100,00.
- Piutang Klaim Covid 19 pada RSUD Komodo Ke BPJS Desember tahun 2021 sebesar Rp127.072.200,00.
- Selain itu terdapat penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada tahun 2022 yang terdiri dari Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Komodo atas Klaim BPJS Bulan November Tahun 2022 sebesar Rp1.049.060.400,00 berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim dari BPJS tanggal 15 Januari 2023.

e) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pada Tahun 2022 terdapat cicilan pelunasan sebesar Rp5.000.000,00 dengan STS Nomor 027/STS/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 yaitu cicilan pelunasan atas Piutang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu Piutang Retribusi Tempat Pariwisata Pulau Komodo (Loh Liang) an. PT. Flores Trail (Emil Bei) sebesar Rp44.700.000,00 berdasarkan Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Nomor: 556.9/07/PARBUD/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 perihal perintah membayar tunggakan retribusi kepada Manager PT. Flores Trail (Emil Bei).

f) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Pada Tahun 2022 terdapat cicilan pelunasan piutang tahun 2021 sebesar Rp164.560.000 yang terdiri dari:

- Piutang atas Retribusi sewa kios di Tempat Pelelangan Ikan 2020 sebesar Rp4.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- Piutang atas Retribusi sewa kios di Tempat Pelelangan Ikan 2021 sebesar Rp137.700.000,00.
- Piutang atas Retribusi Lapak Penjualan Ikan segar dan Ikan Kering di Tempat Pelelangan Ikan 2021 sebesar Rp22.860.000,00.

Pada Tahun 2022 terdapat penambahan piutang di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp253.195.000,00 yang terdiri dari:

- Piutang atas Retribusi sewa kios di Tempat Pelelangan Ikan 2022 sebesar Rp206.850.000,00.
- Piutang atas Retribusi Lapak Penjualan Ikan segar (Lapak B) di Tempat Pelelangan Ikan 2022 sebesar Rp21.235.000,00.
- Piutang atas Retribusi Lapak Penjualan Ikan Kering (Lapak A) di Tempat Pelelangan Ikan 2022 sebesar Rp 25.110.000,00.

Penyisihan Piutang Retribusi

Saldo penyisihan piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari

Tabel 8 Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Penyisihan Piutang Retribusi			
1	Retribusi Angkutan Perintis	-72.750.000,00	-72.750.000,00
2	Retribusi Sewa Grosir	-135.000.000,00	-135.000.000,00
3	Retribusi sewa kios di Tempat Pelelangan Ikan	-5.131.250,00	-1.406.250,00
4	Retribusi Lapak Penjualan Ikan segar dan Ikan Kering di Tempat Pelelangan Ikan	-5.625.000,00	-3.375.000,00
5	Retribusi Pasar	-456.047.713,00	-296.983.898,00
6	Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol	-31.062.500,00	-33.437.500,00
7	Retribusi Sewa Pakai Alat Berat	-26.895.000,00	-26.895.000,00
8	Retribusi Tempat pariwisata	-19.850.000,00	-11.175.000,00
Jumlah		-752.361.463,00	-581.022.648,00

Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2022 terdiri dari:

- a. Saldo akhir penyisihan piutang retribusi pasar Tahun 2021 sebesar Rp456.047.713,00 di Dinas Perdagangan dan Perindustrian dimana terdapat penambahan penyisihan piutang retribusi pasar sebesar Rp159.063.815,00. Penambahan tersebut terjadi karena bertambahnya umur Piutang Pajak Retribusi Pasar tahun 2018 dan tahun 2019 pada tahun 2022 sehingga Penyisihan piutang tidak tertagih juga bertambah sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Untuk penyisihan piutang retribusi pasar tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 dan 2017 merupakan penyisihan piutang tidak tertagih kategori piutang macet berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sehingga penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan 100% dari piutang retribusi pasar.
- b. Penyisihan piutang retribusi grosir pada tahun 2022 sebesar Rp135.000.000,00 di Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Penyisihan Piutang tidak tertagih kategori piutang macet berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sehingga



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan 100% dari piutang retribusi grosir.
- c. Penyisihan Piutang retribusi angkutan perintis pedesaan di Dinas Perhubungan pada tahun 2022 sebesar Rp 72.750.000,00. Penyisihan piutang retribusi angkutan perintis pedesaan tahun 2012, 2013 dan 2014 merupakan penyisihan piutang tidak tertagih kategori piutang macet berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sehingga penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan 100% dari piutang retribusi angkutan perintis pedesaan.
 - d. Terdapat saldo penyisihan piutang retribusi sewa pakai alat berat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2022 sebesar Rp26.895.000,00. Penyisihan piutang tidak tertagih kategori piutang macet berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sehingga penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan 100% dari piutang retribusi angkutan perintis pada tahun 2022.
 - e. Selain terdapat penambahan saldo penyisihan piutang tahun 2022 atas Piutang atas Retribusi sewa di Tempat Pelelangan Ikan sebesar Rp10.756.250,00. Terdapat penambahan penyisihan piutang retribusi sewa di TPI sebesar Rp6.975.000,00, Penambahan tersebut terjadi karena bertambahnya umur Piutang atas Retribusi sewa kios di Tempat Pelelangan Ikan dan Piutang atas Retribusi Lapak Penjualan Ikan segar sehingga Penyisihan piutang tidak tertagih juga bertambah sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
 - f. Terdapat Pengurangan Saldo Penyisihan piutang sebesar Rp2.500.000,00 diakibatkan cicilan pelunasan atas Piutang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu Piutang Retribusi Tempat Pariwisata Pulau Komodo (Loh Liang) an. PT. Flores Trail (Emil Bei) sehingga saldo penyisihan atas piutang retribusi tersebut menjadi sebesar (Rp19.850.000,00).

c. Piutang Transfer

Saldo Piutang Transfer tahun 2022 sebesar Rp5.771.110.810,00 dan tahun 2021 sebesar Rp0,00. Pada Tahun 2021 Piutang Transfer tercatat di piutang lain-lain sehingga saldo piutang transfer tahun 2021 sebesar Rp0,00. Rincian piutang transfer dapat dijelaskan berikut ini:

Tabel 9 Daftar Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

No	Uraian	per 31 Desember 2022	per 31 Desember 2021
	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	5.771.110.810,00	0,00
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2.555.719.360,00	0,00
2	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.589.001.063,00	0,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.626.122.576,00	0,00
4	Pajak Air Permukaan	267.811,00	0,00

Pada Tahun 2022 terdapat penambahan Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi NTT sebesar Rp5.771.110.810,00 berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 131 Tahun 2022 yang terdiri dari piutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.589.001.063,00, Pajak Kendaraan Bermotor



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

sebesar Rp2.555.719.360,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.626.122.576,00 dan Pajak air permukaan sebesar Rp267.811,00.

Pada Tahun 2022 saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Piutang tahun 2021 sebesar Rp6.728.380.021,00 yang terdiri dari saldo piutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak air permukaan, seluruhnya sudah ditransfer Pemerintah Provinsi NTT ke RKUD Kabupaten Manggarai Barat (025 01.04.000002-2) berdasarkan STS Nomor Nomor STS 325/A/IX/2022 dan 089/A/VI/2022, Nomor STS 091/A/VI/2022 dan 325.2/A/IX/2022, Nomor STS 090/A/VI/2022 dan 325.1/A/IX/2022, dan Nomor STS 092/A/VI/2022 dan 325.3/A/IX/2022.

d. Piutang Lain - lain

Saldo Piutang lain-Lain Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 sebesar Rp33.744.915.590,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.664.882.148,00 dari Piutang Lain-Lain Tahun 2021 sebesar Rp41.409.797.738,00, Pada Tahun 2022 terdapat perubahan Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) pada lingkup Pemerintah Manggarai Barat dimana terdapat perubahan struktur organisasi sehingga terdapat koreksi saldo awal berupa mutasi tambah/kurang atas saldo awal piutang lain-lain. Saldo Piutang lain-Lain Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 sebesar Rp33.744.915.590,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10 Daftar Piutang Lain – Lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Uraian	per 31 Desember 2022	per 31 Desember 2021
A	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	0,00	6.728.380.021,00
1	Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	1.560.054.428,00
2	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	1.190.098.141,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	3.969.519.452,00
4	Pajak Air Permukaan	0,00	8.708.000,00
B	Piutang pada Pihak Ketiga	Rp33.744.631.479,00	34.681.417.717,00
1	CV.Wae Metok: Pembangunan Sumur Bor di Pulau Rinca (Dusun Kerora) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	548.500,00	548.500,00
2	Kanisius Urung (Mantan Kepala Desa Tentang) dan Zakarias Baetul (Mantan Ketua Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Kuwus)	66.049.600,00	66.049.600,00
3	CV. Komodo Wisata: Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan berdasarkan SKTJM Nomor 10/MP.TP-TGR/VII/2015 Tanggal 28-07-2015 pada Dinas Pekerjaan Umum	4.475.950,00	4.475.950,00
4	CV. Karya Murni: Piutang atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak Dan Pengaman Pantai di Pulau Mesah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berdasarkan SKTJM Nomor: 15/MP.TP-TGR/IX/2015 Tanggal 29-09-2015	14.940.800,00	14.940.800,00
5	CV. Sam Jaya: Piutang atas Pekerjaan Telford Jalan Lingkungan Desa Tengker - Desa Golo Riwu pada Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari Tagihan Uang Muka sebesar Rp29.744.100,00 dan denda sebesar Rp4.957.350,00	15.701.450,00	15.701.450,00
6	Piutang atas Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dan Tunjangan Komunikasi berdasarkan SKTJM Nomor:	17.870.000,00	17.870.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	per 31 Desember 2022	per 31 Desember 2021
	30/MP.TP-TGR/IX/2015 Tanggal 29-09-2015 (Fransiskus Sukmaniera) pada Sekretariat DPRD		
7	CV.Selviano Karya: Piutang Denda Retribusi Angkutan Perintis berdasarkan SKTJM Nomor: 25/MP.TP-TGR/IX/2015 Tanggal 29-09-2015	133.660.000,00	133.660.000,00
8	Piutang atas Pekerjaan Pembangunan Boardwalk Gili Lawa pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan an. CV. Graha Mandiri Pratama	115.992.406,00	125.992.406,00
9	Piutang Bunga atas Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir yang bersumber dari P3D Penyerahan dari Kab. Manggarai tahun 2004	21.322.500,00	21.322.500,00
10	Piutang Bunga atas Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir yang bersumber dari APBD II Tahun 2005	10.260.000,00	10.260.000,00
11	Piutang Bunga atas Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir yang bersumber dari Perguliran Ulang P3D Tahun 2005	5.290.000,00	5.290.000,00
12	Piutang Bunga atas Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir yang bersumber dari APBD II Tahun 2006	31.370.000,00	31.370.000,00
13	Piutang Bunga atas Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun 2006	3.310.000,00	3.310.000,00
13	Piutang Bunga atas Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir yang bersumber dari APBD II Tahun 2007	28.980.000,00	28.980.000,00
14	Piutang Bunga atas Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir yang bersumber dari Perguliran Ulang Tahun 2008	11.465.000,00	11.465.000,00
15	Piutang Bunga atas Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir yang bersumber dari APBD II Tahun 2011	22.644.500,00	22.644.500,00
16	Piutang Bunga atas Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir (Koperasi) yang bersumber dari APBD II Tahun 2013	8.707.500,00	8.707.500,00
17	Piutang Bunga atas Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir (UKM) yang bersumber dari APBD II Tahun 2013	15.502.500,00	15.502.500,00
18	Piutang atas Paket Pekerjaan Pengadaan pupuk NPK non subsidi, pupuk urea non subsidi, gergaji pangkas, gunting pangkas, pisau okulasi, gunting gala, sensor kecil hypotan an. CV. Gresdi Sejahtera	140.109.176,00	140.109.176,00
19	Piutang Lain atas penetapan sanksi administratif kepada pemilik bangunan Hotel yang melanggar ketentuan pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Pede dan Pantai Wae Cicu di Kecamatan Komodo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 277/KEP/HK/2021	33.076.431.597,00	34.003.217.835,00
C	Piutang Bunga		
	Piutang atas Remunerasi <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	284.111,00	0,00
	Jumlah (A+B)	33.744.915.590,00	41.409.797.738,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pada Pihak Ketiga
Piutang Lain pada Pihak Ketiga terdiri dari:
 - a. Piutang lain sebesar Rp66.049.600,00 an. Kanisius Urung (Mantan Kepala Desa Tentang) dan Zakarias Baetul (Mantan Ketua Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Kuwus) yang timbul sebagai akibat adanya penyelewengan dana PNPM-MPd di Desa Tentang, Kecamatan Kuwus pada Tahun 2011. Sampai dengan tahun 2022 tidak terdapat penysetoran untuk penyelesaian piutang tersebut.
 - b. Pada Tahun 2022 tidak terdapat penysetoran atas Piutang CV Karya Murni berdasarkan SKTJM Nomor: 15/MP.TP-TGR/IX/2015 tanggal 29 September 2015 atas kerugian daerah akibat selisih UMK pembangunan jalan setapak dan pengaman



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- pantai di Pulau Mesah sebesar Rp14.940.800,00 dan Piutang Pihak Ketiga atas pembangunan sumur bor Pulau Rinca Dusun Kerora (CV.Wae Metok) sebesar Rp548.500,00.
- c. Piutang Denda Retribusi angkutan perintis atas pengelola CV.Selviano Karya sebesar Rp133.660.000,00, dimana tidak terdapat penyetoran atas piutang tersebut pada tahun 2022.
- d. Pada Tahun 2022 tidak terdapat penyetoran atas Piutang Lain Atas Kelebihan Pembayaran biaya Perjalanan dinas dan Tunjangan Komunikasi (an. Fransiskus Sukmaniara) sebesar Rp17.870.000,00.
- e. Pada Tahun 2022 tidak terdapat penyetoran atas Piutang pada Dinas Pekerjaan Umum atas denda keterlambatan pekerjaan (CV. Komodo Wisata) berdsarkan SKTJM Nomor 10/MP.TP-TGR/VII/2015 Tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp4.475.950,00.
- f. Pada Tahun 2022 tidak terdapat penyetoran atas Piutang Piutang Pihak Ketiga Pada Dinas Pekerjaan Umum - Pekerjaan Telford Jalan Lingkungan Desa Tengker - Desa Golo Riwu -CV. Sam Jaya sebesar Rp 15.701.450,00.
- g. Pada Tahun 2022 terdapat cicilan pelunasan Piutang atas Pekerjaan Pembangunan Boardwalk Gili Lawa pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan an. CV. Graha Mandiri Pratama sebesar Rp10.000.000,00 (STS Nomor Nomor:026/STS/I/2022) sehingga saldo piutang menjadi sebesar Rp115.992.406,00.
- h. Pada tahun 2021 tidak terdapat penyetoran atas Piutang Bunga Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir yang bersumber dari APBD II dan Perubahan (dari tahun 2004 s/d 2013).
- i. Pada tahun 2021 tidak terdapat penyetoran/cicilan pelunasan atas Piutang lain di Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan yaitu Piutang atas Paket Pekerjaan Pengadaan pupuk NPK non subsidi, pupuk urea non subsidi, gergaji pangkas, gunting pangkas, pisau okulasi, gunting gala, sensor kecil hypotan an. CV. Gresdi Sejahtera sebesar Rp140.109.176,00.
- j. Pada Tahun 2022 terdapat cicilan pelunasan atas Piutang Lain atas penetapan sanksi administratif kepada pemilik bangunan Hotel yang melanggar ketentuan pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Pede dan Pantai Wae Cicu di Kecamatan Komodo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 277/KEP/HK/2021 sebesar Rp926.786.238,00 yang terdiri dari Atlantis Beach Club sebesar Rp146.769.660,00 dan Plataran Komodo sebesar Rp780.106.578,00 sehingga saldo Piutang Lain atas penetapan sanksi administratif kepada pemilik bangunan Hotel sebesar Rp33.076.431.597,00.
- Piutang Bunga
Piutang Bunga senilai Rp284.111,00 untuk mengakui remunerasi atas pengelolaan TDF Bulan Desember 2022 berdasarkan PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility tanggal 3 Maret 2023.

Rincian piutang lebih lanjut, dapat dilihat pada **Lampiran 10**

Penyisihan Piutang Lain - Lain

Saldo penyisihan piutang Lain per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11 Daftar Penyisihan Piutang Lain – Lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Penyisihan Piutang Lain			
1	Piutang pada Dinas Pekerjaan Umum atas denda keterlambatan pekerjaan (CV KOMODO WISATA) berdasarkan SKTJM Nomor 10/MP.TP-TGR/VII/2015 Tgl. 28-07-2015	-4.475.950,00	-4.475.950,00
2	Piutang Pihak Ketiga Pada Dinas Pekerjaan Umum - Pekerjaan Telford Jalan Lingkungan Desa Tengker - Desa Golo Riwu -CV. Sam Jaya	-15.701.450,00	-15.701.450,00
3	Piutang Pihak Ketiga Pada Dinas Pekerjaan Umum Pembangunan Sumur Bor Pulau Rinca (Dusun Kerora) : CV.Wae Metok (Kontraktor Pelaksana)	-548.500,00	-548.500,00
4	Piutang Berdasarkan SKTJM Nomor: 15/MP.TP-TGR/IX/2015 Tgl. 29-09-2015 Atas Kerugian Daerah Akibat Selisih Umk Pembangunan Jalan Setapak Dan Pengaman Pantai Di Pulau Mesah (Cv Karya Murni)	-14.940.800,00	-14.940.800,00
5	Piutang Denda Retribusi angkutan perintis CV.Selviano Karya berdasarkan SKTJM Nomor: 25/MP.TP-TGR/IX/2015 Tgl. 29-09-2015	-133.660.000,00	-133.660.000,00
6	Piutang Kepada Kanisius Urung (Mantan Kepala Desa Tentang) dan Zakarias Baetul (Mantan Ketua unit pengelola kegiatan kecamatan kuwus) - TA.2013	-66.049.600,00	-66.049.600,00
7	Piutang Lain atas penetapan sanksi administratif kepada pemilik bangunan Hotel yang melanggar ketentuan pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Pede dan Pantai Wae Cicu di Kecamatan Komodo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 277/KEP/HK/2021	-8.269.107.899,25	0,00
8	Piutang Bunga atas Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir yang bersumber dari P3D Penyerahan dari Kab. Manggarai tahun 2004	-21.322.500,00	-21.322.500,00
9	Piutang Bunga atas Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir yang bersumber dari APBD II Tahun 2005	-10.260.000,00	-10.260.000,00
10	Piutang Bunga atas Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir yang bersumber dari Perguliran Ulang P3D Tahun 2005	-5.290.000,00	-5.290.000,00
11	Piutang Bunga atas Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir yang bersumber dari APBD II Tahun 2006	-31.370.000,00	-31.370.000,00
12	Piutang Bunga atas Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun 2006	-3.310.000,00	-3.310.000,00
13	Piutang Bunga atas Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir yang bersumber dari APBD II Tahun 2007	-28.980.000,00	-28.980.000,00
14	Piutang Bunga atas Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir yang bersumber dari Perguliran Ulang Tahun 2008	-11.465.000,00	-11.465.000,00
15	Piutang Bunga atas Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir yang bersumber dari APBD II Tahun 2011	-22.644.500,00	-22.644.500,00
16	Piutang Bunga atas Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir (Koperasi) yang bersumber dari APBD II Tahun 2013	-8.707.500,00	-8.707.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
17	Piutang Bunga atas Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir (UKM) yang bersumber dari APBD II Tahun 2013	-15.502.500,00	-15.502.500,00
18	Piutang atas Pekerjaan Pembangunan Boardwalk Gili Lawa pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan an. CV. Graha Mandiri Pratama	-57.996.203,00	-31.498.101,50
19	Piutang Lain Atas Kelebihan Pembayaran biaya Perjalanan dinas dan Tunjangan Komunikasi berdasarkan SKTJM Nomor: 30/MP.TP-TGR/IX/2015 Tgl. 29-09-2015 (Fransiskus Sukmanjara)	-17.870.000,00	-17.870.000,00
20	Piutang atas Paket Pekerjaan Pengadaan pupuk NPK non subsidi, pupuk urea non subsidi, gergaji pangkas, gunting pangkas, pisau okulasi, gunting gala, sensor kecil hypotan an. CV. Gresdi Sejahtera	-35.027.294,00	-35.027.294,00
Jumlah		-8.774.229.696,25	-478.623.695,50

Penyisihan Piutang Lain Tahun 2022 terdiri dari:

- a. Saldo Penyisihan Piutang Denda Retribusi angkutan perintis CV.Selviano Karya berdasarkan SKTJM Nomor: 25/MP.TP-TGR/IX/2015 tanggal 29 September 2015 di Dinas Perhubungan pada tahun 2022 sebesar Rp133.660.000,00. Saldo Penyisihan Piutang Denda Retribusi angkutan perintis Tahun 2022 sebesar Rp133.660.000,00 merupakan Penyisihan Piutang tidak tertagih kategori piutang macet berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sehingga penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan 100% dari piutang Denda Retribusi angkutan perintis.
- b. Pada Tahun 2022 terdapat Penyisihan Piutang lain pada Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang yaitu Penyisihan Piutang Pihak Ketiga Pada Dinas Pekerjaan Umum Pembangunan Sumur Bor Pulau Rinca (Dusun Kerora) : CV.Wae Metok (Kontraktor Pelaksana) sebesar Rp548.500,00 dan Penyisihan Piutang Berdasarkan SKTJM Nomor: 15/MP.TP-TGR/IX/2015 Tanggal 29 September 2015 Atas Kerugian Daerah Akibat Selisih Umk Pembangunan Jalan Setapak Dan Pengaman Pantai Di Pulau Mesah (CV. Karya Murni) sebesar Rp14.940.800,00, sehingga Saldo Penyisihan Piutang lain Tahun 2021 di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan menjadi sebesar Rp15.489.300,00. Penyisihan Piutang tersebut termasuk kategori piutang macet berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sehingga penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan 100% dari pokok piutang.
- c. Terdapat penambahan Saldo Penyisihan Piutang di Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang sebesar Rp8.269.107.899,25 yang merupakan penyisihan piutang atas Piutang Lain atas penetapan sanksi administratif kepada pemilik bangunan Hotel yang melanggar ketentuan pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Pede dan Pantai Wae Cicu di Kecamatan Komodo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 277/KEP/HK/2021.
- d. Penyisihan Piutang pada Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan atas denda keterlambatan pekerjaan (CV. KOMODO WISATA)



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- berdasarkan SKTJM Nomor 10/MP.TP-TGR/VII/2015 Tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp4.475.950,00 dan penyisihan Piutang Pihak Ketiga Pada Dinas Pekerjaan Umum - Pekerjaan Telford Jalan Lingkungan Desa Tengker - Desa Golo Riwu -CV. Sam Jaya sebesar Rp15.701.450,00. Penyisihan Piutang Lain-Lain di Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan seluruhnya sudah termasuk kategori macet berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sehingga penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan 100% dari pokok piutang.
- e. Pada Tahun 2022 saldo penyisihan Piutang lain -piutang Kepada Kanisius Urung (Mantan Kepala Desa Tentang) dan Zakarias Baetul (Mantan Ketua unit pengelola kegiatan kecamatan kuwus) - TA.2013 sebesar Rp66.049.600,00. Penyisihan piutang tidak tertagih sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dimana penyisihan piutang tersebut termasuk kategori piutang macet berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sehingga penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan 100% dari piutang tersebut.
 - f. Penyisihan Piutang Bunga atas Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir yang bersumber dari APBD II tahun 2004 s/d 2008 tahun 2011 dan tahun 2013 termasuk kategori piutang macet sehingga berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan 100% dari piutang tersebut.
 - g. Saldo penyisihan piutang lain pada Sekretariat DPRD pada tahun 2022 sebesar Rp17.870.000,00 merupakan Penyisihan Piutang tidak tertagih kategori piutang macet berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sehingga penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan 100% dari piutang lain di Sekretraiat DPRD.
 - h. Pada tahun 2022 terdapat pengurangan penyisihan piutang yaitu Piutang atas Pekerjaan Pembangunan Boardwalk Gili Lawa pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan an. CV. Graha Mandiri Pratama sebesar Rp5.000.000,00 dan penambahan Penyisihan piutang atas bertambahnya umur piutang sebesar Rp31.498.101,50 sehingga saldo penyisihan piutang atas Pekerjaan Pembangunan Boardwalk Gili Lawa pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan an. CV. Graha Mandiri Pratama per 31 Desember 2022 sebesar Rp57.996.203,00.
 - i. Selain itu terdapat penyisihan Piutang atas Paket Pekerjaan Pengadaan pupuk NPK non subsidi, pupuk urea non subsidi, gergaji pangkas, gunting pangkas, pisau okulasi, gunting gala, sensor kecil hypotan an. CV. Gresdi Sejahtera di Dinas Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan sebesar Rp35.027.294,00.

Rincian penyisihan piutang lebih lanjut, dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

8) Beban Dibayar Dimuka

31 Des 2022

31 Des 2021

Rp125.741.853,33

Rp82.583.333,33



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Jumlah sebesar Rp125.741.853,33 merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah Komodo sebesar Rp47.333.333,33, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp10.000.000,00 dan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp68.408.520,00. Rincian atas saldo Beban Dibayar Dimuka Tahun 2022 pada 2 (dua) OPD tersebut, yaitu:

- Rumah Sakit Umum Daerah Komodo - Sewa Rumah Dinas untuk Dokter Umum dan Dokter Spesialis dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sewa Rumah Dinas Dokter (Nomor: RSUD.K.PKS/160/VII/2022) dengan nilai kontrak sebesar Rp48.000.000,00 dan jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun atau 12 bulan sejak tanggal 01 Juli 2022 s/d 30 Juni 2023. Dari nilai kontrak tersebut, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 terdapat biaya yang dibayar di muka sebesar Rp24.000.000,00 untuk jangka waktu sewa selama 6 (enam) bulan yaitu dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.
 2. Sewa Rumah Dinas Dokter (Nomor: RSUD.K.PKS/168.c/VIII/2022) dengan nilai kontrak sebesar Rp48.000.000,00 dan jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun atau 12 bulan sejak tanggal 03 Agustus 2022 s/d 03 Agustus 2023. Dari nilai kontrak tersebut, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 terdapat biaya yang dibayar di muka sebesar Rp20.000.000,00 untuk jangka waktu sewa selama 5 (lima) bulan yaitu dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023.
 3. Sewa Rumah Dinas Dokter (Nomor: RSUD.K.PKS/131.d/I/2022) dengan nilai kontrak sebesar Rp40.000.000,00 dan jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun atau 12 bulan sejak tanggal 20 Januari 2022 s/d 19 Januari 2023. Dari nilai kontrak tersebut, sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 terdapat biaya yang dibayar di muka sebesar Rp3.333.333,33 untuk jangka waktu sewa selama 1 (satu) bulan yaitu dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023.
- Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memperbaharui perjanjian sewa rumah yang diperuntukan sebagai kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Surat Perjanjian Sewa Rumah Nomor Kesbang.900/72/IV/2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp60.000.000,00. Jangka waktu sewa 1 (satu) tahun atau 12 bulan mulai dari tanggal 15 Maret 2022 s/d 15 Maret 2023. Biaya yang dibayar di muka di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp10.000.000,00 untuk jangka waktu sewa selama 2 (dua) bulan yaitu dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.
- Terdapat penambahan saldo beban dibayar dimuka sebesar Rp68.408.520,00 di Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu biaya pembuatan sertifikat/akta tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang masih dalam proses/belum selesai.
- Sedangkan Saldo Beban dibayar dimuka sebesar Rp82.583.333,33 merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 yang terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Komodo sebesar Rp68.000.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp4.583.333,33 dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp10.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

9) **Persediaan** **31 Des 2022** **31 Des 2021**
Rp 14.298.130.881,99 **Rp60.760.955.146,10**

Jumlah sebesar Rp 14.298.130.881,99 merupakan saldo persediaan tahun 2022 sedangkan jumlah sebesar Rp60.760.955.146,10 merupakan saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat per 31 Desember 2021. Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 12 Daftar Persediaan per 31 Desember 2022 per OPD

No	OPD	Uraian	Saldo 31 Desember 2022
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persediaan Alat Tulis Kantor	18.147.500,00
		Barang Yang diserahkan ke Masyarakat	0,00
2	Dinas Kesehatan	Persediaan Obat-Obatan	4.767.221.813,16
		Persediaan Obat-Obatan	4.471.521.702,67
3	RSUD Komodo	Persediaan Laboratorium	17.320.000,00
		Persediaan Dokumen / Administrasi	58.500.000,00
		Persediaan Barang Habis Pakai penanganan Covid 19 (Donasi)	367.433.058,00
4	Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Persediaan Alat/ Bahan Komputer	660.000,00
		Barang Yang diserahkan ke Masyarakat	149.711.500,00
5	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Barang Yang diserahkan ke Masyarakat	264.466.620,00
6	Dinas Sosial	Persediaan Barang Habis Pakai penanganan Covid 19 (Donasi)	63.465.000,00
		Peralatan Rumah Tangga Lainnya	80.069.521,00
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Persediaan Ikan/Bibit Ikan	645.863.186,66
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persediaan Alat Tulis Kantor	16.940.000,00
		Persediaan Dokumen / Administrasi	22.161.000,00
		Persediaan Alat/Bahan Komputer	113.994.850,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persediaan Dokumen / Administrasi	120.780.150,00
		Peralatan Rumah Tangga Lainnya	2.300.000,00
		Persediaan Bahan Obat-Obatan	9.793.000,00
		Persediaan Bahan Percontohan	526.156.500,00
		Alat-Alat Keluarga Berencana	219.769.320,00
10	Dinas Bina Marga, Bina Kontruksi dan Perhubungan	Persediaan Dokumen / Administrasi/Karcis	3.332.535,00
		Persediaan Alat/ Bahan Komputer	2.843.500,00
		Barang Yang diserahkan ke Masyarakat	1.402.597.709,00
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Peralatan Rumah Tangga Lainnya	34.740.000,00
		Persediaan Alat/ Bahan Komputer	14.887.450,00
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Persediaan Dokumen / Administrasi Tender/Karcis	29.800.000,00
		Peralatan Rumah Tangga Lainnya	36.992.400,00
		Persediaan Bahan Obat-Obatan	254.546.500,00
		Persediaan Bahan Laboratorium	104.822.100,00
		Persediaan Bibit Ternak/Ternak	68.159.000,00
13	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan	Persediaan obat-obatan pertanian	274.248.166,50



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Uraian	Saldo 31 Desember 2022
14	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persediaan Karcis/ Cetak SKRD	660.000,00
15	Dinas Informatika dan Komunikasi	Persediaan Karcis RPD	62.000,00
16	Badan Pendapatan Daerah	Persediaan Kertas Rol Charger Register	134.164.800,00
Total			14.298.130.881,99

Nilai Persediaan tersebut di atas merupakan persediaan akhir per 31 Desember 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Saldo Persediaan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp18.147.500,00 terdiri dari saldo atas persediaan alat tulis kantor di sekolah-sekolah yang bersumber dari belanja barang bantuan operasional sekolah (dana BOS) sebesar Rp18.147.500,00.
2. Persediaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.767.221.813,16 merupakan sisa persediaan Obat, BHP, Vaksin, dan Reagensia, Mutasi persediaan pada Dinas Kesehatan yang belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
3. Persediaan pada RSUD Komodo sebesar Rp4.914.774.760,67 merupakan saldo akhir persediaan per 31 Desember 2022 yang terdiri dari Persediaan Obat-Obatan, Persediaan Laboratorium, Persediaan Dokumen / Administrasi dan Persediaan Barang Habis Pakai penanganan Covid 19 (Donasi).
4. Persediaan pada Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang sebesar Rp150.371.500,00, yang terdiri dari persediaan barang yang diserahkan ke masyarakat dan persediaan bahan/alat komputer.
5. Persediaan pada Dinas Sosial sebesar Rp143.534.521,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Persediaan beras yang belum keluar dari BULOG untuk Desa Golo Bore sebesar Rp2.774.094,40,- seluruhnya telah dimanfaatkan pada tahun 2022 sehingga saldo persediaan beras per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.
 - b. Saldo persediaan bersumber dari APBN Penanganan Covid-19 Tahun 2021 sebesar Rp63.465.000,00 belum dimanfaatkan pada tahun 2022.
 - c. Pada Tahun 2022 terdapat saldo persediaan barang bantuan habis pakai hibah dari Dinas Sosial Provinsi NTT Tahun 2022 sebesar Rp80.069.521,00.
6. Saldo Persediaan pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp264.466.620,00 merupakan persediaan barang yang diserahkan ke masyarakat yang dimutasi dari Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang.
7. Saldo persediaan Tahun 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp153.095.850,00 merupakan barang persediaan alat tulis kantor, dimana terdapat sisa atas saldo persediaan tahun 2021 sebesar Rp56.976.000,00 dan penambahan saldo persediaan tahun 2022 sebesar Rp96.119.850,00 yang merupakan sisa persediaan alat tulis kantor dan bahan komputer tahun 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

8. Saldo Persediaan tahun 2022 pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp878.798.970,00 yang terdiri dari Alat/Bahan Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor sebesar Rp120.780.150,00, peralatan rumah tangga lainnya sebesar Rp2.300.000,00, persediaan bahan obat-obatan sebesar Rp 9.793.000,00, persediaan bahan percontohan sebesar Rp 526.156.500,00, alat-alat KB sebesar Rp 219.769.320,00.
9. Persediaan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp3.332.535,00 merupakan saldo persediaan tahun 2021, dimana atas saldo persediaan tersebut pada tahun 2022 dimutasi ke Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan dan belum dimanfaatkan sampai tanggal 31 Desember 2022.
10. Terdapat saldo persediaan TA.2022 pada Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan sebesar Rp1.408.773.744,00, yang terdiri dari persediaan barang untuk diserahkan kepada masyarakat Rp1.402.597.709,00, Persediaan karcis mutasi dari Dinas Perhubungan sebesar Rp3.332.535,00 dan persediaan alat/bahan Komputer sebesar Rp2.843.500,00.
11. Saldo Persediaan tahun 2022 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp 49.627.450,00 terdiri atas persediaan karcis sebesar Rp14.887.450,00 dan persediaan Pakaian Adat Rp34.740.000,00.
12. Persediaan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan sebesar Rp 274.248.166,50. Saldo Persediaan barang obat-obatan disebabkan karena penggunaan obat berdasarkan permintaan dari petani/kelompok tani, disesuaikan dengan tingkat serangan OPT terhadap berbagai jenis tanaman. Adapun mekanisme penyaluran obat-obatan berdasarkan proposal yang kemudian diverifikasi oleh petugas pengamat hama baik pada tingkat Kecamatan maupun pada tingkat Kabupaten.
13. Persediaan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp494.320.000,00 yang terdiri dari Persediaan obat-obatan sebesar Rp254.546.500,00, Persediaan Dokumen / Administrasi Tender/Karcis sebesar Rp29.800.000,00, Peralatan Rumah Tangga Lainnya sebesar Rp36.992.400,00, Persediaan Bahan Laboratorium sebesar Rp104.822.100,00, Persediaan Bibit Ternak/Ternak sebesar Rp68.159.000,00 .
14. Saldo Persediaan Tahun 2022 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp660.000,00 yang merupakan saldo atas blanko SKRD. Pada tahun 2022 atas saldo persediaan blanko SKRD tahun 2021 sebesar Rp1.599.996,00 seluruhnya telah digunakan/dimanfaatkan pada tahun 2022.
15. Terdapat saldo persediaan TA.2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp62.000,00 yang merupakan Persediaan berupa Karcis RPD yang belum dimanfaatkan.
16. Pada Tahun 2022 atas Saldo persediaan TA 2021 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp4.770.244.000,00 seluruhnya telah diserahkan ke Masyarakat.
17. Pada Tahun 2022 terdapat persediaan Ikan dan peralatan pendukung lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (UPTD Balai Benih Ikan)



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

sebesar Rp645.863.186,67 yang merupakan persediaan ikan yang terdapat di UPTD Balai Benih Ikan.

18. Saldo Persediaan di Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp134.164.800,00 merupakan persediaan rol thermal paper yang digunakan untuk cash register yang merupakan saldo persediaan tahun 2020 yang belum dimanfaatkan dan atas saldo persediaan tersebut seluruhnya telah dimutasi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Rincian persediaan lebih lanjut, dapat dilihat pada **Lampiran 12**

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	31 Des 2022	31 Des 2021
	Rp95.002.402.172,00	Rp103.062.114.863,00

Jumlah sebesar Rp95.002.402.172,00 merupakan saldo dana Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat per 31 Desember 2022. Investasi Penyertaan Modal Kabupaten Manggarai Barat terdapat di PDAM Wae Mbeliling, Perumda Bidadari dan Bank NTT.

PDAM Wae Mbeliling mencatat Ekuitas Tahun 2022 berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Wae Mbeliling (audited) sebesar Rp200.907.010.646,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021	53.325.432.176,00
Koreksi Laba/Rugi Tahun Lalu	35.497.139,00
Laba/Rugi Tahun Berjalan	(11.415.820.669,00)
Penyertaan Modal Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	158.961.902.000,00
Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022	200.907.010.646,00

Penyertaan Modal Pemerintah yang belum ditentukan statusnya sebesar Rp158.961.902.000,00 yang dicatat di Laporan Perubahan Ekuitas. Atas Penyertaan Modal tersebut tidak dikonsolidasikan ke Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dikarenakan statusnya masih berupa pengelolaan sementara berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara antara Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah III Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor KU.05.05/BA/CB19.7/287 tanggal 10 Agustus 2022. Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada PDAM Wae Mbeliling dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Wae Mbeliling. Di dalam pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017, disebutkan bahwa :

1. Penyertaan modal pada PDAM ditetapkan dalam bentuk uang dan barang.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

2. Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan rincian :
 - a. Penyertaan modal yang telah direalisasikan sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. Penambahan penyertaan modal dalam bentuk uang Tahun 2017 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
3. Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp12.865.458.687,00 (dua belas milyar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berupa Penyertaan Modal kepada Bank NTT sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami peningkatan Investasi Permanen Penyertaan Modal sebesar Rp5.000.000.000,00. Pada Tahun 2021 telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Di dalam pasal 6, disebutkan bahwa :

Rencana penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebesar Rp53.300.330.000 (lima puluh tiga miliar tiga ratus juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Tahapan Penambahan Penyertaan Modal Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.500.000.000 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.800.330.000 (tiga belas miliar delapan ratus juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pada Tahun 2022 terdapat penambahan Penyertaan Modal ke Bank NTT sebesar Rp5.000.000.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 428/LS/III/2022 tanggal 17 Maret 2022. Daftar kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada Bank NTT, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 13 Daftar Kepemilikan Saham Pemerintah Kab. Manggarai Barat pada Bank NTT

No.	Tahun Anggaran	Tanggal Penyertaan	No. Seri Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai (Rp)
1	2004	31-Mei-04	04568206 s.d. 04573205	5.000	50.000.000,00
2	2006	01-Mei-06	0100001 s.d. 01010000	10.000	100.000.000,00
		01-Mei-06	02516382 s.d. 02601381	85.000	850.000.000,00
		02-Jun-06	04113750 s.d. 04213749	100.000	1.000.000.000,00
3	2007	23-Apr-07	11938750 s.d. 12438749	500.000	5.000.000.000,00
		05-Jun-07	12938750 s.d. 13188749	250.000	2.500.000.000,00
4	2008	29-Apr-08	19640875 s.d. 19990874	350.000	3.500.000.000,00
5	2009	15-Jun-09	25272135 s.d. 25622134	350.000	3.500.000.000,00
6	2010	20-Des-10	35041573 s.d. 35091572	50.000	500.000.000,00
7	2011	19-Okt-11	38731239 s.d. 38881238	150.000	1.500.000.000,00
8	2012	18-Okt-12	47745339 s.d. 47945338	200.000	2.000.000.000,00
9	2013	19-Nov-13	54845339 s.d. 55045338	200.000	2.000.000.000,00
10	2014	24-Jun-14	63717127 s.d. 63917126	200.000	2.000.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

11	2015	30-Agt-15	80367127 s.d 80417126	50.000	500.000.000,00
12	2020	27-Agt-20		500.000	5.000.000.000,00
13	2020	30-Mar-2020		169.967	1.699.670.000,00
14	2021	16 Juni 2021		1.500.000	15.000.000.000,00
15	2022	17 Maret 2022		500.000	5.000.000.000,00
Total				5.169.967	51.699.670.000,00

Keterangan : Saham dan No. Seri Saham penyertaan modal Tahun 2020,2021 dan 2022 belum diperoleh dari Bank NTT

Realisasi dividen yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dari Bank NTT atas penyertaan modal yang telah dilakukan sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp66.581.018.126,48, dengan uraian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14 Daftar Realisasi Dividen Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dari PT BPD NTT Tahun 2005-2022

No	Tahun	Jumlah Dividen
1	2005	13.921.500,00
2	2006	188.544.148,00
3	2007	342.766.535,06
4	2008	1.445.505.266,72
5	2009	1.857.314.040,64
6	2010	3.260.782.449,11
7	2011	4.433.426.273,99
8	2012	5.254.795.520,96
9	2013	5.879.026.883,65
10	2014	6.582.924.030,00
11	2015	6.907.135.171,00
12	2016	6.539.041.490,00
13	2017	4.725.433.263,00
14	2018	4.439.744.275,00
15	2019	4.168.713.839,00
16	2020	3.809.587.236,35
17	2021	4.012.182.992,00
18	2022	2.720.173.212,00
Jumlah		66.581.018.126,48

Selain itu pada tahun 2021 terdapat Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ke Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bidadari sebesar Rp4.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Bidadari. Di dalam pasal 3 ayat 1,2 dan 3 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020, disebutkan bahwa :

1. Penyertaan modal pada Perumda Bidadari ditetapkan dalam bentuk uang.
2. Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) dengan rincian :
 - a. Tahun 2021 sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah).
 - b. Tahun 2022 sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah).
 - c. Tahun 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).
 - d. Tahun 2024 sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).

Sedangkan pada Tahun 2022 tidak terdapat Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ke Perumda Bidadari. Perumda Bidadari mencatat Ekuitas Tahun 2022 sebesar Rp3.037.012.687,00 berdasarkan Laporan Keuangan Perumda Bidadari (*audited*) dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021	3.037.012.687,00
Koreksi Laba/(Rugi) Tahun Lalu:	1.493.065,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Mutasi Tambah dan Kurang Aset Ekstrakomptabel Tahun 2022 sebesar Rp17.759.377.003,00 terdiri dari:

1. Penambahan pada Aset Peralatan dan Mesin dibawah Kapitalisasi sebesar Rp943.230.501,00
2. Penambahan atas ekstra pada dinas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp83.551.000,00 atas Alat Laboratorium
3. Mutasi ekstra Peralatan dan Mesin dari UPTD Dinas PPO Kecamatan Boleng dan UPTD Dinas PPO Kecamatan Mbeliling ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp6.000.000,00
4. Penghapusan Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM sebesar Rp 7.451.383,00 dan Kelurahan Wae Kelambu sebesar Rp321.000,00
5. Penambahan pada Aset Gedung dan Bangunan dibawah Kapitalisasi sebesar Rp14.755.473,00
6. Koreksi Kurang Aset Ekstrakomptabel Jalan, Jaringan dan Instalasi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp500.000,00
7. Penambahan pada Aset Tetap Lainnya dibawah Kapitalisasi sebesar Rp750.664.200,00
8. Penambahan atas ekstra pada dinas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp47.489.200,00 atas belanja buku bos
9. Koreksi Kurang Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atas pekerjaan yang sudah di mutasikan ke aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.194.994,00.

Tabel 18 Daftar Aset Ekstrakomptabel dan Intrakomptabel

Aset Tetap	Saldo Awal Aset Tetap	Penyesuaian		Saldo Akhir Aset Tetap
		Bertambah	Berkurang	
- Tanah	242.923.171.329,00	1.337.044.472.570,00	31.388.880.615,00	1.548.578.763.284,00
- Peralatan dan Mesin	330.960.056.950,00	87.032.035.310,00	24.753.929.360,00	393.238.162.900,00
- Gedung dan Bangunan	764.673.375.688,00	253.988.951.138,00	50.229.503.008,00	968.432.823.818,00
- Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.655.711.499.202,00	742.111.098.689,00	601.354.603.672,00	1.796.467.994.219,00
- Aset Tetap Lainnya	4.029.109.500,00	3.604.788.132,00	1.447.528.532,00	6.186.369.100,00
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.834.261.128,00	168.783.866.897,00	2.393.247.121,00	170.224.880.904,00
- Akumulasi Penyusutan	(1.040.836.255.946,00)	(310.818.833.849,12)	(150.732.520.674,00)	(1.200.922.569.121,12)
Jumlah	1.961.295.217.851,00	2.281.746.378.886,88	560.835.171.634,00	3.682.206.425.103,88

Nilai mutasi aset tetap per 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah	31 Des 2022	31 Des 2021
	Rp1.548.578.763.284,00	Rp242.923.171.329,00

Saldo aset tetap tanah pada Tahun 2022 sebesar Rp1.548.578.763.284,00. Kenaikan/Penurunan Aset Tanah dapat dirinci sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 19 Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2022

No	Saldo Awal Aset Tanah Tahun 2022	242.923.171.329,00
	Mutasi Tambah (1 s/d 12)	1.337.044.472.570,00
1	Belanja Modal 2022 (LRA)	-
2	Aset Tetap yang dimutasikan dari SKPD Lain (Mutasi antar SKPD)	28.770.970.340,00
3	Belanja non Modal (Belanja Pegawai/Barang & Jasa yang diatribusikan menjadi aset tetap)	-
4	Belanja non Modal (Aset tetap yang berasal dari belanja Pegawai/Barang Jasa)	85.167.160,00
5	Hibah (Pemerintah Pusat/Provinsi/Pemda Lain/Masyarakat)	4.266.142.000,00
6	Pindahan dari KDP	-
7	Koreksi Nilai	-
8	Kurang Pencatatan (M6 - Hasil Inventarisasi)	-
9	Kurang Pencatatan (Sebab Lain)	1.303.664.441.242,00
10	Utang Belanja	-
11	Reklasifikasi Masuk dari Aset Lain-lain	-
12	Reklasifikasi Masuk (Mutasi antar Aset Tetap)	257.751.828,00
	Mutasi Kurang (1 s/d 18)	31.388.880.615,00
1	Belanja Modal 2022 tidak Jadi Aset Tetap (Persediaan)	-
2	Belanja Modal 2022 tidak Jadi Aset Tetap (Dibawah Nilai Kapitalisasi)	-
3	Belanja Modal 2022 tidak Jadi Aset Tetap (Hibah/Diserahkan)	-
4	Belanja Modal 2022 tidak Jadi Aset Tetap (Pelunasan Utang)	-
5	Belanja BTT/Hibah (Bukan dari Belanja Modal) tidak Jadi Aset Tetap (Persediaan)	-
6	Belanja BTT/Hibah (Bukan dari Belanja Modal) tidak Jadi Aset Tetap (Dibawah Nilai Kapitalisasi)	-
7	Belanja non Modal (Bukan dari Belanja Modal) tidak Jadi Aset Tetap (Dibawah Nilai Kapitalisasi)	-
9	Kurang Pencatatan (M6 - Hasil Inventarisasi) Tidak Jadi Aset tetap (Dibawah Nilai Kapitalisasi)	-
10	Aset Tetap yang dipindahkan ke aset lainnya	-
11	Aset Tetap yang dihapuskan	-
12	Aset Tetap yang dimutasikan ke SKPD Lain (Mutasi antar SKPD)	28.770.970.340,00
13	Koreksi Nilai	-
14	P3D	-
15	Aset Tetap yang Dihilah	2.549.501.755,00
16	Reklasifikasi ke KDP	68.408.520,00
17	Lebih Pencatatan	-
18	Reklasifikasi Keluar (Mutasi antar Aset Tetap)	-
	Saldo Per 31 Desember 2022 (A+B-C)	1.548.578.763.284,00

- Mutasi Tambah :

1. Pada Tahun 2022 terdapat aset tetap yang dimutasi antara organisasi perangkat daerah sebesar Rp28.770.970.340,00 yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 20 Daftar Mutasi Tambah Aset Tetap Tanah antar OPD

No	OPD	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	64.915.120,00	-
2	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan	421.500.000,00	382.565.220,00
3	Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang	382.565.220,00	-
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	811.740.000,00	-
5	Dinas Perhubungan	-	421.500.000,00
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	811.740.000,00
7	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	450.000.000,00
8	Bagian Pemerintahan Umum	-	26.415.250.000,00
9	Kelurahan Wae Kelambu	-	225.000.000,00
10	Badan Keuangan dan Aset Daerah	27.090.250.000,00	64.915.120,00
	Total	28.770.970.340,00	28.770.970.340,00

2. Pada Tahun 2022 Terdapat penambahan Aset tetap tetap dari Belanja non Modal (Aset tetap yang berasal dari belanja Pegawai/Barang Jasa) sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- Rp85.167.160,00, yaitu belanja pembuatan sertifikat tanah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Pada Tahun 2022 terdapat Hibah aset tetap tanah sebesar Rp 4.266.142.000,00 yang terdiri dari :
- a. Hibah aset tetap tanah kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat/Dinas Kesehatan sebesar Rp4.103.742.000,00 yang terdiri dari:
- 1) Tanah untuk Fasilitas Kesehatan dengan dokumen perolehan berupa adalah Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah Adat untuk Pemerintah Kab. Manggarai Barat Tanggal 2 April 2022 sebesar Rp3.639.792.000. Adapun tanah dimaksud terletak di Lengkong Sekolah Manga Jarak Desa Golo Mori Kec. Komodo;
 - 2) Tanah untuk Fasilitas Kesehatan dengan dokumen perolehan berupa Surat Penyerahan Tanah Desa Kakor Kecamatan Lembor Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor DK.140/116/III/2022 Tanggal 23 Maret 2022 sebesar Rp207.800.000. Tanah dimaksud terletak di Kakor Desa Kakor Kecamatan Lembor Selatan;
 - 3) Tanah untuk Fasilitas Kesehatan dengan dokumen perolehan berupa Surat Penyerahan Tanah Untuk Lokasi Pustu Desa Lewat Kecamatan Macang Pacar Kab. Manggarai Barat NTT yang diserahkan tanggal 16 Juli 2015 dari masyarakat kampung Pateng Kepada Bupati Manggarai Barat sebesar Rp 76.150.000,00. Tanah dimaksud terletak di Dusun Pateng Utara Desa Lewat Kecamatan Macang Pacar.
 - 4) Tanah untuk Fasilitas Kesehatan dengan dokumen perolehan dengan berupa Surat Penyerahan Tanah Adat Lingko Paku tanggal 24 Januari 2012 dari Tuan Tanah/Tua Teno masyarakat Maras Desa Wae Kanta Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Tanah dimaksud merupakan Tanah Bangunan Puskesmas Wae Kanta yang terletak Dusu Paku Desa Wae Kanta Kecamatan Lembor. Nilai tanah dimaksud adalah sebesar Rp180.000.000,00.
- b. Hibah aset tetap tanah kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat/Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang sebesar Rp 1.540.000,00 yaitu Tanah Untuk Bangunan air Bersih/Air Baku dengan dokumen perolehan berupa Surat Pernyataan Hibah dari Muhamat Surat yang bersedia memberikan kontribusi dalam bentuk tanah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tanggal 1 Agustus 2022 sebesar Rp1.540.000,00. Di atas tanah dimaksud rencananya akan dibangun reservoir air minum untuk kebutuhan masyarakat yang terletak di Barat Lui Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo.
- c. Hibah aset tetap tanah kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat/Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp10.860.000,00 yang terdiri dari:
- 1) Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar dengan dokumen perolehan berupa Surat Perjanjian Hibah Nomor



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- Pem.140/DR/091/VII/2021 dan Nomor Dinkominfo.487/356/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp4.000.000,00. Tanah dimaksud terletak di Desa Rehak Kecamatan Welak;
- 2) Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar dengan dokumen perolehan berupa Surat Perjanjian Hibah Nomor Pemdes 140/73/VII/2021 dan Nomor Dinkominfo.487/358/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp4.000.000. Tanah dimaksud terletak di Desa Semang Kecamatan Welak.
 - 3) Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar dengan dokumen perolehan berupa Surat Perjanjian Hibah Nomor Pem.140/162-DNK/X/2021 dan Nomor Dinkominfo.487/351/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp 2.860.000,00. Tanah dimaksud terletak di Desa Nanga Kantor Kecamatan Macang Pacar.
- d. Hibah Aset tetap tanah kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat/Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp150.000.000,00. Tanah Persil Lainnya dengan dokumen perolehan berupa Berita Acara Pembaharuan Penyerahan Tanah Untuk Pemerintah Kabupaten Manggarai barat Tanggal 8 Maret 2022 dari Hilarius Hander yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan seluruh warga masyarakat persekutuan hukum adat Tua Gendang Kulang yang terletak di Mberenang Desa Watu Tiri Lembor Selatan.
4. Koreksi tambah atas Kurang Pencatatan (Sebab Lain) aset tetap tanah sebesar Rp1.303.664.441.242,00 merupakan koreksi atas nilai aset tetap tanah pada Pencatatan pada Inventaris BMD di Pengelola BMD/Badan Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari:
 1. Pemerintah Kabupaten Manggara Barat ditahun 2022 mendapatkan tambahan aset tanah sebesar Rp1.301.011.162.242 sebidang tanah tersebut terletak di Karang/Torro Lemma Batu Kallo Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat seluas ± 30 hektar. Pada awalnya tanah tersebut diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Manggarai (Kabupaten Induk) dari Hibah masyarakat merupakan bagian dari Personil, Pembiayaan Sarana Dan Prasarana, Dan Dokumen (P3D). Namun demikian Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat belum mencatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan belum juga dilaporkan dalam Laporan Keuangan Tahun anggaran sebelumnya, disebabkan oleh beberapa dokumen dasar pencatatan belum lengkap dan terindikasi adanya penguasaan oleh Pihak lain dalam bentuk Sertifikat Hak Milik. Sehubungan persoalan tersebut maka Penanganan permasalahan tanah tersebut melalui proses Hukum (penanganan Tindak Pidana Korupsi) yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pada tahun 2022 tanah yang terletak di Karang/Torro Lemma Batu Kallo Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat seluas ± 30 hektar telah diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti antara Kejaksaan Tinggi Provinsi



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Nusa Tenggara Timur dengan Bupati Manggarai Barat Nomor BA-20 Tanggal 1 April 2022 yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 314 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 3 Februari 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.KPG Tanggal 23 Agustus 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tipikor Pada PN Kupang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/ PN.Kpg Tanggal 18 Juni 2021 atas nama terpidana AS. Sebagai tindak lanjut atas pengembalian tanah dimaksud Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mencatatkan tanah dimaksud pada Pengelola Barang Milik Daerah dengan nilai sebesar Rp1.301.011.162.242 (Satu Triliun Tiga Ratus Satu Miliar Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah). Atas Dasar Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah menetapkan Status Barang Milik Daerah tersebut melalui Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 313/KEP/HK/2022 Tentang Penetapan Status Barang Milik Daerah atas Tanah Karang/Torro Lema Batu Kallo Pada Pengelola Barang Tanggal 20 Oktober 2022. Nilai dicatat dan dilaporkan dalam laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Manggarai barat tahun Anggaran 2022 adalah nilai tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang sebagaimana diuraikan tersebut diatas.

Selanjutnya sebagai informasi tambahan bahwa diatas areal tanah milik Pemerintah Daerah tersebut masih terdapat Sertifikat Hak Milik Perorangan (SHM) sebanyak 6 (enam) SHM, atas Sertifikat Hak Milik tersebut maka Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah mengajukan pencabutan atas ke 6 sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat melalui surat nomor 900.030/BKAD/371/V/2022 Tanggal 9 Mei 2022 Perihal Permohonan Pembatalan 6 (Enam) Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tanah rampasan di Karang/Torro Lema Batu Kalo. Selanjutnya dilayangkan Surat Kedua 900.030/BKAD/689/VII/2022 Tanggal 19 Juli 2022 Perihal Pembatalan 6 (enam) Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tanah rampasan di Karang/Torro Lema Batu Kallo. Surat Susulan I Nomor 900.030/BKAD/995/X/2022 Tanggal 4 Oktober 2022 dan Surat Susulan II Nomor 900.030/BKAD/1493/XII/2022 Tanggal 22 Desember 2022 yang pada intinya memohon kepada Badan Pertanahan Nasional agar pembatalan atas 6 (enam) Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas tanah Karang/Torro Lema Batu Kalo direalisasikan. Adapun sampai dengan akhir Desember 2022 atas permohonan pembatalan tersebut belum ada realisasinya.

2. Koreksi tambah pencatatan tanah atas kurang pencatatan tanah yang sudah bersertifikat (sertifikat-sertifikat yang telah terbit tahun-tahun sebelumnya dari tahun 1994, 1997, 2008, 2009 dan 2013) sebesar Rp2.653.279.000,00. Hal tersebut terjadi karena adanya sertifikat-



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

sertifikat yang telah terbit tahun-tahun sebelumnya yaitu sejumlah 36 sertifikat, dengan Pemegang Hak Sertifikat baik atas nama Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Manggarai maupun Kabupaten Manggarai Barat dan dikuasai fisik asli sertifikatnya dan disimpan pada Pengelola Barang Milik Daerah melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah yang setelah dilakukan verifikasi awal ditemukan bahwa tanah-tanah sebagaimana tersebut dalam sertifikat belum tercatat pada Kartu Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, atas sertifikat-sertifikat dimaksud dilakukan koreksi pencatatan dengan berita acara nomor 900.030/BKAD/1559/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022. Adapun untuk mendapatkan nilai tanah yaitu dengan menggunakan nilai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Selanjutnya atas tanah-tanah hasil koreksi dimaksud seluruhnya dicatat pada Pengelola Barang Milik Daerah, tujuannya adalah pada tahun-tahun yang akan datang dilakukan verifikasi lapangan untuk secara presisi mengetahui letak dan lokasi tanah sehingga dapat ditetapkan status penggunaannya.

5. Selain itu terdapat Reklasifikasi Masuk nilai aset tetap tanah (Mutasi antar Aset Tetap) atas pensertifikatan tanah di Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp48.156.480,00 dan Penggusuran Lapangan SDI Lewat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp209.595.348,00.

- Mutasi Kurang :

1. Pada Tahun 2022 terdapat mutasi kurang aset tetap tanah yang sebesar Rp31.388.880.615,00 yang terdiri dari :
 - a. Koreksi kurang karena Aset Tetap yang dimutasikan ke SKPD Lain (Mutasi antar SKPD) sebesar Rp28.770.970.340,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21 Daftar Mutasi Keluar Aset Tetap Tanah antar OPD

No	OPD	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	64.915.120,00	-
2	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan	421.500.000,00	382.565.220,00
3	Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang	382.565.220,00	-
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	811.740.000,00	-
5	Dinas Perhubungan	-	421.500.000,00
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	811.740.000,00
7	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	450.000.000,00
8	Bagian Pemerintahan Umum	-	26.415.250.000,00
9	Kelurahan Wae Kelambu	-	225.000.000,00
10	Badan Keuangan dan Aset Daerah	27.090.250.000,00	64.915.120,00
	Total	28.770.970.340,00	28.770.970.340,00

- b. Hibah aset tetap tanah sebesar Rp2.549.501.755,00 di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum yang terdiri dari:

- 1) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Stasiun



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor:
900/BPKD/1957/XI/2021DANB.4060/SJ.2/PL.330/XI/2021 dengan nilai sebesar Rp 110.750.000,00.
- 2) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang Nomor: 900/BPKD/1025/VII/2021 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00.
 - 3) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 900.030/BKAD/561/VI/2022danB/537/VI/KA/PR.02.03/2022/BN NP-NTT dengan nilai sebesar Rp110.000.000,00.
 - 4) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Bea dan Cukai Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Maumere Nomor 900/BPKD/1389/VII/2021 dengan nilai sebesar Rp161.250.000,00.
 - 5) Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 900/BPKD/1122/VII/2021 dengan nilai sebesar Rp112.000.000,00.
 - 6) Polisi Militer Daerah Militer IX/1 Udayana Detasemen Polisi Militer IX/1 Kupang Nomor 900/BPKD/1340/VII/2021 dengan nilai sebesar Rp486.300.000,00.
 - 7) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 900.030/BKAD/374/V/2022 DAN 121/KU.01.2-SD/5315/2022 dengan nilai sebesar Rp589.701.755,00.
 - 8) Komando Operasi TNI Angkatan Udara II Pangkalan TNI AU El Tari Nomor PEM.130/257/X/2021 dengan nilai sebesar Rp 769.500.000,00.
 - 9) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 900.030/BKAD/1404/XII/2022DANBA0151/WPJ.31/ 2022 dengan nilai sebesar Rp110.000.000,00.

2. Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp68.408.520,00 atas biaya pensertifikasian tanah yang masih dalam proses pada Kantor BPN Manggarai Barat.

Penjelasan lain-lain :

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memiliki aset tetap tanah seluas 99.729 m² yang tercatat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Nilai yang tercatat pada Barang Milik Daerah merupakan nilai atas tanah, sementara di atas aset tetap tanah tersebut terdapat obyek pariwisata Batu Cermin. Atas obyek wisata ini tidak dapat dinilai karena obyek wisata Batu Cermin tidak diatur dalam kebijakan akuntansi dan barang milik daerah terkait cara menilai obyek wisata tersebut.

Rincian aset tetap Tanah lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 13**

2) Peralatan dan Mesin



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Peralatan dan Mesin

31 Des 2022

31 Des 2021

Rp379.907.307.706,00 Rp318.642.210.874,00

Saldo aset tetap peralatan dan mesin pada Tahun 2022 sebesar Rp379.907.307.706,00.
Kenaikan/Penurunan Aset Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22 Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022

A	Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022	318.642.210.874,00
B	Mutasi Tambah (1 s/d 12)	86.019.026.192,00
1	Belanja Modal 2022 (LRA)	38.845.232.335,00
2	Aset Tetap yang dimutasikan dari SKPD Lain (Mutasi antar SKPD)	16.058.671.495,00
3	Belanja non Modal (Belanja Pegawai/Barang & Jasa yang diatribusikan menjadi aset tetap)	168.400.000,00
4	Belanja non Modal (Aset tetap yang berasal dari belanja Pegawai/Barang Jasa)	1.796.005.420,00
5	Hibah (Pemerintah Pusat/Provinsi/Pemda Lain/Masyarakat)	22.417.530.301,00
6	Pindahan dari KDP	-
7	Koreksi Nilai	-
8	Kurang Pencatatan (M6 - Hasil Inventarisasi)	-
9	Kurang Pencatatan (Sebab Lain)	-
10	Utang Belanja	100.000.000,00
11	Reklasifikasi Masuk dari Aset Lain-lain	317.821.680,00
12	Reklasifikasi Masuk (Mutasi antar Aset Tetap)	6.315.364.961,00
C	Mutasi Kurang (1 s/d 18)	24.753.929.360,00
1	Belanja Modal 2022 tidak Jadi Aset Tetap (Persediaan)	1.256.142.266,00
2	Belanja Modal 2022 tidak Jadi Aset Tetap (Dibawah Nilai Kapitalisasi)	943.230.501,00
3	Belanja Modal 2022 tidak Jadi Aset Tetap (Hibah/Diserahkan)	-
4	Belanja Modal 2022 tidak Jadi Aset Tetap (Pelunasan Utang)	-
5	Belanja BTT/Hibah (Bukan dari Belanja Modal) tidak Jadi Aset Tetap (Persediaan)	-
6	Belanja BTT/Hibah (Bukan dari Belanja Modal) tidak Jadi Aset Tetap (Dibawah Nilai Kapitalisasi)	-
7	Belanja non Modal (Bukan dari Belanja Modal) tidak Jadi Aset Tetap (Dibawah Nilai Kapitalisasi)	-
9	Kurang Pencatatan (M6 - Hasil Inventarisasi) Tidak Jadi Aset tetap (Dibawah Nilai Kapitalisasi)	-
10	Aset Tetap yang dipindahkan ke aset lainnya	3.003.956.535,00
11	Aset Tetap yang dihapuskan	-
12	Aset Tetap yang dimutasikan ke SKPD Lain (Mutasi antar SKPD)	16.058.671.495,00
13	Koreksi Nilai	-
14	P3D	-
15	Aset Tetap yang D hibah	-
16	Reklasifikasi ke KDP	-
17	Lebih Pencatatan	-
18	Reklasifikasi Keluar (Mutasi antar Aset Tetap)	3.491.928.563,00
	Saldo Per 31 Desember 2022 (A+B-C)	379.907.307.706,00

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Mutasi Tambah :

1. Belanja Modal TA 2022 (LRA) sebesar Rp38.845.232.335,00.
2. Pada Tahun 2022 terdapat aset tetap yang dimutasi antara organisasi perangkat daerah sebesar Rp16.058.671.495,00 yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 23 Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar OPD

NO	OPD	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)
1	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan	4.849.832.302,00	1.845.083.356,00
2	Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang	3.331.052.604,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	OPD	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)
3	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	50.240.692,00	-
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.623.499.561,00	-
5	Bagian Hukum	24.750.000,00	-
6	Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam	492.960.310,00	355.320.000,00
7	Bagian Administrasi Pembangunan	355.320.000,00	-
8	Sekretariat DPRD	1.295.007.000,00	-
9	Inspektorat	15.448.454,00	-
10	Badan Pendapatan Daerah	4.020.560.572,00	-
11	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	3.109.468.809,00
12	Dinas Perhubungan	-	4.849.832.302,00
13	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	50.240.692,00
14	Bagian Umum	-	1.748.397.000,00
15	Bagian Administrasi Pembangunan	-	43.460.310,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	12.500.000,00
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	4.044.369.026,00
Total		16.058.671.495,00	16.058.671.495,00

3. Belanja non Modal (Belanja Pegawai/Barang & Jasa yang diatribusikan menjadi aset tetap) sebesar Rp 168.400.000,00 merupakan belanja honorarium panitia pengadaan barang jasa yang diatribusikan untuk memperoleh aset peralatan dan mesin yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 24 Rincian Belanja Non Modal yang Diatribusikan menjadi Aset Tetap

No	OPD	Jumlah (Rp)
1	RSUD Komodo	38.700.000,00
2	Dinas Sosial	11.400.000,00
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.150.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	11.150.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.850.000,00
6	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan	1.800.000,00
7	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	22.400.000,00
8	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.200.000,00
9	Bagian Hukum	750.000,00
10	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	1.250.000,00
11	Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam	600.000,00
12	Bagian Umum	32.850.000,00
13	Bagian Administrasi Pembangunan	1.500.000,00
14	Inspektorat	3.600.000,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.800.000,00
16	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.400.000,00
17	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	15.000.000,00
Total		168.400.000,00

4. Belanja non Modal (Aset tetap yang berasal dari belanja Barang Jasa dan Belanja Tak Terduga) sebesar Rp1.796.005.420,00. Belanja barang jasa yang menjadi aset tetap peralatan mesin dengan rincian sebagai berikut :

No	OPD	Uraian Aset	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Peralatan dan Mesin dari Belanja JKN dan Belanja Barang dan Jasa	1.532.774.420,00
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Plang Tanah Pemda	70.185.000,00
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Aset tetap yang bersumber dari belanja barang dan Jasa BOS	193.046.000,00
Total			1.796.005.420,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memperoleh hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp22.417.530.301,00 yang dapat dirinci sebagai berikut :
 - a. Dinas Kesehatan menerima hibah peralatan kesehatan dari Kementerian Kesehatan senilai Rp1.120.495.908,00 yang sebelumnya merupakan Barang Milik Negara Tugas Pembantuan. Adapun hibah dimaksud tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah antara Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan (DK/TP-04) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : KN.02.07/I.3/3920/2022 Tanggal 7 April 2022 dengan Berita Acara Serah Terima Nomor KN.02.07/I.3/3921/2022 tanggal Tanggal 7 April 2022.
 - b. Pada RSUD Komodo senilai Rp18.177.992.622,00 berupa hibah uang dari Kementerian Kesehatan untuk pembelian Barang Peralatan dan Mesin yaitu CT Scann 64 + UPS untuk CT Scann sebesar Rp 12.596.100.000,00 dan Mammography (Deteksi Kanker) sebesar Rp 5.066.119.455,00, selain itu terdapat hibah berupa peralatan kesehatan dari Yayasan BUMN untuk Indonesia sebesar Rp515.773.167,00 Dokumen hibahnya berupa Berita Acara Serah Terima Barang dari Yayasan BUMN untuk Indonesia kepada RSUD Komodo Tanggal 28 Oktober 2022.
 - c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menerima barang hibah dari PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Labuan Bajo. Bank Mandiri memberikan hibah peralatan penyulingan air laut menjadi air tawar berdasarkan dokumen hibah nomor Berita Acara Serah Terima Barang Antara PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Labuan Bajo dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor R11.BR.LBJ/356/2022 dan 900.030/BKAD/732/VII/2022 Tanggal 27 Juli 2022 sejumlah Rp711.163.200,00 dimana atas nilai hibah tersebut yang diakui sebagai peralatan dan mesin sebesar Rp580.815.700,00 sedangkan atas senilai Rp130.347.500 diakui sebagai aset renovasi yang akan uraikan lebih lanjut pada penjelasan mengenai hibah aset tetap lainnya.
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerima barang berupa PC Komputer, Printer dan Modem dari Kementerian Inventasi /Badan Koordinasi Penanaman Modal sebesar Rp17.858.500,00. Dokumen hibahnya berupa Surat Perjanjian Hibah antara Kementerian Inventasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal berupa komputer, printer, dan perangkat koneksi internet dalam rangka implemetasi OSS berbasis resiko di Daerah TA 2021 antara Kementerian Inventasi/Badan Koordinasi penanaman Modal dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Barat Nomor 367/XI/PH-Komputer Daerah/DPPM/ Kemeninves-BKPM/2021 tanggal 20 Desember 2021 dan Berita Acara Nomor 367/XII/BAST-Komputer Daerah/DPPM/ Kemeninves-BKPM/2021 Tanggal 20 Desember 2021.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- e. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menerima barang hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Berita Acara Serah Terima yaitu Berita Acara Serah Terima Bantuan Pojok Baca Digital (POCADI) untuk Perpustakaan Daerah Nomor Nomor :4880/4.2/PLK.03.04/X/2021 Tanggal 18 Oktober 2021. Barang yang diterima berupa P.C Komputer, Televisi, Sofa dan peralatan lainnya dengan Total Nilai Hibah sebesar Rp151.910.000,00. Dari total hibah sebesar Rp151.910.000,00 yang diakui sebagai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp135.507.160,00 sedangkan atas senilai Rp2.538.900,00 merupakan barang persediaan yang telah digunakan dan Rp13.863.940,00 merupakan Pojok POCADI di Gedung Kantor Bupati Manggarai Barat yang tidak dikapitalisasi karena tidak memenuhi nilai batas bawah kapitalisasi gedung yaitu sebesar Rp15.000.000. Selain menerima barang Hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat juga menerima hibah Mobil Unit Perpustakaan Keliling dari PT Bank Mandiri sebesar Rp500.000.000,00 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Hibah Bantuan CSR Mobil Perpustakaan Keliling antara PT Bank Mandiri kepada Pemerintah Kab. Manggarai Barat Nomor R11.Br.LBJ/081/2019 Tanggal 25 Februari 2020 dan Berita Acara Serah Terima Nomor R11.Br.LBJ/081/2019 Tanggal 25 Februari 2020.
- f. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menerima barang hibah berupa LCD Projektor, Sound System dan barang lainnya dengan total Rp125.816.835 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) yaitu berdasarkan beberapa dokumen hibah sebagai berikut:
- 1) Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Peranian C.Q Proyek Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (IPDMIP) kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 16041/PL130/09/2021 dengan nilai sebesar Rp34.712.650,00;
 - 2) Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Peranian C.Q Proyek Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (IPDMIP) kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 23788.3/PL.130/I.2/12/2021 Tanggal 17 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp44.790.875,00.
 - 3) Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Peranian C.Q Proyek Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (IPDMIP) kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat Nomor B-



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- 24415/PL.130/I.2/12/2021 Tanggal 17 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp46.313.310,00.
- g. Kementerian Pekerjaan umum telah menghibahkan hasil Penataan KSPN Labuan Bajo yaitu Kawasan Puncak Waringin dan Batu Cermin dengan nilai sebesar Rp64.520.522.507 (Enam Puluh Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1293/BA/DC/2022 dan 900.030/BKAD/1379/XII/2022 Tanggal 7 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor 1293.1/BA/DC/2022 dan 900.030/BKAD/1380/XII/2022 Tanggal 7 Desember 2022. Atas hibah dimaksud telah dilakukan pencatatan sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada Pengelola Barang Milik Daerah yang diakui pencatatannya dalam aset tetap peralatan dan mesin adalah sebesar Rp601.119.042,00 dengan rincian barang antara lain berupa papan-papan informasi (Signage) Puncak Waringin dan Batu Cermin.
- h. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghibahkan pelaksanaan Pekerjaan di Kawasan Puncak Waringin dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi Interior untuk Creativ Hub Labuan Bajo Puncak Waringin dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor B/279/PL.01.00/DPDI/2021 dan 900/BKAD/062/I/2022 Tanggal 31 Desember 2021, dimana untuk nilai hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp783.327.534,00 merupakan barang-barang atau peralatan dan mesin diantaranya adalah Meja, A.C Split, Kipas Angin, Rak Kayu, LCD Proyektor dan peralatan-peralatan lainnya yang semua diletakkan di Kawasan Puncak Waringin. Adapun dari nilai sebesar Rp783.327.534 sebesar Rp4.624.398 merupakan barang ekstrakomptabel dengan barang-barangnya adalah pedestal (kursi kayu) sebanyak 7 (tujuh) unit.
- i. Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah Sarana Ruang Kreatif untuk Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor BAST-BANPER/467/PPK.4/Kemenparekraf/DPDI.3/XII/2021 dan 900/BPKD/2175/XII/2021 Tanggal 14 Desember 2021 sebesar Rp372.497.000,00 semuanya dalam bentuk peralatan dan mesin. Selanjutnya yang diakui sebagai aset tetap peralatan dan mesin antara lain adalah sofa, meja makan, senilai Rp372.387.000,00 sedangkan senilai Rp110.000,00 merupakan barang ekstrakomptabel berupa karpet kecil dari daun pandan natural.
6. Penambahan nilai aset yang berasal dari pengakuan Utang Belanja di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp 100.000.000,00 yaitu Pengadaan Meubeler SDI Rempo.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Lain-lain yang merupakan Mobil Rusak Berat yang di lakukan pemeliharaan dengan Nilai sebesar Rp.317.821.680,00
- Pada Tahun 2022 terdapat Reklasifikasi Masuk (Mutasi antar Aset Tetap) sebesar Rp6.315.364.961,00 yang terdiri dari:

No	OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	727.404.637,00
2	Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar	32.412.000,00
3	RSUD Komodo	5.074.539.781,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	25.000.000,00
5	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	456.008.543,00
	TOTAL	6.315.364.961,00

- Mutasi Kurang :

- Mutasi kurang atas belanja modal Tahun 2022 karena merupakan bahan pakai habis/barang persediaan sebesar Rp1.256.142.266,00, yang dapat dirinci sebagai berikut :

No	OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	553.771.150,00
2	RSUD Komodo	1.440.000,00
3	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan	48.515.000,00
4	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	3.446.996,00
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	506.257.500,00
6	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan	142.711.620,00
	Total	1.256.142.266,00

- Dari penambahan aset tetap peralatan mesin sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat aset tetap yang nilainya dibawah kapitalisasi aset tetap maka dilakukan pencatatan pada daftar ekstrakomptable. Jumlah aset peralatan mesin di bawah batasan minimal kapitalisasi aset tetap tetap peralatan mesin sebesar Rp943.230.501,00. Belanja Modal 2022 tidak Jadi Aset Tetap (Dibawah Nilai Kapitalisasi) sebagai berikut:

No	OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	711.050.607,00
2	Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar	6.105.000,00
3	Dinas Kesehatan	91.758.222,00
4	RSUD Komodo	30.206.314,00
5	Dinas Sosial	23.010.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	24.479.400,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.642.500,00
8	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan	8.916.560,00
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	22.500.000,00
10	Kecamatan Boleng	770.000,00
11	Kecamatan Mbeliling	797.500,00
12	Kecamatan Pacar	7.260.000,00
13	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.734.398,00
	Total	943.230.501,00

- Pada Tahun 2022 terdapat aset peralatan mesin yang di reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp3.003.956.535,00. Merupakan aset peralatan mesin yang rusak berat berdasarkan surat usulan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022, yang dapat rinci sebagai berikut:

No	OPD	Jumlah(Rp)
1	RSUD Komodo	45.588.848,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

2	Dinas Sosial	137.396.000,00
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	175.045.209,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	223.887.335,00
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.001.633.831,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	77.265.784,00
7	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	21.766.828,00
8	Bagian Hukum	20.000.000,00
9	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	60.214.286,00
10	Bagian Administrasi Pembangunan	11.544.554,00
11	Sekretariat DPRD	502.912.661,00
12	Kecamatan Lembor	39.262.500,00
13	Kecamatan Lembor Selatan	191.750.000,00
14	Kecamatan Welak	100.000.000,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	215.722.674,00
16	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	179.966.025,00
Total		3.003.956.535,00

4. Pada Tahun 2022 terdapat Aset Tetap yang dimutasikan ke OPD Lain (Mutasi antar OPD) sebesar Rp16.058.671.495,00 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)			
NO	OPD	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
1	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan	4.849.832.302,00	1.845.083.356,00
2	Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang	3.331.052.604,00	-
3	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	50.240.692,00	-
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.623.499.561,00	-
5	Bagian Hukum	24.750.000,00	-
6	Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam	492.960.310,00	355.320.000,00
7	Bagian Administrasi Pembangunan	355.320.000,00	-
8	Sekretariat DPRD	1.295.007.000,00	-
9	Inspektorat	15.448.454,00	-
10	Badan Pendapatan Daerah	4.020.560.572,00	-
11	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	3.109.468.809,00
12	Dinas Perhubungan	-	4.849.832.302,00
13	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	50.240.692,00
14	Bagian Umum	-	1.748.397.000,00
15	Bagian Administrasi Pembangunan	-	43.460.310,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	12.500.000,00
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	4.044.369.026,00
Total		16.058.671.495,00	16.058.671.495,00

5. Pada Tahun 2022 terdapat Reklasifikasi Keluar (Mutasi antar Aset Tetap) dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap JIJ sebesar Rp3.491.928.563,00, di RSUD Komodo dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai akibat dari kesalahan penganggaran Tahun Anggaran 2022.

Rincian aset tetap peralatan dan mesin lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 14**

3) Gedung dan Bangunan

Peralatan dan Mesin	31 Des 2022	31 Des 2021
	Rp379.907.307.706,00	Rp318.642.210.874,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Saldo aset tetap gedung dan bangunan pada Tahun 2022 sebesar Rp967.341.444.390,00. Kenaikan/Penurunan aset gedung dan bangunan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 25 Daftar Mutasi Aset Gedung dan Bangunan

A	Saldo Awal Aset Gedung dan Bangunan 2022	763.596.751.733,00
B	Mutasi Tambah (1 s/d 12)	253.974.195.665,00
1	Belanja Modal 2022 (LRA)	159.623.544.220,00
2	Aset Tetap yang dimutasikan dari SKPD Lain (Mutasi antar SKPD)	31.537.102.523,00
3	Belanja non Modal (Belanja Pegawai/Barang & Jasa yang diatribusikan menjadi aset tetap)	1.572.297.500,00
4	Belanja non Modal (Aset tetap yang berasal dari belanja Pegawai/Barang Jasa)	279.821.750,00
5	Hibah (Pemerintah Pusat/Provinsi/Pemda Lain/Masyarakat)	57.007.906.789,00
6	Pindahan dari KDP	165.326.576,00
7	Koreksi Nilai	8.194.994,00
8	Kurang Pencatatan (M6 - Hasil Inventarisasi)	-
9	Kurang Pencatatan (Sebab Lain)	-
10	Utang Belanja	101.283.835,00
11	Reklasifikasi Masuk dari Aset Lain-lain	-
12	Reklasifikasi Masuk (Mutasi antar Aset Tetap)	3.678.717.478,00
C	Mutasi Kurang (1 s/d 18)	50.229.503.008,00
1	Belanja Modal 2022 tidak Jadi Aset Tetap (Persediaan)	-
2	Belanja Modal 2022 tidak Jadi Aset Tetap (Dibawah Nilai Kapitalisasi)	14.755.473,00
3	Belanja Modal 2022 tidak Jadi Aset Tetap (Hibah/Diserahkan)	190.960.400,00
4	Belanja Modal 2022 tidak Jadi Aset Tetap (Pelunasan Utang)	-
5	Belanja BTT/Hibah (Bukan dari Belanja Modal) tidak Jadi Aset Tetap (Persediaan)	-
6	Belanja BTT/Hibah (Bukan dari Belanja Modal) tidak Jadi Aset Tetap (Dibawah Nilai Kapitalisasi)	-
7	Belanja non Modal (Bukan dari Belanja Modal) tidak Jadi Aset Tetap (Dibawah Nilai Kapitalisasi)	-
9	Kurang Pencatatan (M6 - Hasil Inventarisasi) Tidak Jadi Aset tetap (Dibawah Nilai Kapitalisasi)	-
10	Aset Tetap yang dipindahkan ke aset lainnya	1.608.001.307,00
11	Aset Tetap yang dihapuskan	-
12	Aset Tetap yang dimutasikan ke SKPD Lain (Mutasi antar SKPD)	31.537.102.523,00
13	Koreksi Nilai	532.960.927,00
14	P3D	-
15	Aset Tetap yang Dihilir	-
16	Reklasifikasi ke KDP	9.176.717.960,00
17	Lebih Pencatatan	-
18	Reklasifikasi Keluar (Mutasi antar Aset Tetap)	7.169.004.418,00
Saldo Per 31 Desember 2022 (A+B-C)		967.341.444.390,00

- Mutasi Tambah :

1. Belanja Modal TA 2022 (LRA) sebesar Rp159.623.544.220,00 dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

No	OPD	Jumlah (dalam rupiah)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	19.564.827.268,00
2	Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar	427.331.280,00
3	Dinas Kesehatan	2.294.023.521,00
4	RSUD Komodo	105.627.972.500,00
5	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	4.231.162.789,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.116.770.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.979.637.011,00
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	69.999.250,00
9	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan	371.077.238,00
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.754.290.642,00
11	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.046.452.221,00
12	Sekretariat DPRD	140.000.000,00
	Total	159.623.544.220,00

2. Pada Tahun 2022 terdapat aset tetap gedung bangunan yang dimutasi antar organisasi perangkat daerah sebesar Rp31.537.102.523,00. Rincian mutasi antara Organisasi Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut :

No	OPD	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar
1	RSUD Komodo	22.977.960.606,00	-
2	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan	5.853.056.485,00	1.011.488.345,00
3	Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang	1.011.488.345,00	-
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	24.672.557.693,00
5	Dinas Lingkungan Hidup ,Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.694.597.087,00	-
6	Dinas Perhubungan	-	5.853.056.485,00
	Total	31.537.102.523,00	31.537.102.523,00

Terdapat Mutasi keluar aset tetap Gedung bangunan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp24.672.557.693,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Mutasi keluar aset tetap Gedung bangunan- Bangunan Rumah Sakit Umum ke RSUD Komodo sebesar Rp22.977.960.606,00
- Mutasi keluar aset tetap Gedung bangunan ke Dinas Lingkungan Hidup ,Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp1.694.597.087,00

3. Belanja non Modal (Belanja Pegawai/Barang & Jasa yang diatribusikan menjadi aset tetap) sebesar Rp1.572.297.500,00 merupakan belanja honorarium pengadaan barang jasa yang diatribusikan untuk memperoleh aset gedung dan bangunan, yang dapat rinci sebagai berikut :

No	OPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	150.637.500,00
2	Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar	25.935.000,00
3	Dinas Kesehatan	178.200.000,00
4	RSUD Komodo	183.750.000,00
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	41.600.000,00
6	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	634.068.000,00
7	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	68.450.000,00
8	Badan Keuangan dan Aset Daerah	199.957.000,00
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	89.700.000,00
	Total	1.572.297.500,00

4. Belanja non modal (aset tetap yang berasal dari belanja pegawai/barang jasa) sebesar Rp279.821.750,00 merupakan belanja barang jasa yang setelah ditelusuri merupakan aset tetap gedung dan bangunan yang dapat dirinci sebagai berikut :

No	OPD	Jumlah
----	-----	--------



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	80.000.000,00
2	Sekretariat DPRD	199.821.750,00
	Total	279.821.750,00

- a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga - Pengakuan aset tetap gedung dan bangunan yang bersumber dari Belanja barang jasa (Belanja Pemeliharaan) Rehap Kantor Dinas PKO sebesar Rp80.000.000,00
 - b. Sekretariat DPRD - pengakuan aset tetap gedung dan bangunan yang bersumber dari Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor (Partisi Ruangan) sebesar Rp199.821.750,00.
5. Pada Tahun 2022 terdapat hibah aset tetap gedung bangunan sebesar Rp57.007.906.789,00. Adapun secara ringkas nilai hibah berdasarkan Kartu Inventaris Barang kami klasifikasikan dalam dua bagian besar yaitu Hibah Umum, Hibah untuk mendukung KSPN Labuan Bajo yang dapat dirinci sebagai berikut :
- a. Hibah Umum aset tetap gedung bangunan
Hibah gedung bangunan berasal dari Koperasi Budi Karya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Koperasi Serba Usaha Budi Karya Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 09/KSU.BK/XI/2022 Tanggal 5 November 2022. Barang dimaksud berupa bangunan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sumber dananya berasal dari Bantuan Sosial Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Cq Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Pada awalnya Gedung PKL dimaksud merupakan Aset Koperasi Budi Karya, namun dibangun di atas tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Kelurahan Wae Kelambu (sebelah timur Ruko Pemda Manggarai Barat). Dalam perjalanannya berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan Koperasi Budi Karya Tahun Buku 2016 Gedung dimaksud disepakati untuk diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, namun belum ditindaklanjuti hingga pada 27 Mei 2022 berdasarkan Rapat Anggota Tahun Buku 2021 sepakat untuk menyerahkan asset dimaksud kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Koperasi Serba Usaha Budi Karya Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 09/KSU.BK/XI/2022 Tanggal 5 November 2022. Adapun nilai barangnya merujuk kepada catatan perolehan Koperasi Budi Karya yaitu Rp382.500.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - b. Hibah untuk mendukung KSPN Labuan Bajo
 - Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diakui sebagai aset tetap Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp54.938.481.560 (Lima Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empar Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan tiga bangunan utama



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- yang telah. Pertama Gedung Gua Batu Cermin di Kawasan Batu Cermin yang sebesar Rp17.525.795.149 (Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Juta) dengan beberapa ruang antara lain auditorium, ruang ticketing, kantor, pusat informasi, Mushola dan beberapa ruang lainnya yang menjadi satu kesatuan bangunan. Kedua adalah rumah Tenun di Kawasan Puncak Waringin sebesar Rp11.114.960.497 (Sebelas Miliar Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah). Ketiga adalah Rumah Souvenir sebesar Rp12.558.036.530 (Dua Belas Miliar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- Hibah Dari Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sebesar Rp1.686.925.229 (Satu Miliar Enam Ratus Depalan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) yang merupakan pekerjaan interior pada Gedung Tenun dan Gedung souvenir yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Dengan demikian pencatatan atas interior dikapitalisasi ke Gedung Tenun dan Gedung Souvenir
6. Aset tetap gedung dan bangunan yang di reklasifikasi dari konstruksi dalam pekerjaan Atas Pekerjaan Pembangunan Posko/Sekretariat Bumi Perkemahan Mbuhung dengan kontrak nomor : PKO/PPK-APBDP/04.b/XI/2021 sebesar Rp165.326.576,00 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga yang merupakan aset gedung dan bangunan yang sudah selesai dikerjakan/dimanfaatkan pada Tahun 2022.
 7. Koreksi nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.194.994,00 yang terdapat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Koreksi nilai dilakukan untuk pengakuan pencatatan aset tetap Gedung dan bangunan yang sebelumnya tercatat pada barang-barang daftar ekstrakomtable pada aset tetap konstruksi dalam pengerjaan.
 8. Pada Tahun 2022 terdapat Penambahan pencatatan Aset tetap Gedung Bangunan yang bersumber dari Utang Belanja sebesar Rp101.283.835,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembangunan MCK SMPN 6 Ndosu sebesar Rp69.414.989,00;
 - Pembangunan Posko/Sekretariat semi permanen di Bumi Perkemahan Mbuhung (Kecamatan Komodo) sebesar Rp31.868.846,00.
 9. Pada Tahun 2022 terdapat penambahan nilai asset tetap Gedung dan bangunan yang disebabkan oleh mutasi aset tetap dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp 2.707.928.563,00 pada RSUD Komodo, Mutasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp525.300.032,00 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan dan Mutasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp445.488.883,00 sebagai akibat dari kesalahan penganggaran Tahun Anggaran 2022.
- Mutasi Kurang :



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

1. Mutasi kurang atas belanja modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 karena merupakan barang yang dihibah/diserahkan sebesar Rp190.960.400,00 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.
2. Dari penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat aset tetap yang nilainya dibawah kapitalisasi aset tetap maka dilakukan pencatatan pada daftar ekstrakomptable. Jumlah aset tetap Gedung dan Bangunan di bawah batasan minimal kapitalisasi aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.755.473,00 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Pembangunan Kandang Jepit Puskesmas Kecamatan Boleng).
3. Pada Tahun 2022 terdapat aset tetap gedung dan bangunan yang di reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp1.608.001.307,00 yang terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.458.101.307,00 dan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp 149.900.000,00.
4. Pada Tahun 2022 terdapat koreksi pengurangan nilai atas aset tetap gedung dan bangunan yang disebabkan oleh penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin sebesar Rp. 532.960.927,00 yang terdiri dari:
 - Koreksi pengurangan nilai atas aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp173.806.615,00 yang merupakan koreksi atas kekurangan volume pekerjaan.
 - Koreksi pengurangan nilai atas aset tetap gedung dan bangunan pada RSUD Komodo sebesar Rp 359.154.312,00 yang merupakan koreksi atas kekurangan volume pekerjaan.
5. Reklasifikasi aset tetap Gedung Bangunan ke asset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Pembangunan Gedung IKM sebesar Rp9.176.717.960,00 dimana pekerjaan fisik sampai 31 Desember 2022 belum 100% sehingga belum dapat dilaksanakan Profesional Hand Over (PHO) dari Penyedia Barang kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada masing-masing Perangkat Daerah
6. Reklasifikasi aset tetap Gedung Bangunan
 - Reklasifikasi aset tetap Gedung Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.254.617.461,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp691.657.137,00, Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar sebesar Rp32.412.000,00, RSUD Komodo sebesar Rp5.074.539.781,00 dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp456.008.543,00;
 - Reklasifikasi aset tetap Gedung Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp704.791.609,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp598.691.869,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp15.172.924,00 dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp90.926.816,00;
 - Reklasifikasi aset tetap Gedung Bangunan ke Aset Tetap Tanah yang terdapat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga atas pekerjaan Penggusuran Lapangan SDI Lewat sebesar Rp209.595.348,00;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Rincian aset tetap gedung dan bangunan lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 15.**

4) **Jalan, Jaringan dan Irigasi**

Jalan, Jaringan dan Irigasi	31 Des 2022	31 Des 2021
	Rp1.795.700.308.617,00	Rp1.654.943.313.600,00

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Tahun 2022 sebesar Rp1.795.700.308.617,00. Kenaikan/Penurunan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 26 Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

A	Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan 2022	1.654.943.313.600,00
B	Mutasi Tambah (1 s/d 12)	742.111.098.689,00
1	Belanja Modal 2022 (LRA)	292.362.220.356,00
2	Aset Tetap yang dimutasikan dari SKPD Lain (Mutasi antar SKPD)	382.624.969.203,00
3	Belanja non Modal (Belanja Pegawai/Barang & Jasa yang diatribusikan menjadi aset tetap)	1.485.396.853,00
4	Belanja non Modal (Aset tetap yang berasal dari belanja Pegawai/Barang Jasa)	23.492.736.216,00
5	Hibah (Pemerintah Pusat/Provinsi/Pemda Lain/Masyarakat)	8.980.921.905,00
6	Pindahan dari KDP	162.207.746,00
7	Koreksi Nilai	
8	Kurang Pencatatan (M6 - Hasil Inventarisasi)	8.479.986.700,00
9	Kurang Pencatatan (Sebab Lain)	-
10	Utang Belanja	9.765.200.931,00
11	Reklasifikasi Masuk dari Aset Lain-lain	14.052.667.170,00
12	Reklasifikasi Masuk (Mutasi antar Aset Tetap)	704.791.609,00
C	Mutasi Kurang (1 s/d 18)	601.354.103.672,00
1	Belanja Modal 2022 tidak Jadi Aset Tetap (Persediaan)	-
2	Belanja Modal 2022 tidak Jadi Aset Tetap (Dibawah Nilai Kapitalisasi)	-
3	Belanja Modal 2022 tidak Jadi Aset Tetap (Hibah/Diserahkan)	194.750.662,00
4	Belanja Modal 2022 tidak Jadi Aset Tetap (Pelunasan Utang)	-
5	Belanja BTT/Hibah (Bukan dari Belanja Modal) tidak Jadi Aset Tetap (Persediaan)	-
6	Belanja BTT/Hibah (Bukan dari Belanja Modal) tidak Jadi Aset Tetap (Dibawah Nilai Kapitalisasi)	-
7	Belanja non Modal (Bukan dari Belanja Modal) tidak Jadi Aset Tetap (Dibawah Nilai Kapitalisasi)	-
9	Kurang Pencatatan (M6 - Hasil Inventarisasi) Tidak Jadi Aset tetap (Dibawah Nilai Kapitalisasi)	-
10	Aset Tetap yang dipindahkan ke aset lainnya	59.965.141.285,00
11	Aset Tetap yang dihapuskan	-
12	Aset Tetap yang dimutasikan ke SKPD Lain (Mutasi antar SKPD)	382.624.969.203,00
13	Koreksi Nilai	525.966.027,00
14	P3D	-
15	Aset Tetap yang Dhibah	-
16	Reklasifikasi ke KDP	157.597.787.612,00
17	Lebih Pencatatan	-
18	Reklasifikasi Keluar (Mutasi antar Aset Tetap)	445.488.883,00
	Saldo Per 31 Desember 2022 (A+B-C)	1.795.700.308.617,00

- Mutasi Tambah :

1. Belanja Modal TA 2022 (LRA) sebesar Rp292.362.220.356,00 dimana terdapat realisasi atas pekerjaan yang bersumber dari Dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp221.970.353.154,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

2. Mutasi antar organisasi perangkat daerah sebesar Rp382.624.969.203,00 dapat dirinci sebagai berikut :

No	OPD	Mutasi	
		Tambah	Kurang
1	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan	15.442.812.000,00	182.388.527.864,00
2	Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang	351.516.355.227,00	-
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	184.793.629.339,00
4	Dinas Lingkungan Hidup ,Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	15.665.801.976,00	-
5	Dinas Perhubungan	-	15.442.812.000,00
	Total	382.624.969.203,00	382.624.969.203,00

Terdapat pengurangan aset tetap dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dimutasikan ke Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang sebesar Rp169.127.827.363,00 dan Dinas Lingkungan Hidup ,Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp15.665.801.976,00

3. Belanja non Modal (Belanja Pegawai/Barang & Jasa yang diatribusikan menjadi aset tetap) sebesar Rp1.485.396.853,00 dapat dirinci sebagai berikut :

- Belanja non Modal - Belanja Pegawai/Barang & Jasa yang diatribusikan menjadi aset tetap pada Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan sebesar Rp1.185.276.853,00, bersumber dari Belanja - Pegawai honorarium panitia.
- Belanja non Modal - Belanja Pegawai yang diatribusikan menjadi aset tetap pada Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang sebesar Rp169.000.000,00.
- Belanja non Modal - Belanja Pegawai yang diatribusikan menjadi aset tetap pada Dinas Lingkungan Hidup ,Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp131.120.000,00.

4. Belanja non modal (aset tetap yang berasal dari belanja pegawai/barang jasa) sebesar Rp23.492.736.216,00 merupakan belanja barang jasa yang setelah ditelusuri merupakan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan, yang terdapat pada Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan dan Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang dengan rincian sebagai berikut:

a.	Uraian	Nilai (Rp)
	Pemeliharaan Jalan Sp. Wora-Ranggu-Sp.Lasang (Kampung Bilah)	21.869.450,00
-	Lanjutan Jalan Wae Mata - Raba (Drainase)	141.073.000,00
-	Pembentukan Badan Jalan SMPN I Komodo - Bandara (TPT dan Saluran)	199.716.000,00
-	Pemeliharaan Jalan Replikasi PHJD (Patung Caci sampai pertigaan WaeSambi)	1.421.181.474,00
-	Peningkatan Ruas Jalan SP Ndosu Deru- Waning Ndosu	199.870.000,00
-	Lanjutan TPT Galang ke Istana Ular	141.152.000,00
-	Pembangunan Drainase Jalan Pertigaan Galang-SDK Galang, Desa Gurung, Kec. Welak	99.616.000,00
-	Pembangunan Jalan Racang Dali-Rehok-.Baang-Epanderu Kecamatan Welak	1.438.470.000,00
-	Pembangunan Jalan Dahot-Wae Wako	56.449.530,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- Pembangunan Jalan Masuk Balai Latihan Kerja (BLK)	996.600.788,00
- Pembangunan Jalan Menuju SMK Bina Mandiri	686.787.922,00
- Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Malawatar - Sambu rembong - PLN	2.018.791.324,00
- Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Pasat - Jong - Maras - Poka	2.287.642.332,00
- Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Raba - Translok Longge - Rokap	1.691.840.544,00
- Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Sp. Bonda - Munting-Sp. Kuis	2.823.473.164,00
- Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan SP. Compang - Palong - SP. Rasang Dali	1.706.551.571,00
- Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Sp. Gendang Kaper - Merombok	1.033.721.065,00
- Jalan Culu-Mbore	857.220.000,00
- Peningkatan Jalan Di Golong - kampung baru desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan	190.724.000,00
- Jalan keluar masuk terminal Lembor termasuk penataan jl kompleks pasar	996.786.000,00
- Peningkatan Jalan Tondong Raja Leka	149.834.700,00
- Peningkatan Jalan Tana Dereng-Naba	1.913.263.000,00
- Pembangunan Jembatan Wae Nggorang-Cadot	1.455.979.000,00
- Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor Ruas Jalan Dahang-Tentang-Siri Mese	197.648.000,00
Total	22.726.260.864,00

b. Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang

Uraian	Nilai (Rp)
- Konsultan Perencana Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wae Dangga I	2.667.261,00
- Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wae Dangga I	2.660.896,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Wae Kwinda (Ds Rego Kec M Pacar)	227.239.018,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Wae Ngele (Ds. Kasong Kec. Ndos)	124.963.904,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Wae Rentang I (Ds.Lewur Kec. Kuwus)	170.507.925,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Wae Wa"u Sawah Tontong (Desa Benteng Suru kec. kuwus)	113.554.527,00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Wae Lia (Ds Tondong Belang Kec. Mbeliling)	124.881.821,00
Total	766.475.352,00

5. Pada Tahun 2022 terdapat hibah dari Kementerian PUPR pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang diakui sebagai asset Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam sebesar Rp8.980.921.905 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) yang meliputi barang-barang antara lain Jalur trekking di Kawasan Batu Cermin, Saluran Drainase, Instalasi listrik, Bangunan Bank Penampung Air (Ground Water Tank) instalasi pemadam kebakaran dan penangkal petir.
6. Konstruksi dalam pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan sebesar Rp162.207.746,00 merupakan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi yang sudah selesai dikerjakan/dimanfaatkan pada Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:
- Perencanaan Teknis sebesar Rp33.313.000,00 pada Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan.
 - Pembangunan MCK Eksekutif di Bumi Perkemahan Mbuhung Putri sebesar Rp 128.894.746,00 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

7. Koreksi atas kurang pencatatan asset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pembangunan fisik Jembatan Nanganae Tahun 2012 pada Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan sebesar Rp8.479.986.700,00
8. Pada Tahun 2022 terdapat Penambahan pencatatan Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bersumber dari Utang Belanja sebesar Rp9.765.200.931,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penambahan pencatatan Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bersumber dari Utang Belanja pada Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan atas belanja Konsultan Pengawas sebesar Rp3.410.195.628,00 dan Belanja Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan sebesar Rp6.332.130.399,00
 - b. Penambahan pencatatan Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bersumber dari Utang Belanja pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga atas Pekerjaan Pembangunan MCK Eksklusif di Bumi Perkemahan Mbuhung (Kecamatan Komodo) sebesar Rp22.874.904,00
9. Penambahan nilai Aset Tetap jalan, irigasi dan jaringan yang merupakan mutasi dari persediaan dengan rincian sebagai berikut :
 - Mutasi asset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari persediaan sebesar Rp4.770.244.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Koreksi dari Persediaan 2021 Belanja Barang diserahkan Jalan Transdesa (DAK) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
- Paket Pekerjaan Wae Nakeng-Poco Koe-Sambir di Kec.Lembor	1.561.192.336,00
- Paket Pekerjaan Cowang-Latung-Sp.Romang di Kec.Pacar	1.543.779.838,00
- Paket Pekerjaan Tohong-Sita Rentung-Mbahor di Kec.Boleng	1.665.271.826,00
Total	4.770.244.000,00

- Terdapat barang yang diserahkan kepada masyarakat yang direklasifikasi menjadi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yaitu atas Saluran Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten. Jaringan dimaksud tersebut tersebar dari beberapa wilayah Kabupaten Manggarai Barat antara lain Saluran Irigasi Wae Kaca, Wae Rendong dan beberapa saluran irigasi lainnya. Irigasi dimaksud terdiri dari pembangunan baru maupun rehabilitasi atas jaringan irigasi yang telah ada sebelumnya. Atas pekerjaan rehabilitasi maka dikapitalisasi pada aset induknya. Nilai reklasifikasi dari barang diserahkan kepada masyarakat yang direklasifikasi menjadi aset tetap adalah sebesar Rp9.282.423.170 (Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Uraian	Nilai
- D.I. Wae Tiwu Nampar (200 Ha)	2.633.858.500
- Jaringan Irigasi Wae Sapo III /Sapo Nara	124.711.958
- saluran irigasi wae perang di desa ponto ara	146.012.650
- D.I. Wae Sapo II (292,68 Ha)	1.371.574.800
- Irigasi Wae Wae Desa Wae Wako Kecamatan Lembor	111.446.968
- D.I. Wae Borong (175,61 Ha)	380.446.750
- Jaringan Irigasi Wae Mami Desa Liang Dara Kec. Mbeliling	96.547.900
- Jaringan Irigasi Wae Togo Desa Repi Kec. Lembor Selatan	103.403.800
- Jaringan Irigasi Wae Dangga I	85.088.157
- Jaringan Irigasi Wae Wunis Desa Golo Mbu Kec. Sano Nggoang	86.865.700
- Jaringan Irigasi Wae Ranggu	124.857.881
- D. I. Wae Weor (117,07 Ha)	348.164.900
- Jaringan Irigasi Wae Lalong	124.928.562
- Jaringan Irigasi Wae Mowol Desa Liang Dara Kec. Mbeliling	86.805.900
- Jaringan Irigasi Wae Turi Desa Wontong Kec. Macang Pacar	168.088.464
- Jaringan Irigasi Wae Weter II, Desa Golo Mbu Kec. Sano Nggoang	124.876.120
- D.I. Wae Kaca I (100 Ha)	870.216.000



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- irigasi Laru Golo Nobo Kec. Boleng	97.312.450
irigasi wae kaca sawa mese di sadang desa watu rambung Kec. Lembor Selatan	145.858.600
- Jaringan Irigasi Wae Dangga II Desa Golo Ndoal Kec. Mbeliling	102.038.100
- Jaringan Irigasi Wae Kantor Desa Tondong Belang Kec. Mbeliling	89.581.500
Jaringan Irigasi Wae Randong Persawahan Lengkong Nio Desa Watu Wangka Kec. Mbeliling	128.211.600
- D.I. Wae Rendong (117,17 Ha)	1.160.221.350
- Jaringan Irigasi Persawahan Hawe Desa Wajur Kec. Kuwus Barat	199.507.000
- Jaringan Irigasi Persawahan Kampung Tando	149.494.000
- Jaringan Irigasi Lingko Wae Watu Sowang Kel. Golo Ru'u Kec. Kuwus	116.933.276
- Irigasi Wae Cie Togo Desa Watu Waja Kec. Lembor Selatan	105.370.284
TOTAL	9.282.423.170,0

10. Pada Tahun 2022 terdapat reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp704.791.609,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp598.691.869,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp15.172.924,00 dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp90.926.816,00.

- Mutasi Kurang :

1. Pada Tahun 2022 terdapat belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp194.750.662,00 yang merupakan barang yang diserahkan pada masyarakat sehingga direklasifikasi ke persediaan pada Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang.
2. Pada Tahun 2022 terdapat aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang di reklasifikasi ke aset lain-lain pada Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan sebesar Rp15.239.280.241,00 dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM sebesar Rp186.618.000,00 yang merupakan usulan penghapusan Jalan dan Jembatan. Adapun reklasifikasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan ke aset lain-lain atas aset yang ditangani oleh APBN sebesar Rp 43.394.184.753 pada Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan dan sebesar Rp1.145.058.291 pada Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang.
3. Koreksi Kurang sebesar Rp860.929.765,00 atas Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 disebabkan karena belanja konsultan perencanaan dan belanja konsultan pengawasan terhadap belanja barang yang diserahkan pada masyarakat sebesar Rp 171.902.804,00, Relokasi Utilitas dan Biaya Sosial atas pekerjaan sebesar Rp232.326.932,00, belanja Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin sebesar Rp11.211.146,00 pada Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan dan koreksi atas kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan sebesar Rp.110.525.145
4. Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimutasi ke Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Tahun 2021 terdiri dari :
 - Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimutasi ke Konstruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp247.017.000,00 pada Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang yang merupakan Jasa Konsultansi Peningkatan Jaringan Irigasi DAK 2023
 - Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimutasi ke Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan atas Pekerjaan yang bersumber dari Dana PEN dengan rincian sebagai Berikut ;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Nilai	% Fisik
1	Rekonstruksi/ Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kota Labuan Bajo Paket I yaitu * Sp. Puncak Bandara - Pesona Bali * SMIP - Bukit Theodor * Pasar Wae Kesambi - Sp. SD Batu Cermin * Sp. Familia - Golo Koe * Sp. Kelurahan Wae Kelambu - Golo Koe * SMP Loyola - Pekuburan Lancang * SMA I Komodo - Mata Air Wae Kesambi * Sp. Wae Mata - Wae Nahi * Sp. Kaper - Tuke Tai Kaba * Wae Mata - Raba (Samping Ipi Rambu)	2.845.053.416,00 1.647.722.533,00 519.999.462,00 1.652.500.974,00 3.101.083.499,00 2.605.518.616,00 1.096.163.193,00 2.604.027.056,00 1.384.535.192,00 12.096.750.594,00	85%
2	Rekonstruksi/ Peningkatan Ruas Sp.Momol - Waning - Tehong - Wae Ncuring	9.140.224.734,00	70%
3	Rekonstruksi/ Peningkatan Ruas Sp. Loha-Tanggar-Naha-Sp.Konang	8.064.117.127,00	81%
4	Rekonstruksi/ Peningkatan Ruas Bambor - Meter - Wae Jare	3.224.435.205,00	65%
5	Rekonstruksi/ Peningkatan Ruas Hita - Bari	7.995.133.717,00	80%
6	Rekonstruksi/ Peningkatan Ruas Sp. Nara - Wontong - Pateng Leong - Wae Ncuring	10.636.899.398,00	70%
7	Rekonstruksi/ Peningkatan Ruas Sambigoro - Orong-Wae Tesem/Perbatasan Manggarai	14.134.969.740,00	93%
8	Rekonstruksi/ Peningkatan Ruas Daleng - Pela - Galang	9.552.070.714,00	96%
9	Rekonstruksi/ Peningkatan Ruas Golo Welu - Lewur - Nggawut	14.075.716.868,00	94%
10	Rekonstruksi/ Peningkatan Ruas jalan Bambor - Werang	17.303.471.007,00	86%
11	Rekonstruksi/ Peningkatan Ruas Nao - Kolang - Monsok	8.981.071.970,00	90%
12	Rekonstruksi/ Peningkatan Ruas Jalan Lambur-Kotok- Sp. Wol	10.204.005.443,00	85%
13	Rekonstruksi/ Peningkatan Ruas Daleng - Reweng - Kaca - Wae Mege	14.485.300.154,00	97%
	Jumlah	157.350.770.612,00	

5. Reklasifikasi Keluar (Mutasi antar Aset Tetap) dari aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset tetap Gedung dan Bangunan Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp445.488.883,00 yang merupakan pekerjaan Rehabilitasi atas Gedung IPAL dan Gedung IPL Puskesmas Labuan Bajo.

Rincian konstruksi dalam pengerjaan lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 16**

5) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	31 Des 2022	31 Des 2021
	Rp3.696.116.310,00	Rp2.337.010.110,00

Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2022 sebesar Rp3.696.116.310,00, merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

Rincian Aset Tetap Lainnya yang disajikan adalah :

Tabel 27 Daftar Aset Tetap Lainnya

A	Saldo Awal Aset Tetap Lainnya 2022	2.337.010.110,00
B	Mutasi Tambah (1 s/d 12)	2.806.634.732,00
1	Belanja Modal 2022 (LRA)	2.432.442.632,00
2	Aset Tetap yang dimutasikan dari SKPD Lain (Mutasi antar SKPD)	108.576.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

A	Saldo Awal Aset Tetap Lainnya 2022	2.337.010.110,00
B	Mutasi Tambah (1 s/d 12)	2.806.634.732,00
3	Belanja non Modal (Belanja Pegawai/Barang & Jasa yang diatribusikan menjadi aset tetap)	-
4	Belanja non Modal (Aset tetap yang berasal dari belanja Pegawai/Barang Jasa)	112.748.600,00
5	Hibah (Pemerintah Pusat/Provinsi/Pemda Lain/Masyarakat)	152.867.500,00
6	Pindahan dari KDP	-
7	Koreksi Nilai	-
8	Kurang Pencatatan (M6 - Hasil Inventarisasi)	-
9	Kurang Pencatatan (Sebab Lain)	-
10	Utang Belanja	-
11	Reklasifikasi Masuk dari Aset Lain-lain	-
12	Reklasifikasi Masuk (Mutasi antar Aset Tetap)	-
C	Mutasi Kurang (1 s/d 18)	1.447.528.532,00
1	Belanja Modal 2022 tidak Jadi Aset Tetap (Persediaan)	2.240.800,00
2	Belanja Modal 2022 tidak Jadi Aset Tetap (Dibawah Nilai Kapitalisasi)	750.664.200,00
3	Belanja Modal 2022 tidak Jadi Aset Tetap (Hibah/Diserahkan)	-
4	Belanja Modal 2022 tidak Jadi Aset Tetap (Pelunasan Utang)	-
5	Belanja BTT/Hibah (Bukan dari Belanja Modal) tidak Jadi Aset Tetap (Persediaan)	-
6	Belanja BTT/Hibah (Bukan dari Belanja Modal) tidak Jadi Aset Tetap (Dibawah Nilai Kapitalisasi)	-
7	Belanja non Modal (Bukan dari Belanja Modal) tidak Jadi Aset Tetap (Dibawah Nilai Kapitalisasi)	-
9	Kurang Pencatatan (M6 - Hasil Inventarisasi) Tidak Jadi Aset tetap (Dibawah Nilai Kapitalisasi)	-
10	Aset Tetap yang dipindahkan ke aset lainnya	-
11	Aset Tetap yang dihapuskan	-
12	Aset Tetap yang dimutasikan ke SKPD Lain (Mutasi antar SKPD)	108.576.000,00
13	Koreksi Nilai	-
14	P3D	-
15	Aset Tetap yang Dihilah	-
16	Reklasifikasi ke KDP	-
17	Lebih Pencatatan	-
18	Reklasifikasi Keluar (Mutasi antar Aset Tetap)	586.047.532,00
Saldo Per 31 Desember 2022 (A+B-C)		3.696.116.310,00

- Mutasi Tambah :

1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2022 (LRA) sebesar Rp2.432.442.632,00 yang terdapat pada :
 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Rp1.882.142.600,00.
 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rp25.000.000,00.
 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan Rp525.300.032,00
2. Aset Tetap yang dimutasikan dari SKPD lain (Mutasi antar SKPD) sebesar Rp108.576.000,00 pada Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga merupakan Belanja Modal Buku yang diserahkan ke Sekolah Negeri pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
3. Belanja non Modal (Aset tetap yang berasal dari belanja Pegawai/Barang Jasa) yang terdapat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp 112.748.600,00 - Koreksi Aset Tetap yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa yang disebabkan oleh kesalahan penganggaran.
4. Hibah (Pemerintah Pusat/Provinsi/Pemda Lain/Masyarakat) sebesar Rp152.867.500,00 yang terdapat pada :
 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp21.270.000,00 merupakan Hibah dalam bentuk buku untuk Pojok Baca Digital (POCADI) dari



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima Bantuan Buku Siap Layan untuk Pojok Baca Digital Perpustakaan Daerah Nomor 3607/4.2/PLK.03.07/VII.2021 Tanggal 11. Adapun yang diakui dalam neraca aset tetap lainnya adalah sebesar Rp2.356.000,00 sedangkan senilai Rp18.914.000,00 termasuk dalam klasifikasi ekstrakomptabel.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp130.347.500,00. Sebagaimana telah diuraikan pada aset tetap Peralatan dan Mesin bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menerima hibah atas peralatan penyulingan air laut menjadi air tawar dari Bank Mandiri melalui Berita Acara Serah Terima Barang Nomor R11.BR.LBJ/356/2022 dan 900.030/BKAD/732/VII/2022 Tanggal 27 Juli 2022 yang sebagiannya diakui sebagai aset tetap lainnya yaitu aset renovasi sebesar Rp130.347.500,00 didasari pertimbangan bahwa harusnya dikapitalisasi pada Aset Gedung dan Bangunan namun belum dapat dilakukan karena atas Gedung Bangunan dimaksud (yang berlokasi di Kampung Ujung di atas tanah TPI Kampung Ujung Labuan Bajo) belum menjadi aset tetap Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Gedung yang dimaksud dibangun atas instruksi Menteri BUMN pada saat melakukan dialog dengan para penjual ikan yang membutuhkan tempat penyimpanan ikan kering yang selanjutnya disetujui. Namun sampai saat ini Gedung dimaksud belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Apabila Gedung tersebut telah diserahkan maka dilakukan koreksi pencatatan dan dikapitalisasi ke Gedung yang diserahkan tersebut.
 - Hibah Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga atas alat music Casio dengan nilai sebesar Rp1.250.000,00 pada SMPN 1 Komodo dari UPH College Jakarta melalui Berita Acara Serah Terima tertanggal 7 November 2022 saat mereka melakukan kunjungan ke SMPN 1 Komodo.
- Mutasi Kurang :
1. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang tidak menjadi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.240.000,00 merupakan belanja modal buku pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga yang menjadi Persediaan.
 2. Dari penambahan Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat aset tetap yang nilainya dibawah kapitalisasi aset tetap maka dilakukan pencatatan pada daftar ekstrakomptable. Jumlah Aset Tetap Lainnya di bawah batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp731.750.200,00,00 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp18.914.000,00.
 3. Aset Tetap yang dimutasikan ke SKPD Lain (Mutasi antar SKPD) sebesar Rp108.576.000,00 merupakan Belanja Modal Buku yang diserahkan ke Sekolah Negeri pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
 4. Reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp 35.747.500,00 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga adalah Reklasifikasi aset tetap



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Saldo Per 31 Desember 2022 (A+B-C)

170.145.676.915,00

- Mutasi Tambah :

1. Mutasi Antar OPD Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan sebesar Rp1.940.952.805,00 dengan rincian sebagai berikut :

OPD	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar
- Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	581.465.000,00	1.908.687.805,00
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.327.222.805,00	
- Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan	32.265.000,00	
- Dinas Perhubungan		32.265.000,00
TOTAL	1.940.952.805,00	1.940.952.805,00

2. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang merupakan Reklasifikasi Masuk antar Aset Tetap yaitu dari Aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp247.017.000,00 dengan rincian :

- Pembangunan Drainase di Pandang ruas jalan Malawatar Nangalili sebesar Rp11.142.000,00
- Jasa Konsultansi Peningkatan Jaringan Irigasi DAK sebesar Rp235.875.000,00

3. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp68.408.520,00 merupakan biaya pensertifikasian tanah yang masih dalam proses pada Kantor BPN Manggarai Barat.
4. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas Pembangunan Gedung IKM sebesar Rp9.176.717.960,00 dimana pekerjaan fisik sampai 31 Desember 2022 belum mencapai 100% sehingga belum dapat dilaksanakan Profesional Hand Over (PHO) dari Penyedia Barang kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
5. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas Pekerjaan Dana Pinjaman Daerah (PEN) pada Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan sebesar Rp157.350.770.612,00.

- Mutasi Kurang :

1. Mutasi Kurang Konstruksi dalam Pengerjaan pada Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan sebesar Rp33.313.000,00 yang merupakan Perencanaan Teknis Jembatan Wae Nuwa (Ruas Rai Wangkung Pungkang) Desa Pota Wangka Kec. Bolong yang sudah diselesaikan pada Tahun 2022.
2. Mutasi Kurang Konstruksi dalam Pengerjaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah terdapat pengurangan atas nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp48.156.480,00 yang direklasifikasi keluar (mutasi antar aset) atas biaya pensertifikasian tanah yang sudah di proses pada Kantor BPN Manggarai Barat pada tahun 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

3. Mutasi Kurang Konstruksi dalam Pengerjaan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp.294.221.322,00 atas pekerjaan Posko dan MCK Bumi Perkemahan Mbuhung yang sudah diselesaikan pada Tahun 2022.
4. Koreksi nilai atas biaya sertifikat atas tanah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang sebelumnya di catat sebagai Konstruksi dalam pengerjaan dan direklas ke beban dibayar dimuka sebesar Rp68.408.520,00.

Rincian konstruksi dalam pengerjaan lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

7) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 sebesar Rp1.200.922.569.121,12. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29 Daftar Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022

Uraian	Saldo Akhir 2021	Mutasi Akumulasi Penyusutan Tahun 2022						Saldo Akhir 2022
		Tambah			Kurang			
		Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	Penyusutan Semester I dan Semester II	Penyusutan Mutasi Antar SKPD	Koreksi Saldo Awal	Penyusutan Mutasi Ke Aset Lain-lain	Penyusutan Mutasi Antar SKPD	
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	202.231.302.022,00	301.431.680	40.276.666.869,00	8.545.243.079,00	0,00	2.742.692.555,00	8.545.243.079,00	240.066.708.016,00
Gedung dan Bangunan	112.506.173.584,00	0,00	18.003.681.183,20	1.476.245.982,00	0,00	350.178.148,00	1.476.245.982,00	130.159.676.619,20
Jalan, Jaringan dan Instalasi	726.098.780.340,00	2.409.592.771	128.213.138.540,20	110.926.898.545,00	0,00	26.025.327.165,00	110.926.898.545,00	830.696.184.486,20
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.040.836.255.946,00	2.711.024.450,72	186.493.486.592,40	120.948.387.606,00	0,00	29.118.197.868,00	120.948.387.606,00	1.200.922.569.121,12

Depresiasi/Penyusutan Aset-Aset Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menganut metode garis lurus. Proses Penyusutan aset tetap dilakukan dengan bantuan Aplikasi Simda BMD. Adapun dapat dijelaskan kenaikan/penurunan akumulasi penyusutan pada Tahun 2022 :

- a. Koreksi akumulasi penyusutan atas mutasi akumulasi penyusutan antara organisasi perangkat daerah pada Tahun 2022, rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Daftar Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	OPD	Masuk	Keluar
1	RSUD Komodo	38.296.601,00	-
2	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan	4.780.056.557,00	45.146.131.550,00
3	Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang	107.195.668.047,00	3.932.987.096,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	62.968.359.203,00
5	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	34.921.674,00	-
6	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.813.513.201,00	-
7	Dinas Perhubungan	-	4.780.056.557,00
8	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	34.921.674,00
9	Bagian Hukum	412.500,00	-
10	Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam	490.918.643,00	355.320.000,00
11	Bagian Umum	-	865.725.071,00
12	Bagian Administrasi Pembangunan	355.320.000,00	41.418.643,00
13	Sekretariat DPRD	428.725.071,00	-
14	Inspektorat	13.903.609,00	-
15	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	12.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

16	Badan Pendapatan Daerah	2.796.651.703,00	-
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	2.810.967.812,00
Total		120.948.387.606,00	120.948.387.606,00

- b. Koreksi saldo awal Penyusutan aset tetap terdiri dari :
- Koreksi saldo awal penyusutan aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp301.431.680 merupakan penambahan saldo penyusutan atas mobil rusak berat yang di mutasikan ke aset tetap peralatan mesin setelah dilakukan pemeliharaan
 - Koreksi saldo awal penyusutan aset tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi sebesar Rp1.695.997.340,00 pada Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan atas penambahan nilai penyusutan pembangunan fisik Jembatan Nanganae yang baru di catat di tahun 2022
 - Koreksi saldo awal penyusutan aset tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi sebesar Rp713.595.431 pada Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang atas Penambahan nilai penyusutan persediaan barang yang diserahkan ke masyarakat yang merupakan daerah irigasi kewenangan kabupaten sehingga direklas ke aset tetap Jalan, irigasi dan Jaringan
- c. Penambahan Akumulasi penyusutan sebesar Rp 186.493.486.592,40 yang terdiri dari Semester I Rp92.975.586.179,00 dan Semester II Rp93.517.900.413,40.
- d. Berkurangnya Akumulasi penyusutan Tahun 2022 sebesar Rp29.784.133.068,00 disebabkan karena aset tetap yang pindah ke aset lain dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 31 Daftar Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dipindah ke Aset Lain

No	OPD	Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			Total
		Peralatan dan Mesin	Gedung Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1	Dinas Kesehatan		334.938.315	-	334.938.315
2	RSUD Komodo	33.548.679	-	-	33.548.679
3	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan		-	25.742.919.186	25.742.919.186
4	Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang		-	215.536.529	215.536.529
5	Dinas Sosial	125.155.768		-	125.155.768
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM			66.871.450	66.871.450
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	175.045.209		-	175.045.209
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	203.274.783		-	203.274.783
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	994.918.191		-	994.918.191
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	74.739.534		-	74.739.534
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		15.239.833	-	15.239.833
12	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	21.766.828		-	21.766.828
13	Bagian Hukum	20.000.000		-	20.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

14	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	57.297.620		-	57.297.620
15	Bagian Administrasi Pembangunan	11.544.554		-	11.544.554
16	Sekretariat DPRD	355.819.329		-	355.819.329
17	Kecamatan Lembor	33.855.000		-	33.855.000
18	Kecamatan Lembor Selatan	172.933.334		-	172.933.334
19	Kecamatan Welak	100.000.000		-	100.000.000
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	182.827.701		-	182.827.701
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah			-	
22	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	179.966.025		-	179.966.025
	Total	2.742.692.555	350.178.148	26.025.327.165	29.118.197.868,00

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya

31 Des 2022

31 Des 2021

Rp59.816.797.414,14

Rp32.364.118.779,14

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp59.816.797.414,14. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 32 Rincian Aset Lainnya

No	Uraian	Saldo 31/12/2021	Koreksi Saldo Awal 2022		Saldo 01/01/2022	Mutasi Tahun 2022		Saldo 31/12/2022
			Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
1	Tuntutan Ganti Rugi	1.880.720.125,14	-	-	1.880.720.125,14	732.860.053,00	63.826.416,00	2.549.753.762,14
2	Aset Tak Berwujud	5.766.447.367,00	-	-	5.766.447.367,00	2.401.583.082,00	1.261.283.082,00	6.906.747.367,00
3	Aset Lain-Lain	46.357.803.777,00	867.874.836,00	-	47.225.678.613,00	68.618.551.238,00	20.968.677.724,00	94.875.552.127,00
	Jumlah A	54.004.971.269,14	867.874.836,00	-	54.872.846.105,14	71.752.994.373,00	22.293.787.222,00	104.332.053.256,14
1	Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud	(1.577.139.243,00)			(1.577.139.243,00)	(624.752.237,00)		(2.201.891.480,00)
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(20.063.711.270,00)	(867.874.836,00)		(20.931.586.106,00)	(30.729.234.818,00)	(9.347.456.562,00)	(42.313.364.362,00)
	Jumlah B	(21.640.850.513,00)	(867.874.836,00)	-	(22.508.725.349,00)	(31.353.987.055,00)	(9.347.456.562,00)	(44.515.255.842,00)
1	Dana Bergulir	-	-	-	-	867.874.836,00	-	867.874.836,00
2	Penyisihan Dana Bergulir	-	-	-	-	-867.874.836,00	-	-867.874.836,00
	Jumlah Aset Lainnya (A + B)	32.364.120.756,14	0,00	0,00	32.364.120.756,14	40.399.007.318,00	12.946.330.660,00	59.816.797.414,14

Aset Lainnya sebesar Rp59.816.797.414,14 terdiri dari:

1) Tuntutan Ganti Rugi

31 Des 2022

31 Des 2021

Rp 2.549.753.762,14

Rp1.880.720.125,14

Terdapat saldo Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2022 sebesar Rp2.549.753.762,14 yang merupakan penjumlahan saldo awal Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp2.549.753.762,14 ditambah penambahan saldo tahun 2022 Rp732.860.053,00 dikurangi total penyeteroran Tahun 2021 sebesar Rp63.826.416,00. Pada Tahun 2022 Saldo Tuntutan Ganti Rugi mengalami kenaikan sebesar Rp669.033.637,00 dari Saldo Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Terdapat koreksi saldo awal Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp1.845.640.125,14 dari Inspektorat ke Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Permendagri 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah dimana kewenangan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

pembentukan Sekretariat Majelis Kerugian Daerah menjadi kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD).

- Pada Tahun 2022 terdapat cicilan pelunasan saldo Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp63.826.416,00 yang merupakan atas Temuan Kekurangan Volume Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2020 dan 2021 yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2021 berdasarkan SK Pembebanan, sehingga saldo atas Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp152.940.710,00 ($Rp216.767.126,00 - Rp63.826.416,00 = Rp152.940.710,00$) berdasarkan STS Nomor STS Nomor 298/STS/VIII/2022, STS Nomor 040/STS/I/2022, STS Nomor 041/STS/I/2022, STS Nomor 042/STS/I/2022, STS Nomor 067/STS/II/2022, 320/STS/IX/2022, STS Nomor 0360/STS/I/2022 & STS Nomor 327/A/IX/2022, dan STS Nomor 021/STS/I/2022.
- Selain itu pada Tahun 2022 terdapat penambahan saldo Tuntutan Ganti Rugi yang terdiri dari:
 - (1) TPTGR atas Realisasi belanja tidak didukung bukti lengkap & sah, dan penggunaan dana Korpri tidak sesuai peruntukan SKTJM: Tanpa Nomor, ditandatangani Sdri. Anastasia Luhur Eng, tgl 22 September 2022 Jaminan: Surat Jual Beli Tanah dengan NJOP Rp50.000.000,00. Akan dibayar 24 kali s.d. Agustus 2024 sebesar Rp19.103.543,00.
 - (2) TPTGR atas LYHL (Bendahara Kelurahan Golo Ru'u) Kasus: terdapat kerugian awal Rp64.361.000,00 atas kegiatan fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat berupa pembangunan MCK yang tidak direalisasikan namun dananya dipegang bendahara yang bersangkutan sebesar Rp 30.240.438,00.
 - (3) TPTGR atas MAW (Kepala UPT Balai Benih Ikan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan) Kasus: Belanja Tidak didukung bukti, SKTJM ditandatangani Sdr. MAW, tanggal 22 September 2022 sebesar Rp15.800.000,00.
 - (4) TPTGR atas MM (Staf Honorar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Manggarai Barat) Kasus: Uang Retribusi Pasar Lembor Tahun 2021 SKTJM Sdr MM, tanggal 5 Oktober 2022 sebesar Rp24.230.000,00.
 - (5) Kekurangan Volume atas pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan ruas jalan Ngaet – Kaung – Wae Jare di Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan sebesar Rp 30.681.817,00.
 - (6) Kekurangan Volume pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan kapasitas struktur jalan (khusus kabupaten) Wol – Datak – Semang – Ndiuk di Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan sebesar Rp79.843.328,00.
 - (7) Kekurangan Volume pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit di RSUD Komodo sebesar Rp359.154.312,00.
 - (8) Kekurangan Volume pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp 173.806.615,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Rincian Saldo Tuntutan Ganti Rugi, lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 19**

2) **Aset Tak Berwujud**

31 Des 2022
Rp4.704.855.887,00

31 Des 2021
Rp4.189.306.147,00

Nilai buku Aset berwujud setelah amortisasi per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Daftar Aset Tak Berwujud

No	Akun	Saldo Awal 2022	Mutasi Tahun 2022		Saldo 31/12/2022
			Tambah	Kurang	
1	Perangkat Lunak	715.189.400,00	1.257.339.400,00	117.039.400,00	1.855.489.400,00
2	Lisensi	20.000.000,00			20.000.000,00
3	Kajian (DED)	5.031.257.967,00	1.144.243.682,00	1.144.243.682,00	5.031.257.967,00
	Jumlah A	5.766.447.367,00	2.401.583.082,00	1.261.283.082,00	6.906.747.367,00
1	Akumulasi Amortisasi	(1.577.141.220,00)	(624.752.237,00)	(1.977,00)	(2.201.891.480,00)
	Jumlah B	(1.577.141.220,00)	(624.752.237,00)	(1.977,00)	(2.201.891.480,00)
	Jumlah Aset Tak Berwujud (A + B)	4.189.306.147,00	1.776.830.845,00	1.261.281.105,00	4.704.855.887,00

- Penambahan Aset tidak berwujud dari Pengadaan perangkat lunak sebesar Rp1.257.339.400,00 terdapat pada RSUD Komodo sebesar Rp356.300.000,00 (Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit) dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebesar Rp784.000.000,00 (Aplikasi Absensi Seber Mai Duat/Absensi Online). Sedangkan penambahan sebesar Rp117.039.400,00 pada Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan merupakan mutasi Aset tidak berwujud dari Dinas Perhubungan. Penambahan dan Pengurangan Aset tidak berwujud dari Pengadaan Kajian (DED) merupakan Mutasi mutasi Aset tidak berwujud dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- Penambahan Akumulasi Amortisasi sebesar (Rp624.752.237,00) yang terdiri dari Semester I (Rp288.322.368,00) dan Semester II (Rp336.429.869,00)
- Penambahan Akumulasi Amortisasi sebesar (Rp1.977,00) merupakan koreksi atas akumulasi Amortisasi dinas Perhubungan

Adapun Rincian Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 34 Rincian Aset Tak Berwujud

No		Masa Perolehan		Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Akumulasi Amortisasi		Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
		BL N	THN			Semester I	Semester II		
1		3		4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	Web Site	10	2015	20.000.000,00	(12.500.000,00)	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	(14.500.000,00)	5.500.000,00
	DED Embung	12	2018	138.341.000,00	(42.655.142,00)	(6.917.050,00)	(6.917.050,00)	(56.489.242,00)	81.851.758,00
	DED JEMBATAN WAE NUWA II, WAE RAWAS II, WAE RENDONG II, WAE JERENG	12	2018	147.276.285,00	(45.410.186,00)	(7.363.814,00)	(7.363.814,00)	(60.137.814,00)	87.138.471,00
	Dokumen Lingkungan PHJD Paket I - Langka Kabe - Patung Caci - SMIP	12	2019	79.724.000,00	(16.609.167,00)	(3.986.200,00)	(3.986.200,00)	(24.581.567,00)	55.142.433,00
	Dokumen Lingkungan PHJD Paket II - Patung Caci - Wae Kesambi - Sp. Batu Cermin - SMIP	12	2019	79.724.000,00	(16.609.167,00)	(3.986.200,00)	(3.986.200,00)	(24.581.567,00)	55.142.433,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

	Dokumen Lingkungan PHJD Paket III -TK. Ade Irma - Wae Kesambi & Perjinan - Goa Maria Golo Koe	12	2019	79.724.000,00	(16.609.167,00)	(3.986.200,00)	(3.986.200,00)	(24.581.567,00)	55.142.433,00
	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	12	2019	334.000.000,00	(86.283.333,00)	(16.700.000,00)	(16.700.000,00)	(119.683.333,00)	214.316.667,00
	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	12	2019	657.162.000,00	(136.908.750,00)	(32.858.100,00)	(32.858.100,00)	(202.624.950,00)	454.537.050,00
	Aplikasi Integrasi cetak	11	2021	22.598.930,00	(376.649,00)	(1.129.946,00)	(1.129.947,00)	(2.636.542,00)	19.962.388,00
	APLIKASI SIM PKB standar	11	2021	71.371.495,00	(1.189.525,00)	(3.568.575,00)	(3.568.575,00)	(8.326.675,00)	63.044.820,00
	Aplikasi Terminal Visual	11	2021	23.068.975,00	(384.483,00)	(1.153.449,00)	(1.153.449,00)	(2.691.381,00)	20.377.594,00
2	Dinas Lingkungan Hidup ,Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan								
	Hasil Kajian (DED) DED Pedesterian 2019	9	2018	99.082.000,00	(33.027.333,00)	(4.954.100,00)	(4.954.100,00)	(42.935.533,00)	56.146.467,00
	DED Drainase Dalam Kota Labuan Bajo	7	2018	99.384.000,00	(34.784.400,00)	(4.969.200,00)	(4.969.200,00)	(44.722.800,00)	54.661.200,00
	DED Penataan Lokasi Wisata Rohani Golo Koe	3	2018	49.863.000,00	(19.114.150,00)	(2.493.150,00)	(2.493.150,00)	(24.100.450,00)	25.762.550,00
	DED Perencanaan DAU Paket I	10	2018	99.965.000,00	(32.488.625,00)	(4.998.250,00)	(4.998.250,00)	(42.485.125,00)	57.479.875,00
	DED Perencanaan DAU Paket II	9	2018	99.891.000,00	(33.297.000,00)	(4.994.550,00)	(4.994.550,00)	(43.286.100,00)	56.604.900,00
	DED Perencanaan DAK Cluster I	10	2018	74.933.000,00	(24.353.225,00)	(3.746.650,00)	(3.746.650,00)	(31.846.525,00)	43.086.475,00
	DED Perencanaan DAK Cluster II	10	2018	74.991.000,00	(24.372.075,00)	(3.749.550,00)	(3.749.550,00)	(31.871.175,00)	43.119.825,00
	DED Perencanaan DAK Cluster III	10	2018	74.969.000,00	(24.364.925,00)	(3.748.450,00)	(3.748.450,00)	(31.861.825,00)	43.107.175,00
	DED Perencanaan DAK Cluster IV	11	2018	74.940.000,00	(23.731.000,00)	(3.747.000,00)	(3.747.000,00)	(31.225.000,00)	43.715.000,00
	DED Desa Gorontalo	12	2019	99.995.000,00	(20.832.292,00)	(4.999.750,00)	(4.999.750,00)	(30.831.792,00)	69.163.208,00
	DED Jalan Lingkungan kelurahan Wae Kelambu	12	2019	99.990.000,00	(20.831.250,00)	(4.999.500,00)	(4.999.500,00)	(30.830.250,00)	69.159.750,00
	DED Jalan Lingkungan Desa Batu Cermin	12	2019	99.880.000,00	(20.808.333,00)	(4.994.000,00)	(4.994.000,00)	(30.796.333,00)	69.083.667,00
	DED Kampung Ujung	12	2019	96.360.682,00	(20.075.142,00)	(4.818.034,00)	(4.818.034,00)	(29.711.210,00)	66.649.472,00
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								
	Website dengan Sistem dan Tracking Ijin	12	2019	548.200.000,00	(340.700.000,00)	(27.410.000,00)	(27.410.000,00)	(395.520.000,00)	152.680.000,00
	Penyusunan Kajian Potensi dan Investasi Agribisnis Hortikultura	12	2019	225.965.000,00	(50.842.125,00)	(11.298.250,00)	(11.298.250,00)	(73.438.625,00)	152.526.375,00
4	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan								
	DED Cunca Rami	12	2018	105.105.000,00	(32.407.375,00)	(5.255.250,00)	(5.255.250,00)	(42.917.875,00)	62.187.125,00
	DED Batu Cermin	12	2018	141.274.000,00	(43.559.483,00)	(7.063.700,00)	(7.063.700,00)	(57.686.883,00)	83.587.117,00
	DED Cunca Wulang	12	2018	105.429.000,00	(32.507.275,00)	(5.271.450,00)	(5.271.450,00)	(43.050.175,00)	62.378.825,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah								
	Jasa Penyusunan Analisis Kesesuaian lahan Pertanian	12	2019	999.955.000,00	(208.323.958,00)	(49.997.750,00)	(49.997.750,00)	(308.319.458,00)	691.635.542,00
	Penyusunan Landscape dan Penataan Perkantoran Pemerintah Kab.Manggarai Barat	10	2019	599.885.000,00	(134.974.125,00)	(29.994.250,00)	(29.994.250,00)	(194.962.625,00)	404.922.375,00
	Profil Sosial Ekonomi (PSETK) Paket I Pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	9	2020	96.700.000,00	(12.893.333,00)	(4.835.000,00)	(4.835.000,00)	(22.563.333,00)	74.136.667,00
	Profil Sosial Ekonomi (PSETK) Paket II Pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	9	2020	96.750.000,00	(12.900.000,00)	(4.837.500,00)	(4.837.500,00)	(22.575.000,00)	74.175.000,00
6	RSUD Komodo								
	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (Aplikasi Mora Medical Integrated System)	3	2022	356.300.000,00	-	-	(8.907.500,00)	(8.907.500,00)	347.392.500,00
7	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah								
	Aplikasi Absensi Seber Mai Duat (SMD)	5	2022	784.000.000,00	-	-	(39.200.000,00)	(39.200.000,00)	744.800.000,00
8	Bagian Organisasi								
	Aplikasi Sistem Informasi Analisis Jabatan	12	2021	49.950.000,00	(416.250,00)	(2.497.500,00)	(2.497.500,00)	(5.411.250,00)	44.538.750,00
	Jumlah			6.906.747.367,00	(1.577.139.243,00)	(288.322.368,00)	(336.429.869,00)	(2.201.891.480,00)	4.704.855.887,00

Nilai aset tidak berwujud diamortisasi berdasarkan perkiraan masa manfaat. Masa manfaat aset tidak berwujud selama 10 Tahun.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

3) Aset Lain-lain

31 Des 2022

31 Des 2021

Rp52.562.187.765,00

Rp26.294.092.507,00

Nilai buku Aset Lain-Lain setelah akumulasi penyusutan dan amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Daftar Aset Lain – Lain

No	Aset Lain-Lain	Saldo 31 Desember 2021	Mutasi Tahun 2022		Saldo 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
I	Aset Lain-Lain dari Aset Tetap				
1	Peralatan dan Mesin	18.384.179.941,00	5.873.964.502,00	9.460.641.669,00	14.797.502.774,00
2	Gedung dan Bangunan	26.293.579.636,00	1.608.001.307,00	11.198.511.255,00	16.703.069.688,00
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	59.965.141.285,00	-	59.965.141.285,00
4	Aset Tetap Lainnya	337.524.800,00	-	309.524.800,00	28.000.000,00
	Jumlah A	45.015.284.377,00	67.447.107.094,00	20.968.677.724,00	91.493.713.747,00
1	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	-19.177.382.069,00	-30.427.803.138,00	-9.046.024.882,00	-40.559.160.325,00
	Jumlah B	-19.177.382.069,00	-30.427.803.138,00	-9.046.024.882,00	-40.559.160.325,00
	Jumlah ASET LAIN-LAIN I (A + B)	25.837.902.308,00	37.019.303.956,00	11.922.652.842,00	50.934.553.422,00
II					
1	Aset Tidak Berwujud	1.342.519.400,00	-	-	1.342.519.400,00
	Jumlah A	1.342.519.400,00	-	-	1.342.519.400,00
1	Akumulasi Amortisasi	-886.329.201,00	-	-	-886.329.201,00
	Jumlah B	-886.329.201,00	-	-	-886.329.201,00
	Jumlah Aset Tak Berwujud (A + B)	456.190.199,00	-	-	456.190.199,00
	Jumlah Dana Bergulir (A + B)	-	-	-	-
III					
1	Treasury Deposit Facility (TDF)	-	1.171.444.144,00	-	1.171.444.144,00
	Jumlah TDF	-	1.171.444.144,00	-	1.171.444.144,00
	Jumlah ASET LAIN-LAIN (I+II+III)	26.294.092.507,00	38.190.748.100,00	11.621.221.162,00	52.562.187.765,00

Penjelasan atas mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut :

1. Mutasi tambah aset lain-lain dari aset tetap sebesar Rp67.447.107.094,00 dan Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat sebesar (Rp29.857.620.031,00) dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 36 Rincian Mutasi Tambah Aset Lain-Lain dari Aset Tetap Per 31 Desember 2022

No	OPD	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	-	1.458.101.307,00	-	1.458.101.307,00
2	RSUD Komodo	45.588.848,00	-	-	45.588.848,00
3	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan	2.553.576.287,00	-	58.633.464.994,00	61.187.041.281,00
4	Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang	15.000.000,00	-	1.145.058.291,00	1.160.058.291,00
5	Dinas Sosial	137.396.000,00	-	-	137.396.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	-	-	186.618.000,00	186.618.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	175.045.209,00	-	-	175.045.209,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	223.887.335,00	-	-	223.887.335,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,	1.001.633.831,00	-	-	1.001.633.831,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	77.265.784,00	-	-	77.265.784,00
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	149.900.000,00	-	149.900.000,00
12	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	21.766.828,00	-	-	21.766.828,00
13	Bagian Hukum	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
14	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat	60.214.286,00	-	-	60.214.286,00
15	Bagian Administrasi Pembangunan	11.544.554,00	-	-	11.544.554,00
16	Sekretariat DPRD	804.344.341,00	-	-	804.344.341,00
17	Kecamatan Lembor	39.262.500,00	-	-	39.262.500,00
18	Kecamatan Lembor Selatan	191.750.000,00	-	-	191.750.000,00
19	Kecamatan Welak	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	215.722.674,00	-	-	215.722.674,00
21	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	179.966.025,00	-	-	179.966.025,00
Total A		5.873.964.502,00	1.608.001.307,00	59.965.141.285,00	67.447.107.094,00
1	Akumulasi Barang Rusak Berat	-3.101.326.575,00	-377.412.764,00	-26.378.880.692,00	-29.857.620.031,00
Total B		-3.101.326.575,00	-377.412.764,00	-26.378.880.692,00	-29.857.620.031,00
Total A+B		2.772.637.927,00	1.230.588.543,00	33.586.260.593,00	37.589.487.063,00

2. Mutasi kurang aset lain-lain Tahun 2022 sebesar Rp20.367.246.043,00 dan Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat sebesar (Rp 8.174.410.095,00) yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 37 Daftar Mutasi Keluar Aset Lain – Lain Tahun 2022

No	OPD	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	jumlah
A						
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	202.343.040,00	11.036.764.330,00	-	1.174.800,00	11.240.282.170,00
2	Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar	36.500.000,00	-	-	-	36.500.000,00
3	Dinas Kesehatan	200.000.000,00				200.000.000,00
4	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan	286.924.698,00	-	-	-	286.924.698,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	80.000.000,00	-	-	-	80.000.000,00
7	Dinas Sosial	11.978.300,00	-	-	-	11.978.300,00
8	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	89.884.300,00	-	-	-	89.884.300,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	567.193.000,00	-	-	308.350.000,00	875.543.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	124.931.470,00	-	-	-	124.931.470,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	521.914.000,00	-	-	-	521.914.000,00
12	Dinas Perhubungan	2.553.576.287,00	-	-	-	2.553.576.287,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	714.958.874,00	-	-	-	714.958.874,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.496.500,00	-	-	-	2.496.500,00
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	36.190.000,00	-	-	-	36.190.000,00
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	68.173.825,00	39.274.925,00	-	-	107.448.750,00
17	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	18.623.787,00	122.472.000,00	-	-	141.095.787,00
18	Bagian Pemerintahan Umum	16.500.000,00	-	-	-	16.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	jumlah
19	Bagian Hukum	17.984.500,00	-	-	-	17.984.500,00
20	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	342.892.728,00	-	-	-	342.892.728,00
21	Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam	23.200.000,00	-	-	-	23.200.000,00
22	Bagian Umum	793.016.560,00	-	-	-	793.016.560,00
23	Sekretariat DPRD	2.332.465.620,00	-	-	-	2.332.465.620,00
24	Kecamatan Sano Nggoang	72.662.000,00	-	-	-	72.662.000,00
25	Kecamatan Welak	13.865.000,00	-	-	-	13.865.000,00
26	Kelurahan Labuan Bajo	31.752.000,00	-	-	-	31.752.000,00
27	Kelurahan Wae Kelambu	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
28	Inspektorat	114.415.180,00	-	-	-	114.415.180,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	85.000.000,00	-	-	-	85.000.000,00
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	85.000.000,00	-	-	-	85.000.000,00
Total A		9.460.641.669,00	11.198.511.255,00	0,00	309.524.800,00	20.968.677.724,00
1	Akumulasi Barang Rusak Berat	-6.202.825.289,00	-2.273.016.486,00			-8.475.841.775,00
Total B		-6.202.825.289,00	-2.273.016.486,00	0,00	0,00	-8.475.841.775,00
Total A+B		3.257.816.380,00	8.925.494.769,00	0,00	309.524.800,00	12.492.835.949,00

Atas total mutasi kurang aset lainnya sebesar Rp20.968.677.724,00 dapat di rinci sebagai berikut :

- Mutasi kurang atas penghapusan barang milik daerah sebesar Rp18.013.669.757,00
- Mutasi kurang yang disebabkan oleh mutasi barang antar SKPD sebesar Rp 2.955.007.967,00

3. Pengakuan Pendapatan Dana Transfer Bagi Hasil ke Daerah Non Tunai dalam bentuk Treasury Deposit Facility (TDF) yang belum dicairkan TA 2022 sebesar Rp1.171.444.144,00 berdasarkan Nota Dinas Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor ND-202/PB.6/2023 tentang Penyesuaian kebijakan akuntansi atas penyaluran Dana Transfer Bagi Hasil ke Daerah Non Tunai dalam bentuk Treasury Deposit Facility (TDF) dan PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility tanggal 3 Maret 2023.

4) Dana Bergulir

31 Des 2022

31 Des 2021

Rp867.874.836,00

Rp867.874.836,00

Jumlah sebesar Rp867.874.836,00 merupakan saldo dana yang digulirkan kepada masyarakat yang secara teknis pengelolaannya menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	per 31 Desember 2022	per 31 Desember 2021
1	Dana Bergulir	867.874.836,00	867.874.836,00
2	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	(867.874.836,00)	(867.874.836,00)
	Nilai Bersih Pokok Dana Bergulir	0,00	0,00

Tidak terdapat penambahan perguliran uang yang bersumber dari APBD Kabupaten Manggarai Barat di Tahun 2022, selain itu tidak terdapat cicilan pelunasan Pokok



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Dana Bergulir pada Tahun 2022 sehingga Nilai Aset Lain lain - Dana Bergulir yang disajikan di Neraca Per 31 Desember 2022 sama dengan yang disajikan di Neraca Per 31 Desember 2021. Pada Tahun 2022 penyajian Pokok Dana Bergulir Pokok Dana Bergulir yang disajikan pada Neraca adalah saldo pokok perguliran uang Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2013.

Penyisihan Dana Bergulir	31 Des 2022	31 Des 2021
	(Rp867.874.836,00)	(Rp867.874.836,00)

Nilai Aset Lain lain - Dana Bergulir sebesar Rp867.874.836,00 dikurangi Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih per 31 Desember 2022 sebesar Rp867.874.836,00, dimana Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih termasuk kategori piutang macet berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sehingga Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih ditetapkan 100% dari Aset Lain lain - Dana Bergulir.

Nilai Bersih Pokok Dana Bergulir

Nilai Bersih Pokok Dana Bergulir yang disajikan di Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 merupakan penjumlahan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir sebesar Rp867.874.836,00 dikurangi Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih per 31 Desember 2022 sebesar Rp867.874.836,00, dimana Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih termasuk kategori piutang macet berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sehingga Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih ditetapkan 100% dari Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir.

Rincian saldo Aset Lain lain – Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir per 31 Desember 2022 dijelaskan dalam **Lampiran 20**



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

2. Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga	31 Des 2022	31 Des 2021
	Rp2.287.056.274,00	Rp247.391.088,36

Jumlah sebesar Rp2.287.056.274,00 merupakan saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga Tahun 2022 yang terdapat pada Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri) Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Saldo utang PFK pada Bendahara Umum Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.279.241.849,00 terdiri dari PPh pasal 21 sebesar Rp415.050.091,00 dan PPh pasal 22 Rp1.864.191.758,00 dan pada Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri) Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebesar Rp7.814.425,00 terdiri dari PPN sebesar Rp6.570.387,00, PPh 21 sebesar Rp395.000,00, PPh 22 sebesar Rp0,00 dan PPh 23 sebesar Rp849.038,00. Saldo utang PFK pada Bendahara Umum Daerah Bendahara Dana BOS Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat merupakan saldo Utang PFK yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Rincian saldo Utang PFK Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Utang PFK per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Uraian	per 31 Desember 2022	per 31 Desember 2021
A	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
	Utang PPh Pasal 21	415.050.091,00	0,00
	Utang PPh Pasal 22	1.864.191.758,00	0,00
B	PFK Bendahara Dana BOS SD dan SMP		
	Utang PPh Pasal 21	395.000,00	19.824.338,00
	Utang PPh Pasal 22	0,00	761.964,00
	Utang PPh Pasal 23	849.038,00	31.448.907,00
	Utang PPN	6.570.387,00	195.355.879,36
	Total	2.287.056.274,00	247.391.088,36

Sedangkan jumlah sebesar Rp247.391.088,36 merupakan saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga Tahun 2021 yang terdapat Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri) Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Saldo utang PFK pada Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri) Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebesar Rp247.391.088,36 terdiri dari PPN sebesar Rp195.355.879,36, PPh 21 sebesar Rp19.824.338,00, PPh 22 sebesar Rp761.964,00 dan PPh 23 sebesar Rp31.448.907,00. Saldo utang PFK Bendahara Dana BOS Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat merupakan saldo Utang PFK yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 yang



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

seluruhnya sudah disetor selama tahun 2022. Daftar Rincian Utang PFK Tahun 2021 yang merupakan Utang PFK Dana BOS dapat diuraikan pada **Lampiran 21**

Rincian saldo Utang PFK Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Utang PFK per 31 Desember 2021

No	Uraian	per 31 Desember 2021
A	Sekretariat Korpri	
	Utang PPh Pasal 21	0,00
	Utang PPh Pasal 22	0,00
	Utang PPh Pasal 23	0,00
	Utang PPN	0,00
B	Kecamatan Kuwus	
	Utang PPh Pasal 21	0,00
	Utang PPh Pasal 22	0,00
	Utang PPh Pasal 23	0,00
	Utang PPN	0,00
C	PFK Bendahara Dana BOS SD dan SMP	
	Utang PPh Pasal 21	19.824.338,00
	Utang PPh Pasal 22	761.964,00
	Utang PPh Pasal 23	31.448.907,00
	Utang PPN	195.355.879,36
	Total	247.391.088,36

2) Utang Bunga	31 Des 2022	31 Des 2021
	Rp1.125.983.661,00	Rp0,00

Utang Bunga Tahun 2022 sebesar Rp1.125.983.661,00 merupakan bunga pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat periode Desember tahun 2022 atas Pinjaman PT SMI sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/KM.7/2022 tentang tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Pemotongan Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Kembali Pokok Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 Serta Pembayaran Kembali Pokok Dan/ Atau Pembayaran Bunga Atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 Untuk Periode Penyaluran Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2023.

3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31 Des 2022	31 Des 2021
	Rp 23.574.594.664,00	Rp 0,00

Jumlah sebesar sebesar Rp23.574.594.664,00 merupakan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Sedangkan Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tahun 2021 sebesar Rp0,00. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan Pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi atas Pinjaman PEN PT SMI sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/KM.7/2022 tentang tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Yang Tidak



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ditentukan Pemotongan Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Kembali Pokok Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 Serta Pembayaran Kembali Pokok Dan/ Atau Pembayaran Bunga Atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 Untuk Periode Penyaluran Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2023

4) Pendapatan Diterima Dimuka	31 Des 2022	31 Des 2021
	Rp19.168.487,50	Rp109.419.404,17

Jumlah sebesar Rp19.168.487,50 merupakan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 dan jumlah sebesar Rp109.419.404,17 merupakan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021. Pendapatan diterima dimuka timbul karena adanya perjanjian sewa tanah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan Pihak Lain yang terdiri dari:

1. Pada Tahun 2022 terdapat perpanjangan sewa atas Perjanjian sewa tanah dengan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Nomor Kontrak: $\frac{900/BPKD/205.2/II/2019}{LGL-KNT-ENT-017-T-B/RNW-1/AMDI}$ tanggal 25 Februari 2019) yang digunakan untuk membangun dan mengoperasikan Menara-menara telekomunikasi, pondasi pendukung termasuk fasilitas dan peralatan terkait, dengan besaran sewa menurut perjanjian sewa tersebut sebesar Rp 12.737.400,00 per tahun. Perjanjian sewa tersebut merupakan perpanjangan sewa pertama atas perjanjian sewa yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut selama 20 tahun terhitung sejak pembangunan konstruksi menara tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2034. Setiap 5 (lima) tahun nilai sewa akan diperbaharui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Penyetoran ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat oleh PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia di tahun 2019 (STS Nomor 876/STS/IX/2019) untuk biaya sewa selama 5 tahun atau 60 bulan sebesar Rp63.687.000,00 ($12.737.400,00 \times 5 = 63.687.000,00$). Sampai dengan 31 Desember 2022 kewajiban yang telah diberikan oleh PT Profesional Telekomunikasi Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 46 bulan sehingga jumlah pendapatan yang telah diterima di muka oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk tahun 2022 sebesar Rp14.860.300,00 untuk biaya sewa selama 14 bulan.
2. Perjanjian sewa tanah dengan Benny Asrianto (GM Area Jawa Bali dan Nusa Tenggara) dengan Nomor Kontrak 900/BPKD/420.2/IV/2018, dimana Perjanjian sewa tanah tersebut untuk Pemasangan Infrastruktur Telekomunikasi Microcell dengan nilai kontrak sebesar Rp5.994.000,00 per tahun. Jangka waktu sewa tanah dalam perjanjian tersebut selama 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2023. Penyetoran ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat oleh



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Benny Asrianto (GM Area Jawa Bali dan Nusa Tenggara) di tahun 2018 untuk biaya sewa selama 5 tahun atau 60 bulan sebesar Rp29.970.000,00 ($5.994.000,00 \times 5 = 29.970.000,00$). Sampai dengan 31 Desember 2022 kewajiban yang telah diberikan oleh Benny Asrianto (GM Area Jawa Bali dan Nusa Tenggara) kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 57 bulan sehingga jumlah pendapatan yang telah diterima di muka oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk tahun 2021 sebesar Rp1.498.500,00 untuk biaya sewa selama 3 bulan.

3. Perjanjian sewa tanah dengan Benny Asrianto (GM Area Jawa Bali dan Nusa Tenggara) dengan Nomor Kontrak 900/BPKD/420.3/IV/2018, dimana Perjanjian sewa tanah tersebut untuk untuk relokasi Menara Combat dan perubahan struktur menjadi Menara Microcell dengan nilai kontrak sebesar Rp11.238.750,00 per tahun. Jangka waktu sewa tanah dalam perjanjian tersebut selama 5 tahun dihitung sejak tanggal 4 April 2018 smpai dengan 3 April 2023. Penyetoran ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat oleh Benny Asrianto (GM Area Jawa Bali dan Nusa Tenggara) di tahun 2018 untuk biaya sewa selama 5 tahun atau 60 bulan sebesar Rp56.193.750,00 ($11.238.750,00 \times 5 = 56.193.750,00$). Sampai dengan 31 Desember 2022 kewajiban yang telah diberikan oleh Benny Asrianto (GM Area Jawa Bali dan Nusa Tenggara) kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 57 bulan sehingga jumlah pendapatan yang telah diterima di muka oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk tahun 2022 sebesar Rp2.809.687,50 untuk biaya sewa selama 3 bulan.
4. Perjanjian sewa tanah dengan PT Bank Negara Indonesia dengan Nomor Kontrak: $\frac{END/02/1247/R}{DKPP/1091.a-X/2019}$ tanggal 7 November 2019, dimana Perjanjian sewa tanah tersebut untuk sewa ruangan untuk ATM Galerry TPI dan Lokasi Antena Telekomunikasi Vsat Di Tempat Pelelangan Ikan Labuan Bajo dengan nilai kontrak sebesar Rp20.000.000,00 per tahun. Jangka waktu sewa dalam perjanjian tersebut selama 3 tahun dihitung sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 30 September 2022. Penyetoran ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat oleh PT. Bank Negara Indonesia di tahun 2019 untuk biaya sewa selama 3 tahun atau 36 bulan sebesar Rp60.000.000,00 ($20.000.000,00 \times 3 = 60.000.000,00$) dan berakhir pada tanggal 30 September 2022. Perjanjian Sewa tersebut berakhir pad tanggal 30 September 2022 dimana PT Bank Negara Indonesia tidak melakukan perpanjangan sewa tanah/lahan tersebut.

Tabel 40 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Tanah Untuk Base Transceiver Station (BTS) Per 31 Desember 2022

Nomor Kontrak BPKD	Uraian	Nilai kontrak					Pendapatan diterima dimuka (bln)	Jumlah pendapatan diterima (bulan)
		Nilai kontrak	Thn	Nilai kontrak per tahun	Bln	Nilai kontrak per bulan		
1	2	3	4	5=3/4	6	7=5/6	8	9=7x8
900/PKAD/205.2/II/2019	SEWA TANAH Untuk Base Transceiver Station (Bts) - (Termasuk Akses Jalan Ke Lokasi Yang Disewakan)	63.687.000,00	5	12.737.400,00	12	1.061.450,00	14	14.860.300,00
KNT-ENT- LGL-KNT-ENT-0017-T-B/RNW-I/AMD-I								
900/BPKD/420.2/IV/2018	Sewa Tanah Untuk Pemasangan Infrastruktur Telekomunikasi Microcell	29.970.000,00	5	5.994.000,00	12	499.500,00	3	1.498.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Nomor Kontrak BPKD	Uraian	Nilai kontrak)					Pendapatan diterima dimuka (bln)	Jumlah pendapatan diterima (bulan)
		Nilai kontrak	Thn	Nilai kontrak per tahun	Bln	Nilai kontrak per bulan		
1	2	3	4	5=3/4	6	7=5/6	8	9=7x8
900/BPKD /420.3/ IV /2018	Sewa Tanah Untuk Relokasi Menara Combat Dan Perubahan Struktur Menjadi Menara Microcell	56.193.750,00	5	11.238.750,00	12	936.562,50	3	2.809.687,50
DKPP/1091.a/X/2019 END/02/1247/R	Sewa Ruangan Untuk Atm Galery Tpi Dan Lokasi Antena Telekomunikasi Vsat Di Tempat Pelelangan Ikan Labuan Bajo	60.000.000,00	3	20.000.000,00	12	1.666.666,67	-	0,00
JUMLAH		209.850.750,00		49.970.150,00		4.164.179,17		19.168.487,50

5) Utang Beban

31 Des 2022

31 Des 2021

Rp 16.388.974.560,99

Rp 416.593.301,00

Jumlah sebesar sebesar Rp16.388.974.560,99 merupakan Utang Beban 2022 Sedangkan Saldo Utang Beban Tahun 2021 sebesar Rp416.593.301,00. Utang Beban terdapat pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Pada Tahun 2022 terdapat penambahan Utang beban sebesar Rp16.388.974.560,99 yang terdiri dari :

- Utang Beban air sebesar Rp19.136.600,00;
- Utang Beban Listrik sebesar Rp52.673.238,00;
- Utang Beban Telepon dan Internet sebesar Rp1.000.000,00;
- Utang Beban Belanja ATK dan Penggandaan sebesar Rp58.857.600,00.
- Utang Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp123.950.160,00.
- Utang Beban Belanja Insentif sebesar Rp497.500.073,00.
- Utang Beban Belanja Makan Minum sebesar Rp106.475.000,00.
- Utang Beban Pemeliharaan sebesar Rp24.007.830,00.
- Utang Beban Belanja Penggantian Pengolahan Darah (Kantong Darah) sebesar Rp35.280.000,00.
- Utang Beban Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Dan JKN Non Kapitasi sebesar Rp 523.547.100,00.
- Utang Iuran PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) sebesar Rp401.988.000,00.
- Utang Belanja Pegawai di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp14.544.558.959,99.

Pada Tahun 2022 terdapat pelunasan atas Utang Beban tahun 2021 sebesar Rp416.593.301,00 yang terdiri dari Pelunasan Utang Beban Air sebesar Rp15.264.250,00, pelunasan Utang Beban Listrik sebesar Rp15.604.641,00, Pelunasan Utang Beban Telepon/Internet sebesar Rp5.184.410,00, Pelunasan Utang Beban Belanja ATK Dan Penggandaan di Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan perkebunan sebesar Rp80.000.000,00, Utang Beban Perjalanan Dinas di Dinas PKO sebesar Rp54.100.000,00, Utang Beban Pemeliharaan di Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan sebesar Rp226.440.000,00 dan Utang Beban Belanja Peti Jenasah di Dinas Kesehatan.

Rincian Utang Beban dapat dilihat pada **Lampiran 22**



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

6) **Utang Jangka Pendek Lainnya** **31 Des 2022** **31 Des 2021**
Rp 12.560.144.077,00 **Rp9.826.000,00**

Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp 12.560.144.077,00 merupakan utang jangka pendek yang terdapat di beberapa Organisasi Perangkat Daerah. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2021	Koreksi saldo awal		Saldo per 1 Januari 2022	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	9.826.000,00	0,00	0,00	9.826.000,00	339.847.739,00	0,00	349.673.739,00
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	92.620.000,00	0,00	92.620.000,00
3	RSUD Komodo	0,00	0,00	0,00	0,00	973.445.490,00	0,00	973.445.490,00
4	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600.927.143,00	0,00	10.600.927.143,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	328.069.805,00	0,00	328.069.805,00
6	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	0,00	195.000.000,00
7	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	20.408.000,00	0,00	20.408.000,00
TOTAL		9.826.000,00	0,00	0,00	9.826.000,00	12.550.318.077,00	0,00	12.560.144.077,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp12.560.144.077,00 merupakan Saldo Utang Jangka pendek Lainnya terdiri dari:

- Penambahan Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya tahun 2022 sebesar Rp12.550.318.077,00 yang tersebar di beberapa Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp339.847.739,00, Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp92.620.000,00, RSUD Komodo sebesar Rp973.445.292,00, Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Perhubungan sebesar Rp10.600.927.241,00, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp328.069.805,00, Sekretariat DPRD sebesar Rp195.000.000,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp20.408.000,00.
- Sedangkan atas Saldo Awal Utang Jangka Pendek Lainnya pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp9.826.000,00 yaitu belanja Konsultan pengawas rehabilitasi ruang kelas SDI Lengkong Mbot, SDI Namo dan SDN Golo Lewe, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum terealisasi.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 23**

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang Lainnya **31 Des 2022** **31 Des 2021**
Rp223.958.688.928,00 **Rp0,00**

Per 31 Desember 2022 terdapat saldo Kewajiban Jangka Panjang Lainnya senilai Rp223.958.688.928,00. Pemerintah Daerah Manggarai Barat melakukan pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan Pagu Anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Rp250.000.000.000,00 dan di realisasi selama Tahun 2022 senilai Rp247.533.283.592,00 dengan rincian sebaga berikut:

No	Nama	Nominal	Tanggal
1	Pencairan ke I	62.500.000.000,00	19 April 2022
2	Pencairan ke II	112.500.000.000,00	14 September 2022
3	Pencairan ke III	72.533.283.592,00	30 November 2022
	Jumlah	247.533.283.592,00	

Atas realisasi Kewajiban Jangka Panjang dari Pinjaman SMI senilai Rp247.533.283.592,00, kewajiban pengembalian pokok pinjaman atas Pinjaman PT SMI yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi (Tahun 2023) sebesar Rp23.574.594.664,00 dicatat sebagai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sehingga Nilai Kewajiban Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp223.958.688.928,00. Pinjaman Daerah PT SMI sesuai dengan Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PRJ-216/SMI/1221 tanggal 29 Desember 2021 tentang Perjanjian Pemberian Pinjaman dan perubahannya pada Akta Notaris Lestiana Wang, SH, Mkn Nomor 32 tanggal 31 Oktober 2022 tentang perubahan dan pernyataan kembali. Pinjaman PT SMI digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana tertentu yang menjadi kewenangan daerah meliputi Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Pengawasannya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam **Lampiran 24**.

Berdasarkan perjanjian pemberian pinjaman tersebut diatur bahwa jangka waktu pinjaman selama 96 bulan/8 tahun sejak tanggal pencairan pinjaman pertama kali, termasuk masa tenggang pembayaran pokok pinjaman selama 24 bulan. Mekanisme Pembayaran Biaya Pinjaman sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian pinjaman adalah sebagai berikut:

- Suku Bunga Fixed Rate 6,19% (enam koma satu sembilan persen) p.a
- Biaya Pengelolaan Pinjaman:
 - Untuk pertama kalinya sebesar 0,185% dari Limit Pinjaman, yang dibayarkan selambat-lambatnya sebelum efektifnya Perjanjian; dan
 - Untuk tahun – tahun berikutnya sebesar 0,185% per tahun dari jumlah baki debet/outstanding/ terutang pada ulang tahun perjanjian, yang dibayarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal ulang tahun perjanjian yang berkenan
- Biaya Provisi sebesar 1% (satu persen) dari Jumlah Kumulatif Pinjaman yang dicairkan, dikenakan satu kali yang dibayarkan pada saat pencairan Tahap terakhir Pinjaman atau selambatnya sebelum tanggal terakhir *availability period*.

Pembayaran Kembali pokok dan bunga Pinjaman PTT SMI dilakukan dengan cara diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU (Dana Transfer Umum) sebagaimana diatur dalam PMK Pinjaman PEN Daerah.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah merealisasikan penyerapan Pinjaman PT SMI untuk membiayai Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Pengawasannya sesuai dengan Perjanjian Pinjaman per 31 Desember 2022 senilai Rp221.970.353.154,00 sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran 25**.



3. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.616.847.032.988,50 dengan uraian sebagai berikut:

EKUITAS AWAL	(dalam rupiah) 2.210.135.978.543,46
SURPLUS/DEFISIT-LO	1.409.525.856.364,48
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	-2.814.801.919,43
EKUITAS AKHIR	3.616.847.032.988,50

Uraian tentang akun ekuitas secara lebih terperinci disajikan pada bagian penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional.

	Tahun 2022	Tahun 2021
1. Pendapatan-LO	Rp2.507.139.673.404,09	Rp1.145.622.120.070,94

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 1 Pendapatan LO yang berakhir 31 Desember 2022

URAIAN	2022
PENDAPATAN-LO	
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	
Pendapatan Pajak Daerah - LO	142.915.940.638,16
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	41.285.881.714,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	2.720.173.212,00
Lain-lain PAD yang sah - LO	4.421.163.963,93
Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO	191.499.681.428,09
PENDAPATAN TRANSFER - LO	
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN - LO	
Dana Bagi Hasil Pajak - LO	9.996.244.127,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	2.353.107.068,00
Dana Alokasi Umum - LO	495.899.733.992,00
Dana Alokasi Khusus - LO	327.347.244.144,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan - LO	835.596.329.331,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LO	
Dana Penyesuaian - LO	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - LO	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	23.607.663.606,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi - LO	23.607.663.606,00
Total Pendapatan Transfer - LO	859.203.992.937,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO	
Pendapatan Hibah - LO	107.574.977.494,00
Pendapatan Lainnya - LO	1.349.017.543.445,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO	1.456.592.520.939,00
JUMLAH PENDAPATAN - LO	2.507.139.673.404,09

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2022	Tahun 2021
1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO	Rp191.343.159.528,09	Rp192.876.383.771,47



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO untuk periode Tahun 2022 sebesar Rp191.343.159.528,09 yang terdiri dari:

a. Pendapatan Pajak Daerah – LO **Tahun 2022** **Tahun 2021**
Rp142.915.940.638,16 **Rp85.377.429.874,87**

Realisasi Pendapatan Pajak-LO Tahun 2022 sebesar Rp142.915.940.638,16. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Uraian Pendapatan Pajak Daerah - LO	Saldo 2022
Pajak Daerah - LO	142.915.940.638,16
Pajak Hotel - LO	34.147.722.845,00
Pajak Restoran - LO	24.224.965.923,58
Pajak Hiburan - LO	460.669.625,00
Pajak Reklame - LO	942.371.762,01
Pajak Penerangan Jalan - LO	9.548.974.318,00
Pajak Parkir - LO	301.174.775,00
Pajak Air Tanah - LO	34.125.630,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	25.352.493.458,57
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LO	11.681.068.001,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	36.222.374.300,00

Tabel 3 Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah-LRA dan Pendapatan Pajak Daerah- LO

Pendapatan Pajak Daerah - LRA	Jumlah	Pendapatan Pajak Daerah - LO	Jumlah	Selisih
1	2	3	4	5 = 2-4
Pajak Daerah	141.461.757.403,65	Pajak Daerah - LO	142.915.940.638,16	-1.454.183.234,51
Pajak Hotel	34.275.785.576,00	Pajak Hotel - LO	34.147.722.845,00	128.062.731,00
Pajak Restoran	24.492.063.467,07	Pajak Restoran - LO	24.224.965.923,58	267.097.543,49
Pajak Hiburan	814.374.420,00	Pajak Hiburan - LO	460.669.625,00	353.704.795,00
Pajak Reklame	956.920.006,01	Pajak Reklame - LO	942.371.762,01	14.548.244,00
	9.548.974.318,00	Pajak Penerangan Jalan - LO	9.548.974.318,00	0,00
Pajak Penerangan Jalan				
Pajak Parkir	301.174.775,00	Pajak Parkir - LO	301.174.775,00	0,00
Pajak Air Tanah	34.125.630,00	Pajak Air Tanah - LO	34.125.630,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.604.810.458,57	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	25.352.493.458,57	252.317.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.211.154.453,00	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LO	11.681.068.001,00	-2.469.913.548,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	36.222.374.300,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	36.222.374.300,00	0,00

Selisih Pendapatan Pajak Daerah-LRA dan Pendapatan Pajak Daerah- LO dijelaskan sebagai berikut:

1. Selisih Pajak Hotel-LO dan Pajak Hotel-LRA sebesar Rp128.062.731,00 dapat dijelaskan terdapat penyetoran piutang pajak hotel pada Tahun 2022 sebesar Rp157.862.014,00 dan penambahan



- atas piutang pajak hotel Tahun 2021 sebesar Rp29.799.283,00 pada Badan Pendapatan Daerah.
2. Selisih Pajak Restoran-LO dan Pajak Restoran-LRA sebesar Rp267.097.543,49 dapat dijelaskan terdapat penyetoran piutang pajak restoran pada Tahun 2022 sebesar Rp376.162.407,49 dan penambahan atas piutang pajak restoran Tahun 2022 sebesar Rp109.064.864,00 pada Badan Pendapatan Daerah.
 3. Selisih Pajak Hiburan - LRA sebesar Rp353.704.795,00 dapat dijelaskan terdapat penyetoran Pajak Hiburan pada Tahun 2022 sebesar Rp356.922.295,00 dan penambahan atas piutang Pajak Hiburan Tahun 2021 sebesar Rp3.217.500,00 pada Badan Pendapatan Daerah.
 4. Selisih Pajak Reklame - LO dan Pajak Reklame-LRA sebesar Rp14.548.244,00 dapat dijelaskan terdapat penyetoran Pajak Reklame Rp27.708.959,00 dan penambahan atas piutang Pajak Reklame Tahun 2022 sebesar Rp13.160.715,00 pada Badan Pendapatan Daerah.
 5. Selisih Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA sebesar 252.317.000,00 dapat dijelaskan terdapat penyetoran Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Tahun 2022 sebesar Rp1.514.059.000,00 dan penambahan atas piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2022 sebesar Rp1.261.742.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah.
 6. Selisih Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan-LO dan Pajak Bumi/Bangunan Pedesaan/Perkotaan- LRA sebesar (Rp2.469.913.548,00), dapat jelaskan bahwa pada Tahun 2022 terdapat penyetoran atas Piutang PBB P2 sebesar Rp4.733.386.897,00 dan Penambahan piutang PBB P2 sebesar Rp2.263.473.349,00 pada Badan Pendapatan Daerah.

b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp41.442.403.614,00	Rp52.332.931.926,00

Realisasi Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2022 sebesar Rp41.442.403.614,00 adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Uraian Pendapatan Retribusi Daerah - LO	Saldo 2022
Retribusi Daerah - LO	41.442.403.614,00
Retribusi Jasa Umum - LO	22.329.726.698,00
Retribusi Jasa Usaha - LO	14.044.158.082,00
Retribusi Perizinan Tertentu - LO	5.068.518.834,00



Tabel 5 Perbandingan Pendapatan Retribusi LO-Pendapatan Retribusi LRA

Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	Jumlah	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	Jumlah	Selisih
1	2	3	4	5 = 2-4
Retribusi Daerah	41.417.841.264,00	Retribusi Daerah - LO	41.285.881.714,00	131.959.550,00
Retribusi Jasa Umum	22.531.848.198,00	Retribusi Jasa Umum - LO	22.173.204.798,00	358.643.400,00
Retribusi Jasa Usaha	13.817.474.232,00	Retribusi Jasa Usaha – LO	14.044.158.082,00	-226.683.850,00
Retribusi Perizinan Tertentu	5.068.518.834,00	Retribusi Perizinan Tertentu - LO	5.068.518.834,00	0,00

Penjelasan Selisih Pendapatan Retribusi LO-Pendapatan Retribusi LRA : -
Rp131.959.500,00

- Selisih Retribusi Jasa Umum-LRA dan Retribusi Jasa Umum-LO sebesar Rp191.959.900,00 dapat dijelaskan :
 - Selisih disebabkan oleh terdapat pelunasan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Tahun 2022 sebesar Rp1.402.703.800,00 dan penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp1.049.060.400,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Komodo atas Klaim BPJS.
 - Cicilan Pelunasan Piutang Retribusi Tempat Pariwisata Pulau Komodo (Loh Liang) an. PT. Flores Trail (Emil Bei) sebesar Rp5.000.000,00.
- Selisih Retribusi Jasa Usaha - LO dan Retribusi Jasa Usaha - LRA sebesar (Rp226.683.850,00) pada Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Pengurangan atas pendapatan dimuka atas sewa tanah untuk *Base Transceiver Station* (BTS) sebesar Rp54.668.750,00, dan sewa ruangan untuk ATM Galery dan lokasi antena telekomunikasi vsat di tempat pelelangan ikan labuan bajo Rp15.000.000,00.
 - Pelunasan Piutang Retribusi Pasar pada tahun 2022 sebesar Rp9.500.000,00 dan penambahan Piutang Retribusi Pasar Tahun 2022 sebesar Rp4.997.000,00 pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 - Penambahan Piutang Retribusi di Tempat Pelelangan Ikan sebesar Rp253.195.000,00 dan Penyetoran Piutang Retribusi di Tempat Pelelangan Ikan sebesar Rp164.560.000.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp 2.720.173.212,00	Rp4.012.182.992,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2022 sebesar Rp2.720.173.212,00 adapun rinciannya adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 6 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Uraian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	Saldo 2022
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	2.720.173.212,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	2.720.173.212,00

d. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 Tahun 2021
Lainnya – LO Rp4.421.163.963,93 Rp51.153.838.978,60

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO Tahun 2022 sebesar Rp4.421.163.963,93 adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO

Uraian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO	Saldo 2022
Lain-lain PAD yang Sah – LO	4.421.163.963,93
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	558.214.000,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	540.000,00
Jasa Giro – LO	1.108.793.804,21
Pendapatan Bunga – LO	538.549.852,19
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO	249.567.108,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	1.223.548.594,66
Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO	52.824.110,00
Pendapatan dari Pengembalian – LO	237.656.487,56
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan – LO	451.470.007,31

Tabel 8 Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Lainnya LO dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya LRA

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LRA	Jumlah	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO	Jumlah	Selisih
1	2	3	4	5 = 2-4
Lain-lain PAD yang Sah	5.332.402.636,93	Lain-lain PAD yang Sah – LO	4.421.163.963,93	911.238.673,00
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	558.214.000,00	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	558.214.000,00	-
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	540.000,00	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	540.000,00	-
Jasa Giro	1.108.793.804,21	Jasa Giro – LO	1.108.793.804,21	-
Pendapatan Bunga	538.549.852,19	Pendapatan Bunga – LO	538.549.852,19	-
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	224.019.543,00	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO	249.567.108,00	-25.547.565,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.223.548.594,66	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	1.223.548.594,66	-
Pendapatan Denda Pajak Daerah	52.824.110,00	Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO	52.824.110,00	-
Pendapatan dari Pengembalian	247.656.487,56	Pendapatan dari Pengembalian – LO	237.656.487,56	10.000.000,00
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	451.470.007,31	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan – LO	451.470.007,31	-
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	926.786.238,00	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah- LO	0,00	926.786.238,00



Penjelasan Selisih Pendapatan Asli Daerah Lainnya LO dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya LRA :

1. Selisih Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LRA sebesar (Rp25.547.565,00) dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Pada Tahun 2022 terdapat cicilan pelunasan saldo Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp63.826.416,00 yang merupakan temuan atas Kekurangan Volume Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2020 dan 2021 yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2021 berdasarkan SK Pembebanan, sehingga saldo atas Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp152.940.710,00 ($Rp216.767.126,00 - Rp63.826.416,00 = Rp152.940.710,00$) berdasarkan STS Nomor STS Nomor 298/STS/VIII/2022, STS Nomor 040/STS/I/2022, STS Nomor 041/STS/I/2022, STS Nomor 042/STS/I/2022, STS Nomor 067/STS/II/2022, 320/STS/IX/2022, STS Nomor 0360/STS/I/2022, STS Nomor 327/A/IX/2022, dan STS Nomor 021/STS/I/2022.
 - TPTGR atas Realisasi belanja tidak didukung bukti lengkap & sah, dan penggunaan dana Korpri tidak sesuai peruntukan SKTJM: Tanpa Nomor, ditandatangani Sdri. Anastasia Luhur Eng, tgl 22 September 2022 Jaminan: Surat Jual Beli Tanah dengan NJOP Rp50.000.000,00. Akan dibayar 24 kali s.d. Agustus 2024 sebesar Rp19.103.543,00.
 - TPTGR atas LYHL (Bendahara Kelurahan Golo Ru'u) Kasus: terdapat kerugian awal Rp64.361.000,00 atas kegiatan fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat berupa pembangunan MCK yang tidak direalisasikan namun dananya dipegang bendahara yang bersangkutan sebesar Rp 30.240.438,00.
 - TPTGR atas MAW (Kepala UPT Balai Benih Ikan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan) Kasus: Belanja Tidak didukung bukti, SKTJM ditandatangani Sdr. MAW, tanggal 22 September 2022 sebesar Rp15.800.000,00.
 - TPTGR atas MM (Staf Honorer Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Manggarai Barat) Kasus: Uang Retribusi Pasar Lembor Tahun 2021 SKTJM Sdr MM, tanggal 5 Oktober 2022 sebesar Rp24.230.000,00).
2. Selisih Pendapatan dari Pengembalian – LO sebesar (Rp10.000.000,00). Pada Tahun 2022 terdapat cicilan pelunasan Piutang atas Pekerjaan Pembangunan Boardwalk Gili Lawa pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan an. CV. Graha Mandiri Pratama sebesar Rp10.000.000,00 (STS Nomor Nomor:026/STS/I/2022).



b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	Tahun 2022 Rp0,00	Tahun 2021 Rp171.176.377.000,00
--	------------------------------------	--

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dimana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya- Alokasi Dana desa tidak tercatat pada Laporan Operasional.

c. Transfer Pemerintah Provinsi – LO	Tahun 2022 Rp 23.607.663.606,00	Tahun 2021 Rp 24.008.437.198,00
---	--	--

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi-LO Tahun 2022 sebesar Rp23.607.663.606,00, adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya- LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	24.564.932.817,00	23.607.663.606,00	957.269.211,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	24.564.932.817,00	23.607.663.606,00	957.269.211,00

Selisih pada Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA sebesar Rp957.269.211,00 merupakan selisih antara penyetoran Piutang Pajak Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp6.728.380.021,00 dengan Penambahan Piutang Pajak Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp5.771.110.810,00) yang dapat dijelaskan berikut ini:

- Penyetoran Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp6.728.380.021,00 yang terdiri dari Pajak air permukaan dan saldo piutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, seluruhnya sudah ditransfer Pemerintah Provinsi NTT ke RKUD Kabupaten Manggarai Barat (025 01.04.000002-2) berdasarkan STS Nomor Nomor STS 325/A/IX/2022 dan 089/A/VI/2022, Nomor STS 091/A/VI/2022 dan 325.2/A/IX/2022, Nomor STS 090/A/VI/2022 dan 325.1/A/IX/2022, dan Nomor STS 092/A/VI/2022 dan 325.3/A/IX/2022.
- Penambahan Piutang Transfer pajak Bagi Hasil Pajak Provinsi Rp5.771.110.810,00 yang terdiri dari PKB sebesar Rp2.555.719.360,00, BBNKB sebesar Rp1.589.001.063,00, PBBKB sebesar Rp1.626.122.576,00 dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp267.811,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

	Tahun 2022	Tahun 2021
1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO	Rp1.456.592.520.939,00	Rp 79.856.846.352,47

Pos ini menggambarkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LO untuk periode Tahun 2022 sebesar Rp1.456.592.236.828,00 yang terdiri dari:

Tabel 12 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO

Uraian Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO	Saldo 2022
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO	1.456.592.520.939,00
Pendapatan Hibah – LO	107.574.977.494,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	107.574.977.494,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO	1.349.017.543.445,00
Lain-lain Pendapatan - LO	1.349.017.543.445,00

Penjelasan Selisih Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - Lo dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LRA :

Tabel 13 Perbandingan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LO dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LRA

Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah - LRA	Jumlah	Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO	Jumlah	Selisih
1	2	3	4	5 = 2-4
Pendapatan Hibah	14.536.876.920,00	Pendapatan Hibah - LO	107.574.977.494,00	-93.038.100.574,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	14.536.876.920,00	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	107.574.977.494,00	-93.038.100.574,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	45.352.818.092,00	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO	1.349.017.543.445,00	-1.303.664.725.353,00
Lain-lain Pendapatan	45.352.818.092,00	Lain-lain Pendapatan	1.349.017.543.445,00	-1.303.664.725.353,00

Selisih pada Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LRA dan Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO sebesar (Rp93.038.100.574,00) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penambahan Nilai Aset Tetap Tanah dan Peralatan dan Mesin yang bersumber dari hibah masyarakat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp5.044.237.908,00 pada Dinas Kesehatan;
- Penambahan dari hibah yang bersumber pada RSUD Komodo sebesar Rp18.490.655.180,00 yang terdiri dari hibah Bantuan Pemerintah Pusat sebesar Rp17.662.219.455,00, Hibah Yayasan BUMN untuk Indonesia sebesar Rp515.773.167,00 dan hibah persediaan dari Hibah BBTCLPP Surabaya dan Dinas Kesehatan Provinsi NTT sebesar Rp312.662.558,00;
- Penambahan dari Hibah aset tetap tanah kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat/ Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang sebesar Rp 1.540.000,00;
- Penambahan saldo persediaan Barang Bantuan Habis Pakai Dinas Sosial Provinsi NTT sebesar Rp80.069.521,00 di Dinas Sosial.



- e. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menerima barang hibah dari PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Labuan Bajo Bank Mandiri memberikan hibah peralatan penyulingan air laut menjadi air tawar berdasarkan dokumen hibah nomor Berita Acara Serah Terima Barang Antara PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Labuan Bajo dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
- f. Hibah aset tetap tanah dari masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat/Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp10.860.000,00
- g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerima barang berupa PC Komputer, Printer dan Modem dari Kementerian Inventasi /Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- h. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menerima barang hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Pojok Baca Digital (POCADI) untuk Perpustakaan Daerah dengan Nilai Hibah sebesar Rp151.910.000,00 dan Hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat juga menerima hibah Mobil Unit Perpustakaan Keliling dari PT Bank Mandiri sebesar Rp500.000.000,00.
- i. Hibah tanah dari masyarakat ke Pemerintah Manggara Barat dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00 di Mberenang Desa Watu Tiri Kecamatan Lembor Selatan.
- j. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menerima barang hibah berupa LCD Proyektor, Sound System dan barang lainnya dengan total Rp125.816.835,00 Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian C.Q Proyek Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (IPDMIP).
- k. Hibah Aset Tetap Lainnya berupa Keyboard sesuai BAST dari Guru Pembimbing dari UPH College tanggal 7 November 2022 ke SMPN 1 Komodo sebesar Rp 1.250.000,00.
- l. Hibah atas pekerjaan KSPN dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Hibah Dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat ke Pemerintah Manggarai Barat dan Koperasi Budi Karya yang terdiri dari:
 - Hibah Dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat atas aset tetap JIJ dengan nilai total sebesar Rp8.980.921.905,00.
 - Gedung dan Bangunan dengan nilai serbesar Rp57.007.906.789,00 yang terdiri dari Hibah Dari Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp1.686.925.229,00, Hibah Dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sebesar Rp54.938.481.560,00



- dan Koperasi Budi Karya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Koperasi Serba Usaha Budi Karya Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 09/KSU.BK/XI/2022 Tanggal 5 November 2022 sebesar Rp382.500.000,00.
- Hibah peralatan dan mesin dalam rangka mendukung KSPN Labuan Bajo yaitu Kawasan Puncak Waringin & Batu Cermin sebesar Rp1.756.943.576,00 dan Hibah dari Koperasi Budi Karya sebesar Rp2.100.000,00.
- m. Pendapatan Bunga atas remunerasi pengelolaan TDF Bulan Desember 2022 berdasarkan PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility tanggal 3 Maret 2023 senilai Rp284.111,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

2. Beban **Tahun 2022** **Tahun 2021**
Rp1.084.517.114.144,61 **Rp1.058.423.164.620,47**

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Beban – LO TA 2022

Uraian Beban	Saldo Beban 2022
BEBAN	
Beban Pegawai	384.266.488.217,99
Beban Persediaan	171.418.093.671,11
Beban Jasa	167.868.172.899,32
Beban Pemeliharaan	11.556.888.444,00
Beban Perjalanan Dinas	56.016.220.597,00
Beban Bunga	8.164.691.496,00
Beban Hibah	20.733.781.755,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	187.556.229.312,40
Beban Penyisihan Piutang	12.642.277.577,80
Beban Transfer	62.585.620.000,00
Beban Lain-lain	1.708.650.174,00
Total	1.084.517.114.144,61

2.1 Beban Pegawai **Tahun 2022** **Tahun 2021**
Rp384.266.488.217,99 **Rp336.092.253.190,25**

Beban Pegawai Kabupaten Manggarai Barat adalah Beban Pegawai untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp384.266.488.217,99 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15 Beban Pegawai-LO

Uraian Beban Pegawai	Saldo Beban 2022
Beban Pegawai	384.266.488.217,99
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	249.980.504.559,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	22.308.946.777,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	76.450.702.315,99
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	19.485.512.021,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	813.913.981,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.201.600.000,00
Beban Pegawai BOS	13.025.308.564,00

Tabel 16 Perbandingan Belanja Pegawai - LRA dan Beban Pegawai - LO

Belanja Persediaan - LRA	Jumlah	Beban Persediaan - LO	Jumlah	Selisih
1	2	3	4	5 = 2-4
Belanja Pegawai	371.287.510.538,00	Beban Pegawai	384.266.488.217,99	-12.978.977.679,99



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Belanja Persediaan - LRA	Jumlah	Beban Persediaan - LO	Jumlah	Selisih
1	2	3	4	5 = 2-4
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	249.081.016.486,00	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	249.980.504.559,00	-899.488.073,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	22.308.946.777,00	Beban Tambahan Penghasilan ASN	22.308.946.777,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	64.371.212.709,00	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	76.450.702.315,99	-12.079.489.606,99
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	19.485.512.021,00	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	19.485.512.021,00	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	813.913.981,00	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	813.913.981,00	0,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.201.600.000,00	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.201.600.000,00	0,00
Belanja Pegawai BOS	13.025.308.564,00	Beban Pegawai BOS	13.025.308.564,00	0,00

Belanja Pegawai - LRA dan Beban Pegawai - LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Selisih Beban Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LRA dan Beban Gaji dan Tunjangan ASN-LO sebesar (Rp899.488.073,00) karena terdapat penambahan Utang Beban Pegawai pada Tahun 2022 sebesar Rp899.488.073,00.
2. Selisih Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LRA dan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO sebesar (Rp.12.079.489.606,99) karena terdapat belanja honorarium yang atribusikan ke aset tetap Utang Beban Pegawai sebesar Rp2.408.219.353,00 dan Selisih Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LRA dan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO sebesar (Rp14.487.708.959,00) karena terdapat penambahan Utang Beban Pegawai pada Tahun 2022 sebesar Rp14.487.708.959,00.

2.2 Beban Persediaan	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp 171.418.093.671,11	Rp116.228.679.496,89

Beban Persediaan Kabupaten Manggarai Barat adalah Beban Persediaan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp171.418.093.671,11, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17 Beban Persediaan-LO

Uraian Beban Persediaan	Saldo Beban 2022
Beban Persediaan	171.418.093.671,11
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	87.945.900,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.974.282.104,00
Beban Bahan-Bahan Baku	123.750.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Beban Persediaan	Saldo Beban 2022
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	4.037.500,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	123.900.000,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	559.000.511,67
Beban Bahan-Bahan Lainnya	7.343.752.532,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	11.425.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	81.310.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.687.780.090,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.150.715.723,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.426.631.267,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	492.641.450,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	38.104.430,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.154.361.447,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	13.459.440,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	284.599.712,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.117.500,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	441.335.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.101.696.425,00
Beban Obat-Obatan-Obat	13.680.827.533,64
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6.620.310.336,40
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	105.720.567.780,40
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	62.500.000,00
Beban Natura dan Pakan-Natura	5.739.000,00
Beban Natura dan Pakan-Pakan	365.832.266,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	11.057.254.100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.080.850.642,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.452.055.000,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	321.000.000,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	808.221.500,00
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	125.000.000,00
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	269.400.000,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	74.848.649,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	90.461.250,00
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	89.910.000,00
Beban Pakaian Penyelamatan	1.092.020,00
Beban Pakaian Pelatihan Kerja	158.145.000,00
Beban Pakaian Adat Daerah	74.991.600,00
Beban Pakaian Olahraga	56.300.000,00
Beban Pakaian Paskibraka	199.940.962,00

Tabel 18 Perbandingan Belanja Persediaan - LRA dan Beban Persediaan - LO

Belanja Persediaan - LRA	Jumlah	Beban Persediaan - LO	Jumlah	Selisih
1	2	3	4	5 = 2-4
Belanja Persediaan	154.649.892.044,00	Beban Persediaan	171.418.093.671,11	-16.768.201.627,11
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	87.945.900,00	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	87.945.900,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.974.282.104,00	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.974.282.104,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	123.750.000,00	Beban Bahan-Bahan Baku	123.750.000,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	4.037.500,00	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	4.037.500,00	0,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	123.900.000,00	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	123.900.000,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	24.000.000,00	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	559.000.511,67	-535.000.511,67
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.210.066.362,00	Beban Bahan-Bahan Lainnya	7.343.752.532,00	-133.686.170,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Belanja Persediaan - LRA	Jumlah	Beban Persediaan - LO	Jumlah	Selisih
1	2	3	4	5 = 2-4
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	11.425.000,00	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	11.425.000,00	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	81.310.000,00	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	81.310.000,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.767.780.090,00	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.687.780.090,00	80.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.150.712.723,00	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.150.715.723,00	-3.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.435.752.721,00	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.426.631.267,00	9.121.454,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	492.641.450,00	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	492.641.450,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	38.104.430,00	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	38.104.430,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.032.144.797,00	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.154.361.447,00	-122.216.650,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	13.459.440,00	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	13.459.440,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	284.599.712,00	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	284.599.712,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.117.500,00	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.117.500,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	441.335.000,00	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	441.335.000,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	916.194.248,00	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.101.696.425,00	-185.502.177,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	7.737.123.540,00	Beban Obat-Obatan-Obat	13.680.614.238,64	-5.943.490.698,64
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.922.666.920,00	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6.620.523.631,40	-1.697.856.711,40
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	97.788.338.218,00	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	105.720.567.780,40	-7.932.229.562,40
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	62.500.000,00	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	62.500.000,00	0,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.739.000,00	Beban Natura dan Pakan-Natura	5.739.000,00	0,00
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	365.832.266,00	Beban Natura dan Pakan-Pakan	365.832.266,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.944.916.500,00	Beban Makanan dan Minuman Rapat	11.057.254.100,00	-112.337.600,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.080.850.642,00	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.080.850.642,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.452.055.000,00	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.452.055.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Belanja Persediaan - LRA	Jumlah	Beban Persediaan - LO	Jumlah	Selisih
1	2	3	4	5 = 2-4
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	321.000.000,00	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	321.000.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	808.221.500,00	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	808.221.500,00	0,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	125.000.000,00	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	125.000.000,00	0,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	74.400.000,00	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	269.400.000,00	-195.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	74.848.649,00	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	74.848.649,00	0,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	90.461.250,00	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	90.461.250,00	0,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	89.910.000,00	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	89.910.000,00	0,00
Belanja Pakaian Penyelamatan	1.092.020,00	Beban Pakaian Penyelamatan	1.092.020,00	0,00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	158.145.000,00	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	158.145.000,00	0,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	74.991.600,00	Beban Pakaian Adat Daerah	74.991.600,00	0,00
Belanja Pakaian Olahraga	56.300.000,00	Beban Pakaian Olahraga	56.300.000,00	0,00
Belanja Pakaian Paskibraka	199.940.962,00	Beban Pakaian Paskibraka	199.940.962,00	0,00

Belanja Persediaan - LRA dan Beban Persediaan - LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Selisih Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan-LRA dan Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan-LO sebesar (Rp535.000.511,67) karena berkurangnya saldo persediaan Bibit Ikan Tahun 2021 sebesar Rp559.000.511,67 dan bertambahnya persediaan ternak babi sebesar Rp24.000.000,00.
2. Selisih Beban Bahan-Bahan Lainnya-LRA dan Beban Bahan-Bahan Lainnya-LO sebesar (Rp 133.686.170,00) karena :
 - a. Persediaan dari Belanja Modal Tahun 2022 Rp42.445.550,00
 - b. Berkurangnya Persediaan 2021 Rp161.425.620,00
 - c. Bertambahnya Utang Beban 2022 (Rp20.000.000,00)
 - d. Belanja Persediaan Tahun 2022 menjadi Aset tetap (Rp70.185.000,00)
 - e. Persediaan dari Belanja Tak Terduga Tahun 2022 Rp20.000.000,00
3. Selisih Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor - LRA dan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor sebesar (Rp80.000.000,00) terjadi atas berkurangnya saldo utang beban alat tulis kantor sebesar (Rp80.000.000,00),
4. Selisih Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover LRA dan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover LO sebesar (Rp 3.000,00) terjadi atas berkurangnya persediaan Tahun 2021 sebesar Rp3.000,00
5. Selisih Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak -LRA dan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak -LO sebesar (Rp9.121.454,00) terjadi karena berkurangnya persediaan Tahun 2021



- sebesar Rp6.425.996,00 dan bertambahnya persediaan Tahun 2022 sebesar (Rp15.547.450,00)
6. Selisih Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer-LRA dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer-LO sebesar (Rp122.216.650,00) karena berkurangnya persediaan Tahun 2021 sebesar Rp218.336.500,00 dan bertambahnya persediaan Tahun 2022 sebesar (Rp96.119.850,00)
 7. Selisih Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-LRA dan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-LO sebesar (Rp185.502.177,00) terjadi atas berkurangnya saldo persediaan Tahun 2021 sebesar Rp182.055.181,00 dan terdapat Persediaan dari Belanja Modal Tahun 2022 Rp3.446.996,00
 8. Selisih Belanja Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat-LRA dan Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat-LO sebesar Rp 105.720.567.780,40 dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Bertambahnya saldo persediaan pada Tahun 2022 yang bersumber dari belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp41.734.645.354,00 dan berkurangnya saldo persediaan Tahun 2021 sebesar Rp69.547.691.113,40.
 - b. Terdapat Penambahan Utang Tahun 2022 sebesar Rp972.532.743,00
 9. Selisih Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya-LRA dan Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya-LO sebesar (Rp1.697.856.711,40) karena berkurangnya persediaan Tahun 2021 sebesar (Rp833.569.736,00), bertambahnya persediaan Tahun 2022 sebesar Rp510.978.704,00 dan Penggunaan BMHP di Laboratorium RSUD Komodo yang belum tercatat di Tahun 2020 sebesar (Rp1.375.265.679,40)
 10. Selisih Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan-LRA dan Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan-LO sebesar (Rp5.943.490.698,64) dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Bertambahnya saldo persediaan pada Tahun 2022 yang bersumber dari belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp7.203.355.844,48 dan berkurangnya saldo persediaan Tahun 2021 sebesar Rp 1.047.061.785,00.
 - b. Terdapat Penambahan Utang Tahun 2022 sebesar Rp1.440.000,00,
 - c. Persediaan dari Belanja Modal Tahun 2022 Rp42.445.550,00.
 - d. Koreksi pencatatan Utang Belanja Obat-obatan Tahun 2022 Rp213.295,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

2.3 Beban Jasa

Tahun 2022
Rp167.868.172.899,32

Tahun 2021
Rp154.793.270.395,33

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp167.868.172.899,32. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Beban Jasa-LO

Uraian Beban Jasa	Saldo Beban 2022
Beban Jasa	167.868.172.899,32
Beban Jasa Kantor	115.423.463.022,80
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	20.390.856.748,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.969.140.000,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.103.100.000,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	75.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.550.714.450,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.995.299.829,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	6.286.568,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	320.000.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.417.239.920,00
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	285.329.497,00
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	128.950.317,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.937.048.000,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	358.500.000,00
Beban Barang dan Jasa BOS	16.907.244.547,52

Tabel 20 Perbandingan Belanja Jasa - LRA dan Beban Jasa - LO

Belanja Jasa - LRA	Jumlah	Beban Jasa - LO	Jumlah	Selisih
1	2	3	4	5 = 2-4
Belanja Jasa	167.004.052.892,32	Beban Jasa	167.868.172.899,32	-864.120.007,00
Belanja Jasa Kantor	116.477.716.405,80	Beban Jasa Kantor	115.423.463.022,80	1.054.253.383,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	20.390.856.748,00	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	20.390.856.748,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.969.140.000,00	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.969.140.000,00	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.077.850.000,00	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.103.100.000,00	-25.250.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	75.000.000,00	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	75.000.000,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.232.919.060,00	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.550.714.450,00	682.204.610,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.995.299.829,00	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.995.299.829,00	0,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	6.286.568,00	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	6.286.568,00	0,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	320.000.000,00	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	320.000.000,00	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.417.239.920,00	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.417.239.920,00	0,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	285.329.497,00	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	285.329.497,00	0,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	128.950.317,00	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	128.950.317,00	0,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.206.400.000,00	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.937.048.000,00	-2.730.648.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan	358.500.000,00	Beban Jasa yang Diberikan kepada	358.500.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Belanja Jasa - LRA	Jumlah	Beban Jasa - LO	Jumlah	Selisih
1	2	3	4	5 = 2-4
kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
Belanja Barang dan Jasa BOS	17.062.564.547,52	Beban Barang dan Jasa BOS	16.907.244.547,52	155.320.000,00

Belanja Jasa - LRA dan Beban Jasa - LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Selisih Belanja Jasa Kantor-LRA dan Beban Jasa Kantor-LO sebesar Rp1.054.253.383,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Bertambahnya utang beban Tahun 2022 sebesar Rp724.256.938,00 dan berkurangnya utang beban Tahun 2021 sebesar Rp36.053.301,00.
 - b. Belanja Jasa Konsultan yang teratribusi secara langsung untuk aset tetap Tahun 2022 sebesar Rp42.750.000,00.
 - c. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi-LRA yang yang dicatat sebagai aset tidak berwujud Tahun 2022 sebesar Rp356.300.000,00.
 - d. Belanja Jasa JKN-LRA yang menjadi aset tetap Tahun 2022 sebesar Rp 1.400.257.020,00.
 - e. Bertambahnya utang beban Tahun 2022 sebesar Rp56.850.000,00
2. Selisih Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir-LRA dan Beban Sewa Rumah /Gedung /Gudang /Parkir-LO sebesar (Rp25.250.000,00) disebabkan karena bertambahnya beban dibayar dimuka atas sewa rumah dinas Tahun 2022 sebesar Rp84.916.666,67 dan berkurangnya beban dibayar dimuka atas sewa rumah dinas Tahun 2021 sebesar Rp82.583.333,33.
3. Selisih Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-LRA dan Beban Jasa Konsultansi Konstruksi-LO sebesar Rp682.204.610,00 disebabkan karena terdapat Belanja Jasa Konsultansi-LRA yang menjadi aset tetap sebesar Rp682.204.610,00.
4. Selisih Belanja Uang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LRA dan Beban Uang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO merupakan reklasifikasi dari Belanja Tidak Terduga sebesar (Rp2.730.648.000,00)

2.4 Beban Pemeliharaan

Tahun 2022 **Tahun 2021**
Rp 11.556.888.444,00 **Rp 19.204.128.283,00**

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.556.888.444,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Beban Pemeliharaan-LO

Uraian Beban Pemeliharaan	Saldo Beban 2022
---------------------------	------------------



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Beban Pemeliharaan	Saldo Beban 2022
Beban Beban Pemeliharaan	11.556.888.444,00
Beban Pemeliharaan Tanah	915.953.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.375.296.256,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.801.640.261,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	463.998.927,00

Tabel 22 Perbandingan Belanja Pemeliharaan - LRA dan Beban Pemeliharaan - LO

Belanja Pemeliharaan - LRA	Jumlah	Beban Pemeliharaan - LO	Jumlah	Selisih
1	2	3	4	5 = 2-4
Belanja Pemeliharaan	15.305.510.080,00	Beban Pemeliharaan	11.556.888.444,00	3.748.621.636,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	915.953.000,00	Beban Pemeliharaan Tanah	915.953.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.528.376.256,00	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.375.296.256,00	153.080.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.255.653.908,00	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.801.640.261,00	454.013.647,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.605.526.916,00	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	463.998.927,00	3.141.527.989,00

Selisih Beban Pemeliharaan Rp15.305.510.080,00 – Belanja Pemeliharaan LRA Rp11.556.888.444,00 sebesar Rp3.748.621.636,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengakuan pengakuan aset tetap gedung dan bangunan dari Pemeliharaan gedung kantor sebesar Rp479.778.750,00.
2. Pengakuan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan irigasi dari Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.528.445.826,00.
3. Pengakuan pengakuan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp153.080.000,00.
4. Penambahan saldo Persediaan Tahun 2022 dari Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp 838.665.763,00.
5. Penambahan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.507.025.764,00.
6. Penambahan Utang Tahun 2022 sebesar Rp25.765.103,00
7. Penambahan Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari Belanja Tak Terduga Tahun 2022 Sebesar Rp225.583.600,00
8. Pengakuan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pemeliharaan Gedung sebesar Rp1.507.025.764,00.

2.5 Beban Perjalanan Dinas

	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp 56.016.220.597,00	Rp48.558.089.552,00

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp56.016.220.597,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.



Tabel 23 Beban Perjalanan Dinas-LO

Uraian Beban Perjalanan Dinas	Saldo Beban 2022
Beban Perjalanan	56.016.220.597,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	19.907.164.138,00
Beban Perjalanan Dinas Tetap	915.873.453,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.193.183.006,00

Terdapat penambahan Utang Beban Perjalanan Dinas tahun anggaran 2022 sebesar Rp123.950.160,00 dan berkurangnya Utang Beban Perjalanan Dinas tahun anggaran 2021 Rp54.100.000,00.

2.6 Beban Bunga	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp 8.164.691.496,00	Rp0,00

Jumlah Bunga untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 8.164.691.496,00.

Selisih Belanja Bunga-LRA Rp7.038.707.835,00 dan Beban Bunga-LO Rp8.164.691.496,00 sebesar Rp1.125.983.661,00 merupakan mengakui Utang Bunga yang belum terbayarkan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Pemotongan Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Kembali Pokok Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 Serta Pembayaran Kembali Pokok Dan/ Atau Pembayaran Bunga Atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 Untuk Periode Penyaluran Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2023

2.7 Beban Hibah	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp 20.733.781.755,00	Rp 17.080.217.221,00

Jumlah Beban Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp20.733.781.755,00. Terdapat penambahan atas Beban Hibah Tahun anggaran 2022 yaitu Beban Hibah atas Aset Tetap Tanah pada Bagian Pemerintahan Umum yang diserahkan ke Kementerian dan TNI.

2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp187.556.229.312,40	Rp149.376.981.033,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp187.556.229.312,40. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan atau



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

amortisasi selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 24 Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	OPD	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Instalasi	Aset Lain-lain	Aset Tidak Berwujud	Total
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	9.919.257.162,00	6.291.146.105,93	23.103.856,00	-	-	16.233.507.123,93
2	Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar	51.641.677,00	21.770.094,00	-	-	-	73.411.771,00
3	Dinas Kesehatan	8.689.350.989,00	3.995.384.500,28	142.170.373,00	26.235.283,00	-	12.853.141.145,28
4	RSUD Komodo	6.491.208.339,00	690.337.542,00	7.999.503,00	2.777.919,00	8.907.500,00	7.201.230.803,00
5	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan	1.741.893.823,00	231.891.921,00	112.287.691.310,00	336.446.877,00	165.299.069,00	114.763.223.000,00
6	Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang	425.784.231,00	20.229.767,00	11.577.082.453,20	-	-	12.023.096.451,20
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-	-	-	-	-
8	Satuan Polisi Pamong Praja	316.000.107,00	50.134.866,00	7.207.824,00	-	-	373.342.797,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	109.356.961,00	-	-	-	-	109.356.961,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	637.676.365,00	28.872.368,00	20.145.830,00	-	-	686.694.563,00
11	Dinas Sosial	338.425.289,00	27.008.508,00	20.094.500,00	3.703.565,00	-	389.231.862,00
12	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	259.923.763,00	206.544.980,00	42.462.208,00	17.106.650,00	-	526.037.601,00
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	331.374.798,00	348.018.962,00	722.351.031,00	-	-	1.401.744.791,00
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.415.340.208,00	94.172.608,00	1.053.458.646,00	-	114.424.368,00	2.677.395.830,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	243.580.281,00	42.349.302,00	-	9.270.462,00	-	295.200.045,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	165.816.659,00	66.160.118,00	577.465.644,00	-	-	809.442.421,00
17	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	349.696.481,00	114.767.900,00	-	5.011.669,00	-	469.476.050,00
18	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	392.097.257,00	24.907.895,00	9.842.750,00	-	-	426.847.902,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	151.853.947,00	16.121.430,00	300.000,00	1.130.002,00	77.416.500,00	246.821.879,00
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	475.658.351,00	44.673.090,00	15.773.000,00	-	-	536.104.441,00
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	251.177.079,00	199.749.551,00	308.033.319,00	999.333,00	35.180.800,00	795.140.082,00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan	408.856.077,00	210.291.968,00	1.090.517,00	-	-	620.238.562,00
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	346.088.493,00	201.986.352,00	35.069.371,00	-	-	583.144.216,00
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	278.058.141,00	926.162.996,00	14.933.011,00	-	-	1.219.154.148,00
26	Bagian Pemerintahan Umum	84.940.798,00	5.670.500,00	21.071.000,00	-	-	111.682.298,00
27	Bagian Hukum	108.135.666,00	-	-	-	-	108.135.666,00
28	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	99.979.366,00	-	-	1.166.666,00	-	101.146.032,00
29	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	70.541.373,00	-	-	-	-	70.541.373,00
30	Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam	12.606.709,00	-	-	-	-	12.606.709,00
31	Bagian Organisasi	40.353.733,00	-	-	-	4.995.000,00	45.348.733,00
32	Bagian Umum	1.466.269.892,00	407.898.324,00	-	-	-	1.874.168.216,00
33	Bagian Humas dan Protokol	217.547.571,00	-	-	-	-	217.547.571,00
34	Bagian Administrasi Pembangunan	51.055.493,00	-	-	-	-	51.055.493,00
35	Sekretariat DPRD	1.024.070.466,00	464.607.150,00	195.978.393,00	12.844.000,00	-	1.697.500.009,00
36	Bagian Perencanaan dan Keuangan	12.288.333,00	-	-	-	-	12.288.333,00
37	Kecamatan Komodo	31.857.400,00	125.781.936,00	-	-	-	157.639.336,00
38	Kecamatan Boleng	94.852.096,00	21.300.000,00	-	-	-	116.152.096,00
39	Kecamatan Kuwus	56.138.571,00	41.474.600,00	-	-	-	97.613.171,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Instalasi	Aset Lain-lain	Aset Tidak Berwujud	Total
40	Kecamatan Lembor	22.773.214,00	82.545.430,00	-	1.726.875,00	-	107.045.519,00
41	Kecamatan Lembor Selatan	50.452.429,00	53.333.558,00	-	6.274.997,00	-	110.060.984,00
42	Kecamatan Macang Pacar	99.320.401,00	47.028.508,00	-	-	-	146.348.909,00
43	Kecamatan Mbeliling	55.017.893,00	24.729.648,00	-	-	-	79.747.541,00
44	Kecamatan Ndoso	26.332.736,00	36.417.866,00	-	-	-	62.750.602,00
45	Kecamatan Sano Nggoang	34.599.177,00	37.820.949,00	-	-	-	72.420.126,00
46	Kecamatan Welak	125.138.742,00	44.522.214,00	-	-	-	169.660.956,00
47	Kecamatan Pacar	175.694.506,00	47.895.344,00	-	-	-	223.589.850,00
48	Kecamatan Kuwus Barat	144.333.768,00	60.269.254,00	6.754.600,00	-	-	211.357.622,00
49	Kelurahan Labuan Bajo	13.667.618,00	12.420.908,00	-	-	-	26.088.526,00
50	Kelurahan Wae Kelambu	8.678.570,00	4.873.200,00	-	-	-	13.551.770,00
51	Kelurahan Tangge	16.958.666,00	5.630.170,00	-	-	-	22.588.836,00
52	Kelurahan Nantal	8.617.000,00	672.000,00	-	-	-	9.289.000,00
53	Kelurahan Golo Ruu	6.730.000,00	5.354.320,00	-	-	-	12.084.320,00
54	Inspektorat	200.513.721,00	75.031.290,00	1.341.602,00	-	-	276.886.613,00
55	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	320.375.372,00	45.508.132,00	20.000.000,00	13.296.185,00	179.329.000,00	578.508.689,00
56	Badan Pendapatan Daerah	470.341.461,00	-	-	-	-	470.341.461,00
57	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.124.644.358,00	2.500.213.058,00	1.101.717.799,00	-	-	4.726.575.215,00
58	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	211.723.292,00	-	-	-	39.200.000,00	250.923.292,00
	Total	40.276.666.869,00	18.003.681.183,20	128.213.138.540,20	437.990.483,00	624.752.237,00	187.556.229.312,40

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Realisasi Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Kabupaten Manggarai Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp40.276.666.869,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

KODE	URAIAN	PENYUSUTAN		TOTAL
		SEMESTER I	SEMESTER II	
1.3.2.2	ALAT ANGKUTAN			
1.3.2.2.3	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	287.091.675,00	287.091.675,00	574.183.350,00
1.3.2.2.5	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	-	104.167,00	104.167,00
1.3.2.2.1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	4.724.733.306,00	4.553.440.826,00	9.278.174.132,00
1.3.2.2.2	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	19.943.920,00	22.443.920,00	42.387.840,00
1.3.2.3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			-
1.3.2.3.1	ALAT BENGKEL BERMESIN	10.119.695,00	9.692.729,00	19.812.424,00
1.3.2.3.2	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1.982.125,00	2.420.459,00	4.402.584,00
1.3.2.3.3	ALAT UKUR	138.729.581,00	141.266.951,00	279.996.532,00
1.3.2.1	ALAT BESAR			-
1.3.2.1.3	ALAT BANTU	6.495.714,00	49.395.666,00	55.891.380,00
1.3.2.1.1	ALAT BESAR DARAT	241.799.814,00	227.172.085,00	468.971.899,00
1.3.2.5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			-
1.3.2.5.1	ALAT KANTOR	778.901.358,00	1.328.292.152,00	2.107.193.510,00
1.3.2.5.2	ALAT RUMAH TANGGA	3.011.948.828,00	3.202.011.877,00	6.213.960.705,00
1.3.2.5.3	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	104.860.576,00	103.385.469,00	208.246.045,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

KODE	URAIAN	PENYUSUTAN		TOTAL
1.3.2.7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN			-
1.3.2.7.1	ALAT KEDOKTERAN	4.781.680.284,00	4.307.011.051,00	9.088.691.335,00
1.3.2.7.2	ALAT KESEHATAN UMUM	1.275.644,00	50.918.096,00	52.193.740,00
1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA			-
1.3.2.15.4	ALAT KERJA PENERBANGAN	212.500,00	4.402.859,00	4.615.359,00
1.3.2.15.2	ALAT PELINDUNG	-	-	-
1.3.2.15.3	ALAT SAR	54.758.400,00	54.363.456,00	109.121.856,00
1.3.2.8	ALAT LABORATORIUM			-
1.3.2.8.4	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	2.811.589,00	3.684.471,00	6.496.060,00
1.3.2.8.7	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	60.915.498,00	60.915.501,00	121.830.999,00
1.3.2.8.9	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	-	-	-
1.3.2.8.3	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	188.205.304,00	179.606.094,00	367.811.398,00
1.3.2.8.5	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	143.000,00	143.000,00	286.000,00
1.3.2.8.8	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	109.674,00	311.787,00	421.461,00
1.3.2.8.6	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	206.250,00	206.250,00	412.500,00
1.3.2.8.1	UNIT ALAT LABORATORIUM	906.527.720,00	770.435.038,00	1.676.962.758,00
1.3.2.8.2	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	10.970.252,00	11.236.562,00	22.206.814,00
1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN			-
1.3.2.12.2	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	-	416.667,00	416.667,00
1.3.2.9	ALAT PERSENJATAAN			-
1.3.2.9.1	SENJATA API	395.000,00	402.500,00	797.500,00
1.3.2.4	ALAT PERTANIAN			-
1.3.2.4.1	ALAT PENGOLAHAN	227.269.134,00	171.020.357,00	398.289.491,00
1.3.2.6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR			-
1.3.2.6.2	ALAT KOMUNIKASI	751.037.228,00	736.350.158,00	1.487.387.386,00
1.3.2.6.1	ALAT STUDIO	244.980.311,00	247.103.101,00	492.083.412,00
1.3.2.6.3	PERALATAN PEMANCAR	10.058.522,00	9.417.857,00	19.476.379,00
1.3.2.10	KOMPUTER			-
1.3.2.10.1	KOMPUTER UNIT	2.360.171.054,00	3.069.592.170,00	5.429.763.224,00
1.3.2.10.2	PERALATAN KOMPUTER	773.314.786,00	790.523.129,00	1.563.837.915,00
1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA			-
1.3.2.19.1	PERALATAN OLAH RAGA	-	400.000,00	400.000,00
1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI			-
1.3.2.17.1	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	605.953,00	414.386,00	1.020.339,00
1.3.2.18	RAMBU - RAMBU			-
1.3.2.18.1	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	91.515.173,00	87.304.535,00	178.819.708,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Realisasi Beban Penyusutan Gedung Bangunan Kabupaten Manggarai Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.003.681.183,20 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

KODE	URAIAN	PENYUSUTAN		TOTAL
		SEMESTER I	SEMESTER II	
1.3.3.1	BANGUNAN GEDUNG			
1.3.3.1.1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	6.858.985.598,00	9.707.733.707,20	16.566.719.305,20
1.3.3.1.2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	704.957.777,00	703.448.093,00	1.408.405.870,00
1.3.3.3	BANGUNAN MENARA			
1.3.3.3.1	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	540.000,00	540.000,00	1.080.000,00
1.3.3.2	MONUMEN			
1.3.3.2.1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	5.601.674,00	5.601.674,00	11.203.348,00
1.3.3.4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI			
1.3.3.4.1	TUGU/TANDA BATAS	378.219,00	15.894.441,00	16.272.660,00

3. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Realisasi Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Manggarai Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp128.213.138.540,20 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

KODE	URAIAN	PENYUSUTAN		TOTAL
		SEMESTER I	SEMESTER II	
1.3.4.2	BANGUNAN AIR			
1.3.4.2.6	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	803.411.288,00	840.939.668,00	1.644.350.956,00
1.3.4.2.1	BANGUNAN AIR IRIGASI	1.535.439.145,00	1.622.904.350,00	3.158.343.495,00
1.3.4.2.7	BANGUNAN AIR KOTOR	95.122.403,00	95.122.403,00	190.244.806,00
1.3.4.2.2	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	97.685.618,00	97.685.618,00	195.371.236,00
1.3.4.2.4	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	1.805.618.657,00	2.215.279.902,00	4.020.898.559,00
1.3.4.2.5	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	93.128.828,00	93.128.830,00	186.257.658,00
1.3.4.3	INSTALASI			-
1.3.4.3.1	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	21.278.611,00	25.189.479,00	46.468.090,00
1.3.4.3.6	INSTALASI GARDU LISTRIK	750.000,00	205.029.578,00	205.779.578,00
1.3.4.3.5	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	74.601.824,00	74.601.824,00	149.203.648,00
1.3.4.3.9	INSTALASI PENGAMAN	73.867.413,00	151.904.280,00	225.771.693,00
1.3.4.3.3	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	-	30.835.087,00	30.835.087,00
1.3.4.1	JALAN DAN JEMBATAN			-
1.3.4.1.1	JALAN	57.716.368.134,00	53.772.572.534,20	111.488.940.668,20
1.3.4.1.2	JEMBATAN	1.307.602.303,00	1.282.009.131,00	2.589.611.434,00
1.3.4.4	JARINGAN	84.799.867,00	84.799.867,00	169.599.734,00
1.3.4.4.1	JARINGAN AIR MINUM	1.925.920.964,00	1.925.920.964,00	3.851.841.928,00
1.3.4.4.2	JARINGAN LISTRIK	24.888.610,00	24.888.610,00	49.777.220,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

KODE	URAIAN	PENYUSUTAN		TOTAL
		SEMESTER I	SEMESTER II	
1.3.4.4.3	JARINGAN TELEPON	4.921.375,00	4.921.375,00	9.842.750,00

4. Beban Penyusutan /Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Realisasi Beban Penyusutan /Amortisasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud
Kabupaten Manggarai Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp624.752.237,00
dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28 Beban Penyusutan /Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	Akumulasi Amortisasi		TOTAL
		Semester I	Semester II	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Web Site	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	DED Embung	6.917.050,00	6.917.050,00	13.834.100,00
	DED JEMBATAN WAE NUWA II, WAE RAWAS II, WAE RENDONG II, WAE JERENG	7.363.814,00	7.363.814,00	14.727.628,00
	Dokumen Lingkungan PHJD Paket I - Langka Kabe – Patung Caci – SMIP	3.986.200,00	3.986.200,00	7.972.400,00
	Dokumen Lingkungan PHJD Paket II - Patung Caci - Wae Kesambi - Sp. Batu Cermin – SMIP	3.986.200,00	3.986.200,00	7.972.400,00
	Dokumen Lingkungan PHJD Paket III -TK. Ade Irma - Wae Kesambi & Perijinan - Goa Maria Golo Koe	3.986.200,00	3.986.200,00	7.972.400,00
	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	16.700.000,00	16.700.000,00	33.400.000,00
	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	32.858.100,00	32.858.100,00	65.716.200,00
	Aplikasi Integrasi cetak	1.129.946,00	1.129.947,00	2.259.893,00
	APLIKASI SIM PKB standar	3.568.575,00	3.568.575,00	7.137.150,00
	Aplikasi Terminal Visual	1.153.449,00	1.153.449,00	2.306.898,00
2	Dinas Lingkungan Hidup ,Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
	Hasil Kajian (DED) DED Pedesterian 2019	4.954.100,00	4.954.100,00	9.908.200,00
	DED Drainase Dalam Kota Labuan Bajo	4.969.200,00	4.969.200,00	9.938.400,00
	DED Penataan Lokasi Wisata Rohani Golo Koe	2.493.150,00	2.493.150,00	4.986.300,00
	DED Perencanaan DAU Paket I	4.998.250,00	4.998.250,00	9.996.500,00
	DED Perencanaan DAU Paket II	4.994.550,00	4.994.550,00	9.989.100,00
	DED Perencanaan DAK Cluster I	3.746.650,00	3.746.650,00	7.493.300,00
	DED Perencanaan DAK Cluster II	3.749.550,00	3.749.550,00	7.499.100,00
	DED Perencanaan DAK Cluster III	3.748.450,00	3.748.450,00	7.496.900,00
	DED Perencanaan DAK Cluster IV	3.747.000,00	3.747.000,00	7.494.000,00
	DED Desa Gorontalo	4.999.750,00	4.999.750,00	9.999.500,00
	DED Jalan Lingkungan kelurahan Wae Kelambu	4.999.500,00	4.999.500,00	9.999.000,00
	DED Jalan Lingkungan Desa Batu Cermin	4.994.000,00	4.994.000,00	9.988.000,00
	DED Kampung Ujung	4.818.034,00	4.818.034,00	9.636.068,00
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
	Website dengan Sistem dan Tracking Ijin	27.410.000,00	27.410.000,00	54.820.000,00
	Penyusunan Kajian Potensi dan Investasi Agribisnis Hortikultura	11.298.250,00	11.298.250,00	22.596.500,00
4	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan			
	DED Cunca Rami	5.255.250,00	5.255.250,00	10.510.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Akumulasi Amortisasi		TOTAL
		Semester I	Semester II	
	DED Batu Cemin	7.063.700,00	7.063.700,00	14.127.400,00
	DED Cunca Wulang	5.271.450,00	5.271.450,00	10.542.900,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
	Jasa Penyusunan Analisis Kesesuaian lahan Pertanian	49.997.750,00	49.997.750,00	99.995.500,00
	Penyusunan Landscape dan Penataan Perkantoran Pemerintah Kab.Manggarai Barat	29.994.250,00	29.994.250,00	59.988.500,00
	Profil Sosial Ekonomi (PSETK) Paket I Pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	4.835.000,00	4.835.000,00	9.670.000,00
	Profil Sosial Ekonomi (PSETK) Paket II Pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	4.837.500,00	4.837.500,00	9.675.000,00
6	RSUD Komodo			
	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (Aplikasi Mora Medical Integrated System)		8.907.500,00	8.907.500,00
7	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah			
	Aplikasi Absensi Seber Mai Duat (SMD)		39.200.000,00	39.200.000,00
8	Bagian Organisasi			
	Aplikasi Sistem Informasi Analisis Jabatan	2.497.500,00	2.497.500,00	4.995.000,00
	Jumlah	288.322.368,00	336.429.869,00	624.752.237,00

5. Beban Penyusutan Aset Lain-Lain

Realisasi Beban Penyusutan Aset Lain-Lain Kabupaten Manggarai Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp437.990.483,00. Beban penyusutan aset lain-lain merupakan beban penyusutan atas aset tetap yang di reklas ke aset lain-lain pada Tahun 2022.

2.9 Beban Penyisihan **Tahun 2022** **Tahun 2021**
Rp12.642.277.577,80 **Rp2.919.042.798,00**

Beban Penyisihan merupakan Beban Penyisihan daerah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp12.642.277.577,80. Beban Penyisihan dapat rinci sebagai berikut :

Tabel 29 Beban Penyisihan

No	OPD	Jumlah
Penyisihan Piutang		
1.	Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang	8.269.107.899,25
2.	Badan Pendapatan Daerah	4.166.957.762,05
3.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	159.063.815,00
4.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	40.173.101,50
5.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	6.975.000,00
Total		12.642.277.577,80

2.10 Beban Transfer **Tahun 2022** **Tahun 2021**



Rp62.585.620.000,00 Rp211.748.477.416,00

Jumlah Beban Transfer untuk Tahun 2022 sebesar Rp62.585.620.000,00, terdiri dari:

Tabel 30 Beban Transfer Bantuan Keuangan

No	Beban Transfer Bantuan Keuangan	Jumlah
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	9.137.494.600,00
2	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.930.000.000,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	50.518.125.400,00
Total		62.585.620.000,00

2.11 Beban Lain-lain

Tahun 2022 Tahun 2021
Rp 1.708.650.174,00 Rp2.422.025.235,00

Beban Lain-lain periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.708.650.174,00. Beban lain-lain pada Tahun 2022 bersumber dari Belanja Modal Tahun 2022 yang nilainya dibawah kapitalisasi aset tetap untuk dicatat pada daftar barang ekstrakomtable.

3. Surplus/Defisit dari Operasi

Tahun 2022 Tahun 2021
Rp 1.422.778.797.048,48 Rp87.198.955.450,47

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 31 Surplus/Defisit dari Operasi

Uraian	Jumlah
PENDAPATAN - LO	2.507.295.911.193,09
BEBAN	1.084.517.114.144,62
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	1.422.778.797.048,48

4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Tahun 2022 Tahun 2021
(Rp13.096.702.895,00) (Rp5.422.107.574,00)

Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2022 sebesar (Rp13.096.702.895,00), yang dapat rinci sebagai berikut :

- a. Defisit terjadi atas pengakuan penyertaan modal Pemerintah kabupaten Manggarai Barat pada PDAM Wae Mbeliling yang melaporkan kerugian pada



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

tahun berjalan (2022) sebesar (Rp11.415.820.669,00) berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Wae Mbeliling Tahun 2022.

- b. Defisit terjadi atas pengakuan penyertaan modal Pemerintah kabupaten Manggarai Barat pada Perumda Bidadari yang melaporkan kerugian pada tahun berjalan (2022) sebesar (Rp1.680.882.226,00) berdasarkan Laporan Keuangan Perumda Bidadari Tahun 2022.

5. Pos Luar Biasa	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp0,00	(Rp2.564.834.645,00)

Tidak ada Realisasi Pos Luar Biasa pada Tahun 2022. Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa Tahun 2022 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah.

6. Surplus/Defisit – LO	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp1.409.682.094.153,48	Rp79.212.013.231,47

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022, surplus sebesar Rp1.409.682.094.153,48.



E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran ditambah dengan arus kas bersih atau Kenaikan/Penurunan Kas selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD. Sisa kas di Bendahara SKPD baik Bendahara Penerimaan maupun pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara SKPD merupakan bagian dari Kas Daerah, dimana sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor ke BUD. Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran (TA) 2022 dan 2021 terdiri atas:

Tabel 1 Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

Arus Kas		2022	2021
A.	Aktivitas Operasi	254.635.864.106,26	143.267.226.458,67
B.	Aktivitas Investasi	-498.263.439.543,00	-174.648.189.135,00
C.	Aktivitas Pendanaan	247.533.283.592,00	0,00
D.	Aktivitas Transitoris	2.039.665.185,64	6.819.511.446,00
Arus Kas Bersih		5.945.373.340,90	-24.561.451.230,33

Realisasi kas bersih dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Arus kas bersih aktivitas operasi dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	2022	2021
1.	Arus Kas Masuk	1.256.427.967.229,58	891.274.096.685,92
2.	Arus Kas Keluar	-1.001.792.103.123,32	-748.006.870.227,25
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		254.635.864.106,26	143.267.226.458,67



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Realisasi arus kas aktivitas operasi yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2022	2021
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Arus Masuk Kas:		
a Penerimaan Pajak Daerah	141.461.757.403,65	83.095.687.094,16
b Penerimaan Retribusi Daerah	41.417.841.264,00	51.093.283.091,00
c Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.720.173.212,00	4.012.182.992,00
d Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	5.216.940.083,37	3.917.749.124,76
e Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	9.051.047.982,00	11.285.284.923,00
f Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.126.859.069,00	1.978.080.247,00
g Penerimaan Dana Alokasi Umum	495.899.733.992,00	495.133.465.000,00
h Penerimaan Dana Alokasi Khusus	327.347.244.144,00	169.307.245.579,00
i Penerimaan Dana Penyesuaian	145.840.976.000,00	21.674.262.000,00
j Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	24.564.932.817,00	19.142.408.105,00
k Penerimaan Hibah	14.536.876.920,00	27.537.144.046,00
l Penerimaan Lainnya	45.468.280.645,56	3.097.304.484,00
m Penerimaan Contra Pos	775.303.697,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.256.427.967.229,58	891.274.096.685,92
Arus Keluar Kas:		
a Pembayaran Pegawai	371.580.412.231,00	323.481.026.570,25
b Pembayaran Barang	393.255.378.857,32	347.505.054.444,00
c Pembayaran Bunga	7.038.707.835,00	0,00
d Pembayaran Hibah	18.184.280.000,00	10.031.813.960,00
e Pembayaran Tak Terduga	3.227.054.600,00	3.898.568.837,00
f Pembayaran Bagi Hasil Pajak	9.137.494.600,00	9.333.743.800,00
g Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	2.930.000.000,00	2.615.102.180,00
h Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	196.438.775.000,00	51.141.560.436,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.001.792.103.123,32	748.006.870.227,25
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	254.635.864.106,26	143.267.226.458,67

Jumlah sebesar Rp254.635.864.106,26 merupakan selisih arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas operasi Tahun Anggaran 2022 sedangkan arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp143.267.226.458,67.

2. Aktivitas Investasi

Aliran kas bersih aktivitas investasi merupakan selisih dari aliran kas masuk dengan aliran kas keluar atas aktivitas investasi yang terdiri dari:

Tabel 3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	2022	2021
1.	Arus Kas Masuk	0,00	0,00
2.	Arus Kas Keluar	-498.263.439.543,00	-174.648.189.135,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-498.263.439.543,00	-174.648.189.135,00

Realisasi arus kas aktivitas Investasi yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

a. Arus Masuk Kas – Aktivitas Investasi

Pada Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat arus masuk kas untuk Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan, demikian halnya pada Tahun Anggaran 2021.

b. Arus Keluar Kas– Aktivitas Investasi

Jumlah sebesar Rp498.263.439.543,00 merupakan jumlah arus keluar kas dari Bendahara Umum Daerah untuk membiayai seluruh Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022 dan pada Tahun Anggaran 2021 arus keluar kas dari aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan sebesar Rp174.648.189.135,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
1	Perolehan Tanah	0,00	0,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	38.845.232.335,00	21.373.546.210,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	159.623.544.220,00	44.122.077.702,00
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	292.362.220.356,00	89.746.315.423,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.432.442.632,00	406.249.800,00
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	19.000.000.000,00
	J u m l a h	498.263.439.543,00	174.648.189.135,00

c. Arus Kas Bersih – Aktivitas Investasi

Jumlah sebesar (Rp498.263.439.543,00) merupakan selisih arus masuk kas dan arus keluar kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan Tahun Anggaran 2022 sementara arus kas bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp174.648.189.135,00).

3. Aktivitas Pendanaan

Aliran kas bersih aktivitas pendanaan merupakan selisih dari aliran kas masuk dengan aliran kas keluar atas aktivitas investasi yang terdiri dari:

Tabel 5 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	2022	2021
1.	Arus Kas Masuk	247.533.283.592,00	0,00
2.	Arus Kas Keluar	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	247.533.283.592,00	0,00

a. Arus Masuk Kas – Aktivitas Pendanaan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Pada Tahun 2021 tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan. Sementara pada Tahun Anggaran 2022 arus masuk kas Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan sebesar Rp247.533.283.592,00 yang berasal Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

b. Arus Keluar Kas – Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Pada Tahun 2022 tidak terdapat arus keluar kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan karena sejak Tahun 2018 adanya perubahan struktur Laporan Arus Kas di mana penyertaan modal pemerintah disajikan pada Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi.

c. Arus Kas Bersih – Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Arus Kas Bersih- Aktivitas Pendanaan sebesar Rp247.533.283.592,00 merupakan selisih arus masuk kas sebesar Rp247.533.283.592,00 dan arus keluar kas sebesar Rp0,00 dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan Tahun Anggaran 2022.

4. Aktivitas Transitoris

Aliran kas bersih aktivitas Transitoris merupakan selisih dari aliran kas masuk dengan aliran kas keluar atas aktivitas Transitoris yang terdiri dari:

Tabel 6 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	2022	2021
1.	Arus Kas Masuk	99.435.566.022,00	61.607.476.303,00
2.	Arus Kas Keluar	-97.395.900.836,36	-54.787.964.857,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		2.039.665.185,64	6.819.511.446,00

Realisasi arus kas aktivitas Transitoris yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

a. Arus Masuk Kas – Aktivitas Transitoris

Jumlah sebesar Rp99.435.566.022,00 merupakan jumlah arus masuk kas dari aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2022. Sementara aktivitas Transitoris pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp61.607.476.303,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	98.156.979.688,00	52.441.097.936,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
2	Penerimaan Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun sebelumnya	0,00	2.344.681.048,00
3	Penerimaan Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2022	1.278.586.334,00	0,00
4	Penerimaan kontra pos dan penyetoran kembali Uang Persediaan	0,00	6.821.697.319,00
Jumlah		99.435.566.022,00	61.607.476.303,00

Penerimaan dana pada kas daerah atas pencairan Investasi Jangka Pendek berupa Deposito Berjangka tergolong penerimaan yang dilaporkan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan tidak dilaporkan sebagai penerimaan pada Laporan Realisasi Anggaran, sehingga diakui sebagai penerimaan kas dan disajikan dalam Laporan Arus Kas pada Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris/Non Anggaran karena transaksi tersebut tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

b. Arus Keluar Kas – Aktivitas Transitoris

Jumlah sebesar Rp97.395.900.836,36 merupakan jumlah arus keluar kas dari Bendahara Umum Daerah atas Aktivitas Transitoris/Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022, Sedangkan arus keluar kas Aktivitas Non-Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp54.787.964.857,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
1	Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan	0,00	52.443.283.809,00
2	Pemberian UP dan TUP yang tidak diSPJkan	1.278.586.334,00	1.708.551.342,00
3	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	96.117.314.502,36	636.129.706,00
Jumlah		97.395.900.836,36	54.787.964.857,00

c. Arus Kas Bersih – Aktivitas Transitoris

Jumlah sebesar Rp2.039.665.185,64 merupakan selisih arus masuk kas dan arus keluar kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran Tahun Anggaran 2022. Untuk Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.819.511.446,00.

5. Kenaikan/Penurunan Kas

Jumlah sebesar Rp5.945.373.340,90 merupakan Kenaikan/Penurunan kas Tahun Anggaran 2022 sementara Kenaikan/Penurunan Kas pada Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp24.561.451.230,33) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9 Perhitungan Kenaikan/Penurunan Kas

No	Uraian	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	254.635.864.106,26	143.267.226.458,67
2	Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi /Investasi Aset Non-	-498.263.439.543,00	-174.648.189.135,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Jumlah tersebut di atas merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagaimana yang tersaji dalam Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan Tahun 202 sebesar Rp196.801.480,19 merupakan Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2022 yang terdapat di Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan sebesar Rp196.800.000,00 dan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah sebesar Rp1.480,19 seluruhnya telah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan periode bulan Januari 2022.

d. Saldo Kas yang dibatasi penggunaannya	TA 2022	TA 2021
	Rp0,00	Rp135.252.000,00

Jumlah tersebut di atas merupakan Saldo Akhir Kas Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagaimana yang tersaji dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Saldo Kas yang dibatasi penggunaannya pada Tahun 2021 sebesar Rp135.252.000,00 merupakan Kas di SMPN 4 Lembor yang belum dapat dipastikan/dijelaskan sumber pendanaan atas Kas tersebut, dimana atas Kas tersebut sudah disetor Ke RKUD Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 01 Desember 2022 dengan STS Nomor 596/STS/XII/2022.

e. Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	TA 2022	TA 2021
	Rp 262.865.775,37	Rp 450.031.592,17

Saldo Kas di Bendahara FKTP sebesar Rp262.865.775,37 merupakan total seluruh saldo rekening Kas Jaminan Kesehatan Nasional yang terdapat di 21 (dua puluh satu) Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Seluruh rekening Jaminan Kesehatan Nasional tersebut telah dilaporkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada masing Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan diakui sebagai pendapatan. Pendapatan kapitasi JKN digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP. Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan lagi untuk tahun anggaran berikutnya. Sehingga jumlah sebesar Rp262.865.775,37 akan digunakan lagi oleh seluruh Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Tahun 2023.

f. Saldo Akhir Dana BOS	TA 2022	TA 2021
	Rp 199.220.075,76	Rp1.110.657.121,08



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Jumlah sebesar Rp199.220.075,76 merupakan saldo akhir kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2022 yang terdapat pada Satuan Pendidikan Negeri di Kabupaten Manggarai Barat yang terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2022 sebesar Rp191.405.650,76 dan utang PFK sebesar Rp7.814.425,00. Sedangkan Jumlah sebesar Rp1.110.657.121,08 merupakan saldo akhir kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2021 yang terdapat pada Satuan Pendidikan Negeri di Kabupaten Manggarai Barat yang terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2021 sebesar Rp863.266.032,81 dan utang PFK sebesar Rp247.391.088,27. Adapun jumlah Satuan Pendidikan Negeri di Kabupaten Manggarai Barat yang menerima dan mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Tahun 2022 sebanyak 255 sekolah yang terdiri dari Sekolah Dasar Negeri sebanyak 176 sekolah dan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 79 sekolah.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

F. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA 2022.

1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal Tahun 2022 sebesar Rp2.210.135.978.543,46, merupakan saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2021 pada neraca *audited*.

2. Surplus/defisit – LO TA 2022

Surplus/defisit–LO TA 2022 sebesar Rp1.409.525.856.364,48 berasal dari Pendapatan–LO sebesar Rp2.507.139.673.404,09 dikurangi Beban sebesar Rp1.084.517.114.144,61, ditambah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp13.096.702.895,00).

3. Koreksi Ekuitas

Koreksi ekuitas Tahun 2022 sebesar (Rp2.814.801.919,43) merupakan koreksi tambah sebesar Rp14.565.642.850,95 dan koreksi kurang sebesar (Rp17.380.444.770,38) dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 1 Rincian Koreksi Ekuitas

No	Uraian	Koreksi Tambah (A)	Koreksi Kurang (B)	Total Koreksi Ekuitas (A+B)
1	Piutang	202.530.622,00	-3.849.400,00	198.681.222,00
2	Penyisihan Piutang	0,00	914.590.266,62	914.590.266,62
3	Persediaan	200.608.670,00	-3.515.000,00	197.093.670,00
4	Investasi Jangka Panjang Permanen	36.990.204,00	-	36.990.204,00
5	Tanah	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
6	Peralatan dan Mesin	301.431.680,00	0,00	301.431.680,00
7	Gedung dan Bangunan	8.194.994,00	0,00	8.194.994,00
8	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	8.479.986.700,00	-189.000.882,00	8.290.985.818,00
9	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
10	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
11	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
12	Aset Lain-lain	8.174.412.072,00	-18.098.669.755,00	-9.924.257.683,00
13	Akumulasi Penyusutan	-2.711.024.452,72	0,00	-2.711.024.452,72
14	Utang Pihak Ketiga atas Pengadaan Barang dan Jasa	-328.069.805,00	0,00	-328.069.805,00
15	Koreksi Pendapatan di bayar di muka	20.582.166,67	0,00	20.582.166,67
	Jumlah	14.565.642.850,95	-17.380.444.770,38	-2.814.801.919,43

1. Koreksi atas Piutang Pendapatan terdiri dari :
 - a. Koreksi Saldo awal atas Penambahan Piutang Pajak Parkir (di Bandara Komodo) sebesar Rp202.530.622 pada Badan Pendapatan Daerah
 - b. Koreksi kurang atas Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Komodo atas Klaim BPJS Bulan Agustus Tahap II 2021 sebesar (Rp3.849.400,00)
2. Koreksi Kurang penyisihan piutang atas piutang daerah terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- a. Koreksi tambah Penyetoran Piutang atas Retribusi sewa kios di Tempat Pelelangan Ikan 2020 pada Dinas ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp1.000.000,00
 - b. Koreksi tambah Penyetoran Piutang atas Pekerjaan Pembangunan Boardwalk Gili Lawa pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan an. CV. Graha Mandiri Pratama pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp5.000.000,00
 - c. Koreksi tambah Penyetoran Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp2.375.000,00
 - d. Koreksi tambah atas Pelunasan Piutang Pajak pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp906.215.266,62
3. Koreksi atas persediaan ikan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp200.608.670,00
Koreksi Kurang atas Persediaan Obat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar (Rp3.515.000,00)
4. Koreksi tambah atas Laba/Rugi Tahun Lalu PDAM Wae Mbeliling sebesar Rp36.990.204,00. Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Wae Mbeliling yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
5. Koreksi tambah atas nilai aset tetap Tanah sebesar Rp180.000.000,00 merupakan koreksi atas Tanah untuk Fasilitas Kesehatan dengan dokumen perolehan berupa Surat Penyerahan Tanah Adat Lingko Paku tanggal 24 Januari 2012 dari Tuan Tanah/Tua Teno masyarakat Maras Desa Wae Kanta Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Tanah dimaksud merupakan Tanah Bangunan Puskesmas Wae Kanta yang terletak Dusu Paku Desa Wae Kanta Kecamatan Lembor.
6. Koreksi aset tetap Gedung Bangunan sebesar Rp8.194.994,00 merupakan koreksi Tambah Aset Tetap Gedung Bangunan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atas Konsultan Perencana Poskeswan Kecamatan Boleng yang di catat sebagai barang ekstrakomptabel Konstruksi Dalam Pembangunan pada Tahun 2021.
7. Koreksi tambah Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi terdiri dari :
- a. Koreksi tambah atas pencatatan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pembangunan fisik Jembatan Nanganæe sebesar Rp8.479.986.700,00
 - b. Koreksi kurang atas belanja konsultan perencanaan dan belanja konsultan pengawasan terhadap belanja barang yang diserahkan pada masyarakat sebesar Rp(171.902.804,00), Relokasi Utilitas dan Biaya Sosial atas pekerjaan sebesar Rp(5.886.932,00) belanja Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin sebesar Rp(11.211.146,00) pada Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi
8. Koreksi ekuitas aset lain-lain Tahun 2022 terdiri dari :
- a. Koreksi Kurang atas penghapusan aset lain-lain sebesar (Rp18.098.669.755,00) dan Koreksi Kurang atas Penghapusan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Penyusutan aset lain-lain sebesar Rp8.174.410.095,00 sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 387/KEP/HK/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Atas Barang Yang Tidak Ditemukan Karena Terbakar Dari Daftar Barang Pengelola Barang , Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 388/KEP/HK/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Atas Barang Salah Catat Dari Daftar Barang Pengelola Barang, Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 390/KEP/HK/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Atas Gedung/Bangunan Dari Daftar Barang Pengelola Barang, Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 393/KEP/HK/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Yang Telah Dijual Melalui Pelelangan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengelola Barang, Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 394/KEP/HK/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Atas Barang-Barang yang Telah Diserahkan Kepada Lembaga Pendidikan Swasta Di Kabupaten Manggarai Barat Dari Daftar Barang Pengelola Barang dan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 395/KEP/HK/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Atas Barang Rusak Berat Yang Telah Dimusnahkan Dari Daftar Barang Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2 Daftar Barang Rusak Berat Yang Telah Dimusnahkan
Dari Daftar Barang Pengelola Barang**

No	OPD	Penghapusan aset	Penghapusan Penyusutan aset
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-11.240.282.170	2.327.133.212
2	SPNF SKB Manggarai Barat	-36.500.000	36.500.000
3	Dinas Kesehatan	-200.000.000	
4	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan	-286.924.696	286.924.697
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-80.000.000	80.000.000
6	Dinas Sosial	-11.978.300	11.179.467
7	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	-89.884.300	89.884.300
8	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-521.914.000	521.914.000
9	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-87.543.000	458.192.996
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-124.931.470	120.971.470
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	-714.958.874	666.068.724
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-2.496.500	2.496.500
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-36.190.000	7.238.000
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-107.448.750	62.923.938
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-141.095.787	54.986.220
16	Bagian Pemerintahan Umum	-16.500.000	15.650.000
17	Bagian Hukum	-17.984.500	17.984.500
18	Bagian Perekonomian dan SDA	-23.200.000	23.200.000



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Penghapusan aset	Penghapusan Penyusutan aset
19	Bagian Umum	-793.016.560	723.125.131
20	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-342.892.728	340.835.220
21	Inspektorat	-114.415.180	29.415.180
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-85.000.000	85.000.000
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-85.000.000	85.000.000
24	Sekretariat DPRD	-2.031.033.940	2.031.033.940
25	Kelurahan Labuan Bajo	-31.752.000	9.525.600
26	Kelurahan Wae Kelambu	-1.200.000	1.200.000
27	Kecamatan Sano Nggoang	-72.662.000	72.162.000
28	Kecamatan Welak	-13.865.000	13.865.000
TOTAL		-18.098.669.755	8.174.410.095

- b. Koreksi Kurang atas saldo awal penyusutan aset tak berwujud sebesar Rp1.977,00
9. Koreksi Penambahan atas utang jangka pendek tahun 2021 di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar (Rp328.069.805,00) yang baru di akui di tahun 2022
10. Koreksi Penambahan atas Pendapatan di terima dimuka atas kesalahan pengakuan pendapatan diterima dimuka terkait Perjanjian sewa tanah dengan PT. Anugrah Nuansa Kasih senilai Rp20.582.166,67 yang seharusnya telah habis pada TA 2019
- 4. Kewajiban Untuk dikonsolidasikan**
Kewajiban untuk dikonsolidasikan Tahun 2022 sebesar Rp0,00.
- 5. Ekuitas Akhir**
Saldo Ekuitas Akhir konsolidasi Tahun 2022 sebesar Rp3.616.847.032.988,50.



**PENJELASAN MENGENAI KEGIATAN PENERTIBAN/PENGAMANAN ASET
TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

I. Pengamanan Aset Tetap Tanah

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sejak tahun 2021 telah membentuk Satuan Tugas Pengamanan Aset Tetap Tanah. Tahun 2021 Satuan Tugas dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 53/KEP/HK/2021 Tentang Satuan Tugas (SATGAS) dari Sekretariat Pengamanan Aset Tetap Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tanggal 4 Maret 2021. Selanjutnya pada tahun 2022, Satuan Tugas ini tetap melanjutkan tugas yang kemudian ditetapkan kembali dengan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 50/KEP/HK/2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Tim Sekretariat Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022 Tanggal 14 Februari 2022 dan Perubahannya yaitu Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 210/KEP/HK/2022 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 50/KEP/HK/2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Tim Sekretariat Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022 Tanggal 16 Juni 2022. Unsur yang terlibat dalam Satgas dimaksud antara lain adalah dari Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dengan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat sebagai Ketua Satgas, Kepolisian dengan Kepala Kepolisian Resor Manggarai Barat sebagai Wakil Ketua I, unsur Tentara Nasional Indonesia dengan Komandan Kodim 1612 Manggarai sebagai Wakil Ketua III. Unsur lain yang terlibat adalah beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, UPT KPH Kehutanan Manggarai Barat, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat, Tokoh Masyarakat dan Camat serta Lurah Dalam Kota Labuan Bajo.

Satuan Tugas Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat adalah memiliki tugas-tugas sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 50/KEP/HK/2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Tim Sekretariat Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022 yaitu sebagai berikut :

1. Memeriksa dan memverifikasi aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat atas:
 - a) Inventaris aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
 - b) Dokumen/sertifikat/surat/gambar/peta aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
2. Melakukan pemetaan dan rekonsiliasi aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
3. Melakukan pengamanan terhadap aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
4. Membuat Berita Acara;
5. Membuat Laporan dan Rekomendasi; dan
6. Melaksanakan tugas lainnya yang dianggap perlu.

Adapun yang menjadi fokus kerja Satgas adalah bidang tanah yang diindikasikan memiliki masalah dalam bentuk antara lain adanya okupasi oleh masyarakat atas tanah pemda, belum jelasnya batas-batas sertifikat tanah, tanah sedang dalam perkara hukum dan beberapa persoalan lainnya.



Selanjutnya pada tahun 2022, telah dilakukan beberapa kegiatan penertiban atas tanah bermasalah antara lain dengan

1. Melakukan Pemasangan Plang Peringatan

Dalam rangka penertiban Pemerintah melakukan pemasangan plang tanah Pemda pada beberapa lokasi yaitu sebagai berikut :

No	Nama Tanah	Nilai Tanah	Uraian Ringkas Permasalahan	Luas (m2)	Ket KIB	Waktu Pemasangan
1	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	98.025.000,00	Belum ada kejelasan batas tanah dan ada indikasi penguasaan oleh masyarakat	3.921	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (belum bersertifikat)	26 Agustus 2022
2	Tanah Kosong Lainnya	500.000.000,00	Ada bagian tanah yang diindikasikan dikuasai oleh masyarakat dalam bentuk bangunan semi permanen.	10.000	Bagian Tata Pemerintahan (Sertifikat P29)	26 Agustus 2022

2. Melakukan Pemetaan Ulang

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan pemetaan ulang atas tanah sebagai berikut :

No	Nama Tanah	Nilai Tanah	Uraian Ringkas Permasalahan	Luas (m2)	Ket KIB	Waktu
1	Tanah Kosong Lainnya (Puncak Pramuka)	26.100.000.000	Ada bagian tanah yang diindikasikan dikuasai oleh masyarakat dan terdapat SHM	142.100	Pengelola Barang Milik Daerah	16 s/d 21 Nov 2022

Pemetaan dimaksud dilakukan secara teknis oleh UPT KPH Manggarai Barat. Pelibatan UPT KPH Manggarai Barat dalam melakukan pemetaan tanah dimaksud karena yang pertama kali melakukan Pemetaan Tanah Puncak Pramuka adalah Dinas Kehutanan (sebelum menjadi UPT KPH). Pemetaan dilakukan tanggal 16 s/d 21 November 2022 mengikuti koordinat yang telah dimiliki oleh UPT KPH Manggarai Barat. Dalam pemetaan dimaksud beberapa pilar sudah tidak ditemukan ataupun dalam kondisi rusak. Secara ringkas temuan kondisi pilar saat dilakukan pemetaan adalah berikut ini:

Keberadaan Pilar	Jumlah
Tidak ada	16
Ada, Utuh	9
Ada, Rusak Sedikit	1
Ada, Rusak berat (sisa besi saja)	15
Total	41

Atas 41 titik batas tanah Puncak Pramuka telah dilakukan penanaman ulang pilar sebagai tanda batas.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Untuk tahun-tahun yang akan datang pelaksanaan pengamanan atas asset tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terus akan dilakukan sampai seluruh persoalannya dituntaskan. Hal tersebut merupakan komitmen dari seluruh stakeholders yang terlibat dalam Satgas Pengamanan Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Dapat kami informasikan pula bahwa selain pelaksanaan pengamanan asset pemerintah melalui Satgas Pengamanan Tanah Pemda, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat juga giat melakukan pengamanan tanah pemda dengan melakukan pensertifikat atas tanah-tanah pemda pada kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat. Buah dari proses dimaksud pada tahun 2022, terdapat 18 (delapan belas) bidang tanah pemda yang telah bersertifikat yaitu sebagai berikut :

No	Tanah	Jumlah Bidang	Desa	Kecamatan	Tanggal Terbit Sertifikat
1	SD Negeri Peri	1	Daleng	Lembor	23-Sep-22
2	SMP Negeri 2 Lembor	1	Wae Kanta	Lembor	23-Sep-22
3	SD Negeri Wae Liang	1	Repi	Lembor Selatan	23-Sep-22
4	SD Inpres Golo Ru U	1	Benteng Curu	Kuwus	23-Sep-22
5	SD Inpres Tebang	1	Compang Suka	Kuwus	23-Sep-22
6	SD Negeri Golo Lewe	1	Golo Lewe	Kuwus Barat	23-Sep-22
7	SD Inpres Tanggar	1	Loha Kec. Pacar	Pacar	23-Sep-22
8	SD Inpres Wae Rinding	1	Benteng Ndope	Pacar	23-Sep-22
9	SD Inpres Watu Wangka	1	Manong	Pacar	23-Sep-22
10	SD Negeri Purek	1	Pacar	Pacar	23-Sep-22
11	SD Negeri Watu Deru	1	Lale	Welak	23-Sep-22
12	SDN Tando Kec. Welak	1	Robo	Welak	23-Sep-22
13	SD Inpres Lengkong Belang	1	Tondong Belang	Mbeliling	23-Sep-22
14	SD Inpres Wae Jare	1	Wae Jare	Mbeliling	23-Sep-22
15	SD Inpres Kasong	1	Kasong	Ndoso	23-Sep-22
16	SD Inpres Tehong	1	Tehong	Ndoso	23-Sep-22
17	SD Negeri Torong Raja	1	Golo Rua	Ndoso	23-Sep-22
18	SDI Bempo	1	Watu Rambung	Lembor Selatan	10 Juni 2022
	Jumlah	18			

Selain 18 bidang tersebut di atas terdapat 76 bidang tanah lain yang sedang dalam proses pensertifikatnya pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat yang terdiri dari:

No	Bidang Tanah	Jumlah Bidang	Desa	Kecamatan	No Pendaftaran BPN	Tanggal Pendaftaran
1	SD Negeri Wae Langka	1	Poco Rutang	Lembor	9587/2021	01-Sep-21

**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Bidang Tanah	Jumlah Bidang	Desa	Kecamatan	No Pendaftaran BPN	Tanggal Pendaftaran
2	SD Negeri Wongkol Torok	1	Siru	Lembor	9581/2021	01-Sep-21
3	SD Inpres Metangga	1	Mata Wae	Sano Nggoang	9564/2021	01-Sep-21
4	SD Inpres Parek	1	Sano Ngoang	Sano Nggoang	11297/2021	05-Oct-21
5	Tk. Pembina Labuan Bajo	1	Gorontalo	Komodo	8701/2021	8 Juli 2021
6	SD Negeri Labuan Bajo 2	1	Gorontalo	Komodo	8705/2021	8 Juli 2021
7	Tanah Dinas Perindagkop Dan Ukm	1	Gorontalo	Komodo	8709/2021	8 Juli 2021
8	SD Inpres Golo Lada Bidang 1	1	Tehong	Ndoso	1708/2022	05-Apr-22
9	SD Inpres Golo Lada Bidang 2	1	Tehong	Ndoso	1709/2022	05-Apr-22
10	SD Inpres Lareng Bidang 1	1	Golo Rua	Ndoso	2139/2022	12-Apr-22
11	SD Inpres Lareng Bidang 2	1	Golo Rua	Ndoso	2140/2022	12-Apr-22
12	SD Inpres Hawir Bidang 1	1	Nggilat	Macang Pacar	4878 / 2022	13 Juni 2022
13	SD Inpres Hawir Bidang 2	1	Nggilat	Macang Pacar	4837/2022	13 Juni 2022
14	SD Inpres Jimbor Bidang 1	1	Watu Baru	Macang Pacar	6570/2022	21 Juli 2022
15	SD Inpres Jimbor Bidang 2	1	Watu Baru	Macang Pacar	6643/2022	22 Juli 2022
16	SDI Raong Bidang 1	1	Golo Mori	Komodo	9707/2022	16 Des 2022
17	SDI Raong Bidang 2	1	Golo Mori	Komodo	9708/2022	16 Des 2022
18	SMPN 5 Lembor Selatan (PTSL 2017)	1	Watu Tiri	Lembor Selatan	5390/2022	20 Juni 2022
19	SDI Lengkong Cepang (PTSL 2017)	1	Watu Tiri	Lembor Selatan	5391/2022	20 Juni 2022
20	SD Inpres Macan Tanggar	1	Macang Tanggar	Komodo	3211 / 2022	17 Mei 2022
21	SD Inpres Wae Mata	1	Gorontalo	Komodo	3209/2022	17 Mei 2022
22	SD Negeri Gorontalo	1	Gorontalo	Komodo	4834/2022	13 Juni 2022
23	SMP Negeri 1 Komodo	1	Wae Kelambu	Komodo	4740/2022	14 Juni 2022
24	SDN Ules	1	Benteng Tado	Lembor	5524/2022	22 Juni 2022
25	SDI Merombok	1	Golo Bilas	Komodo	8220/2022	11 Okt 2022
26	SMPN 3 Komodo	1	Golo Bilas	Komodo	8110/2022	10 Okt 2022
27	SDN Roga	1	Daleng	Lembor	5933/2022	4 Juli 2022
28	SDN Siru	1	Siru	Lembor	5932/2022	5 Juli 2022
29	SD SMP Negeri Satu Atap Siru	1	Siru	Lembor	5931/2022	4 Juli 2022



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Bidang Tanah	Jumlah Bidang	Desa	Kecamatan	No Pendaftaran BPN	Tanggal Pendaftaran
30	SDN Nandong	1	Watu Waja	Lembor Selatan	6615/2022	14 Juli 2022
31	SDN Kendol	1	Nanga Lili	Lembor Selatan	7050/2022	16 Agt 2022
32	SDI Beci	1	Wae Mowol	Lembor	7052/2022	16 Agt 2022
33	Tanah SMPN 7 Komodo	2	Warloka	Komodo	8114 & 8111/2022	4 Okt & 10 Okt 2022
34	Tanah Kecamatan Komodo di Lengkong Banta Lenteng Golo Mori	1	Golo Mori	Komodo	5785/2022	28 Juni 2022
35	Tanah Kecamatan Komodo Golo Kuta Golo Mori	1	Golo Mori	Komodo	5787/2022	28 Juni 2022
36	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu (Wae Kanta)	1	Wae Kanta	Lembor	3208/2022	18 Mei 2022
37	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	1	Kakor	Lembor Selatan	5845/2022	1 Juli 2022
38	Tanah Lengkong Sekolah Manga - Jarak	1	Golo Mori	Komodo	5837/2022	1 Juli 2022
39	Tanah Pertanian - Padi	1	Siru	Lembor	5984/2022	6 Juli 2022
40	"Tanah untuk Bangunan Resevoir Mbuhung, Desa Tiwu Nampar					
"	1	Tiwu Nampar	Komodo	7268/2022	25 Agt 2022	
41	SD Negeri Wol	1	Compang Kules	Kuwus Barat	2138/2022	12-Apr-22
42	SD Inpres Poco Dedeng	1	Poco Dedeng	Lembor	3212/2022	17 Mei 2022
43	SD Negeri Golo Rentung	1	Golo Nobo	Boleng	3207/2022	18 Mei 2022
44	Tanah SDN Kois	1	Munting	Lembor Selatan	8113/2022	11 Oktober 2022
45	Tanah SDI Nampar Macing	1	Golo Leleng	Sano Nggoang	8115/2022	4 Okt 2022
46	Tanah SDN Ledang	1	Pong Majok	Lembor	9322/2022	25-Nov-22
47	Tanah SDN Rangga Watu	1	Golo Desat	Mbeliling	9323/2022	25-Nov-22
48	Tanah SDN Kengkar	1	Kombo Selatan	Pacar	9254/2022	22-Nov-22
49	Tanah SDN Bungku	1	Bungku	Macang Pacar	9272/2022	23-Nov-22
50	Tanah SMPN 4 Sano Nggoang	1	Golo Leleng	Sano Nggoang	9280/2022	23-Nov-22
51	Tanah SMP 3 Ndoso	1	Momol	Ndoso	9250/2022	22-Nov-22



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Bidang Tanah	Jumlah Bidang	Desa	Kecamatan	No Pendaftaran BPN	Tanggal Pendaftaran
52	SMPN 1 Ndosso	1	Waning	Ndosso	9252/2022	22-Nov-22
53	Tanah SDI Pateng	1	Pateng	Ndosso	9253/2022	22-Nov-22
54	Tanah SDN Namu	1	Munting	Lembor Selatan	9321/2022	25-Nov-22
55	Tanah SMPN 4 Boleng	1	Golo Ketak	Boleng	9328/2022	25-Nov-22
56	Tanah SDN Terang	1	Golo Sepang	Boleng	9737/2022	19 Des 2022
57	Tanah SMPN 1 Boleng	1	Golo Sepang	Boleng	9734/2022	19 Des 2022
58	Tanah SDN Pajo	1	Raka	Ndosso	9728/2022	19 Des 2022
59	Tanah SDN Puntu	1	Tentang	Ndosso	9698/2022	21 Des 2022
60	SDN Nara	1	Watu Galang	Mbeliling	9271/2022	22-Nov-22
61	SMPN 2 Boleng	1	Pota Wangka	Boleng	9742/2022	19 Des 2022
62	SDI Golo Bombong	1	Pangga	Kuwus	9740/2022	19 Des 2022
63	SMPN 6 Sano Nggoang	1	Wae Sano	Sano Nggoang	9706/2022	21 Des 2022
64	SDI Wae Racang	1	Mata Wae	Sano Nggoang	9697/2022	21 Des 2022
65	SDN Kois (Tanah Kebun Sekolah)	1	Munting	Lembor Selatan	9700/2022	21 Des 2022
66	SMPN 2 Kuwus Barat	1	Wajur	Kuwus Barat	9699/2022	21 Des 2022
67	SDI Cowang	1	Golo Sepang	Boleng	9729/2022	19 Des 2022
68	SDI Mbodong	2	Golo Kondeng	Sano Nggoang	9739/2022 & 9731/2022	19 Des 2022
69	SDN Nterlaing	1	Pota Wangka	Boleng	9705/2022	16 Des 2022
70	Tanah Kecamatan Komodo Tao Dusun Jarak Golo Mori	1	Golo Mori	Komodo	5788/2022	28 Juni 2022
71	Tanah Pemancar Radio	1	Wae Lolos	Sano Nggoang	9251/2022	22-Nov-22
72	Tanah Samping Hutan Kota	1	Batu Cermin	Komodo	9733/2022	19 Des 2022
73	Tanah Rujab Sekda	1	Batu Cermin	Komodo	9727/2022	19 Des 2022
74	Tanah Kantor Kelurahan	1	Wae Kelambu	Komodo	9693/2022	16 Des 2022
TOTAL		72				

II. Daftar Barang Pemerintah Pusat Maupun Pihak Lain Yang Belum Ada Dokumen Hibah



Dapat diinformasikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat selain mengakui barang-barang dalam Kartu Inventaris Barang Milik Daerah sekaligus dalam Neraca Aset Tetap dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat juga telah mencatat penerimaan barang-barang dari pihak lain seperti dari Kementerian maupun pihak swasta yang telah menyerahkan barang kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat namun tidak disertai dengan dokumen hibahnya. Adapun bentuk dokumen yang dari pemberi barang diantaranya adalah dari Kementerian dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Sementara Barang Milik Negara. Barang-barang dimaksud tersebar di beberapa OPD yaitu pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, RSUD Komodo, Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Nilai barang pihak lain yang belum dicatat dalam Kartu Inventaris Barang Milik Daerah sekaligus belum diakui dalam neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp18.522.579.151 (Delapan Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah). Rincian barang sebagai berikut:

No	Nama Barang	Sat	Jumlah Barang	Harga Barang	Pihak yang menyerahkan	Tahun Barang diterima	Kondisi
Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
1	Kendaraan Roda Empat (Truk)	Unit	1		PT Askrindo	2021	Baik
RSUD Komodo							
1	ECG	Unit	1		Kementerian Kesehatan	2021	Baik
2	Ventilator	Unit	1		Kementerian Kesehatan	2021	Baik
3	Ventilator Portabel	Unit	3		Dinas Kesehatan Propinsi NTT	2021	Baik
4	HNFC	Unit	4		Dinas Kesehatan Propinsi NTT	2021	Baik
5	Ventilator Stellar	Unit	2		Dinas Kesehatan Propinsi NTT	2021	Baik
6	Air Purrifier	Unit	3		Dinas Kesehatan Propinsi NTT	2021	Baik
7	Mobil Ambulance PLN Grand Max	Unit	1		PLN	2018	Baik



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama Barang	Sat	Jumlah Barang	Harga Barang	Pihak yang menyerahkan	Tahun Barang diterima	Kondisi
8	Defibrilator (zoll aed pro)	Unit	1		Dinas Kesehatan Propinsi NTT	2020	Baik
9	Mechanical cardiopulmonary resusitasi (zoll)	Unit	1		Dinas Kesehatan Propinsi NTT	2020	Baik
10	Ventilator (zoll eagle II)	Unit	1		Dinas Kesehatan Propinsi NTT	2020	Baik
11	Ventilator (zoll eagle II)	Unit	1		Kementerian Kesehatan	2020	Baik
12	Oxigen Generator	Unit	1		Kementerian Kesehatan	2022	Baik
13	Examination Table, SS	Unit	6	30.696.108,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
14	Medicine Cabinet	Unit	5	32.706.405,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
15	Instrument Cabinet	Unit	12	80.906.436,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
16	Infusion Stand, SS	Unit	11	24.118.446,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
17	Mobile Suction Pump	Unit	6	129.911.238,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
18	Mobile Examination	Unit	10	21.012.170,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
19	Diagnostic Set	Unit	3	3.197.541,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
20	Tabung Oxigen Besar (1500L)	Unit	29	37.091.116,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
21	Tabung Oxigen Kecil + Trolley	Unit	2	2.398.154,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
22	Tabung Gas N20	Unit	2	10.150.918,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
23	Regulator Oxygen	Unit	5	4.123.815,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
24	Oxigen Trolley Besar	Unit	2	4.529.960,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
25	Infusion Pump	Unit	5	114.197.820,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
26	Nebulizer	Unit	1	6.690.372,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
27	Spirometri	Unit	1	47.072.613,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama Barang	Sat	Jumlah Barang	Harga Barang	Pihak yang menyerahkan	Tahun Barang diterima	Kondisi
28	Oxigen Concentrator	Unit	5	136.085.735,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
29	Emergency Set	Unit	2	22.839.564,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
30	Instrument Trolley, SS	Unit	1	2.238.244,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
31	Table Top Strillizer	Unit	1	29.398.971,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
32	Cabinet Table	Unit	9	22.268.574,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
33	Chair	Unit	31	15.340.598,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
34	ECG 3 Chanel	Unit	4	83.745.068,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
35	Bedside Monitor	Unit	6	289.301.142,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
36	Pulse Oxymeter	Unit	3	50.627.700,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
37	Stetoscope Dewasa	Unit	16	5.310.192,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
38	Stetoscope Anak	Unit	4	1.327.548,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
39	Stetoscope Bayi	Unit	1	331.887,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
40	Tensimeter Air Raksa Standing	Unit	17	34.667.199,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
41	Tensimeter Air Raksa Table	Unit	6	4.689.924,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
42	Thermometer	Unit	10	224.880,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
43	Dressing Drum	Unit	11	1.926.012,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
44	Tray	Unit	8	1.005.120,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
45	Ambulance Stretcher	Unit	2	27.626.694,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
46	Brancard, SS	Unit	3	30.477.051,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
47	Emergency Lamp With Battrey	Unit	2	1.735.854,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
48	Room Devider 3 Panel, SS	Unit	2	5.846.974,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
49	Emergency Trolley,SS	Unit	1	7.254.450,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama Barang	Sat	Jumlah Barang	Harga Barang	Pihak yang menyerahkan	Tahun Barang diterima	Kondisi
50	Waiting Chair, 3 Seats	Unit	15	71.259.780,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
51	Obgyn Delivery Table	Unit	1	12.790.156,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
52	Amniotic Fluid Suction Pump	Unit	1	22.147.353,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
53	Vacum Extractor	Unit	1	2.816.879,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
54	Baby Desk	Unit	2	10.487.958,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
55	Incubator	Unit	2	73.908.874,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
56	Infant Warmer	Unit	1	27.772.898,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
57	Head Lamp	Unit	3	457.134,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
58	Photo Therapy	Unit	1	13.868.181,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
59	Resuscitasi Neonatus	Unit	1	6.471.209,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
60	Forcep Naegele	Unit	1	10.490.226,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
61	Fetal Doppler	Unit	2	25.377.292,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
62	USG+2 Probe +Printer	Unit	1	69.787.555,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
63	Film Viewer(single film)	Unit	3	7.021.635,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
64	Film Viewer(double film)	Unit	1	2.836.706,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
65	Timbangan Berat & Tinggi Badan	Unit	2	1.370.374,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
66	Reflex Hammer	Unit	3	91.428,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
67	Tongue Spatel	Unit	15	69.690,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
68	Pen Light	Unit	10	152.950,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
69	Minor Set	Unit	4	32.651.516,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
70	Partus Set	Unit	2	13.776.812,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
71	Nierbeken, SS	Unit	15	410.400,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama Barang	Sat	Jumlah Barang	Harga Barang	Pihak yang menyerahkan	Tahun Barang diterima	Kondisi
72	Wakom antiseptik +tutup, SS	Unit	8	255.584,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
73	Waskom Kassa+tutup,SS	Unit	8	255.584,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
74	Pispot Urine	Unit	5	1.256.120,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
75	Wheel Chair	Unit	1	2.247.193,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
76	Alat Pelindung Diri (arpon)	Unit	3	85.650,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
77	Kuretage Set	Unit	1	45.044.979,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
78	Speculum Set	Unit	1	1.895.707,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
79	Cocor Bebek Set (SML)	Unit	1	1.809.661,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
80	Timbangan Bayi	Unit	1	274.053,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
81	Dental Unit+Comaresor	Unit	1	65.539.397,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
82	Dental Instrument Set	Unit	1	17.191.213,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
83	Stool	Unit	1	2.786.405,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
84	Mobile X-Ray Unit 300 mA	Unit	1	580.861.992,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
85	Vertical Bucky Table	Unit	1	15.595.820,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
86	X-Ray Cassete Stand	Unit	1	3.548.743,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
87	X-Ray Automatic Processing Film	Unit	1	74.989.900,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
88	X-Ray Film Cassete :	Unit			Kementerian Kesehatan	2019	RB
89	-18x24cm	Unit	1	1.279.004,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
90	-24x30 cm	Unit	1	1.451.548,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
91	-30x40 cm	Unit	1	1.837.305,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
92	-35x35 cm	Unit	1	1.827.165,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
93	Apron Single 3,5 mm	Unit	1	3.299.048,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB

**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama Barang	Sat	Jumlah Barang	Harga Barang	Pihak yang menyerahkan	Tahun Barang diterima	Kondisi
94	Apron Double 3 mm	Unit	1	10.010.097,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
95	Lead Letter & Figure	Unit	1	2.334.711,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
96	X-Ray Protection Screen with lead Glass	Unit	1	3.806.594,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
97	X-Ray Film ukuran :	Unit			Kementerian Kesehatan	2019	RB
98	-18x24 cm	Unit	1	1.421.128,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
99	-24x30 cm	Unit	1	1.969.346,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
100	-30x40 cm	Unit	1	3.055.415,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
101	-35x35 cm	Unit	1	3.228.015,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
102	Centrifuge 8 Tabung	Unit	1	21.146.423,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
103	Centrifuge Hematokrit	Unit	1	20.391.105,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
104	Photometer	Unit	1	63.950.778,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
105	Hematology Analyzer	Unit	1	135.949.783,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
106	Micrascope Binocular	Unit	1	2.969.141,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
107	LED Set	Unit	2	685.414,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
108	Glucometer	Unit	2	1.211.088,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
109	Pipet-Pipet Set	Unit	1	11.777.444,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
110	Glass Tube Set	Unit	1	2.830.702,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
111	Rak-rak Tabung set	Unit	1	236.667,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
112	Perlengkapan dan Pengambilan Sample Set	Unit	1	1.129.527,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
113	Reagensia set	Unit	1	3.881.309,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
114	Urinalisa set	Unit	1	1.268.865,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama Barang	Sat	Jumlah Barang	Harga Barang	Pihak yang menyerahkan	Tahun Barang diterima	Kondisi
115	Faeces set	Unit	1	1.306.251,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
116	Hematology Set	Unit	1	6.797.489,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
117	Urinometer	Unit	1	10.309.525,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
118	Laboratorium Table, SS	Unit	2	25.864.900,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
119	Filling Cabinet	Unit	6	9.421.320,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
120	Writing Desk	Unit	9	4.629.096,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
121	Sleeping Sofa	Unit	4	8.120.732,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
122	Kulkas 1 pintu	Unit	7	14.655.389,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
123	TV 21" LCD+Receiver+Parabola	Unit	3	9.516.486,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
124	Lemari Arsip	Unit	5	8.921.705,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
125	Locker 2 pintu	Unit	3	3.768.519,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
126	Operating Lamp	Unit	1	26.795.249,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
127	Operating Table	Unit	1	29.659.711,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
128	Anesthesi machine	Unit	1	421.897.494,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
129	Electro Surgical Unit	Unit	1	106.584.630,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
130	Defibrillator	Unit	1	82.476.202,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
131	Sterilizer Aerosol	Unit	1	9.135.826,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
132	Medicine Trolley	Unit	2	13.703.738,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
133	Dressing Trolley, SS	Unit	2	7.308.660,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
134	Mayor Surgery set	Unit	2	85.862.938,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
135	Caesarean Section Set	Unit	1	32.745.771,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
136	Suture Set	Unit	1	4.227.585,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama Barang	Sat	Jumlah Barang	Harga Barang	Pihak yang menyerahkan	Tahun Barang diterima	Kondisi
137	Minor Surgery Set	Unit	1	8.162.766,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
138	Scrub Station	Unit	1	97.753.332,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
139	Venae Section Set	Unit	1	12.382.760,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
140	Instrument Tray	Unit	4	502.108,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
141	Orthopaedic Set (Screw+Plate) Set	Unit	1	80.017.550,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
142	Hysterectomy Set	Unit	1	47.789.068,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
143	Baju Opreasi Set Set (Spek : ML dan XL)	Unit	2	6.687.032,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
144	Bed For Adult 2 Crank + Matras	Unit	43	455.222.897,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
145	Baby Basket	Unit	5	26.219.610,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
146	Syringe Pump	Unit	5	88.820.525,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
147	Ventilator for Adult&Child	Unit	1	158.608.081,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
148	Autoclave	Unit	1	18.271.652,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
149	Washing Machine	Unit	1	2.283.957,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
150	Laundry Trolley, SS	Unit	1	6.102.729,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
151	Bed for Child 1 crank,(SS)+Matras	Unit	10	54.814.950,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
152	Bedside Cabinet +Over Bed Table	Unit	50	168.096.250,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
153	Work Table for Medicine	Unit	1	12.932.427,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
154	Cawan + Motir Obat	Unit	2	68.654,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
155	Sofa Tamu	Unit	1	3.172.162,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
156	Tempat Sampah+tutup, SS	Unit	31	12.783.811,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
157	Meja Setrika+Setrika	Unit	2	545.608,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
158	Instrument Tray+Tutup	Unit	4	502.324,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama Barang	Sat	Jumlah Barang	Harga Barang	Pihak yang menyerahkan	Tahun Barang diterima	Kondisi
159	Rak Obat-obatan set	Unit	2	13.082.448,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
160	Kitchen Set	Unit	2	2.474.286,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
161	Kulkas	Unit	1	3.464.000,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
162	Kompur Gas 2 Tungku	Unit	1	279.150,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
163	Tabung Gas 15 Kg	Unit	2	1.091.216,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
164	Timbang Duduk	Unit	1	177.639,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
165	Perlengkapan Masak Set	Unit	1	824.763,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
166	Perlengkapan Makan Set	Unit	150	59.002.200,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
167	Pantry Trolley	Unit	1	18.271.652,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
168	Komputer Desk Set	Unit	2	13.957.512,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
169	Genset 50 KVA	Unit	2	398.423.498,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
170	Mesin Pompa Air	Unit	1	4.441.027,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
171	Penampung air	Unit	2	6.344.324,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
172	Alat pemadam kebakaran ringan	Unit	5	3.960.670,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
173	Pengelola limbah padat Incenarator	Unit	1	76.131.879,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
174	Resuscitasi Neonatus	Unit	1	126.886.464,00	Kementerian Kesehatan	2019	RB
175	Bangunan Rumah Sakit Pratama	Unit	1	12.762.641.832,00			
Dinas Kesehatan							
1	Alat PCR	Unit	1		BNPB	2021	Baik
2	Kendaraan Roda Dua (3 Unit Yamaha Mio dan 1 Unit Yamaha Bison)	Unit	4		Kementerian Kesehatan	2016	Baik
3	Kendaraan Roda Empat	Unit	1		Kementerian Kesehatan	2018	Baik
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan							



No	Nama Barang	Sat	Jumlah Barang	Harga Barang	Pihak yang menyerahkan	Tahun Barang diterima	Kondisi
1	Gedung Penyimpanan Ikan Kering	Unit	1			2022	Baik
TOTAL				18.522.579.151,00			

III. Penghapusan Jembatan Mburak dan Jembatan Kenari

Penghapusan Jembatan Mburak dan Jembatan Kenari melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- Proses penghapusan Jembatan Mburak dan Jembatan Kenari dilatarbelakangi oleh adanya rencana pekerjaan Paket Peningkatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Labuan Bajo – Sp. Nalis – Sp. Kenari, Sp. Kenari – Tanamori Tahun Anggaran 2022 sebagaimana disampaikan dalam Surat Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah III Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PW.04.01/Bb10.7/841 tanggal 7 September 2022 perihal Permohonan Pembongkaran Jembatan Eksisting Ruas Jalan Labuan Bajo-Tanamori.
- Menindaklanjuti Surat dimaksud, Kepala Dinas Bina Marga Bina Konstruksi dan Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat selaku Pengguna Barang mengajukan Surat Nomor: BMKHUB.601/658/XI/2022 tanggal 21 November 2022 Perihal Permohonan Persetujuan Pembongkaran Jembatan Mburak dan Jembatan Wae Kenari.
- Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: 900.030/BKAD/1255.1/XI/2022 tanggal 23 November 2022 perihal Persetujuan Pembongkaran Jembatan Mburak dan Jembatan Wae Kenari.
- Adapun pelaksanaan pembongkaran Jembatan Mburak dan Jembatan Wae Kenari dilaksanakan oleh Tim Pembongkaran dari Pemerintah Daerah bersama dengan Satker PJN Wilayah III Provinsi NTT serta PT Wijaya Karya selaku Pihak III/Pelaksana Pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Nomor:



632/BA/Bb10.7.1/2022 tanggal 6 Desember 2022 dan Nomor:
631/BA/Bb10.7.1/2022 tanggal 6 Desember 2022.

IV. Daftar Barang Pemerintah Pusat Yang Rencana Pembangunan Akan Diserahkan Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Namun Belum Dilakukan Penyerahan

Sejalan dengan ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ada beberapa pembangunan di Kabupaten manggarai Barat yang sumber pembiayaan dari APBN dan direncanakan untuk diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten manggarai Barat namun sampai akhir tahun anggaran 2022 belum diserahkan antara lain :

1. Pekerjaan Optimalisasi IPAL Labuan Bajo, Kampung tengah Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten manggarai Barat, sesuai ketentuan Pasal III ayata 4 huruf a) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah kabupaten manggarai Barat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Re[ublik Indonesia yang diwakilkan kepada Balai Prasarana Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 900/BPKD/2144/XI/2020 dan Nomor : 1224.2/PKS/CB19/XI/2020 tanggal 12 Nopember 2020.
2. Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SPAM Wae Mese II Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, sesuai ketentuan Pasal 8 Nota Kesepakatan antara Kemneterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI melalui Direktorat Air Minum Ditjen Cipta Karya dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 589/NK/CA/XI/2020 dan Nomor : HK 22 tahun 2020
3. Pekerjaan Penataan KSPN Kawasan Pantai Marina-Bukit Pramuka (Zona 1 dan Zona 2) Labuan Bajo Kabupaten manggarai Barat, sesuai ketentuan Pasal III ayata 4 huruf a) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah kabupaten manggarai Barat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Re[ublik Indonesia yang diwakilkan kepada Balai Prasarana Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 900/BPKD/2147/XI/2020 dan Nomor : 1224.5/PKS/CB19/XI/2020 tanggal 12 Nopember 2020.
4. Pekerjaan Penataan KSPN Kawasan Pantai Marina-Bukit Pramuka (Zona 5) Labuan Bajo Kabupaten manggarai Barat, sesuai ketentuan Pasal III ayata 4 huruf a) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah kabupaten manggarai Barat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Re[ublik Indonesia yang diwakilkan kepada Balai Prasarana Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 900/BPKD/2145/XI/2020 dan Nomor : 1224.3 /PKS/CB19/XI/2020 tanggal 12 Nopember 2020.
5. Pekerjaan Pembangunan Pengelolaan Sampah Proses Termal Warloka, Kecamatan Komodo Labuan Bajo kabupaten manggarai barat, sesuai ketentuan Pasal III ayata 4 huruf a) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah kabupaten manggarai Barat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Re[ublik Indonesia yang diwakilkan kepada Balai Prasarana Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 900/BPKD/2146/XI/2020 dan Nomor : 1224.4/PKS/CB19/XI/2020 tanggal 12 Nopember 2020.

BAB VI PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022 disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang mengatur Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam menyampaikan Laporan Keuangan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Catatan atas Laporan Keuangan yang telah kami sajikan ini masih jauh dari sempurna dan atas kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Manggarai Barat untuk periode yang akan datang.

Kiranya apa yang disampaikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini akan memberikan gambaran yang jelas bagi ketujuh komponen laporan keuangan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yaitu *a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Laporan Operasional; d. Laporan Perubahan Ekuitas, e Neraca; f. Laporan Arus Kas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan.*

Labuan Bajo, 29 Maret 2023

 **BUPATI MANGGARAI BARAT** h.

EDISTASIUS ENDI, SE